



**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR 30 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN
2017**

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT TAHUN 2016**



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017, sebagai pedoman penyusunan RAPBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006, nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Pemerintahan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode untuk periode 1 (satu) tahun;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan

- (2) RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Narasi RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017
 - BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017
 - BAB VI : PENUTUP
 - b. Matrik RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 yang memuat Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi :
 - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) Tahun 2017;
 - b. Pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2017;
 - c. Pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017;
 - d. Pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 untuk :

- a. Bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017, serta sebagai bahan usulan ke APBD Provinsi Kalimantan Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kotawaringin Barat menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017.

Pasal 7

Dalam hal RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbeda dari hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 8

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dianggarkan setelah ditetapkannya RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 dan belum tercantum dalam RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017.

-9-

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Mei 2016.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

BAMBANG PURWANTO

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 2 Juni 2016.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

MASRADIN

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016
NOMOR : 30.**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si.
NIP. 19600429 199311 1 002**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan YME serta atas perkenan-Nya kita dapat menyelesaikan dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017, disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 - 2025 dan mengacu pada RPJMN Tahun 2015 - 2019, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020.

Sesuai fungsinya, dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan. Oleh karena itu perannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan serta menjadi pedoman dalam proses penganggaran RAPBD selanjutnya. Untuk itu semua Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat harus mempedomani serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi/ memaduserasikan rencana program hingga pelaksanaannya.

Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017.

Pangkalan Bun, Mei 2016

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



BAMBANG PURWANTO, S.ST, MH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	xii
Daftar Grafik	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-9
1.4. Sistematika Dokumen RKPD	I-11
1.5. Maksud dan Tujuan.....	I-13
1.5.1 Maksud.....	I-13
1.5.2 Tujuan	1-13
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.	II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-27
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.	II-55
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.	II-60
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-62
2.2.1 Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan UrusanWajib.....	II-62
2.2.2 Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pilihan.....	II-112
2.3. PermasalahanPembangunan	II-126
2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.....	II-126
2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	II-127
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGANDAERAH.....	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-15

3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-15
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-20
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-27
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1.	Visi dan Misi Pembangunan	IV-2
4.2.	Tujuan dan Sasaran.....	IV-3
4.2.1	Tujuan	IV-3
4.2.2	Sasaran	IV-3
4.3.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017	IV-13
4.3.1	Tema dan Isu Strategis.....	IV-13
4.3.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-15
4.3.3	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Tahun 2017.....	IV- 28
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIAT AN PRIORITAS DAERAH.....	V-1
BAB VI	PENUTUP.....	VI-1
LAMPIRAN RINCIAN, PROGRAM DAN RINCIAN RENCANA KERJA SETIAP SKPD TAHUN ANGGARAN 2016		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas dan Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan	II-1
Tabel 2.2	Tinggi dari Permukaan Laut dan Persentase Tingkat Kemiringan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-3
Tabel 2.3	Formasi Geologi di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-4
Tabel 2.4	Nama-Nama Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Panjang yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata Kedalaman ...	II-6
Tabel 2.5	Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-6
Tabel 2.6	Rencana Pengembangan Perumahan	II-18
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan Tahun 2011 - 2014	II-26
Tabel 2.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2014	II-27
Tabel 2.9	PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014	II-28
Tabel 2.10	Ekspor dan Impor Kabupaten Kotawaringin Barat (US\$)	II-29
Tabel 2.11	Komoditi/ Produk/ Jenis Usaha (KPJU) Unggulan di Kabupaten Kotawaringin Barat.	II-33
Tabel 2.11	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 – 2014 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2000 Kabupaten Kotawaringin Barat.	II-32
Tabel 2.12	Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid menurut Jenis dan Statusnya di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014/2015.....	II-37
Tabel 2.13	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011 – 2015 Kabupaten Kotawaringin Barat	II-37
Tabel 2.14	Persentase APK dan APM Tahun 2013 – 2015	II-37
Tabel 2.15	Kinerja Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Tahun 2014 dan 2015	II-38
Tabel 2.16	Angka Kelulusan Tiap Jenjang Pendidikan 2014-2015	II-38

Tabel 2.17	Angka Putus Sekolah Tiap Jenjang Pendidikan Tahun 2014 dan 2015	II-38
Tabel 2.18	Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-40
Tabel 2.19	Kondisi Angkatan Kerja (AK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2012 – 2014	II-40
Tabel 2.20	Statistik Pasar Kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-41
Tabel 2.21	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat	II-41
Tabel 2.22	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 – 2014	II-42
Tabel 2.23	Kondisi Sarana dan Prasarana pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 – 2015	II-42
Tabel 2.24	Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2008 – 2014 di Kabupaten Kotawaringin Barat	II-43
Tabel 2.25	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2010 – 2014.....	II-43
Tabel 2.26	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2010- 2014 Kabupaten Kotawaringin Barat	II-43
Tabel 2.27	Jumlah Dokter Tahun 2010 – 2014.....	II-44
Tabel 2.28	Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2014	II-44
Tabel 2.29	Jumlah Tenaga Medis Tahun 2010 – 2014	II-44
Tabel 2.30	Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2014 di Kabupaten Kotawaringin Barat	II-45
Tabel 2.31	Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2010 - 2014 di Kabupaten Kotawaringin Barat	II-45
Tabel 2.32	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2010 – 2014	II-45
Tabel 2.33	Rasio Tempat Ibadah Tahun 2011 dan 2014	II-46
Tabel 2.34	Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2009 s.d 2014 Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-46
Tabel 2.35	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan 2014-2015	II-49
Tabel 2.36	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan 2014-2015	II-53

Tabel 2.37	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Statusnya Tahun 2012 – 2014	II-71
Tabel 2.38	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Jenis Permukaannya Tahun 2013 - 2015	II-72
Tabel 2.39	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kondisi fisiknya Tahun 2013 - 2015	II-72
Tabel 2.40	Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kelas Jalan Tahun 2013 – 2015	II-73
Tabel 2.41	Klasifikasi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kondisi fisiknya Tahun 2014 - 2015.....	II-73
Tabel 2.42	Indikator Rasio Jaringan Irigasi Tahun 20142 - 2015.....	II-74
Tabel 2.43	Jumlah Infrastruktur Air Limbah Kabupaten Kotawaringin Barat	II-75
Tabel 2.44	Capaian Pembangunan Drainase 2013 - 2015	II-76
Tabel 2.45	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2014 – 2015	II-77
Tabel 2.46	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2014-2015.....	II-78
Tabel 2.47	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2014 - 2015	II-80
Tabel 2.48	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2014 – 2015	II-81
Tabel 2.49	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2014 - 2015.....	II-82
Tabel 2.50	Pertumbuhan Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 - 2015	II-83
Tabel 2.51	Jumlah Koperasi dan Statusnya di Kabupaten Ktw. Barat Tahun 2014 – 2015.....	II-84
Tabel 2.52	Perkembangan Jumlah dan Jenis UMKM di Kabupaten Ktw. Barat Tahun 2014 – 2015.....	II-84
Tabel 2.53	Penilaian Kondisi KSP/ USP di Kabupaten Ktw. Barat Tahun 2014 – 2015.....	II-85
Tabel 2.54	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catpil.....	II-86

Tabel 2.55	Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Kotawaringin Barat 2012 - 2014	II-87
Tabel 2.56	Kondisi Pasar Kerja Kabupaten Kotawaringin Barat 2013 - 2015.....	II-87
Tabel 2.57	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014-2015	II-93
Tabel 2.58	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2014-2015.....	II-96
Tabel 2.59	Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2014 – 2015.....	II-96
Tabel 2.60	Jumlah Sistem JaringanTransportasi Tahun 2014 – 2015	II-97
Tabel 2.61	Jumlah sarana pendukung keselamatan lalu lintas	II-98
Tabel 2.62	Jumlah Kendaraan Yang di Uji.....	II-99
Tabel 2.63	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 - 2015	II-100
Tabel 2.64	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2014 - 2015	II-101
Tabel 2.65	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2014 – 2015	II-102
Tabel 2.66	Pelanggaran Perda di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014–2015.....	II-103
Tabel 2.67	Usul dan alokasi formasi PNS Tahun 2010 – 2015.....	II-106
Tabel 2.68	Komposisi Penerimaan PNS menurut Golongan Th.2010 - 2015.....	II-106
Tabel 2.69	Penyelenggaraan Administrasi Kepangkatan PNS Tahun2010-2015.....	II-107
Tabel 2.70	Data Base Kepegawaian Tahun 2010 – 2015	II-107
Tabel 2.71	Penanganan Kasus-kasus PNS Tahun 2010 – 2015	II-108
Tabel 2.72	Penghargaan PNS berprestasi Tahun 2010 – 2015.....	II-108
Tabel 2.73	Realisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Th. 2010-2015.....	II-109
Tabel 2.74	Jenis dan Realisasi Perizinan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun2013-2015.....	II-110
Tabel 2.75	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2014-2015.....	II-113
Tabel 2.76	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten	

	Kotawaringin Barat Tahun 2015.....	II-115
Tabel 2.77	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2015	II-117
Tabel 2.78	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015.....	II-118
Tabel 2.79	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2015	II-120
Tabel 2.80	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015.....	II-122
Tabel 2.81	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015	II-123
Tabel 2.82	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015....	II-127
Tabel 2.83	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hasil Komoditas Pertanian Tanaman Pangan Lainnya di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015.....	II-127
Tabel 2.84	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hasil Komoditas Pertanian Tanaman Sayur-Sayuran di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015.....	II-128
Tabel 2.85	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015	II-129
Tabel 2.86	Populasi Ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 - 2015	II-130
Tabel 2.87	Potensi Lahan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015	II-131
Tabel 2.88	Luas Areal Perkebunan Per komoditi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015.....	II-132
Tabel 2.89	Luas Areal Perkebunan Berdasarkan Kategori Kepemilikan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015	II-132
Tabel 2.90	Produksi Perkebunan Per Komoditi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015.....	II-133
Tabel 2.91	Nama Perusahaan Yang Beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	II-133
Tabel 2.92.	Pabrik CPO di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015.....	II-134
Tabel 2.93	Pabrik PKO di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015.....	II-134

Tabel 2.94	Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Karet, Kelapa dan Kelapa Sawit per Kecamatan Tahun 2015	II-135
Tabel 2.95	Luas Areal dan Produksi Kopi dan Lada per Kecamatan Tahun 2015.....	II-136
Tabel 2.96	Luas Areal dan Produksi Mente dan Aren per Kecamatan Tahun 2015	II-137
Tabel 2.97	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015	II-138
Tabel 2.98	Luas Potensi Hutan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015	II-139
Tabel 2.99	Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan di Kabupaten Kotawaringin Barat 2014 - 2015.....	II-139
Tabel 2.100	Jumlah Produksi Hasil Hutan Sektor Kehutanan 2012 - 2015	II-140
Tabel 2.101	Volume dan Nilai Ekspor Sektor Pertambangan	II-141
Tabel 2.102	Potensi Objek Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat	II-143
Tabel 2.103	Jumlah Produksi Komoditas Kayu Sektor Perindustrian	II-144
Tabel 2.104	Nilai Ekspor Komoditas Kayu Sektor Peindustrian	II-144
Tabel 2.105	Perkembangan Potensi Industri Kecil Menengah 2013 - 2015	II-145
Tabel 2.106	Nilai dan Realisasi Volume Ekspor Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015.....	II-146
Tabel 2.107	Data Transmigran dan Penempatannya Tahun	II-147
Tabel 2.108	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	II-150
Tabel 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat 2011-2016... ..	III-1
Tabel 3.2	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014 - 2018 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat	III-7
Tabel 3.3	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014 - 2018 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kotawaringin Barat	III-8
Tabel 3.4	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014 - 2018 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Kotawaringin Barat	III-9
Tabel 3.5	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Tahun 2014 - 2018 Kabupaten Kotawaringin Barat	III-10

Tabel 3.6	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat	III-11
Tabel 3.7	Nilai dan Target Inflasi Tahun 2010 - 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat	III-12
Tabel 3.8	Perkiraan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016-2018	III-17
Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 - 2018	III-18
Tabel 3.10	Perkiraan Target Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016-2018	III-25
Tabel 3.11	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 - 2018	III-26
Tabel 3.12	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2014 - 2018	III-27
Tabel 4.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-6
Tabel 4.2	Prioritas Pembangunan Daerah	IV-18
Tabel 4.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum.....	IV-40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Dokumen RKPD	I-4
Gambar 2.1	Wilayah Administratif Kabupaten Kotawaringin Barat	II-2
Gambar 2.2	Peta Geologi Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	II-5
Gambar 2.3	<i>Sebaran Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat</i>	<i>II-7</i>
Gambar 2.4.	Struktur Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-25
Gambar 3.1.	Struktur Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat 2011-2016.....	III-4

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1	Persentase Usia Kawin Pertama Kabupaten Kotawaringin Barat 2015.....	II-94
Diagram 2.2	Pencapaian Peserta KB Baru 2015	II-95
Diagram 2.3	Pencapaian Peserta KB Aktif 2015.....	II-95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyusun dokumen RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006. Untuk dokumen RPJMD Tahap I (2006-2010) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2006, sedang RPJMD Tahap II (2012-2016) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016, dan saat ini sedang menyusun RPJMD tahap III (2017 – 2021).

Penyusunan RPJMD mengacu kepada RPJPD 2006-2025, yang memuat : visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih; dan rancangan rencana teknokratik. RPJMD yang merupakan visi, misi dan program prioritas dari Kepala Daerah terpilih yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana pembangunan tahunan/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2017-2021.

RKPD sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi : pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh PD untuk menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD Provinsi dengan rancangan Renja PD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi pada tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja PD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKPD Provinsi ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana.

Suatu kebijakan menjadi relevan bagi suatu daerah (yang dengan demikian harus dipedomani) karena beberapa karakteristik:

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik :

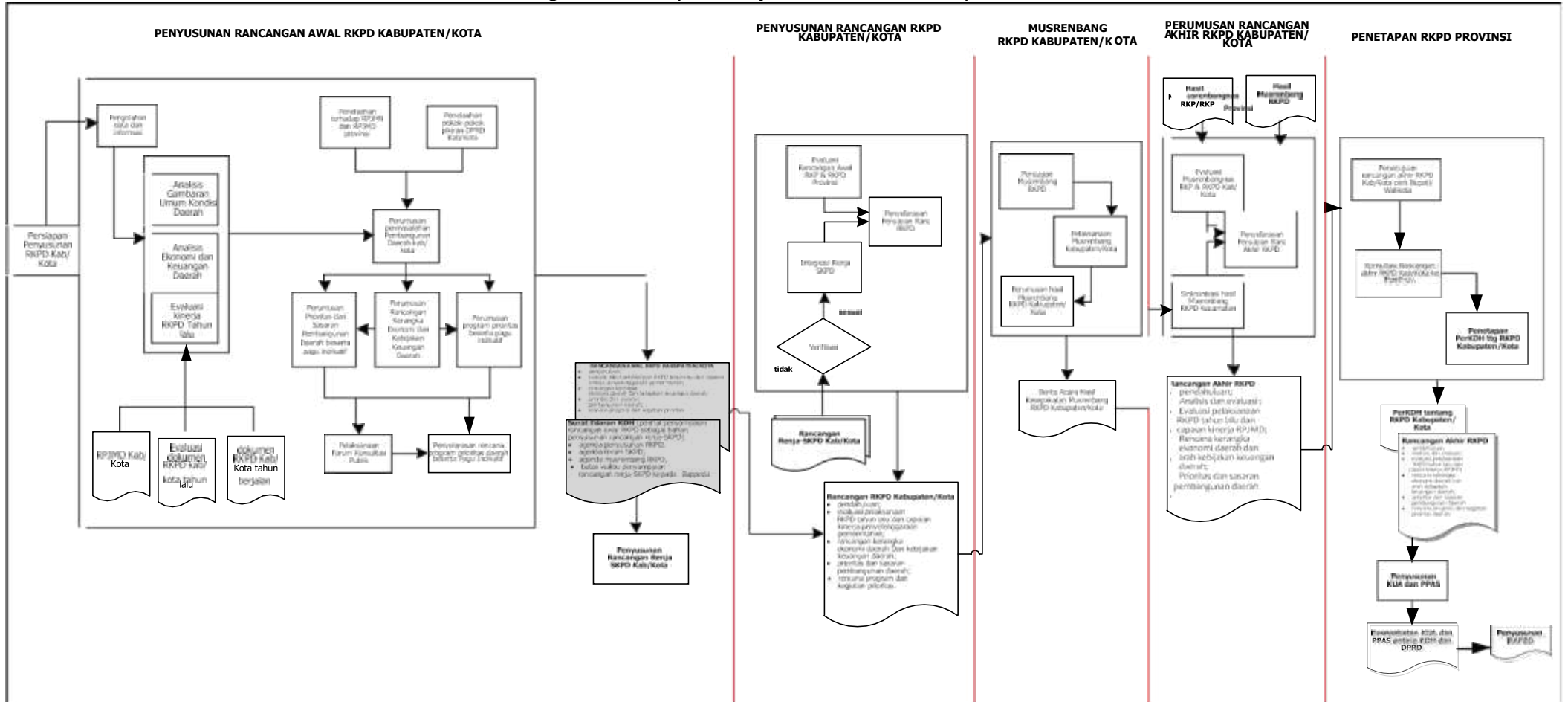
1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2017, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.

Tahap selanjutnya adalah Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap PD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja PD pada PD terkait.

Proses perumusan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut :

Gambar . 1.1
 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota



12. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
29. Peraturan Presiden Nomor .. Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
35. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor ... Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006, nomor 10)
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat Tahun 2013, Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 32);

13. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, Rancangan awal RKPD Kabupaten yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten tersebut juga mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016, RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat 2006-2025, RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025, serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (Nawa Cita).

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional dan daerah (Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat), yaitu sebagai berikut :

1) RPJM Nasional

RPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, pada tanggal 8 Januari 2015. Ada 3 (tiga) dokumen sebagai lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, yaitu : (i) Buku I dengan judul : "Agenda Pembangunan Nasional", (ii) Buku II dengan judul : "Agenda Pembangunan Bidang", dan (iii) Buku III dengan judul : "Agenda Pembangunan Wilayah".

RPJM Nasional tersebut menjadi acuan penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan program kewilayahan / regional.

2) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

RPJMD Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dalam proses penentapan. Arah kebijakan dan program prioritas pada tahun 2017 berdasarkan pada Visi dan Misi Gubernur terpilih,

Program prioritas Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 mengacu Visi dan Misi Gubernur terpilih adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah
- 2) Pemerataan aksesibilitas wilayah.
- 3) Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan,

- 4) Stabilitas Ekonomi Daerah
- 5) Peningkatan pendapatan masyarakat
- 6) Peningkatan kualitas pengawasan dan administrasi pengelolaan keuangan daerah
- 7) Reformasi Birokrasi
- 8) Optimalisasi kinerja aparatur
- 9) Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
- 10) Pengelolaan dan peningkatan pariwisata
- 11) Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan
- 12) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

3) RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat

RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021 : memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih dan rancangan rencana teknokratik, untuk periode perencanaan 5 tahunan.

RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2021. Sejalan dengan tema RKP Nasional pada Tahun 2017, yaitu “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”, tema RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 adalah “Menciptakan Kondisi Aman Guna Mengoptimalkan Potensi Sumber Daya Menuju Kotawaringin Barat Yang Maju”.

Menciptakan keamanan dilaksanakan melalui peningkatan peran pemerintah dan swasta serta partisipasi masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan mengedepankan kerangka hukum yang adil, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif dan efisien, akuntabel. Selain itu juga mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada (pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan), untuk kemajuan Kotawaringin Barat melalui penguatan tata kelola daerah dengan Kabupaten Kotawaringin Barat, menjadi simpul distribusi perdagangan dan jasa pendukung lainnya (industri, pariwisata, pendidikan dan jasa primer pendukung) melalui pengembangan sarana prasarana utama dan pendukung menguatnya jaringan jalur perdagangan regional melalui Kabupaten Kotawaringin Barat dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat pro job (mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja).

Rangkaian Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tahun 2017, diharapkan setiap daerah dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2017 dan

penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2016 memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah diantaranya :

1. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam periode RPJMD ketiga dari RPJPD 2006-2025 ke dalam RKPD Tahun 2017, dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD tahun 2015.
2. Mengacu RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 sebagai arah kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Mengacu RPJMN 2015-2019 (Program NAWA CITA) yang merupakan program prioritas Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Drs. Jusuf Kalla.

4) RENJA – PD

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2017 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Renja PD, adalah sebagai berikut :

- a. Mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2017, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD Tahun 2017, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2017.
- b. Mengacu pada RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD 2017 yang disusun ke dalam rancangan Renja PD 2017,
- c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.
- d. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.
- e. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan PD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja PD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas

yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

14. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Realisasi RPJMD
 - 2.2.1. Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib
 - 2.2.2. Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pilihan
- 2.3. Permasalahan Pembangunan
 - 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
 - 2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat

4.2.1. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun
2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BABVI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk :

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017.
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2017.

1.5.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di bagian barat dengan ibukota Kabupaten di Pangkalan Bun. Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 Km² atau sekitar 6,2% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di daerah khatulistiwa diantara 1⁰19' - 3⁰36' Lintang Selatan dan 110⁰25'-112⁰50' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara;
- Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Laut Jawa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan.

Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini terdiri dari 81 desa dan 13 kelurahan. Adapun Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

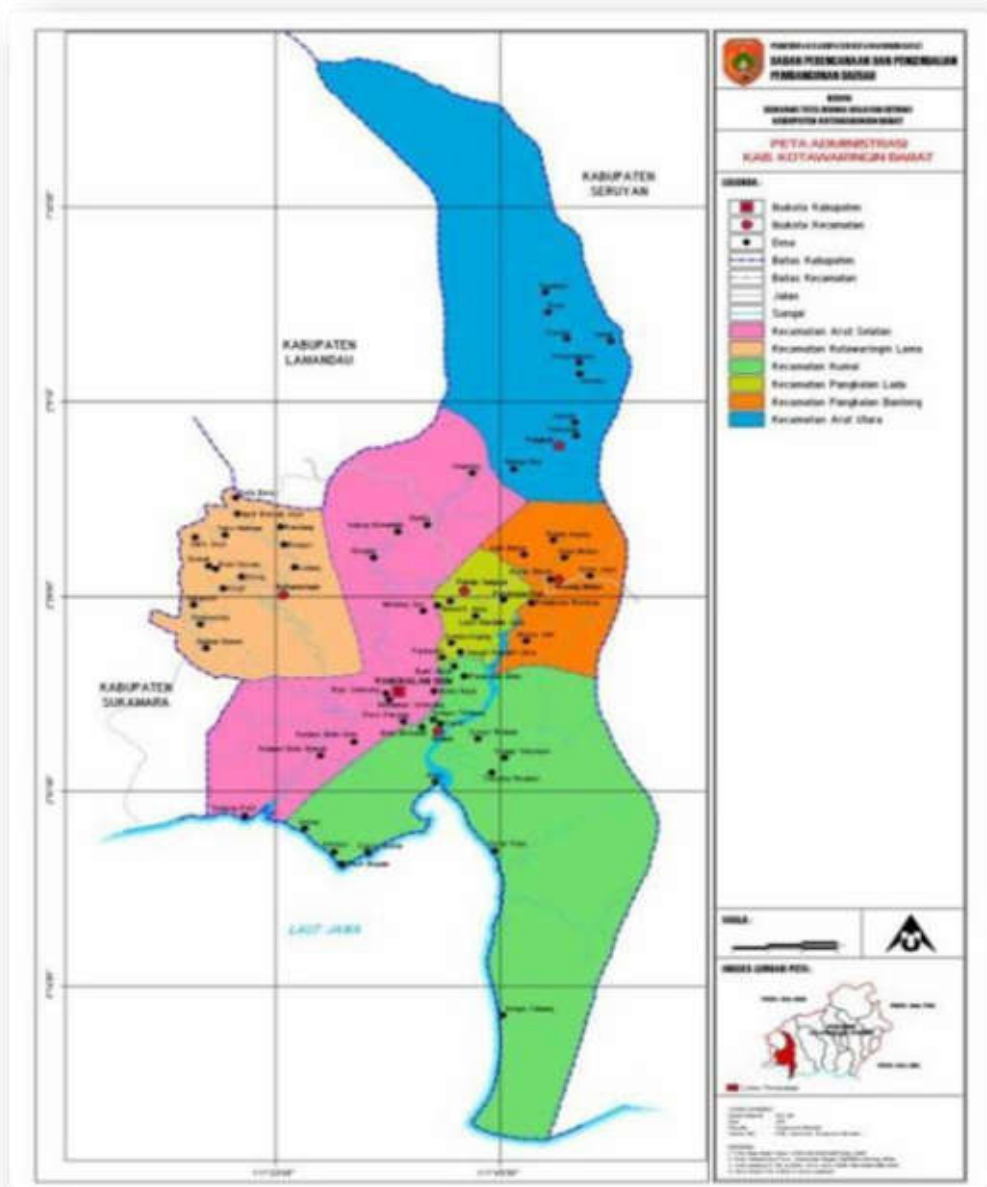
Luas dan Administrasi
Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	JUMLAH		JUMLAH
			Desa	Kelurahan	Desa + Kelurahan
1	Kotawaringin Lama	1.218,0	15	2	17
2	Arut Selatan	2.400,0	13	7	20
3	Kumai	2.921,0	15	3	18
4	Pangkalan Banteng	1.306,0	17	0	17
5	Pangkalan Lada	229,0	11	0	11
6	Arut Utara	2.685,0	10	1	11
JUMLAH		10.759,0	81	13	94

Sumber data : Kobar Dalam Angka Tahun 2015

Gambar 2.1

Wilayah Administratif Kabupaten Kotawaringin Barat
(Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat)



2. **Kondisi Topografi**

Topografis wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat digolongkan menjadi 4 bagian terdiri dari : dataran, daerah dataran berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit.

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada ketinggian 0-500 m dari permukaan laut dan kemiringan antara 0-40%. Ketinggian tempat berpengaruh terhadap suhu udara, yaitu setiap naik 100 meter suhu akan turun rata-rata 0,06 derajat Celsius. Hal tersebut akan menyebabkan semakin tinggi suatu tempat, maka suhu semakin rendah. Dengan demikian ketinggian merupakan faktor yang perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap tumbuh-tumbuhan.

Tabel 2.2

Tinggi dari Permukaan Laut dan Persentase Tingkat Kemiringan menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat

Kecamatan	Luas (Ha)				Jumlah
	0 – 2 %	2 – 15 %	15 – 40 %	> 40 %	
Kotawaringin Lama	45.903,35	64.739,94	3.000,60	0	113.643,89
Arut Selatan	113.593,76	69.107,06	34.963,03	0	217.663,86
Kumai	278.812,90	22.572,55	0	0	301.385,44
Pangkalan Banteng	16.610,11	56.222,47	0	0	72.832,58
Pangkalan Lada	7.189,56	24.120,18	0	0	31.309,74
Arut Utara	0	292.410,98	121.342,23	72.460,00	249.450,98
Jumlah	462.109,98	292.410,98	159.305,86	72.460,00	986.286,49
%	46,85	29,65	16,15	7,35	100

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat

Faktor pembentuk iklim adalah curah hujan, suhu udara, kecepatan angin dan kelembaban. Iklim daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau/kering dan musim hujan. Musim kemarau pada Bulan Juni sampai dengan September sedangkan musim penghujan bulan Oktober sampai dengan bulan Mei. Suhu maximum berkisar 33,4°C-36,4°C dan suhu minimum antara 20,0°C-22,4°C, kelembaban udara berkisar 89,4% - 90,4%, kecepatan angin maksimal 22 knot.

3. **Geologi dan Tanah**

Jenis tanah di daerah selatan berbeda jenis tanah yang terdapat di daerah utara. Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

Podsolik Merah Kuning, tanah podsolik merah kuning merupakan jenis tanah yang sering dijumpai terletak menyebar di tengah sampai hulu sungai kecamatan Arut Utara, sedikit Arut Selatan dan kecamatan Kumai.

Kompleks Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol), tanah regosol podsol merupakan jenis tanah terletak menyebar di tengah kecamatan Kumai, Arut Selatan dan sedikit Kotawaringin Lama.

Kompleks Regosol (Podsol), menyebar di bagian Timur Kecamatan Kumai.

Aluvial, jenis tanah ini terbentuk hasil endapan, banyak terdapat di sekitar daerah aliran sungai Lamandau, Arut, dan Kumai serta di daerah pantai sampai ke bagian tengah kecamatan Kumai.

Organosol, tanah ini terbentuk dari bahan organik yang tertimbun di tempat tersebut, tanah ini menyebar di kecamatan Kumai, kecamatan Kotawaringin Lama dan Arut Selatan.

Oksisol (Lateritik), jenis tanah *oksilik* (lateritik) terdapat bagian atas (hulu) kecamatan Arut Utara. Keadaan medan bergelombang, berbukit, dan bergunung dengan solum tanahnya dalam.

Sedangkan susunan geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat tersusun atas 10 formasi, yaitu :

1. Batuan Terobosan Sintang,
2. Granit Mandahan,
3. Granit Sukadana,
4. Batuan GA Berapi,
5. Tonalik Sepauk,
6. Formasi Dahor,
7. Endapan Rawa
8. Batuan Gunung Api,
9. Alluvium, dan
10. Formasi Laut.

Rincian mengenai susunan geologi di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada **Tabel 2.3**

Tabel 2.3

Formasi Geologi Di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Jenis Formasi	Kecamatan						Jumlah	(%)
		Ktw. Lama	Arut Selatan	Kumai*	Arut Utara	Pangk. Banteng	Pangk. Lada		
1.	Batuan Terobosan Sintang	0	0	0	89,22	0	0	89,22	0,01
2.	Granit Mandahan	265,77	0	0	1.159,50	0	0	1.425,27	0,16
3.	Granit Sukadana	0	0	0	84.598,66	0	0	84.598,66	9,71
4.	Batuan GA Berapi	10.173,09	0	0	2.115,31	0	0	12.288,40	1,41
5.	Tonalit Sepauk	0	0	0	47.049,37	0	0	47.049,37	5,40
6.	Formasi Dahor	50.565,04	50.084,89	57.449,03	5.959,05	34.956,68	24.208,56	223.223,25	25,61

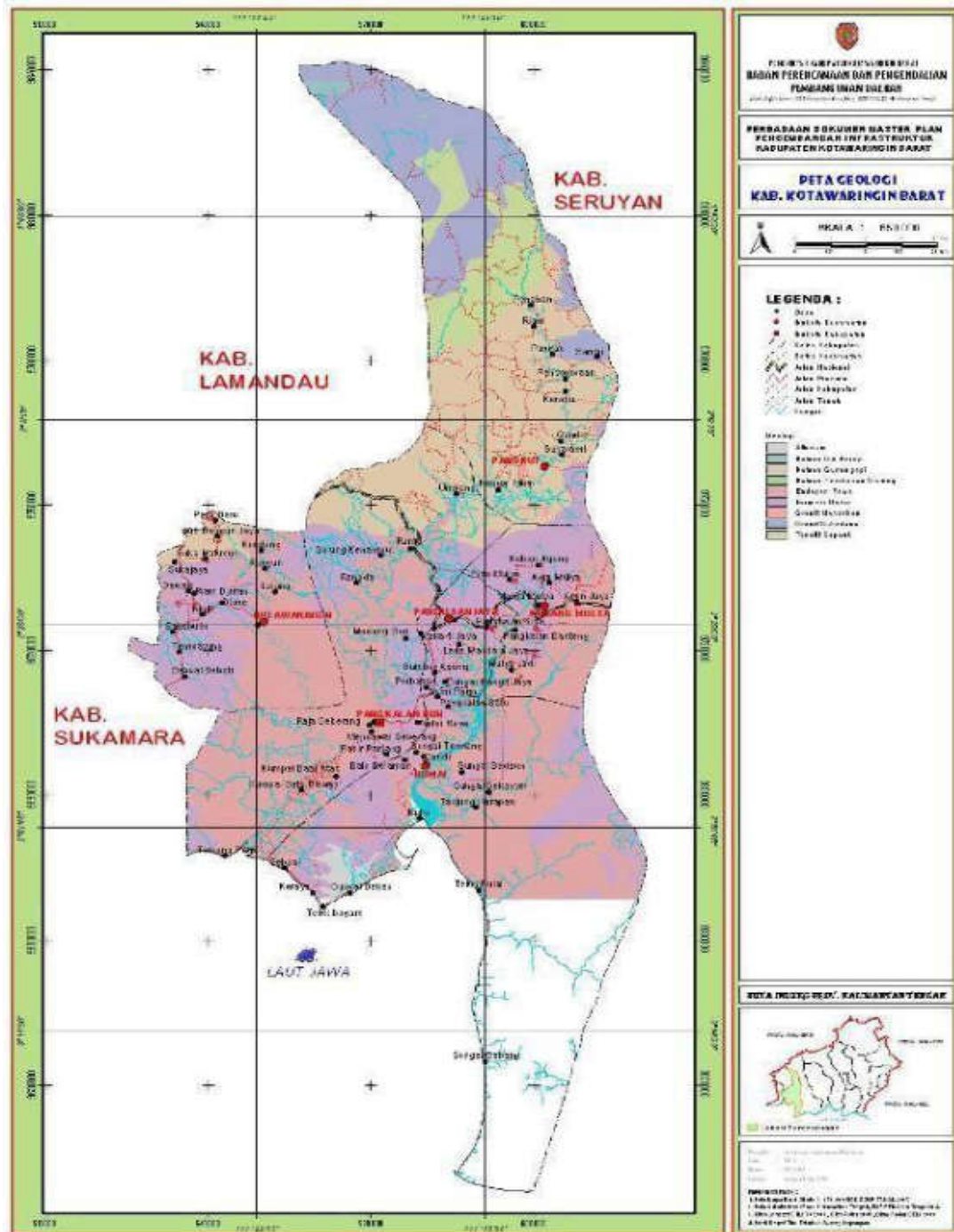
7.	Endapan Rawa	52.640,00	118.916,0 ₃	120.353,27	0	37.083,02	7.101,18	336.093,50	38,56
8.	Batuan Gunung api	0	48.533,61	0	108.479,8 ₇	792,87	0	157.806,35	18,11
9.	Alluvium	0	129,33	6.912,01	0	0	0	7.041,34	0,81
10.	Formasi Laut	0	0	1.997,15	0	0	0	1.997,15	0,23
Jumlah		113.643,89	217.663,8 ₆	186.711,46	249.450,9 ₈	72.832,57	31.309,74	871.612,50	100

Sumber : Diolah dari Peta Geologi Kalimantan Tengah, Tahun 2004

Luas lebih kecil, karena sebagian data tidak ada di Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

Berdasarkan **Tabel 2.3** di atas, terlihat bahwa formasi geologi terbanyak di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah formasi endapan Rawa dan formasi Dahor. Masing-masing dari formasi tersebut seluas 336.093,50 Ha untuk endapan Rawa dan 223.223,25 Ha untuk formasi Dahor. Untuk lebih jelasnya mengenai persebaran susunan geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, lihat **Gambar 2.2**.

Gambar 2.2
Peta Geologi Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat



4. Hidrologi

Di daerah Kalimantan pada umumnya sungai sangat berperan penting di dalam kehidupan masyarakat selain tempat untuk mencari nafkah juga berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi. Demikian pula di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sungai berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat di dalam melakukan aktivitasnya. Sungai-sungai besar yang mengalir di Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Nama-Nama Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Panjang yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata Kedalaman

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Dilayari (Km)	Rata-Rata	
				Kedalaman (M)	Lebar (M)
1.	Sungai Kumai	175,00	100,00	6,00	300,00
2.	Sungai Arut	250,00	190,00	4,00	100,00
3.	Sungai Lamandau	300,00	250,00	6,00	200,00

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat

5. *Klimatologi*

Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau/kering dan musim hujan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret tercatat 423,8 mm, jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan April yaitu 27 hari. Suhu udara maksimum berkisar antara 33,4°C-36,4°C dan suhu minimum antara 20,0°C-22,4°C. Hal ini menyebabkan suhunya relatif panas. Kelembaban udara bervariasi antara 89,4% sampai 90,4%.

6. *Potensi Pengembangan Wilayah*

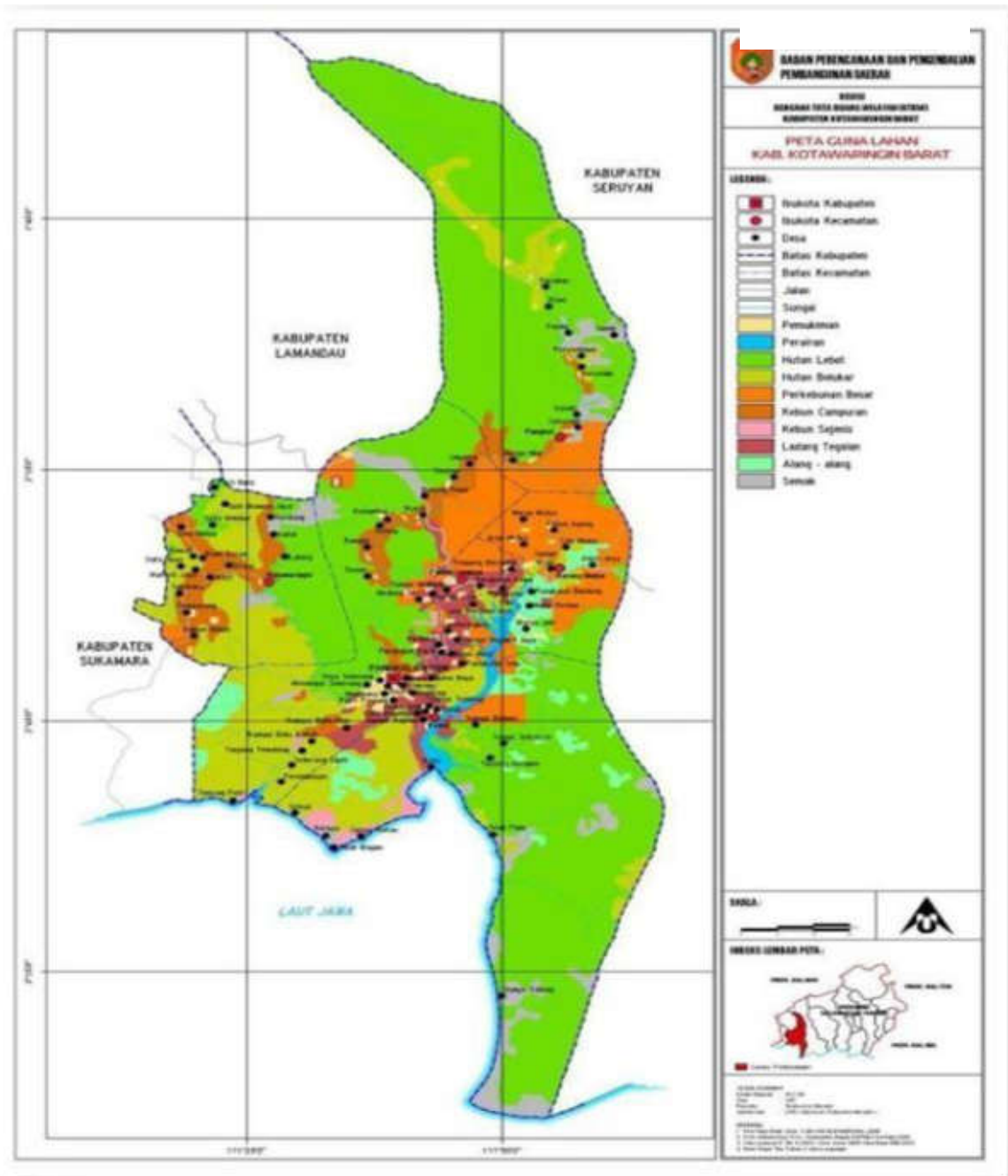
Penggunaan lahan merupakan indikator intensitas pemanfaatan ruang. Penggunaan lahan yang kompleks akan menunjukkan intensitas pemanfaatan ruang yang tinggi. Penggunaan tanah/lahan dapat pula digunakan sebagai bahan untuk melihat tingkat kerusakan lingkungan. Di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat penggunaan tanah/lahan masih didominasi oleh corak alamiah yaitu berupa hutan. Penggunaan tanah/lahan didominasi oleh perkebunan rakyat, perkebunan besar, sawah, ladang/tegalan, kebun campuran, permukiman dan lain-lain sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1.	Hutan Lebat	513.917,11	52,11
2.	Ladang/Tegalan	35.635,55	3,61
3.	Perairan	11.258,62	1,14
4.	Alang-Alang	33.968,94	3,44
5.	Semak	46.722,67	4,74
6.	Hutan Belukar	167.255,64	16,96
7.	Kebun Sejenis	8.201,72	0,83
8.	Pemukiman/Kampung	13.042,39	1,32
9.	Kebun Campuran	54.984,28	5,57
10.	Perkebunan Besar	101.299,57	10,27
	Jumlah	986.286,49	100,00

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat

Gambar 2.3
Sebaran Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat



(Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat)

Jenis lahan/tanah pada suatu kawasan wilayah sangat berpengaruh terhadap pengalokasian lahan yang dialokasikan penggunaannya oleh Pemerintah Daerah setempat dalam pengembangan pembangunan kawasan tersebut seperti pertanian, perkebunan, kehutanan dan perumahan. Adapun jenis tanah/lahan yang terdapat di wilayah Kecamatan Kumai meliputi : lotosal, kompleks podsolik merah kuning-podsol, laterik, alluvial, regosol podsol, organosol serta danau atau rawa - rawa.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

7. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

7.1. Hutan Lindung

Tujuan ditetapkan hutan lindung adalah mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah dan air permukaan. Berdasarkan hasil uji konsistensi dengan RTRWP Kalteng Tahun 2011, maka hingga akhir tahun perencanaan 2031, hutan lindung di Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan pengembangannya menjadi hutan yang dapat dikonversi menjadi hutan produksi. Pengembangan kawasan untuk ditetapkan menjadi hutan lindung dalam Penataan Ruang Wilayah di Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini hanya meliputi 10.088,82 Ha.

7.2 Kawasan Bergambut dan Resapan Air

Kawasan gambut yang perlu dilindungi adalah kawasan yang mempunyai kedalaman > 3m pada hulu sungai dan rawa, yang berfungsi untuk melindungi hidrologi wilayah. Tanah gambut mempunyai ekosistem hutan gambut. Gambut sendiri mempunyai kemampuan yang besar untuk menyimpan air (dari alam).

Kawasan resapan air di Kabupaten kotawaringin Barat seluas 28.991 Ha yang terbagi di Kecamatan Arut Selatan seluas 491 Ha, Kecamatan Kumai seluas 5.000 Ha, Kecamatan Pangkalan Lada seluas 6.000 Ha, Kecamatan Pangkalan Banteng seluas 4.500 Ha, Kecamatan Arut Utara seluas 8.000 Ha dan Kecamatan Kotawaringin Lama seluas 5.000 Ha.

7.3. Kawasan Perlindungan Setempat

Yang termasuk kedalam Kawasan Perlindungan Setempat yaitu sebagai berikut :

- Sempadan Pantai

Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Kriteria sempadan adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan.

- Sempadan sungai

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai. Kriteria sempadan sungai adalah sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar, dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman. Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai, yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-50 meter.

- Sempadan Mata Air

Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.

7.3.1 Kawasan Sempadan Pantai

Peruntukan fungsional kawasan sempadan pantai dimaksudkan dalam upaya melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai dengan batas minimal 50-100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi pantai serta dimaksudkan untuk mengamankan kerusakan lingkungan akibat gerusan, abrasi dan intrusi air laut. Kebijakanaksanaan pemanfaatan kawasan yang ditempuh antara lain :

- Mencegah segala bentuk kawasan kegiatan budidaya disepanjang pantai yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai.
- Mengendalikan kegiatan yang telah ada
- Mengembalikan fungsi lindung pantai yang telah mengalami kerusakan.

Kawasan sempadan pantai ini membentang di bagian selatan wilayah pesisir Kabupaten Kotawaringin Barat, mulai dari Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) di Kecamatan Kumai sampai wilayah pesisir selatan Kecamatan Arut Selatan. Panjang pantai ini kurang lebih sebesar 156 Km, sehingga luas lahan perlindungan sempadan pantai adalah sebesar 1.560 Ha.

7.3.2 Kawasan Sempadan Sungai

Sempadan sungai perlu dilindungi dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai. Sungai-sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat yang perlu dilindungi adalah sungai-sungai besar seperti Sungai Kumai, Sungai Arut dan Sungai Lamandau. Perlindungannya sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri dan kanan sungai dan 50 meter bagi anak sungai diluar permukiman serta apabila sungai dan anak sungai tersebut melintasi lingkungan permukiman, maka areal perlindungannya adalah 10-50 meter di kiri-kanan sungai.

Sempadan Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai luas kurang lebih 725 Km². Untuk DAS Arut luas sempadan sungai sekitar 250 Km², sedangkan DAS Lamandau yang mengalir dari Kabupaten Lamandau memiliki sempadan sungai yang harus dilindungi seluas 325 Km² dan DAS Kumai yang merupakan kumpulan anak-anak sungai memiliki luas 150 Km².

7.3.3 Kawasan Mata Air

Kawasan mata air merupakan sumber air baku yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup. Sumber mata air terbesar berasal dari tiga sungai yang berada di Kabupaten kotawaringin barat yaitu, Sungai Kumai sepanjang 175 Km, Sungai Lamandau sepanjang 325 Km dan Sungai Arut sepanjang 250 Km. Untuk kawasan mata air lainnya berada di kecamatan Arut Selatan meliputi tebing tinggi, Danau Sulung, Danau Seluluk,

Danau Kenambui. Terdapat kawasan mata air yang berasal dari danau di Kecamatan Kotawaringin Lama (Danau Gatal, Masorayan, Terusan, Asam, Purun dan Batang Pagar) dengan luasan sebesar 1,209.9 Ha.

7.3.4 Kawasan Sempadan Danau/Rawa

Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat beberapa danau/rawa yang juga perlu dilindungi sebagai pengendali banjir atau digunakan untuk kepentingan masyarakat sehari-hari maupun untuk kepentingan pertanian dan perkebunan.

Danau-danau yang dimaksud tersebut adalah Danau Kenambui dan Sulung di Kecamatan Arut Selatan serta Danau Gatal dan Kotawaringin di Kecamatan Kotawaringin Lama. Areal lahan yang perlu dilindungi adalah selebar 50-100 meter dari bibir danau ke arah darat.

7.4. Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam

Perlindungan terhadap kawasan suaka alam dan cagar budaya di Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nuffah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Dalam peraturan Menteri Kehutanan P.19 tahun 2004, kawasan suaka alam dan cagar budaya ini termasuk dalam Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Adapun penjelasan dari masing-masing kategori Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam adalah sebagai berikut :

7.4.1. Kawasan Suaka Alam

Kawasan Suaka Alam merupakan kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan yang merupakan kawasan suaka alam di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) , Tanjung Keluang, Suaka Marga Satwa Sungai Lamandau dan Hutan Lindung.

7.4.1.1 Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya

Kawasan suaka alam laut di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kawasan konservasi tumbuhan laut seperti padang lamun dan terumbu karang. Kawasan Padang Lamun yang berada di sepanjang garis pantai desa Teluk Bogam, Desa Sungai Bakau, Gosong Senggora dan Sepagar seluas 210 Ha. Kawasan sebaran terumbu karang berada di Sei Sungai Cabang Timur, Gosong Senggora dan Sepagar seluas 210 Ha. Daerah perlindungan laut khususnya ikan berada di Gosong Senggora dan Tanjung Keluang.

7.4.1.2 Kawasan Pantai Berhutan Bakau

Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas [rawa-rawa](#) berair [payau](#) yang terletak pada [garis pantai](#) dan dipengaruhi oleh [pasang-surut](#) air laut. Kawasan berhutan bakau habitat tumbuhnya di Sungai Mambang Desa Kubu hingga Desa Sungai Bakau di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 6,973 Ha.

7.4.1.3 Kawasan Suaka Margasatwa

Kawasan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau adalah areal yang terletak di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kotawaringin Lama. Kawasan ini memiliki luas sebesar 35.822 Ha atau 3,1% dari luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

7.4.1.4 Taman Nasional

Taman Nasional Tanjung Puting ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 698/pkts/UM/XI/78, tanggal 13 November 1978 dan SK Menteri Kehutanan No 687/kpts-II/1996, tanggal 25 Oktober 1996 seluas 415.040 Ha. Taman ini secara geografis terletak antara 2°35'-3°20' LS dan 111°50'-112°15' BT sedangkan secara administratif pemerintahan, terletak berbatasan langsung dengan Kabupaten Seruyan. Luas kawasan yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah seluas 266.546 Ha.

7.4.1.5 Kawasan Taman Wisata

Taman Wisata Alam Tanjung Keluang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 529, tanggal 12 Desember tahun 2012 seluas 2.563 Ha. Taman Wisata Tanjung Keluang secara administratif pemerintahan, terletak di kecamatan Kumai.

7.4.1.6 Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Kawasan cagar budaya merupakan kawasan yang dilindungi karena memiliki nilai sejarah dan pengetahuan. Kawasan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Istana Kuning atau Keraton Lawang Agung Bukit Indra Kencana, Astana Mangkubumi di Kecamatan Arut Selatan, Astana Al-Nursari, Makam Kyai Gede Masjid Kyai Gede dan Makam Raja Kuta Tanah di Kecamatan Kotawaringin Lama. Rumah Adat, Batu Patahan, Tiang Pantar, Balai Pinyang Laman, Batu Dahieng Burung, Sapundu, Rumah Betang Kuning, Batu Lancang, Tempayan Hermaung Yadana dan Monumen Iskandar Sambi di Kecamatan Arut Utara.

7.4.1.7 Kawasan Hutan Kota

Kawasan hutan kota telah ditetapkan dengan Perda seluas 785,75 Ha, meliputi :

- a. Kawasan Wisata Alam Kelurahan Sidorejo seluas 5 Ha SK. Bupati Nomor : 188.45/2/HUK;

- b. Kawasan Pangkalan TNI AU seluas 713 Ha SK. Bupati Nomor : 3 Tahun 2009;
- c. Hutan Kota Desa Purbasari seluas 55,75 Ha SK. Bupati Nomor : 188.45/16/HUK;
- d. Kawasan Klinik Rehabilitasi Orang Utan seluas 12 Ha SK. Bupati Nomor : 188.45/1/HUK pebruari Tahun 2007;
- e. Hutan lindung dalam arti khusus Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan seluas 411 Ha;
- f. Hutan Kota di Kecamatan Arut Selatan dan Kumai (penanaman turus jalan di Kecamatan Arut Selatan seluas 25 Ha); dan
- g. Hutan Kota di Kecamatan Arut Selatan (penanaman turus jalan di Kota Pangkalan Bun seluas 10 Ha).

7.5. Kawasan Rawan Bencana

7.5.1 Kawasan Rawan Kebakaran

Kebakaran hutan merupakan salah satu dari realitas kondisi yang ada saat ini. Dampak dari kebakaran hutan berupa kabut asap tidak hanya dirasakan secara lokal namun juga secara regional (lintas wilayah/negara). Untuk itu perlu dilakukan suatu rencana yang mengakomodir kawasan rawan kebakaran hutan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun lokasi dari kawasan rawan kebakaran hutan adalah kawasan yang sebelumnya pernah terjadi kebakaran. Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 1.122 titik rawan atau seluas 205 km². Kawasan yang perlu ditetapkan sebagai kawasan rawan kebakaran hutan adalah kawasan yang terletak di daerah pesisir, dekat pantai dan muara sungai.

Menyingkapi permasalahan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, maka kegiatan pengendalian kebakaran meliputi kegiatan mitigasi, kesiagaan, dan pemadaman api.

Kegiatan mitigasi bertujuan untuk mengurangi dampak kebakaran seperti pada kesehatan dan sektor transportasi yang disebabkan oleh asap. Beberapa kegiatan mitigasi yang dapat dilakukan antara lain : (1) menyediakan peralatan kesehatan terutama di daerah rawan kebakaran, (2) menyediakan dan mengaktifkan semua alat pengukur debu di daerah rawan kebakaran, (3) memperingatkan pihak-pihak yang terkait tentang bahaya kebakaran dan asap, (4) mengembangkan waduk-waduk air di daerah rawan kebakaran, dan (5) membuat parit-parit untuk mencegah meluasnya kebakaran beserta dampaknya.

Kesiagaan dalam pengendalian kebakaran bertujuan agar perangkat penanggulangan kebakaran dan dampaknya berada dalam keadaan siap digerakkan. Hal yang paling penting dalam tahap ini adalah membangun partisipasi masyarakat di kawasan rawan kebakaran.

Tahapan ketiga adalah kegiatan pemadaman api. Pada tahap ini usaha lokal untuk memadamkan api menjadi sangat penting karena upaya di tingkat lebih tinggi memerlukan persiapan lebih lama sehingga dikhawatirkan api sudah menyebar lebih luas. Pemadaman api di kawasan bergambut jauh lebih sulit daripada di kawasan yang tidak bergambut. Hal ini terkait dengan kecepatan api yang sangat cepat dan tipe api di bawah permukaan. Strategi pemadaman api secara konvensional seperti pada kawasan hutan dan lahan tidak bergambut harus dikombinasikan dengan cara-cara khas untuk kawasan bergambut, terutama untuk memadamkan api di bawah permukaan. Pemadaman api di bawah permukaan dengan menyemprotkan air ke atas permukaan lahan tidaklah efektif, karena tanah gambut mempunyai daya hantar air vertikal yang sangat rendah. Cara lainnya adalah dengan membuat parit yang dialiri, atau penyemprotan air melalui lubang yang telah digali hingga batas api di bawah permukaan.

7.5.2 Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Kawasan Rawan Banjir

Wilayah di Kabupaten Kotawaringin Barat yang termasuk daerah rawan bencana gelombang pasang yaitu Tanjung Pengujan sampai Tanjung Keluang, Teluk Pulai sampai Teluk Ranggau, Keraya dan Sebuai Kecamatan Kumai. Kawasan rawan banjir di Kecamatan Arut Selatan (Desa Kumpai Batu Bawah, Rangda, Sulung Kenambui, Umpang, Tanjung Trantang), Kecamatan Kotawaringin Lama (Desa Lalang, Rungun dan Kondang).

7.6. Kawasan Lindung Lainnya

7.6.1 Kawasan Perlindungan Plasma-Nutfah

Kawasan lindung hutan plasma-nutfah merupakan kekayaan alam yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 240.778 Ha yang berada pada Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) seluas 198.588 Ha, Suaka Marga Satwa Lamandau seluas 32.712 Ha dan Tanjung Keluang seluas 2.559 Ha.

7.6.2 Kawasan Terumbu Karang dan Biota Laut yang di Lindungi

Kawasan yang merupakan daerah Konservasi Laut Daerah (KKLD) terutama terumbu karang, ikan dan padang lamun yang dilindungi berada di Gosong Senggora dan Sepagar yang secara geografis terletak antara 111°41'65"BT dan 3°12'58"LS, dan daerah perlindungan laut terutama ikan berada di Gosong Sebogor dan Tanjung Keluang secara geografis terletak antara 111°29'43"BT dan 2°58'38"LS. Pencadangan kawasan konservasi perairan sungai atau danau meliputi:

- a. Kawasan konservasi perairan sungai Arut di sungai Desa Panahan dengan luas 1.500 Ha;
- b. Kawasan konservasi perairan Danau Seluluk seluas 200 Ha;
- c. Kawasan konservasi perairan Danau Gatal seluas 1.500 Ha;
- d. Kawasan konservasi perairan Danau Masorayan seluas 250 Ha.

- e. kawasan konservasi Gosong Senggora dan perairan laut Kabupaten Kotawaringin Barat kurang lebih 13.032 hektar.

7.7 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

7.7.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat ini, untuk menghindari tumpang tindih pengelompokan jenis kawasan budidaya dan untuk menselaraskan produk tata ruang di atasnya, maka penetapan jenis kawasan budidaya mengikuti terminologi dari Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dalam produk RTRWP 2006. Kawasan budidaya dikategorikan menjadi : Kawasan Budidaya Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Tetap (HPT), Kawasan Pengembangan Produksi (KPP), Kawasan Permukiman dan Penggunaan Lain (KPPL).

7.7.2. Kawasan Pengembangan Hutan Produksi (HP)

Kawasan hutan produksi diarahkan pemanfaatannya untuk tujuan pemenuhan kebutuhan kayu serta keperluan industri, baik untuk tujuan lokal, nasional maupun ekspor. Kawasan Hutan Produksi terdiri dari 3 kawasan, yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Dalam *draft* Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009, dan Rencana Tata Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2032, wilayah kawasan hutan produksi yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagian besar terletak di kecamatan Arut Utara, Arut Selatan dan di Kecamatan Kotawaringin Lama, serta sebagian kecil di Kecamatan Pangkalan Banteng, yang terdiri dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 53.582 Ha dan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 286.485 Ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) mempunyai luas sebesar 160.185 Ha.

7.7.3 Kawasan Pengembangan Produksi (KPP)

Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) diarahkan penggunaannya untuk kegiatan budidaya non kehutanan berskala besar, termasuk diantaranya usaha perkebunan besar swasta (PBS). Luas yang direncanakan untuk Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) ini adalah seluas 110.690,05 Ha atau 10,29 % dari luas wilayah kabupaten.

7.7.4 Kawasan Hutan Rakyat (HTR)

Penetapan pencadangan lokasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan oleh Menteri Kehutanan No. SK. 529/Menhut-12/2012 seluas 11.924 Ha : Kecamatan Arut Utara (Desa Nanga Mua, Kelurahan Pangkut, Desa

Sukarami, Desa Kerabu dan Desa Gandis) dan Kecamatan Pangkalan Banteng di Desa Amin Jaya.

7.7.5 Kawasan Peruntukan Pertanian

Untuk kawasan pertanian tanaman pangan yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering, perikanan, dan perkebunan rakyat. Adapun pengelolaan untuk kawasan pertanian ini adalah sebagai berikut :

- Pengembangan dan intensifikasi lahan basah di Kecamatan Arut Selatan seluas 14.262,34 Ha, Kotawaringin Lama seluas 2.472,00 Ha, Kumai seluas 9.434,93 Ha, Arut Utara seluas 115,9 Ha, Pangkalan Banteng seluas 367,94 Ha dan Pangkalan Lada seluas 607,68 Ha. Dengan total seluruhnya untuk lahan pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 27.260,79 Ha.
- Pengembangan dan intensifikasi lahan kering untuk tanaman pangan diarahkan ke Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Lama, Kumai, Arut Utara, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada.
- Intensifikasi hortikultura di Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Lama, Kumai, Arut Utara, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada. Upaya perencanaan terhadap kawasan pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :
 1. Pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan pertanian harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam hal ini masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 2. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian tanaman harus memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi dan wajib memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah rusaknya;
 3. Kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan;
 4. Kawasan pertanian tanaman lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh pemerintah daerah setempat dan atau oleh Departemen Pertanian;
 5. Wilayah penghasil produk perkebunan yang bersifat spesifik, lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang, wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan;
 6. Upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering tidak produktif (tingkat kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat.

7.7.5. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas 1.075.900 Ha, cadangan lahan perkebunan seluas 124.810 Ha, terdiri dari perkebunan besar kelapa sawit, karet, lada, kelapa, dll tersebar di 6 Kecamatan di kabupaten Kotawaringin Barat.

7.7.6. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan meliputi :

- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap seluas (156 Km x 4 mil) yang berada di perairan laut sepanjang garis pantai, yaitu Desa Teluk Bogam, Kubu, Keraya, Teluk Pulai, Sebuai dan Sungai Bakau Kecamatan Kumai;
- b. kawasan peruntukan budidaya perikanan darat jenis keramba berada di Kelurahan Raja Seberang hingga Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan dan simpang Sungai Lamandau dan Sungai Arut hingga danau Seluluk;
- c. kawasan peruntukan budidaya ikan tambak berada di desa Sungai Bakau, Kumai Hilir (Teluk Pengarangan), Sungai Cabang Timur, Keraya, Sebuai di Kecamatan Kumai dan Desa Tanjung Putri Kecamatan Arut Selatan;
- d. kawasan peruntukan pengembangan budi daya rumput laut di Sungai Bakau dan Teluk Bogam Kecamatan Kumai; dan
- e. kawasan pengolahan ikan di Kecamatan Kumai;
- f. Untuk kawasan perikanan tangkap tradisional yang diperbolehkan harus berada di luar zonasi konservasi terumbu karang dan biota laut yang dilindungi dan zona alur transportasi laut.

7.7.7. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan tersebar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu untuk pertambangan batu bara berada di Kecamatan Pangkalan Banteng, tambang biji besi di Kecamatan Arut Utara (Desa Pandau, Desa Riam dan Desa Sambi), tambang emas di Kecamatan Arut Utara (Desa Pangkut, Desa Kerabu dan Desa Penyombean), tambang zirkon di kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Kumai.

7.7.8. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri menurut Keppres nomor 41 Tahun 1996. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan RTRWK tentang Rencana Kawasan Industri Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain :

- a. Lokasi kawasan peruntukan industri (*industrial estate*), meliputi :
 1. Industri besar dan menengah berada di Kecamatan Kumai, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng dan Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan seluas 1.500 hektar (empat lokasi); dan
 2. Industri kecil tersebar diseluruh daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

- b. kawasan peruntukan industri diluar kawasan industri, meliputi :
 - 1. industri pengolahan kayu lapis Korea-Indonesia (korindo) merupakan industri besar di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
 - 2. industri translik merupakan industri rumah tangga (*home industry*).
- c. Industri mikro, kecil dan menengah tidak harus berlokasi dalam kawasan industri.

7.7.9. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pemanfaatan ruang untuk daya tarik wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada wisata alam yang dapat ditingkatkan pengembangannya secara fisik dan non fisik sehingga dapat berfungsi dan bernilai tambah. Lokasi-lokasi wisata yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain :

- 1) Kawasan wisata alam :
 - Kecamatan Kumai seperti : Taman Nasional Tanjung Puting, Pantai Kubu, Pantai Keraya, Pantai Teluk Bogam, Tanjung Keluang, Pantai Sebuai, Air Terjun Patih Mambang, Gosong Senggora, Suaka Marga Satwa Lamandau, Danau Naruhum.
- 2) Kawasan wisata budaya :
 - Kecamatan Arut Selatan seperti : Istana Kuning, Astana Mangkubumi, Kolam Pemandian Putri Raja dan Makam Raja-Raja Kutaringin yang terletak di tengah kota Pangkalan Bun,
 - Kecamatan Kotawaringin Lama : Astana Al Nursari, Masjid Kyai Gede dan Makam Kyai Gede terletak di Kecamatan Kotawaringin Lama.

7.7.10. Kawasan Peruntukan Permukiman

Pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan untuk pemenuhan perumahan yang layak huni untuk berbagai lapisan masyarakat. Untuk klasifikasi dari permukiman yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

- Permukiman dengan kepadatan tinggi
Kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi berada di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada dengan tingkat kepadatan 126,14 jiwa/Km², Kecamatan Arut Selatan dengan tingkat kepadatan 42,47 jiwa/Km², dan Kecamatan Pangkalan Banteng dengan tingkat kepadatan 25,11 jiwa/Km²;
- Permukiman dengan skala kepadatan sedang
Kawasan permukiman dengan kepadatan sedang berada di wilayah Kecamatan Kotawaringin Lama dengan tingkat kepadatan 14,15 jiwa/Km², dan Kecamatan Kumai dengan tingkat kepadatan 16,46 jiwa/Km²;
- Permukiman dengan skala kepadatan rendah
Kawasan permukiman dengan kepadatan sedang berada di wilayah Kecamatan Arut Utara dengan tingkat kepadatan 6,04 jiwa/Km².

Jika dilihat dari kecenderungan yang ada pada umumnya permukiman yang dibangun oleh pribadi (masyarakat) ada tiga jenis yaitu yang tertata dengan rapi, sembarangan dan tidak teratur, serta kampung kumuh. Permukiman yang dibangun/dikembangkan oleh pengembang umumnya berupa rumah dalam berbagai tipe, sedangkan untuk rumah dinas tidak ada penambahan.

Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat ditentukan berdasarkan atas luasan kapling rumah dibawah ini :

- Rumah kapling kecil, setidaknya seluas ≥ 200 meter persegi.
- Rumah kapling menengah, luas lahan antara > 250 meter persegi.
- Rumah kapling besar, luas lahan > 500 meter persegi.

Tabel 2.6
Rencana Pengembangan Perumahan

Kecamatan	Jumlah Pertambahan Kebutuhan Rumah Tahun 2031 (unit)				Luas Lahan Yang dibutuhkan Untuk Pertambahan Rumah Tahun 2031 (km ²)			
	Besar	Sedang	Kecil	Jumlah	Besar	Sedang	Kecil	Jumlah
Ktw. Lama	638	1.913	3.826	6.377	318.866,36	478.299,54	765.279,26	1.562.445,16
Arut selatan	3.305	9.915	19.830	33.049	1.652.458,38	2.478.687,57	3.965.900,11	8.097.046,06
Kumai	1.610	4.829	9.658	16.097	804.846,65	1.207.269,97	1.931.631,95	3.943.748,57
Arut utara	503	1.510	3.019	5.032	251.611,39	377.417,09	603.867,34	1.232.895,83
P. Banteng	1.200	3.600	7.200	12.001	600.038,96	900.058,43	1.440.093,50	2.940.190,89
P. Lada	985	2.955	5.910	9.850	492.508,46	738.762,70	1.182.020,31	2.413.291,47
Total	8.241	24.722	49.444	82.407	4.120.330,20	6.180.495,30	9.888.792,48	20.189.617,98

Sumber: Hasil Rencana, Tahun 2.031

Arahan pengembangan untuk kawasan perumahan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang adalah sebagai berikut :

- Pembangunan rumah tidak boleh merusak kondisi lingkungan yang ada.
- Dalam penataan rumah harus memperhatikan lingkungan dan harus berpegang pada ketentuan KDB dan KLB yang telah ditetapkan.
- Pada kawasan-kawasan atau lokasi-lokasi yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan bersifat khusus sebaiknya tidak dialihfungsikan untuk permukiman atau kegiatan lain yang diperkirakan dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengadakan rumah sendiri tetapi penataannya harus mengikuti rencana tata ruang dan *advis planning* yang dikeluarkan oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Untuk pengembangan perumahan yang dilakukan oleh developer harus disertai juga dengan pembangunan fasilitas umum dan sosial terutama pada RTH dan lapangan olah raga, tempat ibadah, makam, perbelanjaan, serta jalan yang menghubungkan dengan jalan yang ada disekitarnya dan jalan utama kota.

- f. Pada kawasan terbangun kota, harus disediakan ruang terbuka hijau yang cukup yaitu :
- Untuk kawasan padat, minimum disediakan area 10% dari luas total kawasan.
 - Untuk kawasan yang berkepadatan bangunannya sedang harus disediakan ruang terbuka hijau minimum 20% dari luas kawasan.
 - Untuk kawasan berkepadatan bangunan rendah harus disediakan ruang terbuka hijau minimum 30% terhadap luas kawasan secara keseluruhan.
 - Untuk kawasan permukiman, taman harus disediakan ruang terbuka hijau 60% terhadap luas kawasan secara keseluruhan.

7.7.11. Kawasan Peruntukan Lainnya

Rencana Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Seiring dengan perkembangan Kabupaten Kotawaringin Barat maka kegiatan perdagangan di Kabupaten Kotawaringin Barat juga semakin meningkat. Kabupaten Kotawaringin Barat dalam skala nasional dan regional mempunyai fungsi sebagai pusat kegiatan distribusi barang dan jasa untuk wilayah sekitarnya. Sehingga dengan demikian keberadaan pusat perdagangan dan jasa (komersial) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai arti yang sangat penting dan perlu diarahkan secara tepat.

Rencana pengembangan kawasan komersial yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan perdagangan skala besar (grosir) untuk jenis sayuran, ikan dan sejenisnya, *garment*, elektronika dan barang perlengkapan sehari-hari diarahkan di Kecamatan Kumai, karena dekat dengan pelabuhan dan akan dikembangkan sebagai kawasan industri pengolahan hasil bumi. Kegiatan perdagangan ini perlu dilengkapi dengan tempat bongkar muat barang, tempat parkir kendaraan, *container* sampah dan pelengkap kebersihan lainnya.
2. Untuk kegiatan perdagangan barang campuran, misalnya *garment*, elektronika dan jasa seperti bank, *show room* mobil-motor, bioskop, biro perjalanan, akan dilayani di sekitar pusat kota. Pengembangan perdagangan dan jasa pada kawasan ini diarahkan dengan intensitas rendah-sedang baik dalam bentuk bangunan maupun tarikan orang yang akan datang dengan disertai sistem parkir di dalam (*off street*)
3. Perdagangan kebutuhan sehari-hari untuk skala kecil dan menengah dilayani oleh pasar yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Kawasan ini juga dikelilingi oleh pertokoan yang akan menjadi pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya.
4. Sesuai dengan perkembangan Kabupaten Kotawaringin Barat maka diperlukan pengembangan kawasan perdagangan baru dengan berbagai skala pelayanan,

mulai dari toko/warung, pertokoan, pasar. Kawasan perdagangan baru tersebut terdiri dari :

- a) Pusat perdagangan baru, direncanakan pada setiap pusat-pusat pelayanan;
- b) Pertokoan, dimana pengembangannya diperlukan pada kawasan baru yang telah dan akan dikembangkan. Pertokoan ini sebaiknya berdekatan dengan fasilitas umum lainnya sehingga secara keseluruhan berfungsi sebagai pusat lingkungan;
- c) Toko dan warung, sifatnya eceran dan barang dagangannya merupakan bahan kebutuhan sehari-hari. Arahannya pengembangannya adalah menjadi satu dengan kawasan/lingkungan permukiman.

7.7.12. Rencana Pengembangan Kawasan Fasilitas Umum

Kawasan Perkantoran

Kawasan perkantoran yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tetap dipertahankan di PKW Kabupaten Kotawaringin Barat Kota Pangkalan Bun yang memiliki skala pelayanan regional, dan di Kecamatan Kumai yang memiliki skala pelayanan kecamatan/lokal, sedangkan untuk instansi lainnya lokasinya menyebar.

Kawasan Pendidikan

Untuk melayani kebutuhan penduduk, kegiatan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Kawasan Pelayanan Kesehatan

Untuk masa yang akan datang lokasi dari rumah sakit yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat tetap dipertahankan mengingat lokasinya yang ada pada saat ini cukup sentral dan mempunyai aksesibilitas yang tinggi, jadi hanya perlu meningkatkan mutu pelayanan saja. Sedangkan untuk pengembangan pelayanan kesehatan lainnya setingkat puskesmas diarahkan di pusat pelayanan lingkungan permukiman terutama pada wilayah baru yang akan dikembangkan sehingga pengembangan baru ini (bersamaan dengan fasilitas lainnya) sekaligus dapat merupakan daya tarik perkembangan daerah pada masa yang akan datang. Selain itu terkait dengan ini untuk pusat pelayanan PKL yang tidak mempunyai fasilitas kesehatan setingkat puskesmas harus dikembangkan pada pusat pelayanan PKL ini.

Kawasan Peribadatan

Seperti pada umumnya masyarakat di Indonesia, ternyata masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat mayoritas memeluk agama Islam, setelah itu agama Kristen Hindu, dan Budha. Berbagai jenis fasilitas peribadatan ini lokasinya sudah tersebar dan sudah dapat melayani kebutuhan penduduk.

Ruang Olah Raga

Sesuai dengan kondisi Kabupaten Kotawaringin Barat maka untuk rencana Ruang Olah Raga diarahkan pengembangan lapangan olah raga yang bersifat terbuka terutama

disetiap unit lingkungan permukiman yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk lapangan olah raga yang ada sekarang sebisa mungkin dihindari untuk peralihan fungsi sebagai kawasan terbangun, dan hanya difungsikan sebagai RTH baik untuk tempat olah raga, taman kota, maupun sebagai peresapan air.

Ruang Terbuka Non Hijau Kota

Ruang terbuka non hijau merupakan ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH berupa ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) yaitu jalan maupun ruang-ruang terbuka yang telah diperkeras sehingga tidak terdapat vegetasi yang mampu meresapkan air. Luasan area ruang terbuka non hijau diperoleh dari luas lapangan olahraga, lapangan upacara, serta parkir terbuka. Area ini tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Rencana pengembangan ruang terbuka non hijau di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah mempertahankan ruang terbuka non hijau yang saat ini ada yaitu ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) meliputi taman bermain, stadion olahraga, jaringan jalan serta parkir yang diperkeras sehingga bersama dengan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) akan meningkatkan kualitas lingkungan fisik, ekonomi dan sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.

7.7.13. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan ini memiliki potensi untuk berkembangnya sektor-sektor strategis yang memiliki pengaruh skala regional dan nasional serta dimungkinkan internasional. Kawasan yang berperan menunjang sektor strategis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

- a. Kawasan Pengembangan Peternakan berupa kawasan Peternakan ruminansia (sapi potong dan kambing) di Kecamatan Arut Selatan, Kumai dan Pangkalan Lada dan non ruminansia (ayam potong dan itik) di Kecamatan Kotawaringin Lama, Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada;
- b. Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis yang terdapat di Kecamatan Arut Selatan seluas 19.190 Ha, Kecamatan Arut Utara seluas 350 Ha, Kecamatan Pangkalan Lada seluas 620 Ha, Kecamatan Pangkalan Banteng seluas 840 Ha, Kecamatan Kotawaringin Lama seluas 3.175 Ha dan Kecamatan Kumai seluas 10.686 Ha; (setelah dikurangi ijin ASMR 3.822 Ha);
- c. Kawasan perkebunan seluas 124.810 Ha terdiri dari perkebunan kelapa sawit, karet, dan lada tersebar di Kecamatan Kumai, Arut Utara, Arut Selatan, Kotawaringin Lama, Pangkalan Banteng, Pangkalan Lada dan Kotawaringin Lama;
- d. Kawasan terpadu Industri, pelabuhan, peti kemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, laut dan udara berupa Kawasan Strategis Pengembangan (KSP) Pangkalan Bun-Kumai, KSP Pandu Sanjaya-Karang

Mulya (Pakam), KSP Pangkut, Kawasan pelabuhan yaitu : Pelabuhan Tanjung Kalap/CPO Bumi Harjo dan Pelabuhan Ro-Ro terletak di Kecamatan Kumai, Bandar udara Iskandar Pangkalan Bun dan Rencana pembangunan bandara baru dengan cadangan lahan seluas 5.000 Ha yang lokasinya terletak di Kecamatan Kumai di tetapkan oleh Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat nomor : 050/27/Bapp-Set/2010 tanggal 18 Januari 2010 dengan maksud untuk pengembangan jalur transportasi udara komersil yang handal sehingga mampu mengantisipasi kebutuhan daerah 20 tahun mendatang;

- e. Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan (pusat pertanian dan perikanan darat) di Kecamatan Pangkalan Lada dan Kumai;
- f. Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan (pusat pengembangan dan pengolahan ikan laut) di Kecamatan Kumai.

7.7.14. Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Sosio-Budaya

Untuk menjaga nilai-nilai luhur budaya lokal sebagai ciri khas pengembangan dan eksistensi budaya bangsa yang menjadi perilaku manusia dan masyarakat dalam segenap aspek kehidupan. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, seperti Istana Kuning dibangun pada jaman sultan ke IX Pangeran Ratu Imanudin terletak di Desa Raja, Kecamatan Arut Selatan, Istana Mangkubumi dibangun pada masa kerajaan Pangeran Ratu Anum Kesumayuda berada di Kecamatan Arut Selatan dan Astana Al-Nursari dibangun oleh Pangeran Paku Sukma Negara di Kecamatan Kotawaringin Lama.

7.7.15. Kawasan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Pengelolaan kawasan lindung dan kritis diarahkan untuk menjaga keseimbangan ekologi sebagai kawasan resapan air dan pengendali banjir, meliputi Taman Nasional Tanjung Puting, *Catchment Area* DAS Arut, *Catchment Area* DAS Kumai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan Strategis Nasional, Taman Nasional Tanjung Puting merupakan kawasan strategis nasional Kabupaten Kotawaringin Barat, merupakan habitat orang utan yang sangat dipertahankan sebagai binatang langka. Selain itu, kawasan Tanjung Puting memiliki kepentingan untuk kegiatan penelitian sains.

Sebagai daerah konservasi alam dan lingkungan hidup, maka yang dipertahankan bukan hanya binatangnya saja, melainkan kawasan hutan sebagai habitatnya juga harus dipertahankan untuk menjaga ekosistem lingkungan dan sumber daya airnya.

7.7.16. Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam yaitu di Kawasan Andalan Laut seluas (156 Km x 4 mil) yang berada di perairan laut sepanjang garis pantai.

7.8 Struktur Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat

7.8.1 Rencana Pengembangan Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

Rencana pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat mengatur susunan pusat-pusat kegiatan yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang hirarkis memiliki hubungan fungsional.

7.8.1.1 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kabupaten Kotawaringin Barat

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan pusat kegiatan permukiman perkotaan dengan hirarki pelayanan skala regional/kecamatan (hirarki I), terletak di Kota Pangkalan Bun yang merupakan Ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat dengan arahan pengembangan kegiatan utama yaitu sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik, perekonomian dan regional, pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa, pusat jasa pendukung kegiatan perekonomian (pengolahan dan pemasaran). Sedangkan untuk kegiatan penunjang utama sebagai pusat kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, dan permukiman.

7.8.1.2 Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Kabupaten Kotawaringin Barat

Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) merupakan pusat permukiman perkotaan dengan skala pelayanan kecamatan (hirarki II) dengan orientasi kegiatan berupa pemerintahan, perdagangan dan jasa, pelayanan masyarakat dan lain-lain. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ini terletak di ibukota Kecamatan terutama Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.

7.8.1.3 Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kabupaten Kotawaringin Barat

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman/kegiatan dengan skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan (hirarki III) dengan arahan pengembangan dan pelayanan sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimilikinya. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Ibukota Kecamatan (IKK) Pangkalan Banteng kawasan ini diharapkan menjadi kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai pusat produksi pertanian dan perkebunan (*agropolitan area*) dengan skala pelayanan beberapa kecamatan serta menunjang kota dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana pengembangan wilayah lebih rendah dari Pusat Kegiatan Lokal.

7.8.1.4 Pusat Pelayanan Kawasan Promosi (PPKp) Kabupaten Kotawaringin Barat

Pusat Pelayanan Kawasan promosi (PPKp) merupakan pusat permukiman/kegiatan ditingkatkan menjadi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan (hirarki III) dengan arahan pengembangan dan pelayanan sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimilikinya, Pusat Pelayanan Kawasan promosi (PPKp) meliputi Desa Runtu Kecamatan Arut Selatan dan Desa Teluk Bogam di Kecamatan Kumai.

7.8.1.5. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kabupaten Kotawaringin Barat

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman/kegiatan dengan skala desa/kelurahan atau beberapa kampung (hirarki IV) dengan arahan pengembangan skala pelayanan sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimilikinya. Pusat pengembangan kegiatan terletak di seluruh pusat desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.

7.8.1.6 Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan

Untuk kebutuhan pengembangan fasilitas perkotaan dibagi berdasarkan sistem perkotaan antara lain sebagai berikut :

- A. Untuk PKW kebutuhan pengembangan fasilitas perkotaan :
 - 1) Pengembangan jalan arteri primer.
 - 2) Pengembangan prasarana lingkungan.
 - 3) Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa.
 - 4) Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
 - 5) Pengembangan kawasan pariwisata.
- B. Untuk PKLp kebutuhan pengembangan fasilitas perkotaan :
 - 1) Pengembangan jalan arteri sekunder.
 - 2) Pengembangan dan perbaikan jalan akses ke PPK.
 - 3) Pengembangan fasilitas lingkungan.
 - 4) Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa.
 - 5) Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
 - 6) Pengembangan industri.
 - 7) Optimalisasi pelabuhan Kumai.
 - 8) Pengembangan fasilitas agropolitan area.
- C. Untuk PPK kebutuhan pengembangan fasilitas perkotaan :
 - 1) Pengembangan fasilitas lingkungan.
 - 2) Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa.
 - 3) Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
 - 4) Pengembangan fasilitas agropolitan area.
- D. Untuk PPKp kebutuhan pengembangan fasilitas perkotaan :
 - 1) Pengembangan fasilitas lingkungan.
 - 2) Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa.
 - 3) Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
 - 4) Pengembangan fasilitas agropolitan area.
- E. Untuk PPL kebutuhan pengembangan fasilitas perkotaan :
 - 1) Pengembangan fasilitas lingkungan.
 - 2) Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
 - 3) Pengembangan fasilitas agropolitan area.

8. **Demografi**

Aspek kependudukan dalam proses pembangunan berperan penting utamanya dalam meningkatkan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sepanjang kualitas penduduk memenuhi persyaratan dalam meningkatkan produktivitas.

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2011 sebesar 244.900 jiwa, tahun 2012 berjumlah 253.000, pada tahun 2013 berjumlah 261.200 jiwa dan pada akhir tahun 2014 berjumlah 269.629 jiwa, yang tersebar di 81 desa dan 13 Kelurahan dan 6 kecamatan. Pada tahun 2014, dari jumlah penduduk tersebut sebesar 41,41% penduduk berada di Kecamatan Arut Selatan atau berjumlah 111.658 jiwa, Kecamatan Kumai (19,48% atau berjumlah 52.534 jiwa), Kecamatan Pangkalan Banteng (14% atau berjumlah 37.231 jiwa), Kecamatan Pangkalan Lada (11,72% atau berjumlah 31.589 jiwa), Kecamatan Kotawaringin Lama (6,93% atau berjumlah 18.695 jiwa), Kecamatan Arut Utara (6,65% atau berjumlah 17.922 jiwa).

Secara demografis, peningkatan atau penurunan jumlah penduduk pada dasarnya tergantung pada kelahiran, kematian dan migrasi. Faktor kelahiran dan kematian biasa disebut dengan faktor-faktor alamiah, sedangkan arus masuk dan keluar yang disebut dengan migrasi. Dengan mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat selama Tahun 2011-2014 menandakan bahwa faktor migrasi penduduk merupakan variabel penting dalam mempengaruhi penambahan penduduk. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat selama periode 2011-2014 tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 3,23 persen.

Tabel 2.7

Jumlah Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan Tahun 2011 – 2014

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Kec. Kotawaringin Lama	16.796	17.321	17.777	18.232	18.695
2.	Kec. Arut Selatan	98.406	101.999	105.176	108.378	111.658
3.	Kec. Kumai	46.544	48.176	49.612	51.056	52.534
4.	Kec. Arut Utara	15.528	16.167	16.740	17.323	37.231
5.	Kec. Pangkalan Banteng	30.597	32.309	33.890	35.525	31.589
6.	Kec. Pangkalan Lada	27.934	28.928	29.804	30.686	17.922
	Kab. Kotawaringin Barat	235.803	244.900	253.000	261.200	269.629

Sumber data : Penduduk Kotawaringin Barat 2015

Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kerja optimal masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah maupun Nasional. Kinerja pembangunan daerah yang di lihat dari 3 aspek, yaitu :

- 1) Aspek Kesejahteraan masyarakat;
- 2) Aspek Pelayanan Umum; dan
- 3) Aspek Daya Saing Daerah

Konsep pembangunan tahun 2017 akan diarahkan pembangunan dengan pendekatan keterpaduan program. Keberhasilan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat secara makro dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi yang selalu tumbuh di atas rata-rata provinsi dan nasional, yakni pada tahun 2011 tumbuh 7,56%. Tahun 2012 tumbuh 6,70%, tahun 2013 tumbuh 6,96%, pada tahun 2014 6,95%, tahun 2015 tumbuh 6,95%-6,98% dan pada tahun 2016 diproyeksikan tumbuh sebesar 6,98% - 7,01%.
2. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp 33,32 juta, tahun 2012 sebesar 36,24 juta rupiah dan tahun 2013 sebesar 39,41 juta rupiah serta tahun 2014 diperkirakan sebesar 43,70 juta rupiah, tahun 2015 47,84 juta rupiah dan tahun 2016 diproyeksikan sebesar 52,42 juta rupiah.
3. Laju Inflasi Kota Pangkalan Bun tahun 2011 laju inflasi sebesar 5,58%, tahun 2012 sebesar 3,99%, dan tahun 2013 sebesar 6,29%. Pada tahun 2014 laju inflasi sebesar 7,97%, tahun 2015 4,08% dan tahun 2016 diproyeksikan inflasi di kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 3,00%.
4. Tingkat Kemiskinan secara perlahan mengalami penurunan selama kurun waktu 4 tahun terakhir (2011-2014). Jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin sebesar 14.910 jiwa atau sebesar 6,19%, tahun 2012 sebesar 5,64 atau 14.410 jiwa, tahun 2013 sebesar 5,44 atau 14.300 Jiwa. Pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 4,94%, tahun 2015 diperkirakan sebesar 4,64% dan tahun 2016 diproyeksikan tingkat kemiskinan di kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 4,35%.
5. Tingkat pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu tahun 2011-2014 juga mengalami penurunan. Pada tahun 2011 tingkat pengangguran sebesar 2,81%, tahun 2012 sebesar 2,36% dan tahun 2013 sebesar 2,47%. Pada tahun 2014 sebesar 1,86%, tahun 2015 dibawah 2% dan tahun 2016 diproyeksikan tingkat pengangguran di kabupaten Kotawaringin Barat dipertahankan dibawah 2%.

212 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari dua fokus, yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. Aspek Kesejahteraan Masyarakat secara makro dapat dilihat dari Indek Pembangunan Manusia, yang merupakan analisis komposit dari angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.8
Indek Pembangunan Manusia (IPM)
Kotawaringin Barat Tahun 2012-2014

No.	Variabel	2012	2013	2014
1.	Angka harapan hidup (tahun)	69,60	69,68	69,77
2.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,29	11,90	12,12
3.	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,49	7,58	7,82
4.	Pengeluaran per kapita (Rpx 1000)	11.807	11.857	11.908
5.	Indeks Pembangunan manusia	68,63	69,51	70,14
6.	Peringkat di Kalteng	2	2	2

Sumber : BPS, 2015

Perkembangan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotawaringin Barat selalu menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2012 sampai dengan 2013, dari 68,63 menjadi 70,14.

Disamping itu aspek kesejahteraan dilihat dari indikator ekonomi yang selalu tumbuh di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah dan rata-rata nasional, pada tahun 2012 tumbuh 6,70%. Tahun 2013 pertumbuhan mencapai 6,96%, dan pada tahun 2014 sebesar 6,95%, tahun 2015 diperkirakan sebesar 6,95-6,98%. dan tahun 2016 diproyeksikan sebesar 6,98-7,01%.

Perkembangan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat, menunjukan transformasi dari sektor primer (sektor pertanian) ke sektor sekunder yaitu industri dan sektor tersier berupa perdagangan dan jasa.

Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat masih didominasi oleh 3 sektor andalan yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi terbesar yaitu 28,63% persen, sektor industri pengolahan 25,28% serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 11,82%.

Tabel 2.9
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kotawaringin Barat
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014

No.	Sektor	PDRB (Jutaan Rp.)	Kontribusi (%)
1	2	3	4
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.373.465,74	28,63
2	Pertambangan dan Penggalian	166.619,72	1,41
3	Industri Pengolahan	2.978.467,82	25,28
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.192,24	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.181,77	0,09
6	Konstruksi	986.688,59	8,37
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.392.026,03	11,82
8	Transportasi dan Pergudangan	921.626,23	7,82
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	144.358,24	1,23
10	Informasi dan Komunikasi	116.329,32	0,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	602.773,60	5,12

12	Real Estate	201.975,11	1,71
13	Jasa Perusahaan	5.732,51	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	375.913,97	3,19
15	Jasa Pendidikan	263.344,70	2,24
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	130.909,94	1,11
17	Jasa Lainnya	106.819,20	0,91
	TOTAL PDRB	11.781.424,82	

Sumber : BPS, 2015

Kinerja ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat yang memberikan kontribusi ekspor Kotawaringin Barat Tahun 2013 sebesar US\$ 151.555,166 atau bila dibandingkan dengan total ekspor Kalteng, maka 91,35% berasal dari Kabupaten Kotawaringin Barat. Tabel Ekspor dan impor dapat dilihat pada tabelberikut :

Tabel 2.10
Ekspor dan Impor Kabupaten Kotawaringin Barat (US \$)

Tahun	Ekspor	Impor	Surplus
2010	317.918,961	13.171.920	304.747,041
2011	403.145,168	23.731.256	379.413,908
2012	376.205,730	25.928.102	350.277,630
2013	151.555,166	16.059.272	135.495,894
2014	189.439.156	27.109.608	162.329.548

Sumber : BPS, 2015

Rincian masing-masing fokus tersebut dibahas pada bagian dibawah ini :

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data PDRB ini menggambarkan jumlah produk nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi, jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga, lembaga swasta, konsumsi pemerintah, dan perubahan ekspor *netto* dari satu daerah.

a. Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh *stake holder*, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat menuju kepada keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup masyarakat.

Perekonomian Kotawaringin Barat pada tahun 2014 sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014 mencapai 6,95%, sedangkan tahun 2013 mencapai 6,96%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 16,79%, disusul oleh kategori Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 13,88%. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh 7,12% dan hanya kategori pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan sebesar 13,20%.

Struktur ekonomi yang dibangun oleh berbagai sektor lapangan usaha akan bergerak menjadi kekuatan ekonomi. Lapangan usaha dengan NTB terbesar akan menjadi tulang punggung perekonomian suatu daerah. Semakin besar NTB suatu lapangan usaha maka akan semakin besar pula tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap lapangan usaha ekonomi tersebut.

Struktur perekonomian di Kotawaringin Barat didominasi oleh tiga kategori, yaitu kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; kategori Industri Pengolahan serta kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor. Pada tahun 2014, ketiga kategori ini memberikan kontribusi sebesar 65,73% dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari ketiga kategori yang mendominasi struktur perekonomian, kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 28,63%, diikuti oleh kategori Industri Pengolahan sebesar 25,28%, serta kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor sebesar 11,82%. Melihat besarnya kontribusi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa ekonomi Kotawaringin Barat masih bergantung pada sumber daya alam. (*resource based*)

b. Pendapatan Perkapita

Peningkatan pendapatan yang tinggi merupakan salah satu ukuran terhadap peningkatan pendapatan dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Besarnya pendapatan masyarakat ini didekati dengan PDRB per kapita. PDRB per kapita dihitung dengan membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita maka laju pertumbuhan ekonomi haruslah lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2010 sampai dengan 2014 terus mengalami peningkatan, baik PDRB per kapita ADHB maupun PDRB per kapita ADHK. PDRB per kapita ADHB tahun 2014 sebesar 43,70 juta rupiah sedangkan PDRB per kapita ADHK sebesar 43,70 juta rupiah. Hal ini bisa memberikan gambaran bahwa rata-rata pendapatan satu

orang penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 adalah sebesar 40,37 juta rupiah.

c. Laju Inflasi

Inflasi adalah angka gabungan dari perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan dianggap mewakili seluruh barang dan jasa yang dijual dipasar.

Laju Inflasi Kota Pangkalan Bun tercatat naik dari 3,99 persen di tahun 2012 menjadi 6,29 persen di tahun 2013, tahun 2014 menjadi 7,97 persen dan pada tahun 2015 sebesar 4,08 persen.

d. Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotawaringin Barat No.7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 s/d 2016 dijelaskan bahwa Aspek-aspek internal yang menjadi faktor kekuatan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- Tingkat pendidikan dan wawasan aparat pemerintah yang semakin meningkat terhadap kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara tercermin diantara dari jumlah peserta pemilu yang meningkat.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotawaringin Barat cukup tinggi yaitu sebesar 68,39.
- Anggaran bidang pendidikan telah mencapai 23%.
- Angka partisipasi pendidikan dasar sudah cukup tinggi hingga mencapai 92,23%.
- Anggaran daerah untuk pendidikan telah mencapai 23%.
- Pertumbuhan ekonomi berada diatas rata-rata provinsi.
- Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan makin meningkat.
- Pemahaman masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat makin baik, antara lain tercermin dari keberhasilan daerah meraih adipura selama tiga tahun berturut-turut.
- Sektor pertanian komoditas jagung menunjukkan prospek yang cukup menggembirakan
- Sektor perkebunan juga cukup baik pertumbuhannya, terutama untuk komoditas kelapa sawit.
- Potensi wilayah yang sangat mendukung untuk perkembangan pertanian lahan kering.
- Sektor pariwisata dan perikanan yang belum tergali secara optimal adalah sumber pendapatan yang potensial.

Sedangkan aspek-aspek eksternal yang menjadi faktor peluang bagi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- Semakin beragamnya media informasi yang dapat dipergunakan untuk mensosialisasikan berbagai pedoman tentang demokrasi, berbangsa dan bernegara.
- Kondisi stabilitas politik, ekonomi dan keamanan nasional dapat mempengaruhi pelaksanaan kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara yang menunjang persatuan dan kesatuan.
- Kepedulian kalangan pihak swasta (usaha, industri) dan lembaga Perguruan Tinggi terhadap pengembangan pendidikan semakin besar terutama dalam bentuk kerjasama.
- Adanya organisasi profesi yang memiliki komitmen terhadap pendidikan.
- Meningkatnya kepedulian dan kerjasama dari pihak perguruan tinggi, industri obat-obatan, dan LSM Kesehatan Nasional dalam permasalahan kesehatan dan pengembangan kesehatan.

Kotawaringin Barat memiliki posisi strategis, yang secara Geografis terletak ditengah-tengah kepulauan Nusantara dan diapit dua Alur Laut Kepulauan Indonesia serta memiliki potensi Sumber Daya Alam yang besar untuk dipromosikan dan dijual ke pasar berskala Regional maupun Internasional khususnya pada sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan laut dan darat serta *eco-cultural tourism* yang didasarkan atas keunikan aneka ragam budaya-budaya lokal dan keanekaragaman hayati, yang menjadikannya sebagai potensi daerah yang layak untuk dikembangkan.

Potensi unggulan daerah dapat diartikan sebagai sumber daya baik alam maupun buatan yang terkandung dalam suatu wilayah yang memiliki nilai bobot lebih dan diperkirakan dapat menjadi komoditas unggulan daerah sehingga dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Potensi unggulan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan dapat menciptakan peluang investasi yang menghasilkan komoditas unggulan daerah, sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Potensi Unggulan Daerah ditentukan atas dasar pertimbangan dan kriteria :

- 1) Komoditas yang diunggulkan merupakan motor penggerak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Mencerminkan potensi sumber daya alam dan secara ekonomi;
- 3) Memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan sektor lainnya;
- 4) Mampu menciptakan peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja lokal;
- 5) Memiliki keramahan lingkungan dan efek kerusakan yang kecil terhadap alam.

Sehingga dapat dirumuskan sektor yang menjadi peringkat unggulan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

- (1) Pertanian dalam arti luas,
- (2) Perdagangan,
- (3) Industri pengolahan,
- (4) Jasa-jasa dan Pengangkutan, dan

(5) Komunikasi.

Pada peringkat sektor tersebut, hanya pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan yang menjadi sektor basis.

Sedangkan dari hasil analisa berbagai aspek internal yang menjadi faktor kekuatan dan aspek eksternal yang menjadi faktor peluang serta sektor-sektor yang menjadi peringkat unggulan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat, maka ditetapkanlah Produk Unggulan Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 520/06/Bapp-III/2016.

Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi :

- (1) Crude Palm Oil (CPO)
- (2) Krupuk Amplang,
- (3) Ekowisata, dan
- (4) Daging sapi potong.

Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tersebut diatas merupakan produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, sehingga mampu menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong untuk memasuki pasar global.

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi pengembangan ekonomi yang sangat tinggi. Hal ini selain terlihat dari potensi sumber daya alamnya yang melimpah, juga dibuktikan dengan pertumbuhan ekonominya yang selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut ditopang oleh beberapa sektor yang memberikan kontribusi cukup signifikan melalui komoditi/produk/jenis usaha unggulannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) unggulan di Kabupaten Kotawaringin Barat telah ditetapkan sejumlah KPJU yang telah unggul dalam sejumlah kriteria tertentu dalam mencapai tujuan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing serta pertumbuhan ekonomi di masa datang, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.11
Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan
Di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	KPJU	Skor Terbobot	No.	KPJU	Skor Terbobot
	Pertanian/ Tanaman Pangan			Pertambangan dan Bahan Galian	
1.	Padi Sawah	0,313	1.	Emas	0,324
2.	Jagung Manis	0,226	2.	Batu Gunung	0,213
3.	Kacang Tanah	0,216	3.	Pasir Zirkon	0,174

No.	KPJU	Skor Terbobot	No.	KPJU	Skor Terbobot
4.	Ubi Kayu	0,127	4.	Tanah Urug	0,157
5.	Ubi Jalar	0,118	5.	Pasir Batu	0,132
Pertanian/ Hortikultura			Industri Pengolahan		
1.	Sawi	0,405	1.	Amplang	0,344
2.	Pisang	0,201	2.	Roti	0,268
3.	Kacang Panjang	0,184	3.	Kue Jajanan	0,160
4.	Nangka	0,109	4.	Batako	0,122
5.	Rambutan	0,101	5.	Batu Bata	0,106
Pertanian/ Perkebunan			Perdagangan		
1.	Kelapa Sawit	0,358	1.	Pakaian Jadi	0,233
2.	Karet	0,320	2.	Ikan	0,232
3.	Kelapa (dalam)	0,132	3.	Toko Sembako	0,182
4.	Lada	0,126	4.	Emas	0,177
5.	Jabon	0,064	5.	Sayuran	0,176
Pertanian/ Peternakan			Pariwisata, Hotel dan Restoran		
1.	Sapi Pedaging	0,389		Warung Kopi	0,308
2.	Ayam Ras Pedaging	0,344		Hotel (melati)	0,231
3.	Ayam Buras	0,122		Wisata Alam	0,208
4.	Walet	0,088		Rumah Makan	0,156
5.	Entog (itik)	0,058		Losmen	0,097
Pertanian/ Perikanan			Transportasi		
1.	Ikan Nila (kolam)	0,258	1.	Angkutan Barang	0,306
2.	Ikan Mas (kolam)	0,220	2.	Angkutan Antar Kota	0,263
3.	Ikan Patin (kolam)	0,219	3.	Taksi	0,157
4.	Ikan Lela Dumbo (kolam)	0,158	4.	Angkutan Kota	0,145
5.	Kerang (tangkap)	0,145	5.	Speed Boat	0,129
Kehutanan (non kayu)			Konstruksi dan Jasa Usaha		
1.	Rotan	0,321	1.	Tukang Batu	0,263
2.	Kayu Gembor	0,227	2.	Tukang Bangunan	0,245
3.	Nipah	0,202	3.	Bengkel Motor	0,225
4.	Gaharu	0,168	4.	Jasa Cuci Mobil	0,198
5.	Damar	0,081	5.	Buruh Harian	0,069

Sumber : Penelitian Pengembangan KPJU Unggulan oleh Bank Indonesia Th.2013

Dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan serta titik kekuatan dan titik kritis terhadap KPJU unggulan maka telah direkomendasikan beberapa masukan sebagai berikut :

a. Padi Sawah

Rekomendasi bagi pelaku UMKM dengan menggunakan varietas atau bibit unggul yang sesuai dengan kondisi alam setempat, sehingga hasil yang akan diperoleh akan lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi. Selain itu dapat pula dengan membranding beras sendiri dengan gaya yang lebih baik. Bagi Instansi Pemerintah Terkait dengan memberikan bantuan modal dan teknologi modern, serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang budidaya padi sawah.

b. Karet

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah meningkatkan kualitas dengan penggunaan bibit berkualitas dan proses pemeliharaan yang baik. Selain itu membentuk klaster karet dan asosiasi petani karet. Bagi Instansi Pemerintah Terkait upaya yang dapat ditempuh dengan peningkatan transparansi harga, penguatan teknologi dan inovasi di setiap lini produk. Selain itu pendirian pabrik pengolahan karet di wilayah yang belum tersedia serta proyek pengadaan industri karet setengah jadi sehingga tidak menjual bahan mentah saja. Bagi perbankan pendirian perbankan pada setiap kecamatan yang belum tersedia, sehingga mempermudah akses permodalan.

c. Kelapa Sawit

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah meningkatkan kualitas produk. Penting sekali bagi pembudidaya dalam memperhatikan bibit yang digunakan berkualitas atau tidak. Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah menyediakan bibit unggul, pengembangan bibit unggul bersama pelaku UMKM secara mandiri, pengadaan pabrik pengolahan sawit di wilayah yang belum tersedia, peningkatan pelatihan sosialisasi teknik budaya. Bagi Perbankan dengan meningkatkan kemudahan akses permodalan, dan sosialisasi besaran kredit pembiayaan.

d. Sapi Pedaging

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah mengembangkan agribisnis pembibitan sapi potong, pemanfaatan sumber daya lokal potensial yang ada di lokasi usaha yang tersedia dengan mudah dan harga murah, mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan budidaya. Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah memfasilitasi dan advokasi terutama dalam dukungan modal, inovasi teknologi, pembinaan kepada petani terkait teknik pembibitan serta manajemen usaha, dan mendatangkan sapi betina untuk pembibitan sapi. Bagi Perbankan dengan pemberian bantuan modal.

e. Ayam Ras Pedaging

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah dengan pengadaan bibit dan pakan secara mandiri. Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah dengan pembinaan

dan pelatihan untuk pembibitan ayam potong dan pembuatan pakan yang baik, berkualitas, efektif dan efisien dalam pembiayaan. Bagi perbankan adalah mempermudah akses permodalan yaitu dengan membangun jaringan perbankan di lokasi-lokasi yang belum tersedia.

f. Ikan Patin (kolam)

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah meningkatkan kualitas produk dan membangun pembibitan patin. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan penggunaan bibit unggul, efisiensi dalam proses budidaya, baik dalam pembuatan kolam, pengawasan kualitas air, proses pengiriman yang sesuai standar serta melakukan inovasi produk olahan dari ikan patin. Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah pemberian pelatihan dan pembinaan dalam pembibitan ikan patin dan teknik budidaya yang baik, efisien dan berdaya hasil maksimal. Bagi perbankan dengan memberikan bantuan kredit syari'ah dalam pengembangan usaha budidaya maupun pembibitan patin.

g. Ikan Nila (kolam)

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah menekan biaya produksi dengan mencari alternatif bahan baku yang lebih murah namun tetap berkualitas.

Hal tersebut dapat pula ditempuh dengan membuat pakan secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Selain itu dapat pula memasuki segmen pasar baru serta meningkatkan cakupan distribusinya, meningkatkan produk olahanyang bervariasi dan berdaya saing. Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah dukungan modal dan inovasi teknologi terutama dalam pembuatan pakan ikan, pembinaan dan pelatihan kepada petani terkait teknik budidaya dan pengolahan pakan. Bagi perbankan dengan menyediakan fasilitas pinjaman tanpa bunga dapat menjadi solusi bagi petani ikan agar memudahkan mereka dalam pembudidayaan.

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain dapat dilihat pada uraian berikut ini :

a. Pendidikan

Kelengkapan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat ditunjukkan dengan keberadaan sarana pendidikan yang ada, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Distribusi dari masing-masing jenis fasilitas pendidikan di setiap kecamatan pada umumnya cukup merata, kecuali untuk perguruan tinggi yang hanya terdapat di ibu kota Kabupaten. Adapun kondisi kegiatan pendidikan yang dirinci menurut tingkatan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12
Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014/2015

No	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1.	SD	195	1,887	33.028
5.	SMP	67	932	12.382
8.	SMA	28	505	8.358
10.	SMK	15	94	4.309
Jumlah		305	3.418	58.077

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015

i) Angka Melek Huruf

Persentase penduduk yang melek huruf di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tabel diatas mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011, yaitu dari 94,52% menjadi 97,00 % pada tahun 2015. Indikator-indikator tersebut menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah.

Tabel 2.13
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011-2015
Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka melek huruf (%)	94,52	92,67	91,54	96,12	97,00

Sumber Data : Dinas Dikpora, 2015.

Pencapaian kinerja Urusan Pendidikan yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan dibidang pendidikan sebagai berikut :

- 1) Meskipun pada data terjadi penurunan APK dan APM, tetapi pada kenyataannya terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk mensukseskan wajib belajar. Adapun data tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14
Persentase APK dan APM Tahun 2013 - 2015

JENJANG	APK (%)			APM (%)		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
SD/MI	106,95	117,35	118,14	92,83	98,60	98,79
SMP/MTS	97,56	95,89	98,88	84,60	80,92	86,60
SMA/MA/SMK	77,88	87,59	87,59	75,32	74,03	75,06

Sumber : Disdikpora Kab. Ktw. Barat Tahun 2014 dan data diolah

- 2) Kinerja Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Tahun Ajaran (TA) 2011/2012 melalui rintisan sekolah gratis, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di setiap Kecamatan, baik PAUD, SD, SLTP dan SMA/SMK. Kinerja pelayanan pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2.15
Kinerja Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Tahun 2014 dan 2015

No.	Jenjang/ Indikator Kinerja	2014	2015
I. Pendidikan Dasar			
1	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	185,00	162,09
2	Rasio Guru/ Murid	1 : 32	1 : 21
II. Pendidikan SMP/MTS			
1	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	310,12	123,00
2	Rasio Guru/ Murid	1:28	1 : 19
III. Pendidikan SMA/MA/SMK			
1	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	660,15	326,00
2	Rasio Guru/ Murid	1:28	1 : 14

Sumber : Disdikpora Kab. Ktw. Barat Tahun 2015

- 3) Tingkat kelulusan tiap jenjang pendidikan Tahun 2015 secara umum mengalami kenaikan dibandingkan 2014 sebagai terutama jenjang pendidikan dasar sedangkan jenjang pendidikan menengah mengalami penurunan, uraian secara lengkap pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Angka kelulusan Tiap Jenjang Pendidikan Tahun 2014 dan 2015

No.	Jenjang Pendidikan	2014 (%)	2015 (%)
I. Pendidikan Dasar			
1	SD/MI	98,92	100
2	SMP/MTS	99,58	100
III. Pendidikan Menengah			
1	SMA /MA/SMK	99,09	73,71

Sumber : Disdikpora Kab. Ktw. Barat Tahun 2015

- 4) Angka putus sekolah tiap jenjang pendidikan Tahun Ajaran 2015 secara umum mengalami penurunan bila dibandingkan Tahun Ajaran 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.17
Angka Putus Sekolah Tiap Jenjang Pendidikan Tahun 2014 dan 2015

No.	Jenjang Pendidikan	2014 (%)	2015 (%)
1	SD/ MI	0,20	0,21
2	SMP/ MTS	1,19	0,40
3	SMA/ MA/ SMK	1,60	1,10

Sumber : Disdikpora Kab. Ktw. Barat Tahun 2014

- 5) Untuk pencapaian SPM memang belum dapat di penuhi secara maksimal, karena berbagai macam faktor, antara lain faktor anggaran, letak geografis yang terpencil,

jumlah penduduk dan akses jalan yang belum terbuka luas. Namun kami tetap berusaha meningkatkan pemenuhan SPM dengan cara menjadikan prioritas kegiatan di tahun anggaran berikutnya.

ii) Kesehatan

Capaian keberhasilan Urusan Kesehatan berdasarkan kinerja output dan outcome yang mendukung pencapaian keberhasilan di bidang kesehatan adalah :

- 1) Selama tahun 2015 kunjungan RSUD Sultan Imanuddin sebanyak 97.081 orang atau meningkat sebesar 9,06% dibandingkan tahun 2014 dengan total kunjungan sebanyak 89.020 orang;
- 2) Pendapatan RSUD Sultan Imanuddin melalui retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 63.256.230.897,- melebihi target yang telah ditetapkan Rp.60.000.000.000,- (105,43%). Pendapatan tahun 2015 meningkat 66,41% dibandingkan pendapatan tahun 2014 sebesar Rp. 38.011.259.957,-.
- 3) Pada tahun 2015 dilaksanakan survey kepuasan masyarakat/pelanggan RSUD Sultan Imanuddin terhadap 600 responden yang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Antakusuma Pangkalan Bun dengan hasil survey kepuasan 99,83% menyatakan puas (92,83% menyatakan puas, 7% menyatakan sangat puas) dan 0,17% menyatakan kurang puas;
- 4) Ketersediaan tenaga dokter umum sebanyak 12 orang, dan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin pada tahun 2015, berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 21 orang PNS, 3 orang tenaga kontrak dan 1 orang tenaga mitra, dengan rincian sebagai berikut :
 - i. **Dokter spesialis bedah : 2 orang berstatus PNS;**
 - ii. **Dokter spesialis kandungan : 3 orang berstatus PNS;**
 - iii. **Dokter spesialis anak : 2 orang berstatus PNS dan 1 orang kontrak;**
 - iv. **Dokter spesialis penyakit dalam : 3 orang berstatus PNS;**
 - v. **Dokter spesialis Syaraf : 1 orang (PNS);**
 - vi. **Dokter spesialis THT-KL : 1 orang (PNS);**
 - vii. **Dokter spesialis Mata : 1 orang (PNS);**
 - viii. **Dokter spesialis Anastesi : 2 orang (1 orang PNS dan 1 orang tenaga mitra);**
 - ix. **Dokter spesialis Radiologi : 1 orang (PNS);**
 - x. **Dokter spesialis Patologi Klinik : 3 orang (PNS);**
 - xi. **Dokter spesialis Kesehatan Jiwa : 1 orang (tenaga kontrak);**
 - xii. **Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin : 1 orang (PNS).**
 - xiii. **Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik : 1 orang (PNS).**
 - xiv. **Dokter Gigi Spesialis Orthodontis : 1 orang (PNS); dan**
 - xv. **Dokter Spesialis Orthopedic : 1 orang tenaga kontrak.**
- 5) Tingkat mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Sultan Imanuddin sesuai dengan SPM, dari 172 indikator yang mencapai target sebanyak 148 indikator (86,04%);

- 6) Pencapaian Indikator tingkat pemanfaatan, mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit sebagai berikut :
- Bed Occupancy Rate (BOR)* : 77,00% (ideal 60-85%);
 - Average Length of Stay (Av LOS)* : 3,54 hari (ideal 6-9 hari);
 - Bed Turn Over (BTO)* : 79,34 kali (ideal 40-50 kali);
 - Turn Over Interval (TOI)* : 1,06 hari (ideal 1-3 hari);
 - Net Death Rate (NDR)* : 1,44% (nilai yang masih ditolerir 25 perseribu);
 - Gross Death Rate (GDR)* : 3,48% (seyogyanya tidak lebih dari 45 perseribu).

iii) Tenaga Kerja

Lapangan pekerjaan formal yang tersedia belum mampu menyerap sepenuhnya tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dilihat dari jenisnya, lapangan pekerjaan yang tersedia masih didominasi sektor informal seperti nelayan, petani, penambang tradisional dan sebagainya. Mengenai tenaga kerja serta tingkat pendidikan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.18
Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1.	Bekerja	117.762	122.307	133.222
2.	Sekolah	11.158	15.141	17.465
3.	Mengurus Rumah Tangga	35.276	39.732	35.398
4.	Lainnya	3.421	5.886	5.446
	Jumlah	167.617	183.066	191.531

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2015

Pada tahun 2014 dengan bertambahnya jumlah Angkatan Kerja (AK) sebanyak 136.864 jiwa, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,66 % lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 seperti yang tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.19
Kondisi Angkatan Kerja (AK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2012 – 2014

No.	Tahun	Angkatan Kerja/ AK (Jiwa)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) %	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %
5.	2012	120.613	70,75	97,64	2,36
6.	2013	126.935	67,62	96,35	3,65
7.	2014	136.864	70,05	97,34	2,66

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015

Adapun jumlah pencari kerja, lowongan dan penempatan tenaga kerja adalah sebagaimana tertera pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.20
Statistik Pasar Kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat 2012 – 2014

No.	Aktivitas	2012	2013	2014
1.	Pendaftaran	909	2.063	2.379
2.	Permintaan	367	367	522
3.	Pengiriman	294	261	510
4.	Penempatan	294	207	510
5.	UMK (Rp)	1.401.101	1.538.244	1.789.066

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015

m) Kemiskinan

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.21
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin (%)	Penduduk Miskin (000 jiwa)
2009	186.618	7,76	19,6
2010	212.060	6,87	17,8
2011	238.987	6,19	16,5
2012	268.998	5,64	14,1
2013	273.467	5,44	14,3

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015

3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Selanjutnya penyajian pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.22
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 – 2014

No	Tahun	Jumlah grup kesenian	Jumlah gedung kesenian	Jumlah klub olahraga	Jumlah gedung olahraga
----	-------	----------------------	------------------------	----------------------	------------------------

1	2011	35	3	60	7
2	2012	43	3	77	7
3	2013	43	3	68	8
4	2014	43	3	68	8

21.3 Aspek Pelayanan Umum

1. Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Pendidikan

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 2.22 berikut :

Tabel 2.23

**Kondisi Sarana dan Prasarana pendidikan
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 – 2015**

No.	Uraian	Tahun	
		2014	2015
1.1	Pendidikan dasar		
	SD/MI		
1.1.1	Perbandingan guru dan siswa SD/Mts	1:32	1 : 21
	SMP/MTs		
1.1.2	Perbandingan guru dan siswa SMP/Mts	1:28	1 : 19
1.2	Pendidikan Menengah		
1.2.1	Rasio guru terhadap murid	1:28	1 : 14
1.3	Fasilitas Pendidikan		
1.3.1	Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	80,26	33,05
1.3.2	Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	87,73	52,78
1.3.3	Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	82,00	88,00
1.4	Angka Putus Sekolah		
1.4.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,20	0,20
1.4.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	1,10	0,40
1.4.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	1,60	1,10
1.5	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		
1.5.1	Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	52,94	97,08
1.5.2	Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	91,34	95,56
1.5.3	Guru SMA/SMALB/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	77,16	95,56

b. Kesehatan

1) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Untuk menghitung rasio posyandu per satuan balita dapat disusun tabel sebagai berikut :

Tabel 2.24

Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2010 – 2014 di Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah posyandu	170	174	174	176	176
2.	Jumlah balita	33.210	25.248	16.655	-	-
3.	Rasio	5,12	6,89	6,89	-	-

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 dan BPS 2015

2) Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pusekesmas Pembantu (Pustu)

Tabel 2.25

Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2010 - 2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Puskesmas	15	15	15	15	17
2.	Jumlah Poliklinik/R.Bersalin/B. Pengobatan	16	16	16	16	16
3.	Jumlah Pustu	72	72	75	75	75
4.	Jumlah Penduduk	241.383	244.900	253.000	261.200	269.629
5.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
6.	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
7.	Rasio Pustu persatuan penduduk	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28

Sumber : BPS Kotawaringin Barat Tahun 2015

3) Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Untuk menghitung rasio rumah sakit per satuan penduduk dapat disusun tabel sebagai berikut :

Tabel 2.26

Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2010 - 2014 Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum	1	1	1	1	2
2.	Jumlah Penduduk	241.383	244.900	253.000	261.200	269.629
3.	Rasio	0,04	0,04	0,04	0,04	0,07

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2015

4) Rasio Dokter Persatuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi

dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Untuk menghitung rasio dokter per satuan penduduk dapat disusun tabel sebagai berikut:

Tabel 2.27
Jumlah Dokter Tahun 2010 - 2014

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Dokter	31	30	31	30	30
2	Jumlah Penduduk	241.383	244.900	253.000	261.200	269.629
3	Rasio	0,13	0,12	0,13	0,10	0,11

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2015

Tabel 2.28
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2014

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Ktw Lama	18.695	1	0 ,06
2	Arut Selatan	111.658	13	0,15
3	Kumai	52.534	6	0,08
4	Arut Utara	17.922	2	0,12
5	Pangkalan Banteng	37.231	3	0,18
6	Pangkalan Lada	31.589	3	0,12
	Jumlah	269.629	30	0,11

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2014

5) Rasio Tenaga medis Persatuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Untuk menghitung rasio tenaga medis persatuan penduduk dapat disusun tabel sebagai berikut :

Tabel 2.29
Jumlah Tenaga Medis Tahun 2010 – 2014

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Tenaga Medis	320	320	355	219	
2	Jumlah Penduduk	241.383	244.900	253.000	261.200	269.629
3	Rasio	1,33	1,30	1,45		

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2012

Tabel 2.30
Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2014
di Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Medis	Rasio
1	Ktw Lama	18.695	52	3,02
2	Arut Selatan	111.658	91	0,89
3	Kumai	52.534	64	1,33
4	Arut Utara	17.922	33	2,03

5	Pangk. Banteng	37.231	75	2,29
6	Pangk. Lada	31.589	40	1,38
	Jumlah	269.629	355	1,45

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2014

c. Lingkungan Hidup

1) Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Untuk menghitung persentase penduduk berakses air bersih dapat disusun tabel sebagai berikut :

Tabel 2.31

Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2010 - 2014 di Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum	9.271	9.494	10.207		
2.	Jumlah penduduk	230.984	244.900	253.000	261.200	269.629
3.	Persentase penduduk berakses air bersih	4,01	3.93	4,15		

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2014

d. Sarana dan Prasarana Umum

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Panjang jaringan jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan kondisi dapat disusun tabel sebagai berikut :

Tabel 2.32

Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2010 – 2014

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Kondisi Baik	408,93	484,18	526,68	582,38	615,14
2.	Kondisi Sedang	1.061,39	1.059,39	1.041,97	999,59	981,39
3.	Kondisi Rusak	661,18	661,52	669,52	633,39	657,38
4.	Kondisi Rusak Berat	273,76	261,66	242,02	246,22	227,56
5.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)	2.405,26	2.466,76	2.480,18	2.461,58	2.481,47

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2015

2) Rasio Tempat Ibadah Per satuan Penduduk

Tabel 2.33

Rasio Tempat Ibadah Tahun 2011 dan 2014

NO.	Bangunan tempat ibadah	2011			2014		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
1	2	3	4	(5=3/4)	6	7	(8=6/7)
1.	Mesjid	169	225.995	0,75		22.836	
	Mushola/Langgar	313					

2.	Gereja	88	15.174	5,80			
3.	Pura	1	983	1,02			
4.	Vihara	2	647	3,09			
5.	Kelenteng	-	83				
6.	Lainnya/Balai Kaharingan	3	2.880	1,04			
Jumlah		575	245.762	2,34			

3) Rasio Tempat Pembuangan sampah Per satuan Penduduk

Tabel 2.34

Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2009 s.d 2014 Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³)	285	306				
2.	Jumlah Penduduk	230.984	241.383	244.900	253.000	261.200	269.629
3.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	1,23	1,27				

214. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari tingkat PDRB, semakin tinggi tingkat PDRB per kapita maka semakin tinggi kemampuan ekonomi suatu daerah tersebut. PDRB perkapita penduduk Kabupaten kotawaringin Barat berdasarkan harga konstan tahun 2000 mengalami peningkatan sejak tahun 2012 hingga tahun 2014. Pada tahun 2012 PDRB perkapita Kabupaten kotawaringin Barat hanya sebesar 32,56 Juta Rupiah meningkat menjadi 34,95 Juta Rupiah pada tahun 2014.

Jenis komoditi yang memiliki nilai ekspor terbesar di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah pada tahun 2011 adalah CPO, *Polywood* dan *Iron ore*.

2. Iklim Berinvestasi

Merupakan komitmen pemerintah daerah bahwa kebijakan penanaman modal daerah di Kabupaten kotawaringin Barat, meliputi 2 (dua) langkah yakni :

- a) Arah dan tujuan kebijakan pemerintah daerah dibidang penanaman modal mempunyai maksud sebagai berikut :

- 1) Mempertahankan dan mengembangkan investasi yang sudah ada.
 - 2) Menambah dan mencari serta menarik investor-investor baru baik lokal, nasional maupun asing.
 - 3) Pemberdayaan masyarakat dan ekonomi rakyat.
- b) Strategi kebijakan pemerintah daerah di bidang penanaman modal, meliputi:
- 1) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian proyek investasi PMA dan PMDN melalui satuan tugas (satgas) terpadu baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan sehat.
 - 2) Memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bersama aparat keamanan terhadap para investor.
 - 3) Memberikan kemudahan pelayanan perizinan yang cepat, keringanan pajak, pembebasan pajak untuk masa persiapan dan kontrustruksi (berupa *tax holiday* secara selektif).
 - 4) Melakukan promosi : kedalam dan luar negeri dengan mengikuti even-even pameran, penyebaran booklet dan leaflet melalui perwakilan/kedutaan Indonesia dan asing di dalam dan di luar negeri baik melalui jasa pos, website/internet, dan email.
 - 5) Menjalin dan mewujudkan kerjasama sektoral, nasional, regional, serta internasional yang mengutamakan kepentingan nasional dalam rangka meningkatkan penanaman modal di daerah, seperti kerjasama BIMP-EAGA, ASEAN, AIDA, AFTA dan lainnya.
 - 6) Peningkatan pengembangan dan pembangunan Prasarana dasar/Infrastruktur daerah, sebagai sarana pendukung peningkatan investasi dan perdagangan di Kabupaten kotawaringin Barat sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Perkembangan penanaman modal, baik PMA/PMDN, mengalami perubahan/peningkatan, baik dalam jumlah proyek maupun jumlah investasi. Jumlah perusahaan PMA/PMDN secara kumulatif sebanyak 35 buah perusahaan dengan rincian PMA sebanyak 26 buah perusahaan dengan realisasi investasi sebesar US \$ 455.203.990,- sedangkan PMDN sebanyak 9 buah perusahaan dengan realisasi investasi sebesar Rp. 714.448.540.000,-.

Untuk menunjang kegiatan investasi telah tersedia 2 (dua) pelabuhan laut serta 1 (satu) bandar udara. Pelabuhan laut tersebut adalah Pelabuhan Kumai dengan panjang dermaga 900 m, dan Pelabuhan Pangkalan bun (316 m). Sedangkan 1 (satu) bandar udara tersebut adalah: Bandara Iskandar, dengan panjang landasan 1.850 m.

Selain data primer maupun sekunder yang disajikan diatas, Upah Minimum Regional merupakan salah satu penarik investasi bagi investor, kejelasan regulasi tentang upah minimum akan memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi. Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada tahun 2008 sebesar Rp. 781.185,- pada tahun 2009 sebesar Rp.890.550,- pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.059.754 dan tahun 2011 sebesar Rp.

1.239.912 pada tahun 2012 sebesar 1.401.101,- pada tahun 2013 sebesar 1.583.224,- pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.789.066,- dan pada tahun 2015 sebesar Rp.2.003.745,- (Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat).

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah tercantum dalam RKPD Tahun 2013 dan realisasinya pada APBD Tahun 2013 sebagai berikut :

2.2.1. Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

Keberhasilan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2015 khususnya pada bidang pendidikan sebagaimana ketercapaian dari 27 Indikator Standar Pelayanan Pendidikan (SPM) pendidikan dasar telah menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap desa telah terlayani pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Begitu pula dengan peningkatan sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bahwa telah terlampauinya target satu desa satu PAUD dengan jumlah sarana PAUD yang ada telah mencapai 270 satuan PAUD. Sedangkan sarana pendidikan SMP/MTs. yang ada telah mencapai 72 satuan pendidikan. Artinya bahwa penyediaan sarana pendidikan dasar telah dapat mengakumulir jumlah anak usia sekolah.

Keberadaan sarana pendidikan SMA, MA dan SMK telah mencapai 32 sekolah dengan jumlah murid yang bervariasi sesuai dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan menengah atas. Sedangkan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan telah terpenuhi hanya pada sekolah dasar yang belum terpenuhi.

Tolok ukur pencapaian target kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dicermati dalam indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012-2016 seperti dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.35
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2014-2015

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2014	2015	
				Target	Realisasi
1	Angka Melek Huruf	%	96,12	97,97	97,00
2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,30	8,70	8,80
3	Angka Partisipasi Kasar				
	a. PAUD	%	25,37	25,45	30,03
	b. SD/MI	%	117,35	117,50	118,14
	c. SLTP/MTs	%	95,89	97,01	98,88
	d. SMU/MA/SMK	%	87,59	87,60	87,59

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2014	2015	
				Target	Realisasi
4	Angka Partisipasi Murni				
	a. PAUD	%	17,61	17,65	27,78
	b. SD/MI	%	98,60	98,89	98,79
	c. SLTP/MTs	%	80,92	81,72	86,60
	d. SMU/MA/SMK	%	74,03	74,10	75,06
5	Angka Kelulusan				
	a. SD/MI	%	98,92	96,32	100,00
	b. SLTP/MTs	%	99,58	99,60	100,00
	c. SMU/MA/SMK	%	99,09	73,71	99,09
6	Angka melanjutkan				
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	89,67	100,00	99,75
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	99,64	96,03	99,66
7	Angka Putus Sekolah				
	a. SD/MI	%	0,20	0,21	0,20
	b. SLTP/MTs	%	1,19	0,39	0,40
	c. SMU/MA/SMK	%	1,60	1,50	1,10
8	Jumlah Prestasi Siswa dalam Olimpiade/Kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional				
	a. SD/MI	siswa	12	5	2
	b. SLTP/MTs	siswa	8	10	19
	c. SMU/MA/SMK	siswa	4	15	15
9	Jumlah sekolah standar nasional				
	a. SD/MI	sekolah	1	2	1
	b. SLTP/MTs	sekolah	2	8	5
	c. SMU/MA/SMK	sekolah	2	5	5
10	Prestasi Olah raga siswa Tingkat Nasional				
	a. PON	siswa		4	1
	b. POPNAS	siswa	9	9	4
	c. POSPENAS	siswa	5	5	3
11	Rasio ketersediaan sekolah dibandingkan penduduk usia sekolah (Jumlah penduduk usia sekolah/ Jumlah sekolah)				
	a. SD/MI		185,00	190,95	162,09
	b. SLTP/MTs		310,12	322,52	123,00
	c. SMU/MA/SMK		660,15	700,55	326,00
12	Rasio jumlah guru/murid				
	a. SD/MI		1:32	1:26	1:21
	b. SLTP/MTs		1:28	1:14	1:19
	c. SMU/MA/SMK		1:28	1:14	1:14
13	Persentase sekolah yang memiliki ruang kelas sesuai SPM				
	a. SD/MI		80,26	93,66	33,05
	b. SLTP/MTs		87,73	93,16	52,78
	c. SMU/MA/SMK		82,00	89,23	88,00

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2014	2015	
				Target	Realisasi
14	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV				
	a.Guru SD/SDLB		52,94	65,79	97,08
	b.Guru SMP/SMPLB		91,34	95,05	95,56
	c.Guru SMA/SMALB/SMK		77,16	85,46	95,56

Sumber : Disdikpora Kab. Kotawaringin Barat

Sampai dengan tahun 2015, program pemberantasan buta aksara sebagai salah satu program di *Millenium Development Goals (MDG's)* dapat menggarap sebanyak 4 per 1000 penduduk usia 15-24 tahun (166 orang) di Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi melek aksara, selain itu sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program pendidikan untuk semua dan dukungan atas program Provinsi Kalimantan Tengah di bidang pendidikan (Kalteng Harati), pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyediakan anggaran sebesar 10 % dari jumlah bantuan baik dari APBN maupun APBD Provinsi.

Salah satu indikator kinerja pada upaya peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat dari besaran angka partisipasi. Angka partisipasi tersebut meliputi Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2015 sebesar 30,03%, Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2015 sebesar 27,78%, kondisi ini menggambarkan 100 anak usia PAUD di Kotawaringin Barat 26-27 anak telah bersekolah PAUD.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI pada tahun 2014 sebesar 117,35%, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 118,14%. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2014 sebesar 98,60% dan pada tahun 2015 sebesar 98,79%. Jumlah Unit Sekolah Baru tingkat SD bertambah, jumlah ruang kelas baru bertambah akibat pemekaran desa, juga terjadinya murid yang sekolah SD belum mencapai usia 7 tahun sudah masuk sekolah.

Berdasarkan data, angka putus sekolah untuk tingkat SD/MI pada tahun 2015 sebesar 0,20%. Angka ini lebih kecil dibandingkan target yang ditetapkan, yaitu 0,21%. Pada umumnya yang melatarbelakangi alasan putus sekolah lebih pada kondisi budaya, yaitu adanya pemahaman lama yang beranggapan bahwa anak bisa baca tulis sudah cukup dan faktor geografis jarak sekolah di beberapa wilayah yang relatif masih cukup jauh serta domisili orang tua yang tidak menetap karena faktor pekerjaan. Untuk menekan angka putus sekolah dilakukan dengan penambahan jumlah SD, jumlah ruang kelas, adanya Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat dan daerah.

Kondisi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs pada tahun 2014 sebesar 95,89% dan di tahun 2015 sebesar 98,88%, APM SMP/MTs di tahun

2014 sebesar 80,92% dan di tahun 2015 menjadi 86,60%. Menurut catatan, angka putus sekolah SMP/MTs saat ini sebesar 0,40%. Angka ini sedikit lebih besar dari target yang ditentukan, yaitu sebesar 0,39%.

Kondisi APK Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK) pada tahun 2014 menunjukkan angka sebesar 87,59%, sedangkan tahun 2015 tidak mengalami perubahan sebesar 87,59%, APM SMA/MA/SMK tahun 2014 sebesar 74,03% dan mengalami peningkatan di tahun 2015 menjadi 75,06%. Rasio Siswa SMA terhadap SMK adalah 1:0,97. Artinya, siswa SMA lebih besar jumlahnya dibanding siswa SMK. Hal ini menunjukkan keberadaan SMK di Kabupaten Kotawaringin Barat masih perlu ditingkatkan baik dari sisi kapasitas daya tampung maupun kualitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan minat yang tinggi atas SMK serta penyiapan tenaga kerja terampil yang siap pakai. Dengan melihat kebutuhan daerah, terutama dari sektor ekonomi, maka perlu dikembangkan SMK kelompok/bidang pariwisata, pertanian dan perkebunan, disamping SMK Teknik, SMK Akuntansi, SMK Kesehatan, SMK Perikanan, dan SMK Pertanian, selain itu perlu juga dikembangkan sekolah yang berbasis keagamaan.

Infrastruktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kotawaringin Barat pada tahun 2014 berjumlah 128 sekolah, tahun 2015 meningkat menjadi 270 sekolah dan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2014 berjumlah 185 sekolah dan tahun 2015 berjumlah 188 sekolah yang merata di seluruh desa. Untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada tahun 2014 berjumlah 14 sekolah dan tahun 2015 berjumlah 15 sekolah hanya terdapat di beberapa desa. Sedangkan SDLB sampai saat ini hanya berjumlah 1 sekolah. Untuk jenjang pendidikan SMP tahun 2014 berjumlah 57 sekolah dan 59 sekolah di tahun 2015, MTs 13 sekolah di tahun 2015 sama seperti tahun 2014 dan SMPLB 1 sekolah. Pada jenjang pendidikan SMU tahun 2015 berjumlah 13 sekolah sama dengan tahun 2014, Madrasah Aliyah pada tahun 2015 berjumlah 5 sama seperti tahun 2014 dan SMK pada tahun 2015 berjumlah 13 sekolah sama dengan jumlah pada tahun 2014. Sedangkan untuk jenjang perguruan tinggi berjumlah 1 lembaga.

Indikator kinerja lain dalam upaya peningkatan mutu pendidikan adalah rasio siswa per-guru. Rasio siswa per-guru adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru untuk untuk jenjang pendidikan tertentu yang menunjukkan bahwa makin tinggi rasio maka makin banyak siswa yang harus dilayani oleh seorang guru atau makin kurang jumlah guru di jenjang tersebut.

Rasio siswa per-guru untuk tahun 2015 pada jenjang pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2015 adalah 1:17, untuk jenjang SD/MI adalah 1:17, untuk jenjang pendidikan SMP/MTs adalah 1:32, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK adalah 1:14. Standar ideal dan norma nasional untuk mengukur rasio siswa/guru adalah : SD/MI sebesar 1:32 ; SMP/MTs sebesar 1:36; dan SMA

sebesar 1:20, MA sebesar 1:20 serta SMK sebesar 1:15. Berdasarkan standar dan norma nasional tersebut dapat dikatakan bahwa rasio siswa per-guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Kotawaringin Barat telah sesuai dan berada pada standar nasional yang ditetapkan.

Pada jenjang pendidikan tinggi tercatat bahwa jumlah mahasiswa yang menimba ilmu di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 sejumlah 1.048 mahasiswa. Pada tahun 2013, angkanya meningkat menjadi 1.742 mahasiswa. Kenyataan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk dapat lebih meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang ada sehingga mampu bersaing dengan perguruan tinggi di luar daerah dalam hal meraih kepercayaan masyarakat.

Apabila dicermati dari ketersediaan ruang belajar, dengan rata-rata kepadatan ruang belajar di SD/MI adalah 24 siswa/kelas, SMP/MTs adalah 28 siswa/kelas, dan SMA/SMK/MA sebesar 32 siswa/kelas, khususnya ketersediaan ruang belajar tingkat SMA/SMK/MA masih perlu adanya penambahan fasilitas ruang belajar, agar tercapai peningkatan kualitas SDM selaras dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun dan guna memenuhi SPM pendidikan serta memberikan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat.

2. URUSAN KESEHATAN

Tujuan dari pembangunan kesehatan menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Penyediaan sarana kesehatan yang memadai merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam upaya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, dan program ini terus ditingkatkan kualitas pelayanan serta keberadaannya. Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat ternyata cukup memadai untuk jumlah penduduk yang harus dilayani.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah puskesmas, rumah sakit, dan jumlah tenaga medis yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tahun 2015 di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 1 unit rumah sakit pemerintah, 1 unit rumah sakit swasta, 2 rumah bersalin swasta, 1 klinik pengobatan swasta, 18 unit puskesmas, 75 unit puskesmas pembantu, 57 unit Poskesdes dan didukung 512 orang tenaga kesehatan.

Beberapa hal yang menjadi isu mendasar pembangunan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah peningkatan jaminan pemeliharaan semesta, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan/pelatihan kesehatan. Perlu disadari bahwa kesehatan dan

permasalahannya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi semua pihak di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti dunia usaha, LSM, dunia pendidikan, dan masyarakat sendiri. Hal ini karena permasalahan kesehatan terkait dengan faktor seperti keadaan geografis dan lingkungan, sosial budaya, IPTEK, dan lain sebagainya.

Indikator sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.36
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2014-2015

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET	CAPAIAN (%)		STATUS CAPAIAN 2015
		(%) 2015	(%) 2014	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7
A	PENYELENGGARA AN PELAYANAN KESEHATAN DASAR					
1	Cakupan kunjungan ibu hamil (K-4)	95%	95%	104,8%	87,4%	Tidak memenuhi target & turun dibanding 2014
2	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	80%	89,4%	62 %	Tidak memenuhi target turun dari thn 2014
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95%	93%	98 %	87 %	Turun dari tahun 2014, belum memenuhi target
4	Cakupan pelayanan nifas	90%	90%	97,1%	87,7 %	Turun dari tahun 2014, target tak tercapai
5	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80%	80%	91,1%	54 %	Turun dari tahun 2014, tidak mencapai target
6	Cakupan Kunjungan Bayi	90%	90%	96,5%	92,6%	Turun dari tahun 2014 namun melebihi target
7	Cakupan desa / kelurahan UCI	100%	100%	89,4%	91,5 %	Naik dibanding tahun 2014
8	Cakupan pelayanan anak balita	90%	85%	99,6 %	92,4%	Turun dari 2014 dan sudah memenuhi target
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia (6-24 bulan)	100%	100%	100%	100%	Tercapai
10	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	100%	100%	100%	100%	Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET	CAPAIAN (%)		STATUS CAPAIAN 2015
		(%) 2015	(%) 2014	2014	2015	
11	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	100%	97,6%	96,3%	Turun dari tahun 2014 namun belum melebihi target
12	Cakupan peserta KB aktif	70%	75%	78%	130,4 %	Naik dari tahun 2013 dan sudah melebihi target
13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP) per 100,000 penduduk < 15 tahun	≥ 2,0 per 100.000 pddk ≤ 15 tahun tiap tahunnya	≥ 2 ,0per 100.000 pddk ≤ 15 tahun tiap tahunnya	0	0%	Tidak ditemukan kasus
14	Cakupan Penemuan penderita pneumonia balita	90%	100%	5,0 %	100 %	tercapai target
15	Cakupapan penemuan dan penanganan penderita baru TB BTA positif	85%	90%	50 %	98,46%	Naik dari tahun 2014 melebihi target
16	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita DBD yang ditangani	100%	100%	100%	100%	Tercapai
17	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita diare	100%	100%	90%	90 %	Sama dengan capaian tahun 2014
18	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	100%	100%	100%	100%	Tercapai
B	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN					
19	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	Tercapai
20	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan RS Kab / Kota	100%	100%	100%	100%	Tercapai
C	PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB					
21	Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	Tercapai
D	PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET	CAPAIAN (%)		STATUS CAPAIAN 2015
		(%) 2015	(%) 2014	2014	2015	
	22 Cakupan desa siaga	80%	80%	80%	80%	Tercapai target
E	RASIO FASILITAS KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN DAN UMUR HARAPAN HIDUP					
23	Rasio rumah sakit per satuan penduduk.(Rasio tempat tidur / jumlah penduduk).	1:1000	1:1000	1:1200	1:963	Tercapai target (Melebihi Target Nasional)
24	Rasio dokter Spesialis Per satuan penduduk (1:8333)	1:8333	1:8333	1:5000	1:4348	Tercapai target
25	Rasio dokter umum per satuan penduduk (1:2083)	1:2083	1:2083	1:3333	1:2857	Belum tercapai
26	Rasio dokter gigi per satuan penduduk (1:9090)	1:9090	1:9090	1:11111	1:10000	Belum tercapai
27	Rasio tenaga Bidan per satuan penduduk bidan (1:1.333)	1:1.333	1:1.333	1:518	1:454	Tercapai target (Melebihi Target Nasional)
28	Rasio tenaga Perawat per satuan penduduk (1:632)	1:632	1:632	1:485	1:326	Tercapai target (Melebihi Target Nasional)
29	Rasio tenaga Apoteker per satuan penduduk (1:8333)	1:8333	1:8333	1:25000	1:16000	Belum Tercapai
30	Rasio tenaga SKM per satuan penduduk (1:8333)	1:8333	1:8333	1:3333	1:3127	Tercapai target (Melebihi Target Nasional)
31	Rasio tenaga Perawat gigi per satuan penduduk (1:6250)	1:6250	1:6250	1:6750	1:6750	Belum Tercapai
32	Rasio tenaga Gizi per satuan penduduk (1:4166)	1:4166	1:4166	1:7692	1:4000	Tercapai target (Melebihi Target Nasional)
33	Rasio tenaga Gizi per satuan penduduk (1:6666)	1:6666	1:6666	1:8333	1:6666	Tercapai target
34	Umur Harapan Hidup	72	72	72	72	Tercapai target

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2016

Capaian derajat kesehatan (Umur Harapan Hidup, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan) Kabupaten Kotawaringin Barat masih lebih baik dibandingkan capaian rata-rata secara

nasional. Capaian usia harapan hidup di suatu wilayah menggambarkan keberhasilan program kesehatan dan program sosial ekonomi pada umumnya di wilayah tersebut.

Sebagaimana disajikan dalam tabel, untuk data angka harapan hidup yang tersedia adalah data kondisi tahun 2015 dimana umur harapan hidup Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 72. Hal tersebut mengartikan bahwa secara rata-rata penduduk Kotawaringin Barat yang lahir pada tahun 2015 akan hidup hingga mencapai umur 72 tahun.

Meningkatnya pelayanan kesehatan, dan naiknya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Kemampuan memenuhi kebutuhan gizi dan kalori dan tingkat pendidikan yang lebih baik yang memungkinkan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai pada gilirannya juga akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Capaian Umur Harapan Hidup yang tinggi di Kabupaten Kotawaringin Barat memberi konsekuensi dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat usia lanjut.

Capaian Indikator kesehatan lainnya, seperti Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Bayi, serta gizi masyarakat menunjukkan tren positif. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 mengalami penurunan dari 199 per-100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2014, menjadi 92 per-100.000 Kelahiran hidup pada tahun 2015. Angka tersebut masih di bawah Angka Kematian Ibu nasional sebesar 228 per-100.000 Kelahiran Hidup.

Angka Kematian Balita di Kabupaten Kotawaringin Barat, pada tahun 2015 adalah 9,64 per-1000 Kelahiran Hidup. Angka tersebut jauh di bawah angka nasional sebesar 43 per-1000 Kelahiran Hidup (SDKI 2007). Sedangkan Angka Kematian Bayi, pada tahun 2015 ini mencapai 9,27 per-1000 kelahiran hidup. Angka tersebut di bawah angka nasional sebesar 34 per-1000 Kelahiran Hidup (SDKI 2007).

Pola penyakit menular yang selalu menjadi sepuluh besar penyakit (puskesmas) selama beberapa tahun terakhir adalah influenza, diare, pneumonia, typhus perut klinis, diare berdarah (disentri), tersangka TB paru, campak dan TBC dengan BTA (+). Sementara untuk balita, pola penyakit masih didominasi oleh penyakit-penyakit infeksi. Seiring dengan peningkatan status ekonomi, perubahan gaya hidup dan efek samping modernisasi, problem penyakit tidak menular pun cenderung meningkat. Beberapa penyakit tersebut di antaranya penyakit jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*), *hipertensi*, *stroke*, *diabetes mellitus*, *kanker*, hingga gangguan jiwa.

Prevalensi balita dengan gizi buruk dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Prevalensi gizi buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun

2015 sebesar 0,0002%, dari target sebesar 5%. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus-kasus gizi buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak terpantau.

Untuk itu, seluruh elemen masyarakat, birokrat dan swasta diharapkan tetap waspada serta dapat bersama sama meningkatkan komitmennya untuk menurunkan prevalensi gizi buruk, atau minimal mempertahankan.

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten harus dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Adapun realisasi kinerja urusan lingkungan hidup atau pembangunan bidang lingkungan hidup tahun 2015 sebagai berikut.

1) Tingkat Penurunan Pencemaran Udara dan Air

a. Tingkat Penurunan Pencemaran Udara Ambient

1. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas udara pada tahun 2015 semester I lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari konsentrasi debu (TSP) sebesar 90.48 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi debu (TSP) sebesar 38.09 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi TSP sebesar 61,90 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, dan realisasi semester II lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari konsentrasi debu (TSP) sebesar 45.03 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi debu (TSP) sebesar 18.76 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi TSP sebesar 138.46 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, dari ketiga lokasi tersebut pada tahun 2015 semester I mengalami peningkatan kualitas udara, target yang diharuskan sebesar 230 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, yaitu pada lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari konsentrasi debu (TSP) mengalami peningkatan kualitas udara dengan hasil 90.48 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi debu (TSP) sebesar 38.09 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi TSP sebesar 61,90 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, Hal ini disebabkan pada waktu pengujian udara cuaca mendung. hasil semester I dibandingkan dengan semester II di lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari konsentrasi debu (TSP) dan lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi debu (TSP) mengalami peningkatan kualitas udara, sedangkan pada lokasi bundaran pancasila mengalami penurunan kualitas udara. Konsentrasi debu (TSP) semester 1 61,90 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ di semester II 138,46 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, namun masih memenuhi target, target yang diharuskan sebesar 230 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

2. Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas udara pada tahun 2015 semester I lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari konsentrasi Karbon Monoksida (Co) sebesar 5.808 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi Karbon Monoksida (Co) sebesar 1.087 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi Karbon Monoksida (Co) sebesar 1.774 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dan realisasi semester II lokasi Simpang Empat Pasar Indra Sari konsentrasi Karbon Monoksida (Co) sebesar 2880 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi Karbon Monoksida (Co) sebesar 2394 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, pada lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi Karbon Monoksida (Co) sebesar 1301 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, realisasi semester I dibandingkan dengan realisasi semester II mengalami peningkatan kualitas udara pada semester I lokasi simpang empat pasar indra sari konsentrasi Karbon Monoksida (Co) sebesar 5.808 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, dan pada semester II sebesar 2880 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, semester I pada lokasi Simpang Tiga Terminal konsentrasi Karbon Monoksida (Co) sebesar 1.087 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dan pada semester II sebesar 2394 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, semester I lokasi Bundaran Pancasila konsentrasi Karbon Monoksida (Co) sebesar 1.774 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dan pada semester II sebesar 1301 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, dari target yang diharuskan sebesar 30.000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

b. Tingkat Penurunan Pencemaran Air Sungai Arut

(BOD), *Chemical Oxygen Demand (COD)*, *Total Suspended Solid (TSS)* dan *Demand Oxygen (DO)* Parameter utama yang digunakan untuk menilai kualitas air sungai adalah *Biological Oxygen Demand* dll.

1. Parameter Residu Terlarut (TDS) di Sungai Arut dan Sungai Kumai

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 semester I, hasil pengukuran Residu Terlarut (TDS) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 21,65 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 12 mg/l, Lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 25,8 mg/l, lokasi Hilir Korindo (A.4) sebesar 16,8 mg/l, keempat lokasi tersebut mengalami peningkatan kualitas air, maka dari itu target kinerja tercapai, hasil analisa parameter Residu Terlarut (TDS) masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan untuk kelas II sebesar 1.000 mg/l dalam PP 82 Tahun 2001, sedangkan di lokasi Sungai Lamandau (Hilir sungai Arut) (A.5) sebesar 13.700 mg/l pada lokasi ini mengalami penurunan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja belum tercapai, dilihat dari hasil analisa parameter Residu Terlarut (TDS) berada di atas baku mutu yang persyaratkan, disebabkan oleh tingginya pemanfaatan lahan, baik untuk pertambangan dan pembukaan lahan perkebunan.

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015, hasil pengukuran Residu Terlarut (TDS) Sungai Kumai di lokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 13.100 mg/l, lokasi kumai hilir (K.3) sebesar 13.200 mg/l pada ketiga lokasi ini mengalami penurunan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter TDS melampaui ambang batas apabila diperbandingkan dengan baku mutu air kelas II sebesar 2.000 mg/l dalam PP 82 Tahun 2001, tingginya kadar padatan terlarut (TDS) disebabkan oleh tingginya pemanfaatan lahan, baik untuk pertambangan dan pembukaan lahan perkebunan serta aktivitas perindustrian. Untuk lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 12 mg/l mengalami peningkatan kualitas air sungai maka dari itu, target kinerja tercapai dilihat dari hasil analisa Residu Terlarut (TDS) masih dibawah baku mutu kelas II dalam PP 82 Tahun 2001.

2. Parameter padatan Tersuspensi (TSS) di Sungai Arut dan Sungai Kumai

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 hasil pengukuran total padatan tersuspensi (TSS) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 88 mg/l, Lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 96 mg/l, pada kedua lokasi ini menunjukkan penurunan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa padatan Tersuspensi (TSS) ke tiga titik tersebut nilai TSS melampaui ambang batas apabila dibandingkan dengan baku mutu kelas II sebesar 50 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 tahun 2001, tingginya kadar padatan tersuspensi (TSS) disebabkan oleh tingginya pemanfaatan lahan, baik untuk pertambangan dan pembukaan lahan perkebunan. Untuk lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 22 mg/l, Lokasi Hilir Korindo (A.4) sebesar 28 mg/l, Lokasi Sungai Lamandau (Hilir sungai Arut) (A.5) sebesar 16 mg/l nilai TSS, pada ketiga titik lokasi ini mengalami peningkatan kualitas air, maka dari itu target kinerja tercapai dilihat dari hasil analisa tersebut masih dibawah baku mutu kelas II sebesar 50 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 tahun 2001.

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 pengukuran total padatan Tersuspensi (TSS) Sungai Kumai di lokasi Kelurahan kumai hulu sekitar pemukiman Kelurahan Kumai hulu (K.1) sebesar 24 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 22 mg/l dan lokasi kumai hilir (K.3) sebesar 21 mg/l, nilai padatan Tersuspensi (TSS) pada ketiga lokasi tersebut mengalami peningkatan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa padatan Tersuspensi (TSS) berada dibawah baku

mutu dengan baku mutu air kelas II sebesar 50 mg/l, seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

3. Parameter BOD

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 pengukuran BOD Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 4,0 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 6,0 mg/l, Lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 20,0 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 14,0 mg/l, lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 6,0 mg/l, kelima lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja tercapai dilihat dari hasil analisis parameter BOD5 berada di atas baku mutu yang dipersyaratkan untuk kelas II sebesar 3 mg/l dalam PP 82 Tahun 2001. Tingginya kadar BOD5 disebabkan oleh tingginya pemanfaatan lahan, baik untuk pertambangan dan pembukaan lahan.

Hasil Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 pengukuran BOD Sungai Kumai sekitar pemukiman Kelurahan Kumai Hilir (K.1) sebesar 10,0 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 24,0 mg/l dan lokasi Kumai Hulu (K.3) sebesar 12,0 mg/l, ke tiga lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai, maka untuk itu target kinerja tercapai dilihat dari hasil analisa parameter BOD berada di atas baku mutu yang dipersyaratkan untuk kelas II sebesar 3 mg/l dalam PP 82 Tahun 2001. Tingginya kadar BOD5 disebabkan oleh tingginya pemanfaatan lahan, baik untuk pertambangan dan pembukaan lahan perkebunan.

4. Parameter COD

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 pengukuran COD Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 21 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 14 mg/l, lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 19 mg/l pada ketiga lokasi tersebut mengalami peningkatan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja tercapai, dilihat dari hasil analisa parameter COD berada di bawah baku mutu kelas II seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001. Untuk lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 37 mg/l, lokasi Hilir Korindo (A.4) sebesar 38 mg/l, kedua lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter COD berada di atas baku mutu kelas II sebesar 25 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001, hal ini disebabkan karena adanya aktifitas rumah tangga, industri, pertambangan maupun aktifitas umum lainnya merupakan sumber buangan limbah.

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 pengukuran COD Sungai Kumai sekitar pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 44 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 86 mg/l dan lokasi kumai hilir (K.3) sebesar 39 mg/l, ketiga lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter COD berada diatas baku mutu kelas II sebesar 25 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

5. Parameter DO

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 Parameter DO Sungai Arut Hilir Korindo (A.4) sebesar 3,7 mg/l, pada lokasi ini mengalami peningkatan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja tercapai dilihat dari hasil analisa DO berada di bawah baku mutu air kelas II sebesar 4 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001, sedangkan di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 7,7 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 6,7 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 7,0 mg/l, dan lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 4,9 mg/l, keempat lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter DO berada di atas baku mutu air kelas II sebesar 4 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001. Hal ini menunjukkan bahwa di perairan Arut, konsumsi oksigennya lebih tinggi sebagai akibat dari terjadinya peningkatan jumlah limbah organik yang berasal dari kegiatan industri sawit dan limbah rumah. Kandungan oksigen terlarut ini memberikan gambaran bahwa secara umum perairan Arut sudah tercemar oleh bahan organik yang mudah terurai.

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 pengukuran DO Sungai Kumai di lokasi sekitar pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 10,0 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 7,9 mg/l dan lokasi Kumai Hilir (K.3) sebesar 9,2 mg/l, di ketiga lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter DO berada di atas baku mutu air kelas II sebesar 4 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

Hal ini menunjukkan bahwa di perairan Kumai, konsumsi oksigennya lebih tinggi sebagai akibat dari terjadinya peningkatan jumlah limbah organik yang berasal dari kegiatan industri sawit dan limbah rumah. Kandungan oksigen terlarut ini memberikan gambaran bahwa secara umum perairan Kumai sudah tercemar oleh bahan organik yang mudah terurai.

6. Parameter NO₃ (Nitrat)

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 NO₃ (Nitrat) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 1,10 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 0,50 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 1,10 mg/l, lokasi sungai Korindo (A.4) sebesar 1,50 mg/l, lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 0,60 mg/l, di keempat lokasi tersebut mengalami peningkatan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja tercapai dilihat hasil analisa parameter NO₃ (Nitrat) dibawah baku mutu air kelas II sebesar 10 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 NO₃ (Nitrat) Sungai Kumai di lokasi sekitar pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 0,40 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 0,50 mg/l, lokasi Kumai Hulu (K.3) sebesar 0,40 mg/l, di ketiga lokasi tersebut mengalami peningkatan kualitas air sungai, untuk itu target kinerja tercapai dilihat dari hasil analisa parameter NO₃ (Nitrat) berada dibawah baku mutu air kelas II sebesar 10 mg/l, yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

7. Parameter NH₃N (Amoniak)

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 pengukuran NH₃N (Amoniak) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 0,33 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 0,09 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 0,04 mg/l, dan lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) tidak terdeteksi, karena kandungannya sangat kecil sehingga tidak terdeteksi oleh alat, ke empat lokasi tersebut mengalami peningkatan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja tercapai dilihat dari hasil analisa parameter NH₃N (Amoniak) berada dibawah baku mutu air kelas II sebesar 0.5 mg/l, yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001 (Gambar 1.17). sedangkan untuk lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 0,86 mg/l mengalami penurunan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa NH₃N (Amoniak) berada di atas baku mutu yang dipersyaratkan.

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 pengukuran NH₃N (Amoniak) Sungai Kumai dilokasi sekitar hilir pemukiman Kelurahan Kumai Hilir (K.1) tidak terdeteksi karena kandungannya sangat kecil sehingga tidak terdeteksi oleh alat, lokasi Kumai hulu (K.2) sebesar 0,0870 mg/l, pada lokasi ini, mengalami peningkatan kualitas air sungai maka dari itu target kinerja tercapai dilihat dari hasil analisa NH₃N (Amoniak) berada di bawah baku mutu yang dipersyaratkan sesuai PP Nomor 82 Tahun 2001, sedangkan untuk lokasi Desa sekonyer (K.3) sebesar 1,44 mg/l, pada lokasi

ini mengalami penurunan kualitas air sungai maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa NH₃N (Amoniak) melebihi baku mutu yang dipersyaratkan.

8. Parameter Tembaga (Cu)

Realisasi kinerja kualitas air sungai pada tahun 2015 pengukuran tembaga (Cu) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 0,24 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 0,70 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 0,13 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 0,40 mg/l dan lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 0,13 mg/l, ke lima lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air, maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter CU melebihi baku mutu kelas II yaitu sebesar 0,02 mg/l sesuai PP No. 28 Tahun 2001.

Hasil pengukuran tembaga (Cu) Sungai Kumai dilokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 0,07 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 0,05 mg/l dan lokasi Kelurahan Kumai Hilir (K.3) sebesar 0,03 mg/l. Di ketiga lokasi ini mengalami penurunan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa cu melebihi baku mutu kelas II yaitu sebesar 0,02 mg/l sesuai PP No. 28 Tahun 2001.

9. Parameter Besi (Fe)

Hasil pengukuran Besi (Fe) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 1,89 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama, Kel. Baru lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 2,82 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 1,80 mg/l, lokasi Hilir Korindo (A.4) sebesar 2,30 mg/l dan lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 0,63 mg/l, pada kelima lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter Fe melebihi baku mutu air kelas II sebesar 0,3 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001. Hal ini disebabkan karena adanya limbah industri, pertambangan, pembuangan sampah yang akan menghasilkan air lindi yang airnya akan merembes ke sungai.

Hasil pengukuran Besi (Fe) Sungai Kumai di lokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 0,21 mg/l, Lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 0,16 mg/l dan lokasi Kelurahan Kumai Hilir (K.3) sebesar 0,19 mg/l pada ketiga lokasi tersebut mengalami peningkatan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja sudah tercapai dilihat dari hasil analisa F3 berada di bawah baku mutu kelas II sebesar 0,3 mg/l, yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

10. Parameter Timbal (Pb)

Hasil pengukuran Timbal (Pb) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 1,40 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 2,22 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 0,51 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 0,62 mg/l dan lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 0,12 mg/l, ke lima lokasi tersebut mengalami peningkatan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter Pb berada di atas baku mutu yang dipersyaratkan sebesar 0,3 mg/l dalam baku mutu kelas II PP Nomor 82 tahun 2001.

Hasil pengukuran Timbal (Pb) Sungai Kumai di lokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 0,12 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 0,13 mg/l dan lokasi Kelurahan Kumai Hilir (K.3) sebesar 0,27 mg/l, ke tiga lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter Pb berada di atas baku mutu yang persyaratkan sebesar 0.3 mg/l dalam PP Nomor 82 Tahun 2001.

11. Parameter Mangan (Mn)

Hasil pengukuran Mangan (Mn) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 6,14 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 7,50 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 6,71 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 8,82 mg/l dan lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 5,35 mg/l, ke lima lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter Mn berada di atas baku mutu yaitu 0,1 mg/l sesuai peraturan dalam PP 82 tahun 2001.

Hasil pengukuran Mangan (Mn) Sungai Kumai di lokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) tidak terdeteksi karena limitnya alat sehingga hasil tidak bisa terbaca oleh alat, pada lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 4,47 mg/l dan lokasi Kelurahan Kumai Hilir (K.3) sebesar 4,48, ke dua lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter Mn berada di atas baku mutu yaitu 0,1 mg/l sesuai peraturan dalam PP 82 tahun 2001.

12. Parameter Flourida (F)

Hasil pengukuran Flourida (F) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 0,32 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) sebesar 0,66 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) sebesar 0,47 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 0,51 mg/l dan lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 0,28 mg/l, pada kelima lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai, maka

dari itu target kinerja sudah tercapai, dilihat dari hasil analisa parameter F berada di bawah baku mutu air kelas II sebesar 1,5 mg/l yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

Hasil pengukuran Flourida (F) Sungai Kumai di lokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 0,63 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 0,61 mg/l dan lokasi Kelurahan Kumai Hilir (K.3) sebesar 0,75 mg/l, pada ketiga lokasi tersebut mengalami peningkatan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter F berada di bawah baku mutu air kelas II sebesar 1,5 mg/l yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

13. Parameter Nitrit sebagai N (NO₂)

Hasil pengukuran Nitrit sebagai N (NO₂) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 0,1100 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) 0,110 mg/l, pada kedua lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai, maka target kinerja pada lokasi ini belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter N (No₂) berada di atas baku mutu air kelas II sebesar 0,06 mg/l, sedangkan lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) 0,050 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 0,060 mg/l dan lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 0,020 mg/l. Pada ketiga lokasi ini mengalami peningkatan kualitas air sungai, maka pada ketiga lokasi ini target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa parameter N (No₂) masih berada dibawah baku mutu air kelas II sebesar 0,06 mg/l yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

Hasil pengukuran Nitrit sebagai N (NO₂) Sungai Kumai di lokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) sebesar 0,0080 mg/l, lokasi Desa Sekonyer (K.2) sebesar 0,0050 mg/l dan lokasi Kelurahan Kumai Hilir (K.3) sebesar 0,0070 mg/l. Pada ketiga lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas air sungai, maka dari itu target kinerja sudah tercapai dilihat dari hasil analisa masih berada dibawah baku mutu air kelas II sebesar 0,06 mg/l seperti yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

14. Parameter Sulfat (SO₄)

Hasil pengukuran sulfat (SO₄) Sungai Arut di lokasi Kelurahan Pangkut (A.1) sebesar 13,0 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A.2) 24,0 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A.3) 13,0 mg/l, Hilir Korindo (A.4) sebesar 13,0 mg/l dan lokasi Sungai Lamandau Hilir (A.5) sebesar 4,0 mg/l, pada kelima lokasi tersebut mengalami peningkatan kualitas air sungai, maka pada kelima lokasi tersebut target kinerja belum tercapai dilihat dari hasil analisa berada di atas baku mutu air kelas II sebesar (-) yang dipersyaratkan dalam PP 82 Tahun 2001.

Hasil pengukuran Sulfat (SO₄) Sungai Kumai lokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (K.1) tidak terdeteksi, lokasi Desa Sekonyer (K.2) tidak terdeteksi, sedangkan di lokasi Kelurahan Kumai Hilir (K.3) tidak terdeteksi pada ketiga lokasi tersebut tidak bisa terdeteksi karena limit alat sehingga tidak bisa terbaca oleh alat.

2) Jumlah Sumber Pencemar Lingkungan yang Tertangani.

Jumlah sumber pencemar lingkungan yang tertangani pada tahun 2014 target yang ditetapkan sebesar 14 perusahaan, sementara realisasi atau capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 16 unit usaha, tahun 2014 realisasi kinerja melampaui target yang ditentukan .

Sedangkan jumlah sumber pencemar lingkungan yang tertangani tahun 2015 target yang ditentukan sebanyak 14 unit usaha, sementara realisasi atau capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 14 unit usaha dengan demikian persentase realisasi kinerja tahun 2015 sebesar 100 %. Sumber pencemar yang tertangani tersebar di wilayah Pangkalan Bun. Umumnya merupakan kegiatan usaha seperti hotel, rumah sakit, industri yang potensial menimbulkan pencemaran air sungai akibat buangan limbah cair yang sebagian dari para pelaku usaha belum mengelola limbahnya dengan baik, begitu juga pencemaran udara akibat emisi dari cerobong asapnya.

3) Penurunan Luas Kerusakan Lahan.

Tahun 2015, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat sudah melakukan Kajian Kerusakan Tanah (Biomassa), kesimpulan :

- a.** Areal efektif untuk Kajian Kerusakan Tanah (Biomassa) di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 367.068 Ha (38,43%). Tanah berpotensi mengalami kerusakan ringan (PR.II) seluas 221.890 Ha (23,23%) dan kerusakan sedang (PR.III) seluas 145.178 Ha (15,20%). Penggunaan lahan (landuse) merupakan penentu potensi kerusakan tanah.
- b.** Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat tanah Rusak (R) seluas 217.153 Ha (22,74%) dan Tidak Rusak (N) seluas 194.960 Ha (15,70%). Tanah tergolong rusak tersebut terdiri atas :
 - Rusak Ringan (R.I) seluas 57.267 Ha (6,00%).
 - Rusak Sedang (R.II) seluas 127.747 Ha (13,38%).
 - Rusak Berat (R.III) seluas 32.139 Ha (3,37%).

Faktor pembatas kerusakan tanah berupa pH-tanah (a), Komposisi fraksi (f), Berat isi (d), Kedalaman tanah (s), Derajat pelurusan air (p), Subsistensi gambut (g), Kedalaman lapisan berpirit (j), Kedalaman air tanah dangkal (w).

- c. Faktor pembatas reaksi (pH) tanah merupakan faktor pembatas yang sering dijumpai pada tanah yang tergolong rusak; faktor pembatas komposisi fraksi pasir terkait dengan bahan induk tanah; Subsistensi gambut selalu diikuti dengan penurunan kedalaman air tanah dangkal dan pH tanah.
- d. Tanah yang mengandung bahan sulfidik di lahan pasang surut sebagian telah berubah menjadi horison sulfurik dengan pH tanah ekstrim masam (pH <3,6) dan tidak menguntungkan untuk pengembangan tanaman pangan.
- e. Status kerusakan tanah berat umumnya terjadi pada tanah *lowland*.
- f. Penggunaan lahan merupakan faktor pemicu status kerusakan tanah terutama pada tanah-tanah sub optimal. (gambaran umum)

Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup juga melaksanakan program/kegiatan yang terkait dengan *Ruang Terbuka Hijau (RTH)*.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 12 (dua belas) Ruang Terbuka Hijau Publik seluas 126.139,21 m² dengan prosentase dari luas RTH perkotaan sebesar 13,25 % dan prosentase luar RTH administrasi kota sebesar 22,13 %. Sedangkan luas hutan kota sebesar 787,75 Ha atau 7,3 % dari luas Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tahun 2015 Pengadaan bibit tanaman ruang terbuka hijau, dengan spesifikasi teknis : Pucuk Merah = 200 batang, dengan tinggi ± 45 cm s/d 60 cm beserta Pot Bunga. Sasaran kegiatan Pasar, Pelabuhan dan jalan protokol yaitu sebagian di jalan Iskandar sekitar jalur menuju Pintu gerbang masuk Bandara hingga jalur jalan H.M. Rafi'i Pangkalan Bun.

4) Penurunan Fluktuasi Muka Air Tanah.

BLH Kabupaten Kotawaringin Barat belum melakukan pengukuran untuk penurunan fluktuasi muka air tanah. Saat ini kegiatan yang dilakukan terkait dengan hal tersebut diatas hanya berupa pembuatan/pengadaan :

a. Biopori

Pada tahun 2014 BLH Kabupaten Kotawaringin Barat pengadaan alat biopori sebanyak 50 Buah dan telah melakukan pembuatan biopori sebanyak 32000 lubang biopori dalam rangka HUT Kabupaten Kotawaringin Barat Ke-55 dan HUT TNI Ke-69 bekerjasama dengan Dandim 1014 Pangkalan Bun beserta jajarannya yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Barat 12.000 lubang biopori, Kabupaten Sukamara sebanyak 10.000 lubang biopori dan Kabupaten Lamandau 10.000 lubang biopori. Maksud dan tujuannya adalah :

1. Tersedianya perlindungan sumber daya air melalui kegiatan pembuatan lubang biopori yang dapat memberikan tambahan cadangan air di musim kemarau dan mengurangi air limpasan run off di musim hujan.
2. Upaya untuk mengendalikan tata air tanah di tiga Kabupaten yaitu Kotawaringin Barat, Sukamara dan Lamandau.
3. Lubang biopori dapat meningkatkan kesuburan tanah karena terdapat cacing-cacing yang hidup pada lubang yang telah diberi kompos tersebut.

b. Persampahan

Pengelolaan persampahan merupakan kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah. Sistem pengelolaan sampah di TPA Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan luas area 30 Ha, pada saat ini menggunakan system Sanitary Landfill. TPA dilengkapi fasilitas fisik pendukung berupa kantor, mushola, rumah tinggal penjaga, sarana mck, garasi alat berat, tempat pencucian dump truck sampah, rumah timbang, pos jaga, garasi mobil, sumur pantau dan kolam lindi. Jarak TPA dengan permukiman terdekat adalah 2 Km, jarak TPA dengan sungai atau badan air terdekat 5,2 Km dan jarak TPA dengan pantai 40 Km.

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA digunakan alat angkut berupa dump truck dan *pick up* dengan ritasi 2 kali/hari. Jumlah dump truck dan pick up yang beroperasi per hari sebanyak 14 unit dengan kapasitas 8 m³ sebanyak 8 Unit, 6 m³ sebanyak 2 Unit dan kapasitas 3 m³ sebanyak 4 unit. Pengangkutan menggunakan dump truck melayani wilayah kota Pangkalan Bun dan Kumai. Khusus gerobak sampah dioperasikan pada masing-masing RT lingkungan permukiman, fasilitas perdagangan, fasilitas perkantoran dengan membentuk lembaga pengelola sampah dan menunjuk petugas untuk mengoperasikan pengambilan sampah dari setiap lingkungan.

Cakupan pelayanan di TPA Trans LIK Desa Pasir Panjang Kabupaten Kotawaringin Barat, adalah sampah yang berasal dari seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas area pelayanan tahun 2015 sebesar 1.186 km² atau meningkat 22% dari tahun sebelumnya sebesar 965 km². Sampah yang diperbolehkan dibuang di TPA Sampah adalah sampah rumah tangga (sampah padat yang berasal dari aktifitas rumah tangga) dan sampah sejenis rumah tangga (sampah padat yang berasal dari fasilitas umum dan fasilitas komersial). Tahun 2015 jumlah sampah yang masuk ke TPA Trans LIK Desa Pasir Panjang Kabupaten Kotawaringin Barat sekitar 2.580 m³/tahun dari total timbulan 4.996,8 m³/tahun atau 51,63%. Untuk retribusi kebersihan

tahun 2015 realisasi sebesar Rp. 60.568.000,- atau 121,14 % dari target sebesar Rp. 50.000.000,-.

Dalam peningkatan pengelolaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan ada beberapa jenis kegiatan yang telah dilakukan :

1) Pengadaan Kotak Sampah

Guna mendukung terjalannya pengelolaan sampah yang baik dari sumber sampai dengan proses akhir, ketersediaan sarana dan prasarana dari pemerintah sangat diperlukan disamping swadaya dari masyarakat. Oleh karena itu pengadaan kotak sampah akan dilakukan setiap tahun untuk mencukupi kebutuhan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan pada fasilitas umum seperti Rukun Tetangga (RT), Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, Pasar dan Rumah Ibadah.

Diharapkan dengan adanya ketersediaan kotak sampah dapat mencegah pencemaran sampah yang berserakan sebelum terangkut ke TPA dan pewadahan sampah yang baik dan tertutup dapat mengurangi vector penyakit yang di akibatkan dari sampah.

2) Pengadaan *Komposter*

Sampah terdiri dari berbagai komposisi di dalamnya yaitu komposisi organik dan anorganik. Data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, komposisi sampah organik adalah komposisi terbesar dari total timbunan sampah perhari di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Teknologi tepat guna yang bisa diterapkan untuk mengelola sampah organik adalah dengan dekomposisi secara berkelanjutan menggunakan komposter. Dekomposisi dengan komposter mengurangi jumlah leacet hasil penguraian dan pencampuran air hujan yang sangat mungkin keluar mencemari sumber-sumber air. Pengkomposteran dibagikan kepada beberapa fasilitas umum seperti Sekolah, Puskesmas, Rumah Sakit dan beberapa Rukun Tetangga (RT) titik pantau adipura.

3) Pengadaan Gerobak Sampah

Tahun 2015 dilaksanakan pengadaan Gerobak Sampah Terpilah 5 Jenis sebanyak 15 buah untuk sarana pemilahan bagi masyarakat.

4) Sosialisasi dan pendampingan pembentukan pengelola persampahan berbasis RT. Telah terbentuk satu unit pengelola sampah di RT 19 kelurahan Madurejo kecamatan Arut Selatan yang dilakukan oleh Karang Taruna Akar Telu. Unit pengelola ini juga berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan persampahan kota Pangkalan Bun pada skala terbatas.

Sosialisasi jam pembuangan sampah yang pada tahun sebelumnya dilakukan mulai pukul 07:00 WIB, dimajukan pada pukul 05:00 WIB. Sedangkan untuk jadwal pembuangan sampah oleh masyarakat harus dilakukan pada pukul 22:00 WIB sampai dengan 05:00 WIB

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Bina Marga

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Adapun hasil yang dicapai pada tahun 2015 diantaranya :

1. Kegiatan Pembangunan Jalan sepanjang 40,002 km berupa peningkatan kapasitas jalan dengan pelebaran badan jalan, Pembangunan Jembatan 26 buah, Peningkatan Jalan sepanjang 22,874 km (peningkatan struktur jalan), Pemeliharaan jalan dan swakelola sepanjang 314,607 km, pemeliharaan jembatan 28 buah, serta tersusunnya data base jalan dan data base jembatan Tahun 2015;
2. Terbukanya daerah terisolir, program sampai saat ini daerah pesisir Kubu-Teluk Bogam-Keraya-Sebui telah fungsional dan selesainya pembangunan Jembatan Type Komposit Sungai Bakau;
3. Terbukanya jalan lingkar selatan meliputi Pangkalan Bun-Kumpai Batu-Tanjung Putri-Sebui dan pada tahun 2016 ini melalui dana APBN Rehabilitasi dan Rekonsiliasi pada BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat akan dilakukan penimbunan dari arah Tanjung Terantang-Tanjung Putri-Sebui;
4. Terbukanya jalan lingkar, dalam rangka mendukung MP3EI koridor Kalimantan yang menghubungkan daerah luar melalui pelabuhan Tanjung Kalap-Pelabuhan *Ro-Ro* Panglima Utar, diantaranya dimulainya pembangunan Jembatan Sungai Kakap Tahap I berupa pemancangan dan pada tahun 2016 ini dilanjutkan pembangunan Sungai Kakap tahap II serta pembangunan Sungai Nyirih tahap I;
5. Terbukanya jalan menuju lokasi Bandara Baru di Sebui berupa perbaikan tanah dasar pada ruas jalan tersebut;
6. Terbukanya jalan menuju *hinterland* Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Sukamara, Lamandau dan Manis Mata (Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat) melalui pembangunan jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin yaitu dengan selesainya pembangunan Pile Slab;
7. Peningkatan skala pelayanan kota dengan peningkatan jalan kota Pangkalan Bun seperti pelebaran jalan Iskandar dan peningkatan jalan lainnya di dalam kota;
8. Peningkatan skala pelayanan jalan dalam kota kecamatan, diantaranya penataan jalan Pemuda-Bundaran Kumai di Kumai dan jalan dalam kota Kotawaringin ke arah Bundaran Mahkota.

Berdasarkan statusnya, jalan dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.37
Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Statusnya Tahun 2013 – 2015

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang	%
1	2	3		4			
1	Jalan negara	148,56	6,02	148,56	6,02	156,96	6,36
2	Jalan provinsi	63,70	2,58	63,70	2,58	55,40	2,24
3	Jalan kabupaten	1.220,95	49,51	1.222,84	49,51	1.222,84	49,51
4	Jalan desa	1.033,02	41,89	1.034,55	41,89	1.034,55	41,89
Jumlah		2.466,23	100	2.469,65	100	2.469,75	100

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Tabel. 2.38
Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Jenis Permukaannya Tahun 2013 - 2015

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jalan Aspal	656,99	26,64	1.018,32	41,23	1.022,37	41,40
2	Jalan Batu/kerikil	137,10	5,56	102,38	4,15	100,65	4,08
3	Jalan Tanah	1.436,85	58,26	1.098,68	44,49	1.082,92	43,85
4	Tidak dirinci :						
	• Beton	111,54	4,52	125,00	5,06	137,81	5,58
	• Titian	27,89	1,13	29,11	1,18	29,85	1,21
	• Lainnya	95,86	3,89	96,16	3,89	96,16	3,89
Jumlah		2.466,23	100	2.469,65	100	2.469,75	100

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Panjang keseluruhan jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2015 adalah 2.469,75 Km, dimana jalan Provinsi berkurang dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2014. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan status jalan pada ruas jalan Akses ke Pelabuhan Tanjung Kalap (Bumi Harjo) yang sebelumnya status jalan Provinsi menjadi Status Jalan Negara/nasional. Sementara untuk jalan yang merupakan kewenangan Kabupaten tidak mengalami perubahan panjang, dimana pada tahun 2015 fokus pekerjaan bukan pada penambahan panjang jalan tetapi lebih kepada peningkatan struktur dan kemantapan jalan.

Tabel. 2.39

Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kondisi fisiknya Tahun 2013 – 2015

No	Uraian	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
		2 Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	2	3	4	4	4	4	4
1	Jalan Baik	490,46	19,89	845,98	34,26	890,50	36,06
2	Jalan Sedang	816,60	33,11	784,19	31,75	761,46	30,83
3	Jalan Rusak ringan	856,56	34,73	620,51	25,13	608,00	24,62
4	Jalan Rusak Berat	302,61	12,27	218,97	8,87	209,79	8,49
Jumlah		2.466,23	100	2.469,65	100	2.469,75	100

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Berdasarkan tabel 2.39 dapat disampaikan bahwa kinerja proporsi panjang jalan menurut kondisinya sebagai berikut: Jalan kondisi baik meningkat sebesar 1,8%; jalan kondisi sedang mengalami penurunan sebesar 0,92%, jalan rusak ringan dan mengalami penurunan 0,51%, jalan rusak berat mengalami penurunan 0,38%.

Tabel. 2.40
Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kelas Jalan Tahun 2013 - 2015

No	Uraian	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kelas I	-	-	-	-	-	-
2	Kelas II	-	-	-	-	-	-
3	Kelas III	-	-	-	-	-	-
4	Kelas III A	-	-	-	-	-	-
	Kelas III B	212,26	8,61	212,26	8,59	212,36	8,60
	Kelas III C	451,14	18,29	456,12	18,47	465,90	18,86
	Kelas Tidak dirinci	1.802,83	73,10	1.801,27	72,94	1.791,49	72,54
Jumlah		2.466,23	100	2.469,65	100	2.469,75	100

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Sedangkan kondisi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai akhir tahun 2015 dapat dilihat dari berikut ini :

Tabel. 2.41
Klasifikasi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kondisi fisiknya Tahun 2014 - 2015

NO	Uraian	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
1	Jembatan Baik	113	70,19	141	77,47
2	Jembatan Sedang	30	18,63	26	14,29
3	Jembatan Rusak	16	9,94	14	7,69
4	Jembatan Rusak Berat	2	1,24	1	0,55
Jumlah		161	100	182	100

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Sumber Daya Air :

Sumber daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

Pengelolaan sumber daya air pada daerah irigasi dan daerah rawa bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan air pertanian, mengurangi kehilangan air, menambah debit air dan inspeksi saluran di kawasan daerah irigasi/rawa dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan jaringan irigasi dan kegiatan peningkatan jaringan irigasi. Pada tahun 2015 untuk memenuhi kebutuhan air pertanian, mengurangi kehilangan air, menambah debit air telah dilaksanakan pembuatan saluran irigasi/reklamasi rawa sepanjang 35.600 m, peningkatan saluran dengan pemasangan batu sepanjang 836 m. Guna kemudahan akses menuju lahan pertanian dibuat jembatan layanan sebanyak 9 buah dan peningkatan jalan inspeksi dengan timbunan sepanjang 3.371 m. Untuk pemeliharaan sistem irigasi yang telah dibangun dilaksanakan dalam kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dengan melaksanakan rehab saluran irigasi/reklamasi rawa sepanjang 38.788 m dan dengan melaksanakan pemeliharaan saluran irigasi/reklamasi rawa sepanjang 90.950 m. Agar terpenuhinya fungsi bangunan air sebagai drainase, suplesi dan retensi air irigasi/rawa di lahan pertanian dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan pintu air. Adapun pada tahun 2015 telah dilaksanakan pembuatan dan perehaban pintu air sebanyak 6 buah. Indeks kinerja sistem irigasi dengan rasio ketersediaan air irigasi pada tahun 2014 sebesar 86 % mengalami penurunan sebesar 6% sehingga rasio ketersediaan air ditahun 2015 menjadi 80 %. Hal itu disebabkan oleh semakin banyaknya saluran irigasi/reklamasi rawa yang dibangun tapi tidak diimbangi dengan biaya untuk pemeliharaan saluran yang telah terbangun tersebut.

Tabel 2.42
Indikator Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2014-2015

No	Indikator	2014		2015		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1.	Rasio Jaringan Irigasi	67	86	73	80	109,58

Catatan : Sumber Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Pengelolaan sumber daya air dalam upaya untuk pengendalian banjir dilaksanakan dalam kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, normalisasi/pemeliharaan saluran sungai. Kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai bertujuan untuk mengeringkan bagian-bagian wilayah administrasi kota dan daerah urban dari genangan air baik dari hujan lokal maupun sungai yang melintas di dalam kota. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan pembuatan saluran induk

pengendali banjir sepanjang 2.620 m, peningkatan saluran induk pengendali banjir dengan pasangan dilaksanakan batu sepanjang 195 m dan dengan cor beton saluran induk pengendali banjir sepanjang 108,5 m. Untuk pemeliharaan saluran induk dilaksanakan normalisasi saluran induk pengendali banjir sepanjang 6.654 m dan pemeliharaan saluran induk pengendali banjir 13.141 m. Kegiatan normalisasi/pemeliharaan saluran sungai bertujuan untuk mengembalikan fungsi sungai dan membentuk profil sungai sesuai ukuran awal. Adapun pada tahun 2015 telah normalisasi saluran sungai sepanjang 26.200 m. Untuk pemeliharaan sungai telah dilaksanakan sepanjang 22.500 m.

Dalam upaya mengendalikan tingkat abrasi pantai dan erosi tebing sungai pada daerah pantai dan sungai dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai dan pembangunan turap/talud/bronjong. Pembangunan prasarana pengaman pantai sendiri mempunyai tujuan mengamankan pantai dari erosi dan abrasi dengan membangun bangunan pemecah ombak (*breakwater*). Pada tahun 2015 telah dibangun bangunan pemecah ombak sepanjang 121,20 m. Kegiatan pembangunan turap/talud/bronjong bertujuan untuk mencegah erosi dan longsor, konstruksi yang dibangun berupa pasangan batu sepanjang 393 m.

Bidang Cipta Karya

Air Limbah

Pengolahan air limbah pemukiman secara umum di kabupaten kotawaringin barat ditangani melalui sistem setempat (on-site) ataupun sistem terpusat (off site). Air limbah domestik secara umum diolah secara on site dengan menggunakan tangki septik. Untuk daerah pemukiman yang berada disekitar bantaran sungai air limbah yang dihasilkan langsung ke sungai.

Tabel 2.43
Jumlah Infrastruktur Air Limbah Kabupaten Kotawaringin Barat

No	SPAL	Tahun			Total Infrastruktur 2008 – 2015
		2013	2014	2015	
1.	IPLT	-	1	-	1 Unit
2.	IPAL	-	-	-	1 Unit
3.	MCK Kumonal	3	2	-	12 Unit
4.	SR IPAL	-	1	-	1 Paket

Catatan : Sumber Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum telah membangun Sistem Pengolahan Air Limbah di 2 (dua) kecamatan yaitu Arut selatan dan Kumai, masing-masing 1 Unit IPLT, 1 Paket SR IPAL i Kecamatan Arut Selatan dan 1 Unit MCK Komunal di

kecamatan Kumai yang merupakan area beresiko tinggi sanitasi, dengan tujuan agar kualitas masyarakat meningkat. Pada tahun 2015 kegiatan yang mendukung sistem pengolahan air limbah tidak terealisasi sehubungan dengan rasionalisasi anggaran.

Drainase

Sistem drainase yang telah ada di kabupaten kotawaringin barat sebagian besar berada di pusat-pusat yang ada di sepanjang jaringan jalan utama. Seperti perumahan-perumahan, sedangkan di daerah yang berada diluar pusat kota Sebagian besar masih berupa jaringan drainase alami dimana kondisi fisiknya masih berupa saluran tanah dan masih mengandalkan sistem gravitasi. Potensi gerusan tanah oleh air atau erosi sangat besar terutama di daerah yang mempunyai kemiringan lereng sedang sampai dengan tinggi. Daerah yang berbukit dan banyaknya daerah-daerah cekungan merupakan kendala di dalam mengatasi aliran air sehingga masih banyak daerah-daerah yang tergenang air atau banjir sesaat pada waktu turun hujan deras.

Dengan intensitas curah hujan yang besar dan ketersediaan drainase relatif kecil maka rawan terjadinya luapan air akibat daya tampung saluran yang kurang mencukupi. Dalam masterplan drainase yang dimiliki kabupaten kotawaringin barat semua sistem saluran drainase bermuara di sungai arut, sungai buun, sungai kumai dan sungai lamandau.

Tabel 2.44
Capaian Pembangunan Drainase Tahun 2013 - 2015

No	Tahun	Panjang Drainase (m)	Rasio Pembangunan (%)
1.	2013	34.337	20
2.	2014	25.493	15
3.	2015	16.011	9

Catatan : Sumber Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat rasio pembangunan saluran drainase dari tahun ketahun mengalami penurunan, dikarenakan rasionalisasi anggaran. Total panjang saluran drainase terhitung dari tahun 2009 sampai tahun 2015 sebesar 159.733 meter, tersebar di 6 kecamatan.

5. URUSAN PENATAAN RUANG

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Sesuai dengan

Undang - Undang No. 26 Tahun 2007, pengertian penataan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kehidupannya.

Program urusan tata ruang adalah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pendukungnya, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar fungsi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mengoptimalkan peran penataan ruang sebagai media koordinasi dan sinkronisasi.

Tabel 2.45
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang
Tahun 2014 – 2015

No.	Indikator	2014		2015 *)		% Capaian Terhadap Target
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,1	0,1	0,12	0,12	100

Cat: *) angka sementara
Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 antara lain dapat dilihat pada Rasio bangunan ber-IMB per-satuan bangunan, yang menunjukkan adanya kenaikan dari yang semula sebesar 0,1 pada tahun 2014 menjadi 0,12 pada tahun 2015. Meskipun menunjukkan kenaikan namun apabila dilihat dari capaiannya yang hanya sebesar 0,02 mengindikasikan bahwa sebagian besar bangunan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat masih belum dilengkapi dengan IMB.

Selain itu juga menunjukkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan dalam mendirikan bangunan sangat rendah sekali. Ini dimungkinkan karena memang tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, bisa juga karena kurangnya sosialisasi dari instansi terkait yang membidangi, atau karena kekurangan tegasan instansi terkait dalam memberikan tindakan atau sangsi terhadap pelanggaran tersebut, dan yang terakhir bisa juga karena birokrasi pengurusannya yang terlalu rumit sehingga masyarakat enggan untuk mengurusnya. Hal ini yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten mengingat IMB merupakan salah satu penyumbang potensial dalam penerimaan PAD.

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mempunyai dokumen perencanaan, yang terdiri atas perencanaan jangka panjang (RPJPD) untuk perencanaan 20 tahunan dan perencanaan jangka menengah (RPJMD) untuk perencanaan pembangunan 5 tahunan.

Masing-masing dokumen perencanaan tersebut telah berketetapan hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tanggal 16 Mei 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006–2025 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012–2016.

RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah, sedangkan RPJMD pada hakekatnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD selanjutnya dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD selama 5 tahun serta menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya.

Tabel 2.46
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perencanaan
Pembangunan Tahun 2015

No.	Indikator	2014	2015		
			Target	Realisasi	% Real. terhadap target
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	1	1	100 %
2.	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	1	1	- %
3.	Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	1	1	100 %
4.	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	ada	147	147	100 %

Sumber : Bappeda Kab. Kotawaringin Barat

7. URUSAN PERUMAHAN

Rumah (papan) merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, selain kebutuhan sandang (pakaian) dan pangan (makan). Berbagai kondisi fasilitas perumahan seperti fasilitas penerangan, air minum, jamban dan lain-lain

merupakan aspek yang perlu untuk diperhatikan untuk mengamati tingkat kesejahteraan rakyat. Rumah yang baik serta lingkungan yang sehat diharapkan dapat memberikan rasa nyaman bagi anggota rumah tangga yang menghuninya. Tempat tinggal yang nyaman dan sehat sepatutnya memiliki tempat buang air besar. Di Kabupaten Kotawaringin Barat masih terdapat 3,01 persen rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar. Walaupun jumlahnya kecil namun hal tersebut masih harus menjadi perhatian pemerintah, karena fasilitas pembuangan air besar mempengaruhi kesehatan rumah tangga yang bersangkutan.

Fasilitas pembuangan air besar yang paling dominan di Kabupaten Kotawaringin Barat ini adalah fasilitas pembuangan air besar yang digunakan sendiri oleh tiap-tiap rumah tangga yaitu 78,34 persen. sementara untuk fasilitas yang digunakan bersama-sama dan umum cukup kecil yaitu 11,12 % dan 7,53%. Jika dibandingkan dengan target RPJMD 2015 tentang persentase rumah tangga yang bersanitasi, maka kondisi Kotawaringin Barat untuk tahun 2015 ini telah mencapai target yang diinginkan. Dimana target yang dipatok adalah sebesar 100% dan kondisi Kotawaringin Barat saat ini adalah 100%.

Selain dari segi penggunaan fasilitas pembuangan air besar, sanitasi yang baik juga harus ditinjau dari indikator mengenai penggunaan tangki septik sebagai tempat pembuangan limbah. Penggunaan tangki septik sebagai tempat pembuangan limbah akan mencegah limbah yang dibuang oleh rumah tangga merusak lingkungan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan.

Kabupaten Kotawaringin Barat dilalui beberapa sungai besar, antara lain Sungai Arut, Sungai Lamandau, dan Sungai Kumai. Kondisi ini tentunya mempengaruhi kebiasaan masyarakat khususnya terhadap pemilikan septik tank. Pada 2015, baru 72,50 persen rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir limbah (tinja), sungai/danau/laut 10,25 persen, lubang tanah 20,44 persen dan pantai/tanah lapang/kebun 2,87 persen. Dari kondisi tersebut, masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat terutama yang tinggal di daerah sempadan sungai dan di pedesaan masih perlu diberikan penyuluhan tentang budaya pentingnya fasilitas tempat buang air besar, mengingat sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Air merupakan kebutuhan dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. Didasari pentingnya fungsi air ini, maka salah satu perhatian pemerintah adalah penyediaan fasilitas air bersih. Sumber air bersih oleh rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari air leding (berlangganan PDAM), air sumur gali, air sumur bor, air sungai, mata air, mata air tak terlindung dan air hujan. Ketersediaan air dalam jumlah yang cukup merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Fasilitas air minum menjadi hal penting karena sangat menentukan kualitas air minum itu

sendiri. Rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak memiliki fasilitas air minum yaitu sekitar 1,86 persen. sementara rumah tangga dengan fasilitas air minum sendiri memiliki persentase paling besar yaitu 51,91 persen. hal tersebut menggambarkan kondisi yang cukup baik dimana setiap rumah tangga, sekitar 98,14 persen sudah memiliki fasilitas air minum.

Sebagian besar sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah air isi ulang yaitu sebesar 34,5 persen dan sumur terlindung sebesar 24,5 persen. Sementara sumber air minum yang paling sedikit digunakan oleh rumah tangga di Kotawaringin Barat adalah air hujan yang hanya sebesar 0,74 persen.

Penduduk Kotawaringin Barat yang tinggal di daerah bantaran sungai sudah mulai meninggalkan penggunaan air sungai sebagai sumber air minum dan beralih ke penggunaan air isi ulang sebagai sumber air minum utama. Masih terbatasnya jangkauan pelayanan PDAM mengakibatkan masih ada rumah tangga yang mengkonsumsi air yang diduga kurang bersih, seperti air sungai, air hujan, sumur gali (jika tercemar), dan mata air tak terlindung.

Begitu pula dengan air minum, sebagian warga memilih menggunakan air minum isi ulang yang mungkin kebersihannya kurang terjaga, dengan alasan harganya yang lebih ekonomis dibandingkan dengan air isi ulang bermerk. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Salah satu indikator dalam urusan perumahan ini juga yaitu mengenai rasio tempat pemakaman umum. Luas pemakaman di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 445.170 m² dengan rincian Luas Tempat Pemakaman Umum 374.170 m², Luas Tempat Pemakaman Bukan Umum 26.00 m², Luas Tempat Pemakaman Khusus 25.000 m² dan Luas Taman Makam Pahlawan 20.000 m². Daya tampung tempat pemakaman sebanyak 144.681 Unit dengan rincian Tempat Pemakaman Umum 121.606 Unit, Tempat Pemakaman Bukan Umum 8.450 unit, Tempat Pemakaman Khusus 8.125 unit dan Taman Makam Pahlawan 6.500 Unit.

Tabel 2.47
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perumahan
Tahun 2014-2015

No.	Indikator	2014		2015 *)		% Capaian terhadap target
		Targe (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
1.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	72,1	70	70,55	70,55	100
2.	Rumah Tangga Bersanitasi	72,1	73,2	80,35	73,2	91,10
3.	Rumah Layak Huni	63	36,74	64	37,16	58

4.	Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk	77,18	77,18	77,18	77,18	100
5.	Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	5,2	0,98	6,2	2,27	36,61

Cat: *) angka sementara

Sumber : Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat

8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan memberikan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian melalui sentra-sentra pemberdayaan pemuda. Pengembangan kepemudaan juga dilakukan di pedesaan untuk memberikan semangat agar para pemuda dapat menjadi penggerak roda pembangunan.

Dalam usaha memberikan bekal kewirausahaan, dilakukan pelatihan-pelatihan keterampilan serta upaya menumbuhkan semangat melakukan inovasi bisnis. Diharapkan para pemuda tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal sebagai pekerja/pegawai, namun sanggup mengembangkan usaha mandiri yang dapat bertahan terhadap goncangan dan persaingan.

Dalam bidang olahraga, pembinaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketersediaan potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun pemuda. Selanjutnya, akan dilakukan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan melalui kompetisi-kompetisi tingkat kabupaten. Bibit-bibit berprestasi akan terus dibina agar dapat meningkatkan prestasi sampai ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi.

Pembinaan olahraga tentu perlu didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta teknologi. Melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung bidang kepemudaan dan olahraga diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2.48
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2014 - 2015

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2014	2015		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Prestasi Olahraga Tingkat Nasional		12	14	12	85,71%
	a. POPNAS	Peringkat	9	9	4	44,44%
	b. POSPENAS	Peringkat	5	5	3	60%
2.	Jumlah organisasi pemuda	buah	105	93	105	112%
3.	Jumlah organisasi olah raga	buah	77	75	77	102%
4.	Gedung olah raga/balai remaja (selain milik swasta)	buah	8	8	7	100%
5.	Lapangan olahraga	buah	150	150	150	100 %

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kegiatan kepemudaan dan olah raga diukur dengan jumlah organisasi pemuda, jumlah grup olah raga, serta ketersediaan gedung dan lapangan olah raga sebagai wadah bagi warga untuk beraktifitas. Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 8 buah gedung olah raga, 150 buah lapangan olah raga, 77 klub olah raga dan 105 buah organisasi pemuda. Lapangan olah raga yang dimaksud disini adalah jumlah seluruh lapangan olah raga yang ada di suatu kecamatan, termasuk lapangan milik sekolah. Klub olah raga yang terdapat di tiap kecamatan umumnya adalah klub sepak bola, bola voli dan catur.

Sedangkan organisasi kepemudaan adalah organisasi Karang Taruna, yang diasumsikan terdapat di setiap desa dan kelurahan. Secara umum kegiatan kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah cukup baik, namun perhatian pemerintah perlu ditingkatkan untuk perkembangan yang lebih baik.

9. URUSAN PENANAMAN MODAL

Terbatasnya sumber daya modal adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh kebanyakan daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, sementara di sisi lain kebutuhan peningkatan pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan dalam upaya pemerintah daerah mendorong kegiatan ekonominya seoptimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Kab. Kotawaringin Barat masih memerlukan sejumlah tambahan dana dalam bentuk investasi swasta, baik yang berasal dari investor dalam negeri maupun investor asing.

Pertumbuhan investasi PMDN maupun PMA di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 belum mencapai target RPJMD 2012-2016, pertumbuhan PMDN mencapai Rp.714.448.540.000,- atau (20,24%) dan pertumbuhan PMA mencapai US\$.455.203.990,- atau (70,03%). Rincian perusahaan yang merealisasikan investasinya di Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 35 perusahaan terdiri dari 26 PMA dan 9 PMDN. Nilai realisasi dan pertumbuhan investasi PMA/PMDN terhadap target RPJMD di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut;

Tabel 2.49
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Tahun 2014-2015

No.	Indikator	Capaian 2014 (%)	2015		
			Target	Realisasi	(%)
1.	Nilai Pertumbuhan Investasi PMDN/PMA)				
a	Nilai investasi PMDN (Rp. Juta)	17,30	3.500.000	714.448,54	20,24
b	Nilai investasi PMA (US\$. Ribu)	58,35	650.000	455.203,99	70,03
2.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (proyek)				

a	- PMDN (proyek)	24	9	9	100
b	- PMA (proyek)	180	18	26	144
3.	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi				
a	Kenaikan nilai PMDN (Rp. Juta)	0,08	1.500.000	108.805,88	7,25
b	Kenaikan nilai PMA(US\$.ribu)	-	-	75.958,98	-

Sumber : Disperindag Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2015

Sedangkan pertumbuhan riil investasi PMDN di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 sebesar Rp.108.805.880.000,-atau (17,96%), dan pertumbuhan investasi PMA sebesar US\$.75.958.980,- atau (20,03%).

Tabel 2.50
Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 - 2015

Tahun	Investasi PMDN (dalam Rp. juta)	Pertumbuhan		Investasi PMA (dalam US\$. ribu)	Pertumbuhan	
		(Rp. juta)	(%)		(US\$. ribu)	(%)
2014	605.642,66	1.240,06	0,21	379.245,02	112.394,21	42,11
2015	714.448,54	108.805,88	17,96	455.203,99	75.958,98	20,03

Sumber : Disperindag Kab. Kotawaringin Barat Th. 2015

Pada tahun 2015, pertumbuhan investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat terutama berasal dari sektor sekunder, lebih khusus lagi bidang industry pengolahan. Dalam perkembangannya, perusahaan PMDN menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, yakni pada industri pengolahan. Sedangkan pada perusahaan PMA, sebagaimana tahun sebelumnya, bidang industri pengolahan, perdagangan, dan pengangkutan masih memberikan nilai pertumbuhan yang signifikan.

Meskipun demikian, perlu diakui bahwa realisasi pertumbuhan investasi di tahun 2015 masih rendah, Tidak tercapainya target terutama berasal dari kurangnya realisasi investasi PMDN dibanding perhitungan awal berdasar surat persetujuan investasi PMDN yang diterbitkan sebelumnya. Beberapa persoalan di lapangan terindikasi menjadi penyebab masih tidak terealisasinya surat persetujuan PMDN/PMA menjadi perusahaan operasional (aktif) di Kabupaten Kotawaringin Barat, yakni kesulitan investor untuk memperoleh lahan usaha yang diinginkan dan jaminan kepastian hukum yang cenderung tidak kondusif bagi iklim investasi.

Upaya peningkatan iklim investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 dilakukan dengan 2 (dua) strategi utama. Pertama, perbaikan perangkat sistem dan prosedur investasi melalui sistem SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi Perijinan Investasi Secara Elektronik), kedua peningkatan jalinan komunikasi berikut pelayanan prima kepada investor. Perbaikan perangkat sistem dan prosedur telah diupayakan dengan optimalisasi fungsi Gerai Kantor

Pelayanan Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP) dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perijinan Penanaman Modal.

10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33, Koperasi merupakan sokoguru perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengimplementasikannya dengan memberikan porsi yang besar untuk Koperasi dan UMKM untuk maju dan berkembang.

Hal ini terlihat dengan antusiasnya permohonan pembuatan Badan Hukum Koperasi baru, Perkembangan usaha dan jumlah anggota Koperasi yang semakin meningkat, dan semakin besarnya SHU (sisa hasil usaha), serta terus bertambahnya jumlah UMKM. Pada tahun 2015 tercatat terdapat 254 buah koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang jenisnya meliputi Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Petani Plasma, Koperasi Nelayan, Koperasi Pegawai, Koperasi Guru, dan lain sebagainya.

Tabel 2.51
Jumlah Koperasi dan Statusnya
di Kabupaten Ktw. Barat Tahun 2014 – 2015

Koperasi	Tahun 2014 (unit)	Tahun 2015 (unit)	+/(-)
Aktif	198	206	8
Tidak Aktif	48	48	-
Primer	246	254	8
KUD	25	25	-
Non KUD	221	229	8

Sumber :Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar, Kab. Ktw. Barat, Th. 2015

Berangkat dari perkembangan Koperasi dan UMKM yang semakin baik dan pengaruh signifikannya pada roda perekonomian masyarakat, tentu menjadi hal yang membanggakan dan menjadikan motifasi segenap stakholder untuk terus menciptakan iklim serta progres pencapaian maksimal. Sedangkan untuk jumlah UMKM mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.52
Perkembangan Jumlah dan Jenis UMKM

di Kabupaten Ktw. Barat Tahun 2014 – 2015

Jenis UMKM	Tahun 2014 (unit)	Tahun 2015 (unit)	+/(-)
Aneka Jasa	1710	1738	28
Perdagangan	4986	5046	60
Industri Pertanian	1607	1613	6
Industri Non Pertanian	1386	1394	8
Pertanian	1556	1558	2
Jumlah	11.245	11.349	104

Sumber :Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar, Kab. Ktw. Barat, Th. 2015

Sementara itu, pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja usaha kecil juga terus meningkat. Pengembangan kinerja usaha mikro masih membutuhkan kerja keras, hal ini penting karena pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja yang rendah. Padahal usaha mikro masih dominan dalam menampung bertambahnya penggunaan tenaga kerja.

Selanjutnya peningkatan secara umum penilaian KSP/USP di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 dibandingkan Tahun 2014 yang ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

Tabel 2.53
Penilaian Kondisi KSP/ USP
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 – 2015

Koperasi	Tahun 2014 (unit)	Tahun 2015 (unit)	+/(-)
Sehat	49	51	2
Cukup Sehat	37	42	5
Kurang Sehat	16	14	-2
Tidak Sehat	1	1	0
Jumlah	103	108	5

Sumber :Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar, Kab. Ktw. Barat, Th. 2015

11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Informasi administrasi kependudukan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengambilan kebijakan di sektor-sektor yang lain, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berkomitmen untuk senantiasa melakukan pembangunan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk mensukseskan program elektronik KTP (KTP-el), Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi data kependudukan yang berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Berikut ini dapat disampaikan mengenai perkembangan capaian indikator kinerja utama bidang kependudukan.

Berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada akhir tahun 2015 berjumlah **88.082** Kepala Keluarga = (**300.685**) jiwa.

Tabel 2.54

Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Indikator	Realisasi Tahun 2014	s/d Tahun 2015		%
		Target	Realisasi	
Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	70	72	91,95	
Kepemilikan Kartu Keluarga Nasional	84.663	115.000	88.082	76,60
Kepemilikan KTP Nasional	187.519	--	---	---
Perekaman KTP-el	147.155	191.776	172.604	90,00
Kepemilikan KTP-el	126.267	191.776	172.604	90,00
Penduduk Pindah dari Kabupaten Kotawaringin Barat ke luar Daerah	5.965	-	8.789	-
Penduduk datang dari luar Daerah ke Kabupaten Kotawaringin Barat	6.132	-	8.121	-
Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil :				
• Kepemilikan Akta Kelahiran	157.488	269.872	165.327	61,26
• Kepemilikan Akta Perkawinan (Non Muslim)	1.497	1.500	1.664	110,93
• Kepemilikan Akta Kematian	1.156	-	1.437	-
• Kepemilikan Akta Perceraian (Non Muslim)	39	-	42	-
• Kepemilikan Akta Perubahan Nama	16	-	17	-
• Kepemilikan Akta Pengesahan anak	8	-	19	-
• Kepemilikan Akta Pengangkatan anak	2	-	3	-
• Kepemilikan Akta Perubahan Kewarganegaraan	1	-	1	-

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Ktw. Barat tahun 2015

12. URUSAN KETENAGAKERJAAN

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dengan banyaknya penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja dan mencari pekerjaan). Dari total penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat, sekitar 69% berada dalam usia kerja (15 tahun ke atas). Rasio antara angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja dikenal dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK mengalami penurunan dari 70,75 persen menjadi 67,13 persen.

Tabel. 2.55
Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012 - 2014

No.	Uraian	2012	2013	2014
1.	Penduduk Usia Kerja (jiwa)	170.468	184.860	195.373
2.	Angkatan Kerja (jiwa)	120.613	124.101	136.864
3.	Bekerja (jiwa)	117.762	119.533	133.222
4.	Menganggur (jiwa)	2.851	4.568	3.642
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,75 %	67,13 %	70,05%
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,36	3,68	2,66
7.	Tingkat Kesempatan Kerja	97,64	96,32	97,33
8.	Bukan Angkatan Kerja	49.855	60.759	58.509
9.	Sekolah	11.158	15.141	17.465
10.	Mengurus Rumah Tangga	35.276	39.732	35.598
11.	Lainnya	3.421	5.886	5.446

Sumber : BPS Kab. Kotawaringin Barat

Tabel. 2.56
Kondisi Pasar Kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2013 - 2015

No.	Uraian	2013	2014	2015
1.	Upah Minimum Regional (UMK) /Rp.	1.538.244	1.789.066	2.003.745
Kondisi Pasar Kerja				
2.	Pendaftaran	2.063	2.379	2.669
3.	Permintaan	367	522	346
4.	Pengiriman	261	510	210
5.	Penempatan	207	510	176

Sumber : BPS Kab. Kotawaringin Barat

Pasar tenaga kerja juga ditandai dengan tingginya angka kesempatan kerja. Ini dapat dilihat dari tingginya persentase penduduk usia kerja yang bekerja, yang besarnya mencapai lebih dari 97 persen. Tingkat pengangguran mengalami penurunan dari 3,68 menjadi 2,66. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk dapat lebih mengoptimalkan lagi berbagai upaya terkait dengan peningkatan penyediaan kesempatan kerja guna untuk mengimbangi peningkatan angkatan kerja yang cukup signifikan, agar target RPJMD untuk angka pengangguran sebesar 2% pada tahun 2016 dapat tercapai.

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN

Keberhasilan ketahanan pangan di suatu wilayah menjadi tolok ukur dan sumbangan bagi keberhasilan ketahanan pangan dan gizi nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program dan kegiatan yang benar-benar mampu memperkokoh perwujudan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan tentang pangan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat. Pemenuhan hak atas pangan dicerminkan pada definisi ketahanan pangan, yaitu “kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan”.

Bagi Indonesia, pangan sering diidentikan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Nilai strategis beras juga disebabkan karena beras adalah makanan pokok paling penting. Industri perberasan memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi (dalam hal penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan dinamika ekonomi perdesaan, sebagai wage good), lingkungan (menjaga tata guna air dan kebersihan udara) dan sosial politik. Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak dan vitamin. Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri.

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) adalah Program Nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertical, untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara horizontal semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin.

Keberhasilan Program Raskin ditentukan mulai dari perencanaan, penganggaran, penyediaan, penyaluran, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan penanganan pengaduan oleh K/L terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi Raskin Pusat. Pelaksanaan penyaluran Raskin oleh Perum BULOG sampai Titik Distribusi (TD) di seluruh Indonesia. Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam penyaluran Raskin dari Titik Distribusi (TD)

sampai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dukungan yang diperlukan dari pemerintah daerah minimal pengalokasian APBD untuk angkutan beras dari Titik Distribusi (TD) sampai ke RTS.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat sasaran program raskin tersebar di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Lama, Arut Utara, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, dan Kumai. Dengan jumlah RTS sebanyak 7.421 RTS, dengan harga Rp. 1.600 per kg natto di TD (titik distribusi).

Produksi padi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 sebesar 18.725 ton. Produksi Padi tersebut bila dikonversi dalam bentuk beras dengan asumsi 1 kg padi menghasilkan 0,63 kg beras, maka produksi beras Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 sebesar 11.996,75 ton. Dibandingkan dengan kebutuhan, maka produksi padi belum mampu memenuhi kebutuhan beras seluruh penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang terus meningkat setiap tahunnya.

Dengan asumsi kebutuhan beras per kapita per tahun sebesar 121,76 kg dan perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 278.338 jiwa (naik 3,23% dari tahun 2014 sebesar 269.629 jiwa) maka kebutuhan beras masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 33.890,44 ton, masih kekurangan sebesar 22.093,69 ton (65,19%). Upaya menekan defisit beras tersebut dengan peningkatan produksi tentunya menjadi pilihan utama.

Peningkatan produksi ini diupayakan melalui peningkatan luas areal tanam dan panen, peningkatan indeks pertanaman dan peningkatan produktivitas tanaman. Disamping itu juga perlu ada gerakan, kampanye maupun sosialisasi pentingnya diversifikasi pangan dan substitusi pangan beras menjadi pangan non-beras seperti jagung, ubi jalar dan ubi kayu.

Ketiga komoditi ini sangat sesuai dikembangkan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Capaian luas panen dan produksi jagung Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 sebesar 608 ha dan 2.219 ton, luas panen dan produksi ubi jalar sebesar 114 ha dan 1.040 ton, sedangkan luas panen dan produksi ubi kayu mencapai 426 ha dan 5.263 ton.

Produksi daging di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 mencapai 1.987,25 ton, yang berasal dari daging sapi sebesar 572,24 ton, daging kambing/domba sebesar 58,14 ton, daging babi sebesar 94,47 ton dan daging unggas sebesar 1.172,40 ton. Berdasarkan angka produksi daging, apabila dikaitkan dengan kebutuhannya sebesar 6.095,60 Ton (kebutuhan daging per kapita per tahun sebesar 21,90 kg), maka produksi daerah belum mampu memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat.

Apabila kebutuhan daging hanya dipenuhi dari daging sapi maka kekurangan daging tahun 2015 relatif besar yaitu sebesar 5.523,36 ton. Apabila kebutuhan daging tersebut disubstitusi dari ternak lainnya maka kekurangan

dagingnya akan lebih kecil. Berbagai upaya terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daging, salah satunya dengan penggalakan kegiatan pengembangan peternakan sapi yang diintegrasikan dengan kebun kelapa sawit.

Dari kebun kelapa sawit dapat diambil daun dan limbah solidnya sebagai pakan sapi, sedangkan dari sapi bisa dihasilkan tenaga untuk mengangkut hasil sawit serta kotoran sapi bisa digunakan sebagai pupuk tanaman kelapa sawit. Beberapa perusahaan perkebunan besar dan kelompok tani telah merintis program integrasi tanaman kelapa sawit dan ternak sapi.

Kebutuhan telur sebagai sumber protein bagi masyarakat dapat dipenuhi dari telur ayam buras, telur ayam ras dan telur itik. Pada 2015 di Kabupaten Kotawaringin Barat telah terdapat tiga pengusaha / investor yang mengembangkan peternakan ayam ras petelur, sehingga terdapat populasi ternak sebesar 46.500 ekor dengan produksi telur mencapai 109,25 ton.

Untuk telur ayam bukan ras dan telur itik dalam skala kecil sudah diusahakan sendiri oleh peternak di daerah. Produksi telur ayam buras dan itik di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 mencapai 341,17 ton. Dengan asumsi kebutuhan telur per kapita per tahun sebesar 7,30 kg, maka kebutuhan produksi telur mencapai 2.031,87 ton. Sehingga produksi telur yang dihasilkan di daerah (550,42 ton) belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Upaya memenuhi kebutuhan telur tersebut, perlu menarik investor agar menanamkan investasi dalam bidang peternakan baik dalam budidaya maupun penyediaan sarana dan prasarannya seperti pembibitan, penyediaan pakan maupun usaha pengolahan dan pemasarannya. Selain daging dan telur, ikan juga merupakan salah satu sumber pangan hewani yang kaya akan protein.

Ikan dapat diperoleh dari penangkapan maupun budidaya. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi panjang pantai sebesar 156 km sehingga potensi penangkapan ikan di perairan laut cukup besar. Di samping itu juga terdapat sungai besar dan kecil, danau dan rawa yang juga mempunyai potensi baik untuk penangkapan maupun budidaya.

Sumber air cukup melimpah di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, meliputi kolam, keramba, jaring apung maupun tambak, yang tersebar di semua Kecamatan. Produksi perikanan pada tahun 2015 di Kabupaten kotawaringin Barat sebesar 16.055,81 ton. Apabila kebutuhan ikan per kapita per tahun sebesar 40,58 kg (Susenas 2012), maka secara total kebutuhan ikan (sebesar 11.294,95 ton) di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 dengan asumsi jumlah penduduk sebesar 278.338 jiwa, sudah terpenuhi, bahkan mengalami surplus sebesar 4.760,86 ton.

Berdasarkan sistem ketersediaan pangan, produksi pangan di daerah berupa beras, daging dan telur, masih terjadi defisit atau tergantung dari luar

daerah. Ditinjau dari sistem distribusi pangan, Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu pintu gerbang perdagangan di Provinsi Kalimantan Tengah, dimana terdapat pelabuhan dan bandara yang memperlancar arus keluar masuk barang dan penumpang.

Arus barang dari Pulau Jawa ke Kabupaten Kotawaringin Barat adalah melalui pelabuhan "Panglima Utar" di Kecamatan Kumai, yang selanjutnya didistribusikan secara lancar ke kecamatan sampai tingkat desa. Namun, faktor cuaca buruk seringkali menghambat distribusi pangan dari luar pulau. Arus bongkar muat dari Pelabuhan Pangkalan Bun dan Kumai tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan barang pangan Kabupaten Kotawaringin Barat melainkan juga untuk kabupaten tetangga seperti Lamandau, Sukamara dan sebagian Seruyan.

Harga barang ditingkat rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat relatif terjangkau sampai diseluruh pelosok wilayah kecamatan dan desa-desa. Terkait dengan stabilitas harga dan pasokan barang, harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25% dari kondisi normal. Pasokan pangan di suatu wilayah masih dinyatakan dalam kondisi stabil jika terjadi penurunan pasokan pangan kurang dari 40%. Umumnya gejolak harga dan pasokan pangan biasa terjadi pada saat menjelang hari besar keagamaan dan cuaca ekstrim, dimana komoditi pangan yang harganya seringkali meningkat (mendorong inflasi) adalah daging ayam, cabe dan bawang merah.

Kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan dari bulan ke bulan pada tahun 2015 relatif tetap sesuai perkembangan jumlah penduduk. Hanya saja terjadi sedikit peningkatan pada kondisi tertentu yaitu pada saat memasuki bulan Ramadhan atau pada saat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Untuk mengatur pasokan bahan pangan ke dalam suatu daerah/wilayah dapat berjalan normal, fungsi distribusi, transportasi, dan efisiensi distribusi perlu dikendalikan, sehingga mobilitas pasokan, baik keluar maupun masuk ke suatu daerah/wilayah, dapat berjalan normal dan terjadi keseimbangan antara produksi setempat dan pasokan bahan pangan dari luar.

Kemudian terkait dengan kondisi rawan pangan berdasarkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak ada satupun dari desa di wilayah Kotawaringin Barat yang masuk dalam kategori desa rawan pangan. Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya kita bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan wilayah, rumah tangga dan individu yang berbasis kemandirian pangan.

Penentuan desa rawan pangan mendasarkan pada tiga indikator, yaitu Kurang Energi dan Protein, Kemiskinan, dan Produksi Pertanian/Pangan. Pembangunan ketahanan pangan membutuhkan kelembagaan yang mantap, dengan didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia

mempunyai peran penting dan menentukan dalam pengelolaan dan dukungan program/kegiatan kelembagaan ketahanan pangan.

Oleh karena itu, upaya pengembangan sumber daya manusia perlu lebih dioptimalkan. Keragaman sumber daya manusia dan aktivitas penyelenggaraan penyuluhan dapat dilihat dari jumlah Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) di Kabupaten Kotawaringin Barat yang berjumlah 102 orang.

14. **URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Pembangunan pemberdayaan gender merupakan bagian integral dari pembangunan daerah. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat masih jauh dari ideal. Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) diperlukan dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) tersebut. Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan dan persentase angkatan kerja laki-laki dan perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi aktif dalam berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. IDG disusun dari tiga komponen, yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan.

Tanggung jawab sosial masyarakat terhadap permasalahan perlindungan perempuan dan anak semakin meningkat. Namun demikian, masih perlu ditingkatkan baik akses maupun layanan terhadap Kesejahteraan Anak, Perlindungan Anak, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Saksi dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Meningkatnya partisipasi perempuan dapat dilihat dari peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan, jumlah pejabat struktural perempuan, jumlah pengusaha perempuan, pengusaha mikro dan kecil, jumlah pejabat publik dan profesi perempuan di segala bidang. Namun demikian, masih perlu ditingkatkan baik jumlah dan kompetensinya. Berikut ini adalah tabel capaian indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tabel 2.57
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014-2015

No	Indikator	Capaian	2015
----	-----------	---------	------

		2014	Target	Realisasi	% Realisasi terhadap target
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	-	-	-
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	-	-
3.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	18,07	20	5,97	29,85
4.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	25,06	20	94,02	470
5.	Rasio KDRT	58,86	0,045	0,01	22,22
6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	74,64	5	0,02	0,40

Sumber : BPPKB Kabupaten Kotawaringin Barat

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh tiga hal, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi atau perpindahan penduduk. Untuk mengontrol pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang tepat dilakukan adalah dengan mengontrol jumlah kelahiran penduduk dan jumlah migrasi. Pengontrolan terhadap jumlah kelahiran dilakukan oleh pemerintah dengan melaksanakan program keluarga berencana (KB). Dengan program ini diharapkan tercipta penduduk dengan jumlah dan kualitas yang ideal bagi pembangunan.

Akseptor KB Baru Kabupaten Kotawaringin Barat bulan Januari – Desember 2015 sebesar 5.395 atau 57,72% dari target sebesar 9347 akseptor. Hal ini tidak tercapai karena target yang ditetapkan oleh BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah terlalu tinggi, tidak sesuai dengan sisa Pasangan Usia subur (PUS) yang baru yang belum ber-KB. Sedangkan untuk akseptor KB aktif di Kabupaten Kotawaringin Barat (angka CPR) adalah sebesar 69,92% dari Pasangan Usia Subur sebesar 48.505. hal ini telah menunjukkan CPR Kabupaten Kotawaringin Barat lebih tinggi daripada target RPJMN yaitu sebesar 65%. Untuk angka TFR kabupaten Kotawaringin Barat masih berkisar 2,8 dari target nasional sebesar 2,27.

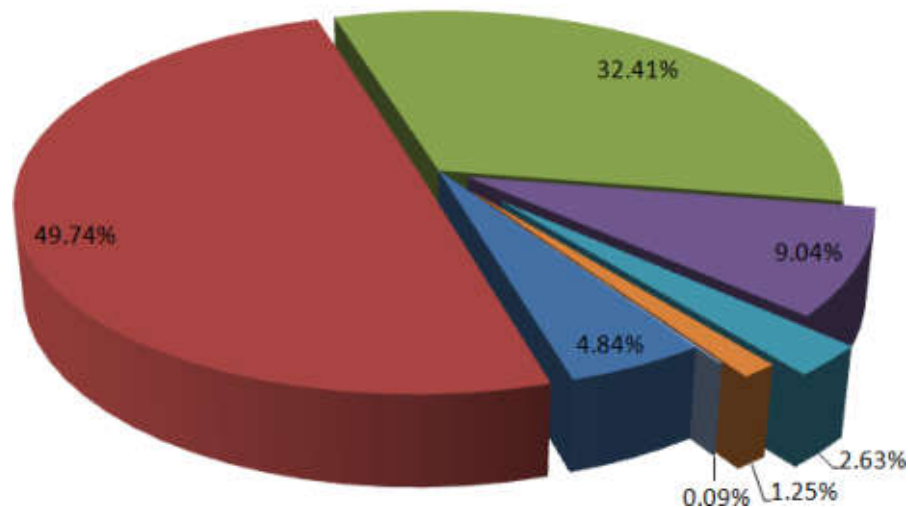
Sementara itu, jika ditilik dari usia perkawinan pertama untuk wanita umur 10 tahun keatas menunjukkan kondisi yang cukup baik, ternyata perempuan di Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung untuk menikah pada umur 15-19 tahun yaitu sebesar 49,74%. Akan tetapi perlu diperhatikan juga bahwa masih terdapat 4,84% wanita usia kurang dari 15 tahun yang menikah untuk pertama kali. Padahal semakin muda umur saat perkawinan, maka peluang untuk terjadinya kematian ibu dan bayi juga semakin besar disebabkan masih belum siap dan matangnya si ibu untuk melahirkan anak.

Untuk lebih jelasnya, persentase usia kawin pertama di kabupaten Kotawaringin Barat dapat terlihat seperti diagram dibawah ini

Diagram 2.1

PERSENTASE USIA WANITA KAWIN PERTAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2015

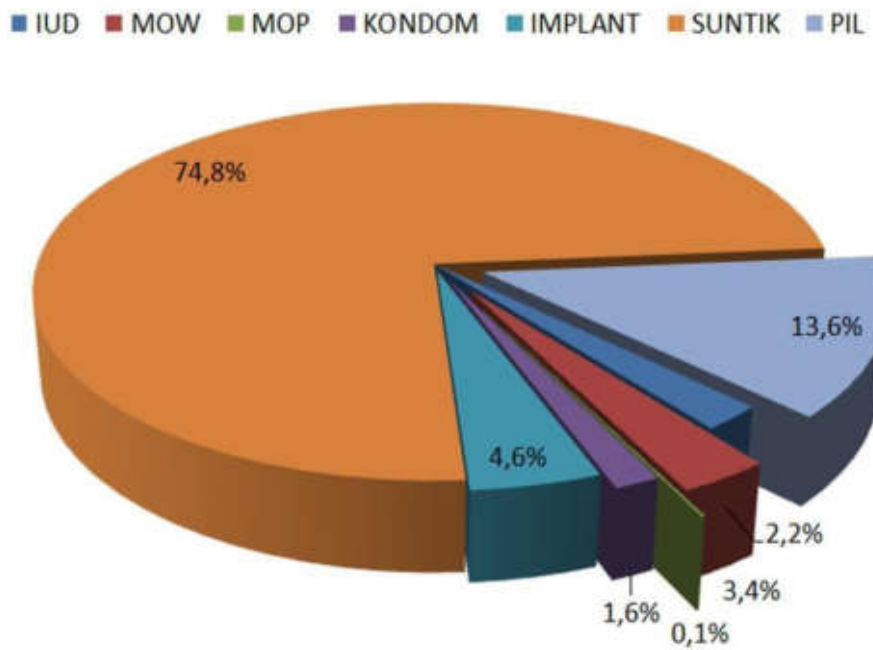
■ USIA 10-14 ■ USIA 15-19 ■ USIA 20-24 ■ USIA 25-29
■ USIA 30-34 ■ USIA 35-39 ■ USIA 40+



Sumber : Hasil Analisis BPPKB Kab. Kotawaringin Barat

Dari pelaksanaan Pelayanan KB selama tahun 2015 seperti tersebut diatas maka secara keseluruhan dari Januari sampai dengan Desember Tahun 2015 dapat disampaikan perolehan peserta KB Baru sebanyak 5.395 Peserta atau 57,72 % dari Target sebesar 9.347 Peserta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram dibawah ini :

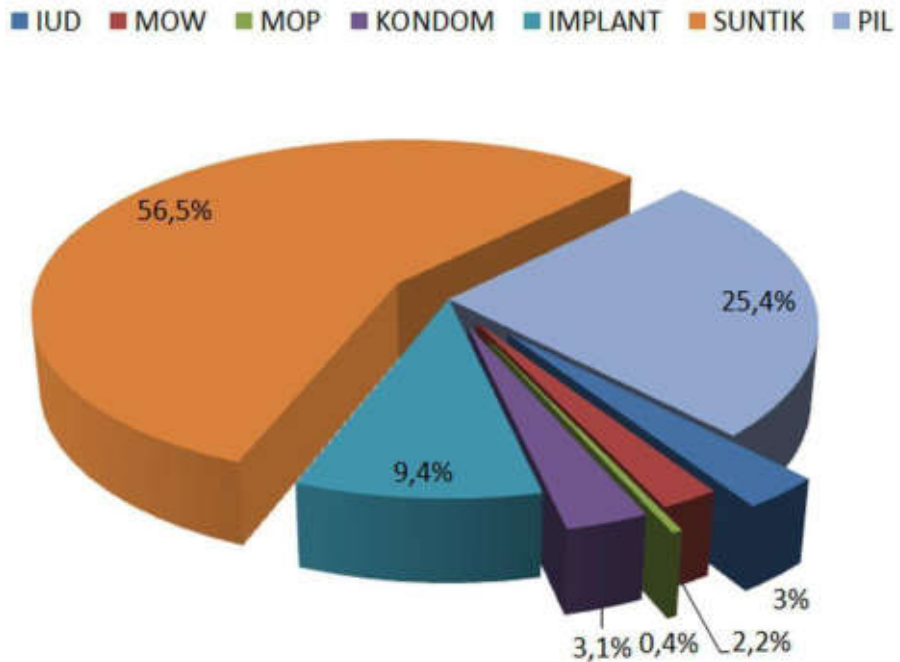
Diagram 2.2
PENCAPAIAN PESERTA KB BARU TAHUN 2015



Sumber : Hasil Olah Data dan Analisis BPPKB Kab. Kotawaringin Barat

Sedangkan untuk kesertaan KB Aktif sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 33.916 KB Aktif atau 68,41 % dari Pasangan Usia Subur sebanyak 49.578. Untuk lebih jelasnya pencapaian peserta kb aktif per mix kontrasepsi sampai dengan Desember Tahun 2015 dapat dilihat dalam diagram dibawah ini :

Diagram 2.3
Pencapaian Peserta KB Aktif Tahun 2015



Sumber : Hasil Olah Data dan Analisis BPPKB Kab. Kotawaringin Barat

Meski demikian, untuk menyukseskan program KB perlu dilakukan sedikit upaya evaluasi untuk dapat menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR) jumlah satu keluarga dari 2,8 anak menjadi 2,1 sesuai dengan slogan program KB.pada tahun 2016 2 (dua) Anak Cukup.

Tabel 2.58
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2014-2015

No	Indikator	Capaian 2014	Target	2015	
				Realisasi	Realisasi (%)
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3	2,27	2,8	2,8
2.	Rasio akseptor KB	84,00%	80,69	69,92	86,65
3.	Cakupan peserta KB aktif (orang)	79,79%	43.917	34.358	78,23
4.	Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I	100%	700	120	17,14

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kobar

Berdasarkan pendataan sampai dengan bulan Desember 2015, jumlah peserta KB aktif sebanyak **33.916** atau **68,41%** dari Pasangan Usia Subur (PUS) yang berjumlah **49.578**.

Tabel 2.59
Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2014-2015

No	Peserta KB Aktif	Tahun 2014			Tahun 2015		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	IUD	686	943	137,46	638	1015	159,0
2	MOP	105	119	113,33	128	140	109,3
3	MOW	501	736	146,906	1.110	758	68,28
4	IMPLANT	3.486	3.162	90,70	1.739	3175	182,5
5	SUNTIK	8.135	19.324	237,541	21.738	19.174	88,20
6	PIL	11.923	8.190	68.691	8.399	8.610	102,5
7	KONDOM	744	736	121.102	515	1.044	202,7
	Jumlah PA	25.580	33.375	130,47	33.916	33.916	100
	Jumlah PUS	49.238	49.238	100	48.505	49.578	102,21
	% PA/PUS	65		67,78	69,92		68,40

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Kotawaringin Barat

16. URUSAN PERHUBUNGAN

Sektor perhubungan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan, karena sektor perhubungan merupakan mata rantai tatanan transportasi nasional, regional

dan lokal yang merupakan pendukung dan penggerak mobilitas orang, barang dan jasa dalam menunjang dinamika pembangunan perekonomian.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat serius dalam membangun sektor perhubungan. Pembangunan sektor perhubungan bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antar wilayah, membuka keterisolan suatu wilayah dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Kabupaten Kotawaringin Barat dengan karakteristik wilayah yang dikelilingi oleh sungai, moda transportasi yang digunakan oleh masyarakat adalah transportasi angkutan darat dan angkutan sungai.

Sedangkan untuk menghubungkan antar pulau dilayani dengan transportasi laut dan udara. Mengingat Kotawaringin Barat merupakan daerah yang sedang berkembang maka semua moda transportasi tersebut sangat memungkinkan untuk dikembangkan potensinya dan ditingkatkan perannya sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Adapun beberapa indikator pembangunan dibidang perhubungan sampai tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.60
Jumlah Sistem Jaringan Transportasi Tahun 2014 - 2015

No	Uraian	Capaian 2014	T a h u n 2015(akumulasi)		
			Target	Realisasi	%
1	Jumlah Bandara (Buah)	1	1	1	100
2	Jumlah Pelabuhan Laut (Buah)	3	3	3	100
3	Terminal	4	4	4	100
4	Halte	11	12	12	100
5	Jaringan Trayek AKDP	0	0	0	0
6	Jaringan Trayek Perdesaaan	9	9	9	100
7	Dermaga LLASDP	18	19	19	100
8	Trayek LLASDP	3	4	4	100

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2015

Tabel 2.61
Jumlah sarana pendukung keselamatan lalu lintas

No	Uraian	Capaian 2014	Tahun 2015 (akumulasi)		
			Target	Realisasi	%
1	Rambu Lalu lintas darat	409	699	699	100
2	APILL	5	5	5	100
3	RPPJ	11	13	13	100
4	Traffic Cone	58	58	58	100
5	Paku Jalan	0	0	0	0
6	Tenda Portable	0	4	4	100
7	Rambu lalu lintas sungai	74	94	94	100
8	BajuPelampung	0	166	166	100
9	Delinator	0	45	45	100
10	Warning Light	1	4	4	100

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.62
Jumlah Kendaraan Yang di Uji

No	Jenis Kendaraan	Capaian 2014	Tahun 2015		
			Target	Realisasi	%
1	Mobil Penumpang	114	90	90	100
2	Mobil Bus	225	212	212	100
3	Mobil Barang	6.009	5.948	5.948	100
4	Speed boat	34	34	16	47
5	Kelotok	64	64	64	100

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pergerakan pesawat mengalami penurunan dari 6.922 pada tahun 2014 menjadi 5.964 pada tahun 2015. Artinya, pergerakan pesawat di Bandara Iskandar Pangkalan Bun mengalami penurunan sebesar 13,83 % dari tahun 2014 ke tahun 2015.

Faktor –faktor yang mengakibatkan pergerakan pesawat di Bandara Iskandar Pangkalan Bun mengalami penurunan di sebabkan :

1. Adanya pengurangan atau tidak beropersinya armada pesawat.
2. Adanya pengurangan rute penerbangan pesawat.
3. Adanya pergantian armada kapasitas pesawat kecil menjadi kapasitas pesawat yang lebih besar (boing)

Dengan adanya beberapa faktor tersebut, maka pergerakan pesawat di Bandara Iskandar Pangkalan Bun mengalami penurunan serta daya angkut penumpang dari 2 (dua) kali penerbangan menjadi 1 (satu) kali penerbangan. Sedangkan Program Pengembangan Bandara Baru tetap dilaksanakan guna percepatan pembangunan bandara baru melalui program peningkatan pelayanan angkutan dan program pembangunan prasara dan fasilitas perhubungan serta study kelayakan bandara baru.

17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dalam era globalisasi saat ini, berbagai informasi dapat diakses melalui semua media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Namun perangkat komputer dan situs internet masih belum populer di kalangan masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan masih kecilnya persentase rumah tangga yang menguasai komputer dan penduduk yang mengakses internet. Di Kabupaten Kotawaringin Barat, persentase penduduk yang mengakses internet masih sangat rendah yaitu hanya 11,23 persen, sementara yang tidak mengakses internet sebesar 88,77 persen.

Oleh sebab itu, agar kebutuhan informasi untuk masyarakat tetap terpenuhi, Bagian Humas Setda Kab. Kotawaringin Barat juga menyediakan informasi Pembangunan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Offline melalui kerjasama media elektronik dan media cetak, penerbitan media internal berupa tabloid Warta Kobar, bulletin Marunting Batu Aji, kalender tahunan serta media informasi digital lainnya yang telah distribusikan keseluruh kecamatan dan desa di Kab. Kotawaringin Barat.

Tabel 2.63
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014-2015

No.	Indikator	satuan	2014	Target		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952
-----	-----------	--------	------	--------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak memiliki kewenangan dibidang pertanahan karena semua kewenangan di bidang pertanahan menjadi urusan Badan Pertanahan Nasional yang merupakan instansi vertikal yang menjalankan tugas pemerintah di bidang pertanahan baik di pusat maupun di daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah adalah melakukan fasilitasi terhadap permasalahan-permasalahan pertanahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terus berupaya melakukan koordinasi dengan badan Pertanahan Nasional guna untuk kepentingan pembangunan daerah.

Tabel 2.64
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2014-2015

No.	Indikator	satuan	2014	2015		
				Target	Realisasi	Prosentase
1.	Luas tanah bersertifikat	Hektar	-	1.113.218	237.347	21,32%
2.	Luas tanah yang belum bersertifikat	Hektar	-	875.871	875.871	-
3.	Jumlah bidang tanah bersertifikat	bidang	429	62	16	25,81%
4.	Jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat	bidang	342	0	0	0
5.	Jumlah aset tanah dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten	bidang	820	-	-	-
6.	Jumlah aset tanah dalam penguasaan Pemkab yang sudah bersertifikat	bidang	429	-	-	-
7.	Jumlah aset tanah Pemerintah Kabupaten dengan status hak pakai/ hak guna bangunan kepada pihak ke tiga	bidang	0	-	-	-
8.	Jumlah Ijin lokasi yang telah dikeluarkan untuk pengelolaan tanah kas desa	Ijin	0	-	-	-
9.	Konflik pertanahan yang terjadi	kasus	6	-	-	-
10.	Konflik pertanahan yang terselesaikan	kasus	2	-	-	-

Sumber : Bagian Adm. Pemerintahan dan Perlengkapan Setda

Pelaksanaan urusan pertanahan tahun 2015 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu kenaikan luas lahan bersertifikat.

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Kesatuan bangsa memiliki arti adanya rasa kebersamaan di dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kondisi politik dalam negeri dipengaruhi oleh adanya kemajemukan masyarakat, mulai dari suku bangsa, agama, bahasa daerah, dan juga golongan. Kemajemukan masyarakat merupakan salah satu

kekayaan budaya bangsa, tetapi dapat juga menjadi ancaman atau potensi penyebab konflik apabila tidak dikelola dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kerukunan masyarakat dan menjalin komunikasi antar elemen masyarakat di Kotawaringin Barat. Usaha itu di antaranya adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Dialog Antar-Umat Beragama/ Forum Umat Beriman, serta Dialog Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga melakukan program pendidikan politik masyarakat, yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti Forum Kemitraan Rapat Kerja Antara Ormas/Orpol dan pemerintah di daerah, Pembinaan dan Optimalisasi Fungsi dan Peran Ormas dan LSM, Forum Diskusi Politik dalam Pengembangan Pendidikan Perempuan, serta Sosialisasi Undang-Undang Parpol bagi Partai Politik peserta Pemilu 2015.

Kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik dilakukan agar terwujudnya kerjasama yang baik dan persatuan antar Parpol, LSM dan Ormas. Hal ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan secara rutin dan penyampaian sosialisai peraturan yang baru terkait Parpol, LSM dan Ormas seperti penyaluran Bantuan Keuangan untuk Parpol, Pemberian Dana Hibah untuk LSM dan Ormas.

Tabel 2.65
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2014 – 2015

No.	Uraian	satuan	Capaian 2014	2015		%
				Target	Realisasi	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan	kegiatan	4	3	3	100
2.	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	kegiatan	7	2	2	100
3.	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM,ORMAS dan OKP	kegiatan	1	2	1	50
4.	Jumlah kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian potensi linmas dan hak-hak sipil	kegiatan	3	3	3	100

Sumber : Badan Kesbangpolinmas & Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat

Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan dengan pendekatan preventif, persuasif dan represif. Proses penegakan peraturan daerah dilakukan melalui sosialisasi peraturan kepada masyarakat, pemantauan apakah masyarakat sudah memahami peraturan yang disosialisasikan.

Kemudian, untuk masyarakat yang melanggar, dilakukan operasi non-yustisi dengan pembinaan dan teguran disertai berita acara dan pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran. Selanjutnya, perlakuan terhadap pelanggar ditingkatkan menjadi operasi yustisi, yaitu pelanggar diproses secara hukum.

Tabel 2.66
Pelanggaran Perda di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2014 – 2015

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran		+ / (-)	Keterangan
		2014	2015		
1	2	3	4	5	6
1.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	3	3	0	
2.	Minuman Keras (Miras)	50	80	30	
3.	PSK liar/prostitusi/Pasangan Mesum	20	39	19	
4.	Gelandangan dan Pengemis (GEPENG)	6	6	0	
5.	Premanisme	0	0	0	
6.	Judi Togel	0	1	1	
7.	Mucikari	0	14	14	
8.	KTP	0	9	9	
9.	Ngelem Fox	0	1	1	
	Jumlah	79	153	74	

Sumber : PPNS Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat

20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1. SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah pemerintahan di daerah yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi.

Pencapaian kinerja output dan outcome kegiatan pada Sekretariat Daerah, mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebagai berikut :

Tersusunnya Perda Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi:

- a) Perda dan Perbub APBD sebanyak 3 buah;
- b) Perda dan Perbub Perubahan APBD sebanyak 1 buah;
- c) Perda Pertanggungjawaban APBD yang meliputi :
 - Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Arus Kas;
 - Neraca;
 - Catatan L/K.

2. SEKRETARIAT DPRD

Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat adalah menyelenggarakan pelayanan umum dan administrasi DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan tertib, efisien, transparan, akuntabel dan bebas dari unsur KKN dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk mendukung pencapaian misi tersebut, Sekretariat DPRD mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 6.860.751.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.956.033.739,- atau 86,81 %.

3. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPKD)

Pengelolaan keuangan daerah wajib dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik tidak dapat dipisahkan dari fungsi pembinaan administrasi keuangan daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan peraturan perundangan baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Untuk

tahun 2015 ditargetkan **2 (dua) Peraturan Daerah** yaitu *Perda Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD TA2015 dan Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang APBD TA2016* serta **2 (dua) Peraturan Bupati** yaitu *Perbup Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA2015 dan Perbup Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TA2016* dapat direalisasikan semua.

Kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan di tahun anggaran 2015 adalah :

- a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Perda Pertanggungjawaban APBD yang meliputi :
 - Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Arus Kas;
 - Neraca;
 - Catatan L/K;

Dalam melaksanakan Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.831.833.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.543.935.371,- atau 94,04%.

4. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pegawai merupakan unsur utama dalam organisasi memegang peranan strategis dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang menjadi penggerak jalannya organisasi. Tanpa didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional, suatu organisasi akan kesulitan dalam mencapai tujuannya.

Dalam rangka meningkatkan disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dikembangkan sistem *reward and punishment*. Kedisiplinan PNS digunakan sebagai salah satu indikator kinerja PNS. Selanjutnya diberikan *reward* bagi PNS sesuai dengan kinerjanya. *Reward* diberikan dalam bentuk Tambahan Penghasilan berupa Tunjangan Kinerja yang diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai dan instansi. *Reward* juga diberikan dalam bentuk pemberian tali asih bagi PNS yang memasuki masa purna tugas. *Punishment* diterapkan kepada PNS berupa penegakan peraturan perundangan sesuai peraturan yang berlaku.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan pegawai selama ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Seleksi Penerimaan CPNS.

Dalam rangka mengisi formasi tambahan PNS pada SKPD/Satuan Unit Kerja, dilaksanakan melalui pengadaan CPNSD Kabupaten Kotawaringin Barat. Usul dan alokasi formasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.67
Usul dan alokasi formasi PNS Tahun 2010 – 2015

TH	USUL TAMBAHAN PEGAWAI BARU PER JENIS TENAGA				ALOKASI FORMASI YG DITERIMA PER JENIS TENAGA				KETERANGAN
	GURU	KES	TEKNIS	JML	GURU	KES	TEKNIS	JML	
2010	619	50	613	1.282	117	50	93	260	
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	
2012	2	-	13	15	2	-	13	15	
2013	50	4	18	72	50	4	18	72	Dari hasil tes tenaga honorer K.2 sebanyak 71 orang + 1 orang dari formasi khusus dokter
2014	632	206	320	1158	42	36	17	101	Formasi jalur khusus dokter 6 + formasi umum 95
2015	661	150	337	1148	-	-	-	-	Tidak ada penerimaan CPNS karena adanya moratorium dari pemerintah pusat

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

2. Penempatan PNS

Melalui penempatan PNS diharapkan dapat mengisi jumlah, kualitas, komposisi, distribusi pegawai sesuai dengan kebutuhan SKPD/Satuan Unit Kerja dilaksanakan melalui penempatan PNS dengan mengangkat CPNS Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2.68
Komposisi Penerimaan PNS menurut Golongan Tahun 2010-2015

TAHUN	JUMLAH	GOLONGAN RUANG								KETERANGAN
		I.a	I.b	I.c	II.a	II.b	II.c	III.a	III.b	
2010	229	0	0	0	0	8	57	161	3	
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2012	15	1	-	3	6	-	2	3	-	
2013	72	2	-	2	49	2	4	12	1	
2014	74	2	-	2	17	5	4	35	9	
2015	90	-	-	-	-	1	26	56	7	

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas penyelenggaraan administrasi kepegangatan.

Tabel 2.69
Penyelenggaraan Administrasi Kepangkatan PNS Tahun 2010-2015

NO	KEGIATAN	Tahun						Keterangan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Kenaikan Pangkat	988	792	1111	814	1012	696	
2	Peninjauan Masa Kerja	4	7	7	1	12	3	Sesuai usulan dari SKPD
3	Pengangkatan Cpnns Menjadi Pns	171	317	234	4	12	-	CPNS formasi tahun 2010. Tahun 2011 tidak ada penerimaan CPNS. Tahun 2014 dari honorer K.2
4	Pencantuman Gelar	19	13	8	16	28	15	Sesuai usulan dari SKPD

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

Informasi Kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat yang dapat mendukung pengambilan keputusan dalam rangka pembinaan pegawai, melalui peningkatan dalam pengelolaan database. Jumlah PNS yang masuk data base dari tahun ke tahun terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.70
Data Base Kepegawaian Tahun 2010 – 2015

NO	TAHU N	GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV					JUMLA H
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e	
1	2010	4	9	28	15	159	426	553	259	885	572	583	498	882	51	16	1	0	4941
2	2011	2	7	13	16	105	474	580	252	1011	536	495	563	911	85	19	0	0	5069
3	2012	2	6	12	16	97	367	589	230	830	643	456	610	1008	78	22	0	0	4966
4	2013	2	6	10	34	153	498	421	474	715	576	544	822	561	62	19	0	0	4897
5	2014	4	4	11	9	100	131	392	487	598	918	480	668	1021	74	24	1	0	4922
6	2015	3	3	13	7	88	86	401	503	492	1016	499	655	1036	65	33	1	0	4901

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

4. Penyelesaian Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Tabel 2.71
Penanganan Kasus-kasus PNS Tahun 2010– 2015

NO.	Kegiatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah	Keterangan
1	Pelanggaran Disiplin	18	0	0	-	8	5	31	

2	Dugaan Pelanggaran Disiplin	-	-	-	12	10	8	30	
---	-----------------------------	---	---	---	----	----	---	----	--

NO.	Kegiatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah	Keterangan
3	PNS melakukan Tindak Pidana	6	5	3	2	-	-	16	
4	Pemberhentian PNS	2	0	2	1	4	7	16	
5	Pemberian Izin Cerai	6	7	1	8	13	5	40	
6	Bimbingan Teknis Disiplin	0	1	6	6	29	1	43	Bimtek 2015 diikuti 100 orang dari semua SKPD
7	Siraman Rohani	-	-	-	1	1	7	9	Siraman Rohani tahun 2015 dilaksanakan di setiap Kecamatan
8	Sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010					1	2	3	

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

Terlaksananya pemberian penghargaan kepada PNS yang berprestasi melalui pemberian piagam Satyalencana Karya Satya, Penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Taspen dan Pensiun PNS.

Tabel 2.72
Penghargaan PNS berprestasi Tahun 2010 – 2015

N O	Kegiatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
1	KARPEG	186	111	538	195	13	33	1076
2	KARIS / KARSU	201	232	529	261	251	317	1791
3	PENSIUN	74	78	74	74	50	59	409
4	SATYA LENCANA	93	62	27	74	194	83	533
5	TASPEN	141	85	20	20	5	75	346

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dilakukan melalui kegiatan diklat kepemimpinan, diklat prajabatan dan pengiriman mengikuti seleksi tugas belajar serta pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas serta pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN.

Tabel 2.73
Realisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Th. 2010-2015

N O	KEGIATAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	JUMLAH
1	DIKLAT KEPEMIMPINAN	46	91	54	22	19	61	293
2	DIKLAT PRA JABATAN	294	679	226	16	1	71	1287
3	TUGAS BELAJAR	33	10	18	22	23	27	133
4	IJIN BELAJAR	21	360	234	75	95	104	889
5	UJIAN DINAS	35	33	12	34	40	41	195
6	UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH	60	10	11	18	20	12	131

7	IPDN	3	1	2	1	4	1	12
---	------	---	---	---	---	---	---	----

Sumber : Badan Kepegawaian Kab. Kotawaringin Barat

5. INSPEKTORAT KABUPATEN

Dalam rangka mewujudkan *clean government* di jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, diperlukan dukungan aparatur pengawasan yang kompeten. Upaya untuk membentuk aparatur pengawasan yang kompeten tersebut senantiasa dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur pengawasan sehingga akan diperoleh pengawasan yang profesional.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, selama Tahun 2015 dilakukan beberapa hal yaitu :

1. Pemeriksaan reguler sebanyak 74 obyek pemeriksaan dari jumlah potensi pemeriksaan 261 obyek (28,35%). Hasil dari pemeriksaan tahun 2014 terdapat 334 temuan dengan 659 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sejumlah 334 (50,68%);
2. Melakukan pengukuran kinerja instansi atas pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2014 terhadap 36 SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Selanjutnya fungsi pengawasan juga dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari SKPD;
2. Pemeriksaan Khusus;
3. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi KKN;
4. Review atas laporan keuangan SKPD Tahun Anggaran 2014;
5. Pencermatan DPA SKPD Tahun Anggaran 2015;
6. Kas Opname dan Stok Opname Tahun Anggaran 2015;
7. Monitoring inventarisasi aset tetap 2015;
8. Asistensi penyelenggaraan pemerintah baik tingkatan desa maupun SKPD;
9. Inspeksi Mendadak.

6. KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN (KPTP)

Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat menangani beberapa jenis izin yaitu sebanyak 15 jenis izin. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan / Non

Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat. Berikut ini adalah informasi tentang jenis dan realisasi izin yang diterbitkan oleh sebagai berikut :

Tabel 2.74
Jenis dan Realisasi Perizinan di Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2013 s/d 2015

No.	Jenis Izin Usaha	Ralisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	2015		
				Target	Realisasi	% Realisasi dari target
1	2	3	4	5	6	7
1.	IMB	1.168	1.229	1.229	769	62,58
2.	SITU	660	700	700	573	112,30
3.	HO				550	
4.	Reklame	13	13	0	0	0
5.	TDP	467	462	462	428	92,64
6.	IUI	2	1	2	1	50,00
7.	TDI			2	3	100
8.	SIUP	461	466	466	439	94,21
9.	TDG/R	3	3	3	10	333,34
10.	IUA	2	1	1	0	0
11.	IT (Izin Trayek)			1	0	0
12.	IUA-PP	46	41	41	18	43,91
13.	IT-PP	0	0	3	3	100
14.	IBA dan Logpond	111	107	107	36	33,65
15.	IUJK	94	112	112	145	129,47
JUMLAH		3.027	3.135	3.135	2.975	

Sumber : KPTP Kabupaten Kotawaringin Barat

Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2015 telah menerbitkan berbagai izin usaha sebanyak 2.975 izin. Izin yang diterbitkan terdiri dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 769 izin, Izin Tempat Usaha (SITU) 573 izin, Izin Gangguan (HO) sebanyak 550 izin, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebanyak 428 izin, Izin Usaha Industri (IUI) sebanyak 1 izin, Tanda Daftar Industri sebanyak 3 izin, Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebanyak 439 izin, Tanda Daftar Gudang / Ruang sebanyak 10 izin, Izin Usaha Angkutan (IUA) dan Izin Trayek (IT) tidak ada yang mengajukan permohonan izin untuk tahun 2015. Kemudian Izin Usaha Angkutan Perairan Pedalaman (IUA-PP) sebanyak 18 izin, Izin Trayek Perairan Pedalaman (IT-PP) sebanyak 3 izin, Izin Bangunan Air (IBA) dan Logpond sebanyak 36 izin, dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebanyak 145 izin.

7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial. Pertama, Bencana Alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemic, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Kedua, Bencana Non Alam antara lain kebakaran hutan/lahan/permukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Ketiga, Bencana Sosial antara lain berupa kerusuhan social politik dan konflik social dalam masyarakat yang sering terjadi.

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi teknis terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kesehatan PU, dll. Begitu pula pada Tingkat Kabupaten, sehingga koordinasi antara instansi tersebut cukup sulit. Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Sesuai dengan amanat undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 25, dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun Pengisian dan Pelantikan pejabat eselon II, III dan IV dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2013.

8. KANTOR KECAMATAN

Pemerintahan Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis dan vital karena merupakan ujung tombak dan berada pada garda terdepan dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan fungsi pelayanan kepada masyarakat, disamping pemerintahan desa dan kelurahan.

Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat menjelaskan bahwa tugas kecamatan adalah “Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan

kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”.

Tugas umum pemerintahan yang dimaksud meliputi:

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses membangun masyarakat melalui pengembangan kemampuan, perubahan perilaku dan pengorganisasian masyarakat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri. Untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya diperlukan pendekatan yang tepat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di desa.

Terbatasnya akses dan belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat (termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan) dapat berpengaruh pada pemberdayaan ekonomis produktif masyarakat dan pengembangan potensi masyarakat untuk mandiri.

Upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dilakukan serta dititikberatkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan kelembagaan dalam masyarakat serta pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, selain itu pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui pemantapan nilai sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna. Berikut adalah indikator dan capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa th. 2014-2015 :

Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2014-2015

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2014	2015		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Jumlah desa yang terbaharui profil desanya	desa	75	94	77	81
2.	Jumlah musyawarah pembangunan desa/kelurahan yang dapat difasilitasi	desa/kel.	94	94	94	100
3.	Terlaksananya bulan bakti gotong royong masyarakat	desa	1	1	1	100
4.	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang terlatih	orang	0	188	0	0
5.	Jumlah desa/kelurahan yang mendapat akses TTG	desa/kel.	1	1	1	100

Sumber : BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015

Dalam upaya pengentasan dan percepatan desa tertinggal pemerintah daerah akan selalu meningkatkan peranan dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan melalui program pemberdayaan masyarakat.

22. URUSAN SOSIAL

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial

Sasaran dari bidang sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, atau tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesulitan, hambatan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterbatasan, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau kondisi perubahan lingkungan yang kurang mendukung. Dalam upaya pemberdayaan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama keluarga miskin, pada tahun 2015 telah dilakukan upaya pemberdayaan melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin untuk 6 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan pemberian bantuan kepada 20 KUBE

Keluarga Miskin Perkotaan yang berasal dari Kementerian Sosial RI, serta diberikan bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk 5 Kelompok berupa peralatan mesin jahit kepada peserta hasil kegiatan pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di LBK Pangkalan Bun.

Selain itu pada kegiatan pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial dilaksanakan launching program PANDU GEMPITA (pelayanan terpadu gerakan masyarakat peduli kabupaten/kota sejahtera), dimana program tersebut dalam pelaksanaannya melibatkan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga serta Puskesmas; sedangkan Dinas Sosial berperan sebagai stake holder (pengambil kebijakan). Selain launching program, telah dilaksanakan pula kegiatan Rapat Koordinasi PANDU GEMPITA yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial RI, serta terlaksananya pendampingan kepada 1191 KK peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat dilaksanakan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 3 Karang Taruna. Tidak kalah penting adalah pemberdayaan organisasi sosial (orsos) berupa yayasan atau organisasi dalam bentuk lain milik masyarakat yang melaksanakan penanganan PMKS, seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam atau luar panti yang jumlahnya telah mencapai 17 orsos.

Pada kegiatan pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial, sebagai upaya tetap eksis dan establish peran pemerintah daerah masih sebatas memberikan bantuan dalam bentuk makanan dan peralatan mandi, yang dilaksanakan melalui kegiatan anjongsana ke Panti Asuhan, Lembaga Perumahan, Rumah Sakit Daerah, Sekolah Luar Biasa dan Pondok Pesantren. Melalui Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, telah dilaksanakan konseling dan kampanye sosial (KIE) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Komda Lansia dan pemberian bantuan Bahan Makanan Sembako kepada 75 (tujuh puluh lima) Lansia pada acara Silaturahmi Lanjut Usia, dan pendampingan kepada 92 (sembilan puluh dua) Lanjut Usia yang mendapatkan bantuan sosial dari kementerian Sosial RI, serta pembinaan kepada 22 (dua puluh dua) Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terjaring dalam operasi PEKAT yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten. Kotawaringin Barat.

Pada Program Pembinaan Anak Terlantar melalui kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar memberikan pelayanan berupa pelatihan Sablon kepada 15 (lima belas) anak yang dilaksanakan di Loka Bina Karya (LBK) Pangkalan Bun dan pengiriman klien sebanyak 2 (dua) orang ke Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita (PSBRKW) Palangkaraya. Selain itu sebagai tindak lanjut dari pelatihan di Loka Bina Karya (LBK) telah dibentuk 3 KUBE dan masing-masing KUBE mendapatkan bantuan stimulan berupa peralatan dan perlengkapan Sablon.

Sedangkan pada kegiatan Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar, pelayanan yang diberikan berupa Pemberian Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada 20 (dua puluh) anak terlantar/putus sekolah. Dan terdapat 2 bayi terlantar dan hak asuhnya telah diberikan kepada orang tua asuh adopsi.

Terkait bantuan dan jaminan sosial kepada PMKS telah dilakukan pemberian bantuan pemulangan kepada pekerja migran terlantar sebanyak 107 orang, eks napi sebanyak 23 orang, dan psikotik sebanyak 3 orang. Disamping itu telah terlaksana pendampingan kepada Penerima Bantuan Jaminan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 1191 KK yang tersebar di 5 kecamatan. Dan juga telah terlaksana pemberian surat rekomendasi BPJS bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sebanyak 754 orang.

2.76 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2014	2015		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Keberadaan Sarana sosial:					
	• Panti asuhan	Unit	17	17	17	100
	• Panti jompo	Unit	--	1	--	0
	• Panti rehabilitasi	Unit		1		0
2.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Orang	68,75	72,00	21,29	29,57
3.	Upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	kasus	63,64	68,42	33,51	48,98

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat 2015

Pada tabel diatas untuk indikator PMKS yang memperoleh bantuan dan indikator Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial terlihat capaian pada tahun 2013 dan 2014 lebih tinggi dibandingkan tahun 2015, hal tersebut dikarenakan perbedaan cara penghitungannya yaitu untuk tahun 2013 dan 2014 didasarkan pada jenis PMKS-nya, sedangkan untuk penghitungan capaian tahun 2015 didasarkan pada jumlah penerima bantuan dan jumlah kasus yang ditangani di tahun tersebut yang mana keseluruhannya berjumlah

sebanyak 2.790 orang PMKS, terdapat pula di dalam nya jumlah yang mendapatkan jaminan sosial.

23. URUSAN KEBUDAYAAN

Awalnya Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah tujuan transmigrasi yang digalakkan pemerintah pada tahun 1980an. Dari program transmigrasi ini, warga pendatang dari berbagai daerah mulai masuk ke wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan menetap hingga saat ini. Saat ini penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari berbagai suku bangsa dan ras, yang telah berasimilasi dengan sangat baik.

Keberagaman suku dan ras penduduk ini tentunya juga menyebabkan keberagaman seni dan budaya yang berkembang. Masing-masing budaya terpetakan dengan sangat baik. Kesenian yang berkembang di suatu kecamatan biasanya juga merefleksikan dominasi kesukuan yang mendiami wilayah tersebut.

Di Kecamatan Arut Selatan sebagai ibukota Kabupaten, kesenian yang berkembang didominasi oleh budaya dengan ciri khas Melayu, yang merupakan asal usul Kesultanan Kotawaringin. Terdapat 37 grup kesenian, terdiri dari kesenian hadrah, rebana dan tari tradisional dayak pedalaman dan seni tradisional daerah lain di nusantara seperti Kesenian Sunda, Padang dan Jawa. Sedangkan di Kecamatan Arut Utara, budaya dan adat Dayak dominan dalam kehidupan sehari-hari terdapat 6 sanggar, adapun untuk desa tertentu terdapat kesenian pesisir dan Jawa. Di Kecamatan Kotawaringin Lama kebudayaan yang berkembang juga diwarnai ciri Melayu. Kecamatan Kotawaringin Lama merupakan pusat Kesultanan Kotawaringin. Sementara itu, di Kecamatan Pangkalan Lada budaya yang berkembang didominasi budaya Jawa.

Di Kecamatan Pangkalan Lada terdapat 13 grup kesenian yang terdiri dari grup reog, kuda lumping, wayang dan tari tradisional, bahkan juga barongsai serta Sanggar Tari Dayak. Pangkalan Lada tercatat paling aktif menyelenggarakan pementasan kesenian, dimana tahun 2014 terjadi 7 kali penyelenggaraan kesenian. Pergelaran tersebut merupakan bagian dari kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang melekat dalam kehidupan. Misalnya untuk memperingati tahun baru Hijriyah diadakan bersih desa dan pertunjukan wayang. Kegiatan berkesenian biasanya ditampung di gedung serbaguna milik desa ataupun di lapangan. Dengan demikian dapat diasumsikan masing-masing desa di Pangkalan Lada memiliki saranafasilitas seni.

Senada dengan Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Pangkalan Banteng juga didominasi kebudayaan Jawa. Terdapat 15 grup kesenian di kecamatan ini, dengan 3 kali penyelenggaraan kesenian dan budaya selama

tahun 2015. Sedangkan di Kecamatan Kumai, budaya yang berkembang dominan budaya pesisir lokal. Terdapat 23 grup kesenian dan satu kali penyelenggaraan kegiatan seni budaya pada 2015.

Tabel 2.77
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2015

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2014	2015		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	11 kali	4	11	11	100
2.	Sarana Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	2	2	100
3.	Jumlah group kesenian	43 group	43	50	43	86
4.	Jumlah gedung kesenian	-	-	-	-	-
5.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	33 buah	33	36	33	91,66

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kotawaringin Barat

Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa, membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, melestarikan dan mengembangkan budaya lokal maupun nusantara. Pengembangan budaya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki budaya dan peradaban luhur dan mampu menjaga jati diri ditengah pergaulan global. Langkah yang bisa ditempuh adalah :

1. Menjaga suasana kebebasan kreatif dibidang seni dan keilmuan;
2. Menyediakan prasarana untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan keilmuan yang bersifat non-komersial;
3. Memberikan dukungan dan insentif kepada kegiatan kesenian dan keilmuan untuk mengembangkan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal dan nasional, modern dan tradisional.

24. URUSAN STATISTIK

Urusan statistik di Kabupaten Kotawaringin Barat terkait dengan penyediaan data statistik dasar ditangani oleh instansi vertikal di daerah yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memfasilitasinya melalui kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dengan menyediakan anggaran untuk penggandaannya dan membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung proses penyusunan buku statistik dasar tersebut yang meliputi Buku Kotawaringin Barat Dalam

Angka, Buku PDRB Kotawaringin Barat, Buku Penduduk Kotawaringin Barat dan Buku Distribusi Pendapatan.

Sedangkan untuk penyediaan data statistik sektoral dan statistik khusus seperti Buku Profil Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Buku Profil Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat, Buku Statistik Perkebunan, Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat, Tabel Input Output Daerah dan yang lainnya ditangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau instansi pemerintah di daerah.

Berikut dapat dilihat mengenai Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik selama tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2015 sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD 2012-2016 Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2.78
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2014 - 2015

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2014	2015		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Ketersediaan Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka	buku	Ada	Ada	Ada	100
2.	Ketersediaan buku PDRB Kotawaringin Barat	buku	Ada	Ada	Ada	100
3.	Tingkat keterisian data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	elemen data	Dari 1.304 isian elemen data yang tersedia, berhasil terisi sebanyak 977 atau (74,92%)	1.382 elemen data	1.246 elemen data	90,16 %

Sumber : Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

Pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mengalokasikan anggaran untuk penggandaan Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015 dan Buku PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, dikarenakan pihak BPS selaku lembaga yang berwenang dalam menyediakan data statistik dasar tidak memberikan rekomendasi dalam hal penggandaan buku-buku dimaksud.

Namun demikian meskipun buku-buku tersebut tidak tersedia, kebutuhan akan data-data terbaru untuk kepentingan penyusunan perencanaan tetap dapat terpenuhi karena fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui SKPD terkait, dengan pihak BPS tetap dapat berjalan dengan baik.

Kemudian bila dilihat dari indikator tingkat capaian keterisian data statistik pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) terjadi peningkatan yang cukup significant yaitu dari 74,92 % pada tahun 2014 menjadi 90,16 % pada akhir tahun 2015.

25. URUSAN KEARSIPAN

Arsip berguna sebagai sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan, menunjang proses perencanaan, mendukung pengawasan, menjadi alat pembuktian, alat untuk kepentingan politik dan ekonomi. Banyak proses pembangunan yang terhambat karena hilangnya salah satu arsip sebagai alat pembuktian. Belajar dari berbagai pengalaman yang terjadi beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa kearsipan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Arsip merupakan bukti-bukti konkrit yang akan menjelaskan kebenaran suatu peristiwa.

Perlakuan terhadap arsip di masa sekarang sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pengelolaan arsip yang sistematis akan mengendalikan pertumbuhan arsip yang semakin hari semakin menumpuk dengan semakin kompleksnya kegiatan yang dilakukan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu mengembangkan sistem kearsipan dalam kaitannya dengan penerapan teknologi informasi dan otomasi kearsipan. Tindak lanjut dari penerapan teknologi informasi adalah dengan penyediaan khazanah arsip dalam bentuk digital yang dapat diakses masyarakat secara online. Pengelolaan arsip secara elektronik ini perlu mendapat dukungan dana yang memadai. Terkait dengan Indikator dan Capaian Kinerja Urusan kearsipan yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.79
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 – 2015

No.	Indikator	Capaian 2014	2015		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Pengelolaan arsip secara baku (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	100
2.	Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan Kearsipan	-	-	-	-
3.	Jumlah SKPD yang mempunyai arsiparis	-	4	4	100
4.	Ratio Jumlah SKPD terhadap Arsiparis (%)	4:36	-	4:36	11,11
5.	Arsip audio visual	265	-	-	-
6.	Arsip Foto/Album	279	30	30	100
7.	Pembinaan kearsipan ke pemerintah desa	-	17	21	123,53
8.	Sosialisasi kearsipan	-	-	-	-
9.	Jumlah Arsip In Aktif yang dikelola	19.462	2.000	19.515	975,75
10.	Jumlah Arsip Statis/Vital yang dikelola	1.001	-	7	-

Sumber : KPAD Kab. Kotawaringin Barat

26. URUSAN PERPUSTAKAAN

Perpustakaan merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui penyediaan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, menunjukkan semakin pentingnya peran perpustakaan dalam mentransformasikan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IIPTEK) secara demokratis menuju masyarakat cerdas, kreatif, kritis dan inovatif.

Di samping itu, Perpustakaan memiliki peran sebagai pelestari nilai budaya (*culture building*) di masyarakat dan memajukan peradaban bangsa, bahkan peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari tata kelola, arsitektur bangunan dan koleksi dari perpustakaanannya. Perpustakaan hanya akan berarti bila koleksi yang dimilikinya dapat dimanfaatkan dengan baik, untuk itu penyelenggaraan perpustakaan harus diupayakan agar masyarakat tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah untuk meningkatkan pengunjung Perpustakaan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan Jumlah koleksi bahan pustaka, baik melalui pengadaan langsung ataupun gerakan hibah buku;
2. Menyediakan Layanan Ruang Baca Anak;
3. Menyediakan Internet / *WiFi* gratis;
4. Menyediakan Layanan Audio Visual;
5. Menyediakan Layanan Ruang Baca di tempat;
6. Menyediakan Layanan Referensi;
7. Kelas Berbagi (workshop fotografi, kelas kecantikan, belajar bersama);
8. Layanan Wisata Pustaka;
9. Layanan Mendongeng/ *Story Telling* untuk anak usia TK;
10. Layanan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK);
11. Layanan Pinjam Pakai Buku.
12. Layanan Taman Baca Baruna
13. Layanan Bimbingan Pemakai/ pemustaka

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memajukan urusan perpustakaan pada tahun 2015 meliputi :

- 1) Pemasarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, yaitu dengan mengadakan lomba bercerita tingkat SD se-Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 2) Pengembangan minat dan budaya baca, yaitu dengan membuka layanan setiap hari sampai pukul 21.00 WIB, mengadakan lomba cipta dan baca puisi tingkat SMP, Lomba menulis surat untuk ibu ditingkat SMA, Lomba

senam beruang untuk anak PAUD dan TK dan Lomba menyanyi untuk tingkat SD/MI, mengadakan layanan story telling (mendongeng) untuk anak TK, dan memberikan layanan kelas berbagi untuk masyarakat.

- 3) Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat, yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap perpustakaan kelurahan/desa yang diharapkan akan meningkatkan pengelolaan perpustakaan kelurahan/ desa menjadi lebih baik dan juga mengadakan Lomba perpustakaan desa/ kelurahan se Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 4) Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca, yaitu dengan kegiatan MPK ke sekolah/ desa/ kelurahan yang jauh dari Perpustakaan Umum Daerah;
- 5) Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, yaitu dengan memberikan promosi layanan perpustakaan daerah melalui media elektronik/ siaran radio dan televisi lokal, mengikuti acara Kobar expo dan mengadakan acara peluncuran koleksi buku baru tahun 2015.
- 6) Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, yaitu pengadaan langsung buku-buku perpustakaan, yang diharapkan dengan bertambahnya bahan pustaka akan dapat memenuhi kebutuhan pemustaka dan juga akan meningkatkan jumlah pemustaka (anggota baru, pengunjung dan peminjam buku).
- 7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi kepada perpustakaan desa/ kelurahan yang telah mengikuti Bimtek Pengeolaan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh KPAD Kab. Kotawaringin Barat.
- 8) Perawatan Bahan Pustaka, yaitu kegiatan untuk memelihara dan merawat koleksi bahan pustaka agar tidak rusak.

Terkait dengan Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.80
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015

No.	Indikator	Capaian s/d 2014	2015		
			Target	Realisasi	% Realisasi thd target
1.	Jumlah Perpustakaan/tahun	292	33	111	336,36
2.	Jumlah anggota perpustakaan/tahun	5.621	500	1.391	278,20

No.	Indikator	Capaian s/d 2014	2015		
			Target	Realisasi	% Realisasi thd target
3.	Jumlah pengunjung perpustakaan/tahun	51.919	10.000	62.585	625,85
4.	Jumlah peminjam/tahun	11.017	3.500	34.270	979,14
5.	Jumlah koleksi bahan pustaka/tahun	16.645	3.000	1.528	50,93
6.	Ratio Jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	292 : 252.492	325 : 278.141	403 : 278.141	124,00
7.	Ratio jumlah pustakawan terhadap jumlah penduduk	3 : 252.492	1 : 278.141	1 : 278.141	100

Sumber : KPAD Kabupaten Kotawaringin Barat

2.2.2. Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pilihan

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pembangunan subsektor kelautan dan perikanan selain ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan juga terus didorong dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Subsektor kelautan dan perikanan adalah salah satu pendukung usaha ekonomi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam usaha menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi panjang pantai sebesar 178 km sehingga potensi dari penangkapan di perairan laut cukup besar. Di samping itu juga ada sungai besar dan kecil, danau dan rawa yang juga mempunyai potensi baik untuk penangkapan maupun budidaya. Sumber air cukup melimpah di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, meliputi kolam, keramba, jaring apung maupun tambak, yang tersebar di semua Kecamatan. Usaha untuk meningkatkan perikanan budidaya perlu terus digalakan untuk mengurangi ketergantungan dari perikanan tangkap. Produksi perikanan secara keseluruhan pada tahun 2015 di Kabupaten kotawaringin Barat sebesar

Pada tahun 2015 Dinas Kelautan dan Perikanan telah mendorong pembukaan lapangan kerja baru bagi sekitar 4.972 orang dengan perincian adalah sebagai berikut :

- Bidang perikanan tangkap : 2.391 orang
- Bidang perikanan budidaya : 1.553 orang
- Bidang pengolahan dan pemasaran : 1.028 orang

Pengukuran capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.81
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015

No.	Indikator	2014	2015		
			Target (Ton)	Realisasi (Ton)	% Realisasi thd target
1.	Produksi perikanan (ton)	16.345,53	15.797,20	16.055,81	101,63
2.	Produksi Perikanan tangkap (ton)	12.165,80	13.000,00	12.050,40	92,7
	a. Perairan Laut	10.602,10	11.250,00	10.896,70	93,59
	b. Perairan Umum	1.563,70	1.750,00	1.153,70	83,48
3.	Produksi Perikanan Budi daya (ton)	4.179,73	4.550,00	4.005,41	88,03
	a. Budidaya Air Payau	750,81	800,00	626,19	78,27
	b. Budidaya Air Tawar	3.140,58	3.350,00	2.996,15	89,44
	c. Budidaya Perairan Laut	288,25	400,00	383,07	95,58
4.	Rata-rata Konsumsi ikan per orang/tahun (kg)	38,00	41,35	41,35	100,00
5.	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	1.357,17	589,00	174,32	29,59
6.	Peningkatan produksi benih ikan (juta ekor)	0,35	2 Juta	941,73	47,08

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kobar

Berdasarkan Tabel diatas dari indikator yang ada mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, ini di karenakan perubahan iklim el nino selama tahun 2015 yang menyebabkan beberapa fisik lokasi rawa atau danau yang kering/ luasan berkurang, sedangkan untuk perairan laut kondisi asap mengurangi/mengganggu aktivitas penangkapan ikan.

Jumlah kapal penangkapan ikan perairan laut terdiri dari 204 perahu tanpa motor, 962 kapal ukuran 0 – 5 GT, 129 kapal ukuran 5 - 30 GT, dan 5 kapal ukuran lebih dari 30 GT. Jumlah kapal penangkapan ikan diperairan umum terdiri dari 467 buah perahu tanpa motor dan 614 buah motortempel.

Alat tangkap perairan laut terdiri dari jaring insang tetap sebanyak 593 buah, jaring tiga lapis sebanyak 679 buah, jaring insang hanyut sebanyak 312 buah, purseine sebanyak 50 buah, rawai sebanyak 155 buah, serok sebanyak 65 buah, dogol, termasuk lampara dasar 154, alat penangkap kerang 91 buah, alat penangkap kepiting 45 buah, bubu 110 buah lain-lain sebanyak 120 buah. Alat tangkap perairan umum terdiri dari jaring insang tetap sebanyak 620 buah,

bubu sebanyak 441 buah, pancing sebanyak 341 buah, rawai sebanyak 620 buah, jala tebar sebanyak 303 buah, sero sebanyak 59, garpu tomba, dan lain-lain 201 buah.

Potensi usaha budidaya tambak tahun 2015 di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 35.200 ha. Dari luasan tersebut yang sudah diusahakan dan aktif beroperasi seluas 652 ha atau sebanyak 168 Rumah Tangga Perikanan (RTP), terdapat di Kecamatan Kumai seluas 590 ha atau 373 unit tambak atau 147 RTP dan Kecamatan Arut Selatan 62 ha yang terdiri dari 24 unit tambak atau 21 RTP dengan total produksi 626,19 ton.

Untuk perkembangan usaha budidaya kolam ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah berkembang di 6 (enam) Kecamatan terdiri dari Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, Kotawaringin Lama, Kumai dan Arut Utara, terdiri dari 1.080 RTP dengan luas areal 22,92 ha dan 2.310 unit. Hasil produksi sebesar 1.366,42 ton terdiri dari ikan mas, nila, lele, gurame dan patin.

Usaha budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) di Kabupaten Kotawaringin Barat berada di sepanjang daerah aliran sungai Arut dan Lamandau. Areal yang telah dimanfaatkan sebesar 5,15 ha atau sebanyak 2.785 unit. Jumlah hasil produksi sebesar 1.629,73 ton terdiri dari ikan nila, patin, mas, gabus, bawal dan ikan lainnya.

Usaha budidaya rumput laut hanya di Desa Teluk Bogam dengan jumlah 30 RTP, luas areal 5 Ha atau sebanyak 300 unit. Jumlah produksi sebesar 383,07 ton basah. Bila dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan pembudidaya kekurangan bibit rumput laut terutama pada musim penghujan. Mereka tidak bisa mempertahankan bibit rumput laut untuk bisa dijadikan bibit setelah musim hujan berakhir.

Usaha budidaya mina padi masih belum dikembangkan, untuk menyebarluaskan usaha budidaya mina padi, pada tahun 2015 dibuat kawasan terpadu pertanian di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Pangkalan Banteng yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan juga atas keinginan dari masyarakat setempat.

Sasaran produksi usaha budidaya ikan tahun 2016 sebesar 5.050 ton dan mencakup rumah tangga perikanan (RTP) sebanyak 1.750 RTP, dengan rincian : jumlah unit usaha budidaya tambak 775 ha, dengan produktivitas 500-1.000 kg/Ha/tahun, kolam ikan 140 ha, dengan produktivitas 40.000 - 45.000 kg/Ha/tahun, karamba 2.925 unit dengan produktivitas 400-1.000 kg/unit/tahun, mina padi sebanyak 20 ha dengan produktivitas 1.000 - 1.500 kg/ha/tahun serta rumput laut 500 unit dengan produktivitas 568 ton /tahun (basah).

Perkembangan pengendalian mutu dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum masih sangat minim sarana dan prasarana. Hal ini dapat dilihat dari jumlah unit pengolahan, pabrik es dan lain sebagainya yang mendukung kegiatan pengendalian mutu dan pemasaran hasil perikanan. Namun demikian dalam beberapa tahun ini usaha untuk meningkatkan mutu produk hasil perikanan serta perluasan pasar ikan telah banyak diusahakan, antara lain :

1. Pembangunan gedung outlet pemasaran ikan;
2. Pengadaan alat penepung ikan, alat penghancur es, ice storage, long pan dan ice can;
3. Pengadaan box dingin (*cool box*) untuk menjaga rantai dingin;
4. Pembangunan pasar ikan;
5. Peralatan outlet pemasaran ikan.

Pengendalian mutu produk hasil perikanan sangat bergantung pada sarana rantai dingin, hal ini karena produk perikanan merupakan jenis produk yang mudah busuk (*Ferisablefood*) dimana perlu terjaga rantai dingin dari pasca penangkapan/pasca budidaya hingga sampai ke konsumen.

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 difokuskan pada pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan penertiban ijin usaha perikanan. Hasil pengawasan dilapangan berupa pelarangan penggunaan alat/bahan penangkap ikan yang dilarang seperti strum sebanyak 1 kasus, trawl sebanyak 2 kasus dan potasium sebanyak 1 kasus, perijinan usaha penangkapan ikan 1 kasus dan penangkapan ikan yang dilindungi (*duyung*) sebanyak 1 kasus.

Salah satu program pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat mendesak adalah pembentukan daerah suaka perikanan, dimana hal ini sangat penting guna menjaga dan melestarikan sumberdaya kelautan dan perikanan dari kerusakan yang tidak diinginkan. Pada perkembangan beberapa tahun ini telah pula disusun zonasi/daerah sumberdaya kelautan.

Beberapa potensi sumberdaya kelautan yang dapat dikelola menjadi daerah suaka antara lain :

1. Gosong Senggora;
2. Gosong Sepagar;
3. Gosong Sebogor-Lubang Buaya;
4. Danau Masorayan;
5. Danau Seluluk;
6. Danau Terusan;
7. Danau Gatal Kiri-Kanan.

2. URUSAN PERTANIAN

2.1 Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain sebagai penyedia bahan pangan baik nabati maupun hewani, sektor ini berperan dalam rangka penyediaan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan sumber pendapatan masyarakat di perdesaan, disekaligus pemenuhan input bagi sektor industri pengolahan. Kontribusinya terhadap pembentukan PDRB terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Capaian ini sejalan dengan target capaian indikator kinerja pembangunan sektor pertanian dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2016 yang meliputi peningkatan pengembangan aktivitas kelembagaan petani, nilai tukar petani, peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan, serta perkembangan luas lahan produktif sehubungan dengan upaya pengendalian alih fungsi lahan. Terkait dengan Indikator dan Capaian kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan pada tahun 2015 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.82
Indikator dan Capaian kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2015

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2014	Target	2015	
				Capaian	%
	Pelayanan Urusan Pilihan				
1.	Pertanian Tanaman Pangan				
1.1.	Luas tanam tanaman pangan				
1.1.1.	Padi sawah (Ha)	6.866	8.453	5.412	64,02
1.1.2.	Padi ladang (Ha)	2.862	3.881	1.454	37,46
1.1.3	Jagung (Ha)	638	1.472	1.526	103,67
1.2.	Luas Panen Tanaman Pangan				
1.2.1	Padi sawah (Ha)	7.181	8.030	4.000	49,81
1.2.2	Padi ladang (Ha)	2.674	3.687	1.664	45,13
1.2.3	Jagung (Ha)	493	1.399	608	43,46
1.3	Produktivitas tanaman pangan				
1.3.1	Padi sawah (Ton/Ha)	3,57	3,79	3,73	98,42
1.3.2	Padi ladang (Ton/Ha)	2,23	2,12	2,28	107,55
1.3.3	Jagung (Ton/Ha)	3,70	3,25	3,65	112,31
1.4	Produksi tanaman pangan				
1.4.1	Padi sawah (Ton)	25.626	30.435	14.928	49,05
1.4.2	Padi ladang (Ton)	5.950	7.816	3.797	48,58
1.4.3	Jagung (Ton)	1.822	4.547	2.219	48,80

Sumber : Dinas Pertaniandan Peternakan Tahun 2015

Pada tahun 2015 capaian produksi tanaman pangan strategis yakni padi kurang optimal, namun produksi jagung cukup menggembirakan. Produksi padi mencapai angka 18.725 ton, lebih rendah dari tahun 2014 yang sebesar 31.576 ton. Penurunan produksi disebabkan pergeseran musim tanam akibat musim kemarau yang panjang (elnino) sehingga panen bergeser pada tahun 2016.

Produksi jagung pada tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu sebesar 2.219 ton Pipilan Kering (PK) naik 21,79% dari tahun 2014 yang mencapai 1.822 ton PK. Sedangkan untuk hasil komoditi tanaman pangan lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.83
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hasil Komoditi Pertanian Tanaman Pangan Lainnya di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 – 2015

No	Jenis Komoditi	2014			2015			+ / (-) Produktivitas
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produkti vitas (Ton/Ha)	
1	Kedelai	4	5	1,25	59	70	1,19	-5,08
2	Kacang Tanah	96	109	1,14	79	92	1,16	2,57
3	Kacang Hijau	4	3	0,75	5	4	0,80	6,67
4	Ubi Kayu	404	4.852	12,01	426	5.263	12,35	2,87
5	Ubi Jalar	130	920	7,08	114	1.040	9,12	28,91

Sumber data : Dinas Pertanian dan Peternakan Kobar. Th. 2015

Produksi kedelai sebesar 70 ton, naik 1300% dari tahun 2014 yang hanya mencapai 5 ton, namun produktivitasnya mengalami penurunan. Kondisi peningkatan produksi tanaman ini disebabkan adanya stimulus yang berikan pemerintah melalui pengembangan tanaman kedelai seluas 150 ha. Selain itu, adanya motivasi petani untuk menanam kedelai karena alasan harga yang lebih baik dan adanya pemasaran yang lebih jelas di tingkat lapangan. Dukungan dan bantuan pemerintah umumnya akan membuat petani lebih berminat menanam tanaman pangan.

Produksi kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar pada tahun 2015 masing-masing sebesar 4 ton, 5.263 ton dan 1.040 ton. Angka produksi ketiga komoditi ini naik masing-masing sebesar 33,33%, 8,47% dan 13,04% dibandingkan angka produksi tahun 2014. Untuk komoditi lainnya, yakni kacang tanah, produksinya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 92 ton, turun 15,60% dari tahun 2014 yang angka produksinya pencapai 109 ton.

Usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Kotawaringin Barat baru sebagian kecil yang berorientasi pasar, karena hasil produksi umumnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan petani sendiri. Selain itu, lahan-lahan pertanian yang baru dikembangkan belum berfungsi secara optimal, disisi lain tingginya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke perkebunan

sawit dan karet menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengetahui produksi dan produktivitas tanaman sayur sayuran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.84
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hasil Tanaman Sayur-Sayuran di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 – 2015

No	Jenis Komoditi	2014			2015			+ / (-) Produktivitas
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)	
1	Bayam	92	136,2	1,48	76	159,7	2,10	0,42
2	Cabe Rawit	186	459,7	2,47	163	390,3	2,39	-0,03
3	Cabe Besar	60	155,8	2,60	52	131,5	2,53	-0,03
4	Kacang Panjang	270	552,8	2,05	227	512,6	2,26	0,10
5	Kangkung	139	205,4	1,48	99	227,3	2,30	0,55
6	Ketimun	106	152,2	1,44	91	305,1	3,35	1,34
7	Sawi	188	290,1	1,54	191	389,4	2,04	0,32
8	Terung	217	587,7	2,71	164	564,1	3,44	0,27
9	Tomat	90	187,4	2,08	73	199,3	2,73	0,31
10	Buncis	77	108,2	1,41	77	166,4	2,16	0,54
11	Bawang Daun	94	159,8	1,70	87	182,8	2,10	0,24

Sumber data : Dinas Pertanian dan Peternakan Kobar Tahun. 2015

Upaya mendorong dan mengoptimalkan sentra-sentra baru pengembangan padi yang lebih tertata secara kewilayahan terus dilakukan. Tahun 2015 dilaksanakan rehabilitasi/optimalisasi lahan sawah seluas 75 ha, dan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang 2.995 meter. Dalam bidang perbenihan dilaksanakan pengembangan Balai Benih Padi di Tanjung Terantang seluas 25 ha dan penangkaran benih padi seluas 30 ha di tingkat petani penangkar. Balai Benih Padi ini akan terus dioptimalkan fungsinya dalam rangka pemenuhan penyediaan benih unggul berkualitas bagi petani.

Selain faktor fisik, faktor sumber daya petani dan kelembagaannya juga perlu terus dikembangkan agar petani mampu mengelola usaha taninya secara lebih optimal, mandiri dan lebih baik. Lembaga penyuluh pertanian juga perlu terus didorong fungsi dan perannya dalam rangka pendampingan peningkatan kesejahteraan petani. Mengenai indikator capaian kinerja Sub Sektor Peternakan dapat digambarkan secara rinci pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.85
Indikator dan Capaian kinerja Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2015

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2014	Target	2015	
				Capaian	%
	Pelayanan Urusan Pilihan				
2.	Peternakan				

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2014	Target	2015 Capaian	%
2.1	Populasi Ternak				
2.1.1	Sapi (ekor)	13.155	18.726	14.397	76,88
2.1.2	Kerbau (ekor)	-	-	-	-
2.1.3	Kambing /Domba (ekor)	2.398	2.530	2.764	109,25
2.1.4	Babi (ekor)	5.498	6.178	5.718	92,55
2.1.5	Ayam buras (ekor)	343.941	451.037	345.661	76,64
2.1.6	Ayam ras petelur (ekor)	10.000	38.000	46.500	122,37
2.1.7	Ayam ras pedaging (ekor)	166.973	224.984	158.253	70,34
2.1.8	Itik (ekor)	40.317	45.608	41.527	91,05
2.2	Produksi Daging Ternak				
2.2.1	Sapi (Ton)	552,96	694,99	572,24	82,34
2.2.2	Kerbau (Ton)	-	-	-	-
2.2.3	Kambing / Domba(Ton)	49,62	57,79	58,14	100,61
2.2.4	Babi (Ton)	93,25	115,14	94,47	82,05
2.2.5	Ayam buras (Ton)	388,09	435,95	340,50	78,11
2.2.6	Ayam Ras Petelur (Ton)	-	-	-	-
2.2.7	Ayam Ras Pedaging (Ton)	886,34	892,1	817,78	91,67
2.2.8	Itik (Ton)	17,78	15,14	14,12	93,26
2.3	Produksi Telur				
2.3.1	Ayam buras (Ton)	208,76	281,84	207,98	73,79
2.3.2	Ayam Ras Petelur (Ton)	60,00	171,00	209,25	122,37
2.3.3	Itik (Ton)	133,49	161,17	133,19	82,64

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2015

Sektor peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat terus didorong peran strategisnya terutama dalam rangka peningkatan produksi daging untuk mencapai kemandirian atau mengurangi ketergantungan dari luar daerah. Capaian produksi daging sapi potong pada tahun 2015 sebesar 572,24 ton, naik sebesar 3,49% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 552,94 ton.

Pemotongan ternak sapi potong tahun 2015 tercatat sebanyak 3.563 ekor dengan tingkat produksi daging mencapai 572,24 ton, sedangkan ternak Kambing/Domba sebesar 4.110 ekor dengan produksi daging mencapai 58,14ton. Disisi lain, produksi telur unggas secara keseluruhan pada tahun 2015 mencapai 550,42 ton (naik 36,84% dari produksi tahun 2014 sebesar 402,25 ton). Peningkatan produksi telur ini diperoleh dari adanya pengembangan ayam ras petelur di Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana pada tahun 2015 produksi telur ayam ras telah mencapai 209,25 ton (naik 248,75% dari tahun 2014 yang hanya sebesar 60 ton). Disisi lain, produksi telur ayam buras dan itik pada tahun 2015 masing-masing sebesar 207,98 ton dan 133,19 ton.

Peningkatan produksi daging sapi potong diikuti juga dengan kenaikan produksi ternak kambing/domba dan unggas. Produksi daging kambing/domba tahun 2015 sebesar 58,14 ton, meningkat dibanding tahun 2014 yang mencapai 49,62 ton. Produksi daging ternak babi juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 produksinya mencapai 94,47 ton, sedikit naik dibandingkan produksi

tahun 2014 yang mencapai 93,25 ton. Produksi daging ternak unggas pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 9,27%, dimana pada tahun 2015 produksinya hanya mencapai 1.172,40 ton dibandingkan pada tahun 2014 yang mencapai angka produksi sebesar 1.292,21 ton. Sedangkan untuk populasi ternak secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.86
Populasi Ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2015

No.	Jenis Ternak	Satuan	Populasi		
			2014	2015	Δ (%)
1	Sapi	Ekor	13.155	14.397	9,44
2	Kambing/Domba	Ekor	2.398	2.764	15,26
3	Babi	Ekor	5.498	5.718	4,00
4	Ayam Buras	Ekor	343.941	345.661	0,50
5	Ayam Ras Pedaging	Ekor	166.973	158.253	-5,22
6	Ayam Ras Petelur	Ekor	10.000	46.500	365,00
7	Itik	Ekor	40.317	41.527	3,00

Sumber data : Dinas Pertanian dan Peternakan Kobar, Tahun 2015

Populasi ternak terus mengalami peningkatan pada tahun 2015, Populasi ternak sapi potong pada akhir tahun 2015 telah mencapai 14.397 ekor (naik 9,44% dari tahun 2014 yang mencapai 13.155 ekor). Populasi Ternak Kambing/Domba mencapai 2.2764 ekor (naik 15,26%), Babi 5.718 ekor (naik 4%), Ayam Buras 345.661 ekor (naik 0,50%), Ayam Ras Pedaging 158.253 ekor (turun 5,22%), Ayam Ras Petelur populasinya meningkat cukup tinggi yakni mencapai 46.500 ekor (naik 365% dari tahun 2014 yang hanya 10.000 ekor), sedangkan populasi ternak Itik sebanyak 41.527 ekor (naik 3%).

Pada tahun 2015 sarana pendukung pelayanan kesehatan ternak dan pelayanan Inseminasi Buatan (IB) terus dilengkapi sehingga dapat mendukung pengembangan populasi dan produksi ternak. Dalam bidang perbibitan ternak sapi, kinerja petugas Inseminasi Buatan (IB) cukup baik dimana terfasilitasi pelaksanaan IB atau kawin suntik pada ternak masyarakat sebanyak 1.692 ekor epseptor ternak sapi (90,53% dari target yang ditetapkan yaitu 1.869 ekor). Sedangkan angka kelahiran ternak sapi hasil IB sebanyak 1.031 ekor.

2.2 Sub Sektor Perkebunan

Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas wilayah 1.075.900 Ha. mempunyai potensi lahan perkebunan seluas 281.780 Ha. Dari luasan tersebut 212.083,05 Ha diantaranya telah ditanami. Secara terperinci potensi lahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.87
Potensi Lahan di wilayah Kotawaringin Barat Tahun 2015

NO	Peruntukan	Luas (Ha)	%
1.	Konsesi Kehutanan	565.028,00	52,54
2.	Konsesi Transmigrasi	28.164,00	2,62
3.	Kawasan Pengembangan	69.696,95	6,48
4.	Konsesi Budidaya Perkebunan	212.083,05	19,72
5.	Kawasan Non Perkebunan	191.309,00	17,79
6.	Danau dan Sungai	9.142,00	0,85
Jumlah		1.075.423,00	100,00

Sumber : Data Sementara Statistik Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Semester II Tahun 2015

Terdapat 5 komoditi perkebunan utama yang berkembang di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai tahun 2015 yang diusahakan pada areal seluas 212.083,05 Ha. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2014 yaitu 192.846,56 terjadi penambahan luasan sebesar 19.236,49 ha namun pada tahun 2013 sebesar 204.868,62 ha terdapat penurunan sebesar 12.022,06 Ha. Penurunan ini disebabkan oleh dikeluarkannya data luasan pada 5 Perkebunan Besar Swasta (PBS) Kelapa Sawit yang merupakan perusahaan lintas daerah. Data PBS lintas daerah dikelola oleh Dinas Perkebunan Provinsi yaitu seluas 29.586,91 Ha. Jika data yang dikeluarkan dan data penurunan disinkronkan maka terdapat peningkatan perluasan areal sebesar 17.564,84 Ha (29.586,91-12.022,06). Data luas 5 komoditi secara terperinci disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.88
Luas Areal Perkebunan Per Komoditi
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2015

No	Komoditi	2012 (Ha)	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)
1	Karet	17.407,00	17.451,50	17.907,00	18.082,50
2	Kelapa	1.181,51	1.176,51	1.069,52	776,75
3	Lada	970,20	875,20	268,95	297,74
4	Kelapa sawit	213.547,21	184.695,33	173.048,34	192.669,23
5	Nilam	-	-	-	-
6	Lain-lain	341,50	313,50	243,50	226,83
Jumlah		233.447,42	204.868,62	192.846,56	212.083,05

Sumber :Data Sementara Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat Semester II Tahun 2015

Luas kebun di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 didominasi oleh perkebunan besar swasta 69,61 %, dibandingkan perkebunan besar negara 1,05 % dan perkebunan rakyat 29,35 % , yang terperinci seperti pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.89
Luas Areal Perkebunan Berdasarkan Kategori Kepemilikan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 - 2015

No	Kepemilikan Kebun	2013		2014		2015	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Perkebunan Rakyat	59.898,69	25,62	60.859,01	31,55	62.236,92	29,35
2	Perkebunan Besar Negara	2.220,00	0,95	2.220,00	1,16	2.220,00	1,05
3	Perkebunan Besar Swasta	142.749,93	73,43	129.767,55	67,29	147.626,13	69,61
Jumlah		204.868,62	100,00	192.846,56	100,00	212.083,05	100,00

Sumber : Data Sementara Statistik Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Semester II Tahun 2015

Produksi perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 meningkat, dibanding pada tahun 2014. Produksi kebun didominasi oleh produk kelapa sawit yang terperinci seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 2.90
Produksi perkebunan per komoditi di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2015

No.	Komoditi	2012 (Ton)	2013 (Ton)	2014 (Ton)	2015 (Ton)	Keterangan
1.	Karet	6.481,13	8.012,06	7.619,22	7.433,42	Karet Kering
2.	Kelapa	356,23	358,57	343,83	267,74	Kopra
3.	Lada	426,98	316,81	268,95	162,10	Biji Kering
4.	Kelapa sawit	3.901.270,81	3.020.668,88	3.585.307,15	1.096.178,33	TBS
5.	Nilam	--	--	--	--	Brangkasan
6.	Lain-lain	22,30	21,50	20,24	14,59	

Sumber : Data Sementara Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat Semester II Tahun 2015

Sampai dengan Tahun 2015 perusahaan Perkebunan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 20 perusahaan perkebunan. Perusahaan perkebunan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.91
Nama Perusahaan Perkebunan yang beroperasi di Kab. Ktw. Barats/d tahun 2015

No	Perusahaan	Komoditi	Pola Pengembangan	Lokasi Kecamatan
1	PT. Meta Epsi Agro	K. sawit	Plasma (KKPA)	Arsel, Kumai. P. Lada
2	PT. Primasentosa Pratama Putra	K. Sawit	Non PIR	P. Lada
3	PT.Persada Bina Nusantara Abadi	K. Sawit	Non PIR	Arut Utara
4	PT. Surya Indah Nusantara Pagi	K. Sawit	Non PIR	Arut Utara
5	PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi	K. Sawit	Non PIR	P.Lada-Arsel
6	PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur	K. Sawit	Non PIR	P.Banteng-Aruta
7	PT. Gunung Sejahtera Dua Indah	K. Sawit	Non PIR	P. Banteng

No	Perusahaan	Komoditi	Pola Pengembangan	Lokasi Kecamatan
8	PT. Agro Menara Rahmat	K. Sawit	Non PIR	Arut Selatan
9	PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona	K. Sawit	Non PIR	P.Lada-Aruta
10	PT. Bumi Langgeng Perdana Trada	K. Sawit	Inti - Plasma	Kumai
11	PT. Bangun Jaya Alam Permai	K. Sawit	Non PIR	P. Banteng- Aruta
12	PT. Mitra Mendawai Sejati	K. Sawit	Non PIR	Arut Selatan, Aruta
13	PT. Satya Kisma Usaha	K. Sawit	Non PIR	Arut Selatan
14	PT. Kalimantan Sawit Abadi	K. Sawit	Non PIR	Arsel, Kolam
15	PT. Sawit Sumber Mas Sarana	K. Sawit	Non PIR	Arsel, Aruta, Kolam
16	PT. Surya Sawit Sejati	K. Sawit	Non PIR	P. Lada, Arsel
17	PT. PTPN XIII	Karet	PIR - SUS	P. Banteng
18	PT. Bumitama Gunajaya Abadi	K. Sawit	Inti-Plasma	Ktw. Lama
19	PT. Arut Sawit Mandiri	K. Sawit	Inti-Plasma	Aruta
20	PT. Andalan Sukses Makmur	K. Sawit	Inti-Plasma	Kumai

Sumber : Data Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat

Sampai dengan Tahun 2015 di Kabupaten Kotawaringin Barat telah dibangun dan operasional sebanyak 14 unit Pabrik *Crude Palm Oil* (CPO) serta 4 unit Pabrik Inti Sawit / *Palm Kernel Oil* (PKO), terperinci seperti disajikan pada tabel-tabel berikut :

Tabel. 2.92
Pabrik CPO di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Kapasitas Terpasang (Ton/Jam)	Kapasitas Terpakai (Ton/Jam)
1	PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi	Kec. P. Lada	60	60
2	PT. Gunung Sejahtera Dua Indah	Kec. P. Lada	60	60
3	PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona	Kec. P. Banteng	60	60
4	PT. Surya Indah Nusantara Pagi	Kec. Arut Utara	45	45
5	PT. Sabut Mas Abadi	Kec. P. Lada	30	30
7	PT. Bangun Jaya Alam Permai	Kec. Arut Utara	120	120
8	PT. Sawit Sumbermas Sarana-I	Kec. Arut Selatan	90	90
9	PT. Sawit Sumbermas Sarana-II	Kec. Arut Selatan	90	90
10	PT. Kalimantan Sawit Abadi	Kec. Arut Selatan	45	45
11	PT. Bumitama Gunajaya Abadi	Kec. Kolam	90	60
12	PT. Bumi Langgeng	Kec. Kumai	45	45
13	PT. Surya Sawit Sejati	Kec. Kumai	60	60
14	PT. Mitra Mendawai Putra	Kec. Arsel	60	60

Sumber : Data Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat

Tabel. 2.93
Pabrik PKO di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Kapasitas Terpasang (Ton/Jam)	Kapasitas Terpakai (Ton/Jam)
1	PT. Gunung Sejahtera Dua Indah	Kec. P. Lada	7,5	7,5
2	PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona	Kec. P. Banteng	7,5	7,5
3	PT. Bangun Jaya Alam Permai	Kec. Arut Utara	15,0	15,0
4	PT. Mitra Mendawai Sejati	Kec. Arsel	7,5	7,5

Sumber : Data Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat

Beberapa komoditi perkebunan yang dikembangkan oleh masyarakat antara lain : karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, lada, mente dan aren. Kebun rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat didominasi oleh kelapa sawit, dengan luasan mencapai **45.073,10** ha.

Kebun kelapa sawit rakyat terbesar terdapat di Kecamatan Kotawaringin Lama dengan luas mencapai **18431,38** ha, diikuti Pangkalan Lada sebesar **13.257,78** ha, Kumai sebesar **6.031,13** ha, Arut Selatan sebesar **4.293,81** ha, Pangkalan Banteng sebesar **1.431,00** ha dan Arut Utara sebesar **1.628,00** ha. Sedangkan dari sisi produksi, produksi kelapa sawit terbesar ada di Kecamatan Pangkalan Lada dengan produksi sebesar **27.028,72** ton. Ini lebih besar dibandingkan produksi di Kecamatan Kotawaringin lama yang hanya sebesar **20.790,00** ton, hal ini karena di Kecamatan Pangkalan Lada umur tanaman lebih tua sehingga produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan di Kecamatan Kotawaringin Lama. Produksi selanjutnya yang tinggi adalah Kecamatan Kumai dengan produksi sebesar **9.261,07** ton, diikuti Kecamatan Arut Selatan dengan produksi sebesar **7.031,00** ton, Kecamatan Pangkalan Banteng dengan produksi sebesar **2.862,20** ton dan terakhir Kecamatan Arut Utara dengan produksi sebesar **1.764,38** ton. Sedangkan yang dikembangkan oleh investor adalah kelapa sawit dan karet. Luas areal dan produksi beberapa komoditi perkebunan rakyat dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2.94
Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Karet, Kelapa dan Kelapa Sawit per Kecamatan Tahun 2015.

No	Kecamatan	Karet		Kelapa		Kelapa Sawit	
		Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Arut Selatan	2.528,50	625,10	91,25	25,92	4.293,81	7.031,00
2	Kotawaringin Lama	1.621,00	562,98	92,00	60,48	18.431,38	20.790,00
3	Kumai	2.282,00	437,86	313,00	67,20	6.031,13	9.261,07
4	Arut Utara	1.051,00	134,26	11,50	5,22	1.628,00	1.764,38
5	Pangkalan Banteng	6.489,01	2.704,65	128,00	52,80	1.431,00	2.862,20
6	Pangkalan Lada	1.890,99	1.168,57	141,00	56,12	13.257,78	27.028,72
Jumlah		15.862,50	5.633,42	776,75	267,74	45.073,10	68.737,37

Sumber : Data Sementara Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat Semester II Tahun 2015

Produksi kelapa sawit rakyat yang ada selama ini masih mampu ditampung oleh pabrik pengolahan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pabrik-pabrik tersebut disamping menampung hasil perkebunan rakyat juga menampung hasil produksi kebun mereka sendiri. Komoditi perkebunan rakyat yang dominan setelah kelapa sawit adalah karet. Luas areal tanaman karet Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 sebesar **15.862,50** ha. Luas areal tersebut tersebar di enam kecamatan. Di Kecamatan Pangkalan Banteng kebun karet rakyat menempati luas tertinggi sebesar **6.489,01** ha.

Hal ini karena awalnya di Kecamatan Pangkalan banteng terdapat lokasi eks transmigrasi Perkebunan Inti Rakyat (PIR-Trans) yang komoditinya adalah karet. Berikutnya terdapat di Kecamatan Arut Selatan seluas **2.528,50** ha, disusul Kumai seluas **2.282,00** ha, Pangkalan Lada seluas **1.890,99** ha, Kotawaringin Lama seluas **1.621,00** ha dan terakhir adalah Arut Utara seluas **1.051,00** ha. Sedangkan dari sisi produksi, produksi terbesar di Kecamatan Pangkalan Banteng yaitu mencapai **2.704,65** ton, selanjutnya adalah Pangkalan Lada sebesar **1.168,57** ton, diikuti Arut Selatan sebesar **625,10** ton, Kotawaringin Lama sebesar **562,98** ton, Kumai sebesar **437,86** ton dan terakhir Arut Utara dengan produksi sebesar **134,26** ton.

Luas areal dan produksi kelapa di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 masing-masing sebesar 776,99 ha dan produksi 291,02 ton. Tanaman kelapa tersebar di enam kecamatan. Luas areal kelapaterbesar dan produksinya terdapat di Kecamatan Kumai dengan luasan sebesar **313,00** ha dan produksi sebesar **67,20** ton. Diikuti Pangkalan Lada dengan luasan 141,00 ha dan produksi sebesar **56,12** ton, Pangkalan Banteng luas areal **128,00** ha dan produksi sebesar **52,80** ton, Kotawaringin Lama luas areal **92,00** ha dan produksi sebesar **60,48** ton, Arut Selatan luas areal sebesar **91,25** ha dan produksi sebesar **25,92** ton dan terakhir Arut Utara dengan luasan **11,50** ha dan produksi **5,22** ton.

Komoditi lain yang dibudidayakan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah kopi dan lada. Data luas areal dan produksi kopi dan lada per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.95
Luas Areal dan Produksi Kopi dan Lada Per Kecamatan
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015.

No	Kecamatan	Kopi		Lada	
		Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Arut Selatan	24,00	1,79	0,00	0,00
2	Kotawaringin Lama	33,75	2,24	130,36	68,37
3	Kumai	24,00	1,51	16,00	6,75
4	Arut Utara	0,00	0,00	5,70	2,50
5	Pangkalan Banteng	38,00	4,60	45,38	45,38
6	Pangkalan Lada	44,08	1,89	100,30	39,10
Jumlah		163,83	12,03	297,74	162,10

Sumber : Data Sementara Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat Semester II Tahun 2015

Dari tabel diatas, dapat dilihat luas areal dan produksi Kopi Kabupaten Kotawaringin Barat masing-masing sebesar **163,83** ha dan **12,13** ton. Tanaman kopi tersebar di lima kecamatan, luas areal terbesar terdapat di Kecamatan Pangkalan Banteng sebesar **38,00** ha, disusul Pangkalan lada dengan luas sebesar **44,08** ha, Kotawaringin Lama sebesar **33,75** ha, diikuti Kumai sebesar **24,00** ha, Arut Selatan sebesar **24,00** ha dan terakhir untuk Arut Utara tidak ada luasan komoditi kopi. Sedangkan produksi kopi yang terbesar ada di Kecamatan Pangkalan Banteng yaitu sebesar **4,60** ton, diikuti Kotawaringin Lama sebesar **2,34** ton, Pangkalan lada dengan produksi sebesar **1,89** ton, Kumai dengan produksi **1,51** ton dan terakhir di Arut Selatan dengan produksi sebesar **1,79** ton

Untuk komoditas Lada di Kabupaten Kotawaringin Barat luas areal total sebesar **297,74** ha dengan jumlah produksi **162,09** ton. Luasan terbesar terdapat di Kecamatan Kotawaringin Lama sebesar **130,36** ha, Pangkalan Lada sebesar **100,30** ha, Pangkalan Banteng **45,38** ha, Kumai sebesar **16,00** ha dan Arut Utara sebesar **5,70** ha. Sedangkan produksi lada terbesar di Kecamatan Kotawaringin Lama yaitu mencapai **68,37** ton, diikuti Pangkalan Lada sebanyak **39,10** ton, Pangkalan Banteng sebesar **45,38** ton, Kumai sebesar **6,75** ton dan Arut Utara dengan produksi sebesar **2,50** ton. Komoditi lain yang dibudidayakan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah jambu mete dan aren.

Tabel. 2.96
Luas Areal dan Produksi Mente dan Aren Per Kecamatan
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015

No	Kecamatan	Jambu Mete		Aren	
		Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Kotawaringin Lama	0	0	49,00	2,16
2	Arut Selatan	0	0	0	0
3	Kumai	14,00	0,40	0	0
4	Pangkalan Banteng	0	0	0	0

5	Pangkalan Lada	0	0	0	0
6	Arut Utara	0	0	0	0
Jumlah		14,00	0,40	49,00	2,16

Sumber : Data Sementara Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat Semester II Tahun 2015

Luas areal dan produksi Jambu Mete Kabupaten Kotawaringin Barat masing-masing sebesar **14,00** ha dan **0,40** ton. Jambu Mete hanya dibudidayakan di Kecamatan Kumai. Demikian juga dengan tanaman Aren, tanaman Aren hanya terdapat di Kecamatan Kotawaringin Lama dengan luas areal sebesar **49,00** ha dan produksi **2,16** ton.

Saat ini industri pengolahan produk kelapa sawit baru sebatas *crude palm oil (CPO)* dan *Palm Kernel Oil (PKO)*. Produk turunan sawit masih sangat banyak untuk dikembangkan, seperti *palm stearin, olein, minyak goreng, palmitat, sabun, kosmetik* dan bahan kimia lain. Perlu perhatian serius terhadap kondisi Kecamatan Arut Utara, di mana hampir seluruh *komoditi* pertanian memiliki luasan dan produktivitas yang paling rendah.

Tabel. 2.97
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Pertanian subsektor Perkebunan Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 – 2015

Indikator	Capaian 2015	2015		
		Target	Realisasi	% Realisasi dari target
Perkebunan				
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	23,92***	37,00**	23,92	64,64
Kontribusi PDRB sub-sektor perkebunan terhadap sektor pertanian (%)	89,74***	79,50**	89,74	112,88
Eksport per tahun dari komoditas perkebunan (US\$)	189.439,16***	199.182,20**	189.439,16	95,11
Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun)	65.960,00***	79.820,00**	65.960,00	82,64
Jumlah Industri pengolahan turunan CPO	0	1**	0	0
Sumbangan sektor perkebunan terhadap PAD (Milyar Rupiah)	12.709.661.252*	13.000.000.000,00**	12.709.661.252	97,77
Kemitraan/Plasma	28.785,91*	25.957,91**	28.785,91	110,89
Pengembangan/perluasan areal perkebunan	212.083,05*	225.833,35**	212.083,05	93,91
Karet	18.082,50*	18.284,00**	18.082,50	98,90
Kelapa sawit	192.699,23*	204.908,65**	192.699,23	94,04
Kelapa	776,75*	1.205,00**	776,75	64,46
Lada	297,74*	1.042,20**	297,74	28,57
Lainnya	226,83*	393,5**	226,83	57,64
Produksi komoditi perkebunan				
Karet (lump)	7.433,42*	15.600,00**	7.433,42	47,65

Indikator	Capaian 2015	Target	2015	
			Realisasi	% Realisasi dari target
Perkebunan				
Kelapa (kopra)	267,74*	347**	267,74	77,16
Kelapa Sawit (Tbs)	1.096.178,33*	4.550.000,00**	1.096.178,33	24,09
Lada (putih/hitam)	162,10*	432**	162,10	37,52
Lainnya	14,59*	23,4**	14,59	62,35

Catatan : * Data Data Sementara Statistik Dinas Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat Semester II Tahun 2015
 ** Data Renstra 2012-2016
 *** Data Statistik daerah 2014

3. URUSAN KEHUTANAN

Ruang lingkup pembangunan kehutanan meliputi kegiatan-kegiatan intensifikasi, rehabilitasi, sumber daya hutan, produksi, pengolahan dan pemasaran, peningkatan peran serta dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan kehutanan, pengembangan kelembagaan, optimalisasi dan pemanfaatan fungsi hutan, peningkatan konservasi sumber daya alam dalam rangka peningkatan pendapatan petani sekitar hutan, kelestarian hutan dan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Sampai dengan tahun 2015 luas kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat menurut fungsinya berdasarkan SK Menhut No. 529 Tahun 2012 tanggal 25 September 2012 adalah sebagaimana table berikut :

Tabel 2.98
Luas Potensi Hutan Kab. Kotawaringin Barat
Berdasarkan (SK MENHUT NO: SK.529/Menhut-II/2012 Tgl 25 September 2012)

No.	Fungsi	Luas (Ha)	%
1	Arel Penggunaan Lainnya (APL)	235.731	23,90
2	Hutan Lindung (HL)	9.698	1,00
3	Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)	156.003	15,8
4	Hutan Produksi (HP)	257.045	26,10
5	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	49.314	5,00
6	Kawasan Konservasi Perairan (KKP)	16.482	1,70
7	Kawasan Suaka Alam /Pelestarian Alam (KSA/PA)	239.091	24,30
8	Sungai	22.073	2,20
	Jumlah	985.437	100,00

Sumber data : Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Barat

Pengukuran capaian kinerja Urusan Kehutanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.99
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan
Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 – 2015

No.	Indikator	2014	2015		
			Target	Realisasi	% Realisasi dari target
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	-	3.041	100	3,29
2.	Penataan kawasan KPHP (peruntukan kawasan KPHP)(Ha)	-	-	-	-
3.	Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	100	100	155,25	155,25
4.	Penanganan Kasus Kebakaran Lahan dan Hutan (Ha)	75	1.000	1.400	140

Sumber data : Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Barat

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dari target RPJMD seluas 3.041 Ha sebagian besar belum bisa dilaksanakan disebabkan RTRWK belum ditetapkan dan banyak lahan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan corporate. Penataan kawasan KPHP tidak bisa dilaksanakan karena belum adanya penataan kawasan hutan yang sesuai dengan RTRWK Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun jumlah produksi hasil hutan sektor kehutanan dilihat berdasarkan jenis komoditas kayu di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.100
Jumlah Produksi Hasil Hutan Sektor Kehutanan Tahun 2012-2015

Komoditas (Kelompok)	Jumlah Produksi (dalam M ³)			
	2012	2013	2014	2015
Kayu Meranti	43.775,35	27.689,61	40.219,03	38.608,07
Kayu Rimba Campuran	1.996,07	2.772,03	6.223,98	5.741,29
Kayu Indah	68,87	-	-	-
Jumlah	45.840,29	30.461,64	46.443,01	44.349,36

Sumber: Dinas Kehutanan Kab.Kotawaringin Barat

4. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Secara umum sektor energi di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan perkembangan yang positif jika dilihat dari beberapa indikator seperti produksi listrik dan distribusi listrik. Sebagai sumber penerangan dan

energi lain baik di sektor rumah tangga maupun industri, listrik memegang peranan yang sangat vital.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 87,23 persen rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan 12,77 persen menggunakan listrik non PLN. Selain dua sumber penerangan tersebut, terdapat sumber penerangan lain yaitu petromak 0,13 persen, maka kondisi untuk tahun 2015 ini dengan pertumbuhan penduduk semakin meningkat maka target yang diinginkan secara keseluruhan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, baik listrik PLN maupun non PLN sebagai sumber penerangan utama tahun 2015 mencapai 87,23 persen. Dalam upaya pemenuhan Peningkatan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui APBD Tahun Anggaran 2016 diarahkan pada peningkatan pembangunan penyediaan jaringan distribusi listrik melalui kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur ketenagalistrikan.

Kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Barat dikelompokkan dalam 2 jenis komoditas tambang, yaitu mineral logam, mineral non logam dan batuan. Mineral logam meliputi emas dan biji besi, sementara mineral non logam dan batuan meliputi pasir zirkon, kecubung, kaolin, tanah urug, pasir, sirtu, batu belah dan lainnya.

Dari beberapa potensi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah dimanfaatkan adalah dari mineral logam seperti emas terdapat di Kecamatan Arut Utara Desa Sambi dan mineral non logam dan batuan seperti potensi bahan galian Kecubung di Kecamatan Arut Utara Desa Pangkut dan Gandis, Kaolin di Kecamatan Kumai Desa Keraya dan Kubu, pasir kwarsa, tanah liat dan batu belah yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan. Selain pemanfaatan hasil galian yang ada, perlu juga dilakukan penelitian dan eksplorasi potensi sumber daya tambang untuk mengetahui kandungan mineral dan jenis tambang yang ada di daerah.

Pada perdagangan ekspor, sektor ini telah menyumbangkan komoditas *zircon sand* (pasir zirkon) dengan nilai ekspor tahun 2013 mencapai Rp. 2.328.400.000,- sedangkan tahun 2014 dengan capaian Rp. 2.069.200.000,- dan tahun 2014 meningkat dengan capaian Rp. 2.779.600.000,- maka total ekspor bahan galian zircon dari tahun 2013, sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 7.177.200.000,- dengan volume ekspor 35.986 ton dan nilai ekspor komoditas bahan galian Ilminit yang merupakan hasil produk sampingan dari proses pemurnian zircon tahun 2013 sebesar Rp.123.075.000,- dengan volume ekspor 4.923 ton sementara untuk tahun 2014 dan tahun 2015 tidak ada pengiriman Ilmenite, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.101
Volume dan Nilai Ekspor Sektor Pertambangan

Uraian	Produksi (Ton)			Volume Ekspor (MT)			Nilai Ekspor (dalam Ribuan Rp)		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
• Zircon Sand	11.642	10.346	13.998	11.642	10.346	13.998	2.328.400	2.069.200	2.779.600
• Lump Ore Zink	-	-	-	-	-	-	--	---	---
• Iron Ore	4.923	-	-	4.923	-	-	123.075		
• Ilmenite									
	16.565	10.346	13.998	16.565	10.346	13.998	4.444.660	2.451.475	2.779.600

SumberData :BagianPerekonomiandan SDA SETDA Kobar

5. URUSAN PARIWISATA

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi.

Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan restoran dan lain-lain. Sehingga sektor pariwisata memberikan peluang Bergeraknya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian sektor pariwisata juga dapat memberikan kontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu dengan melibatkan rakyat miskin dalam berbagai kegiatan integratif dengan bisnis pariwisata.

Secara umum Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan. Potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup beraneka ragam jenisnya. Secara garis besar, jenis wisata yang ditawarkan terbagi atas beberapa, yaitu:

1. Wisata alam, antara lain Taman Nasional Tanjung Puting, Air Terjun Patih Mambang, Arung Jeram, Danau Gatal dan Danau Masorayan;
2. Wisata sejarah/budaya/religi, antara lain Istana Kuning, Astana Al-Nursari, Istana Mangkubumi, Palagan Sambu, Masjid Kyai Gede, Makam Kyai Gede, Makam Kuta Tanah, Batu Petahan dan Tiang Pantar;
3. Wisata bahari antara lain Pantai Kubu, Tanjung Keluang, Pantai Teluk Bogam, dan Tanjung Penghujan;

Obyek wisata Taman Nasional Tanjung Puting Pangkalan Bun adalah salah satu obyek wisata Taman Nasional yang sudah menjadi icon dunia, dimana jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun meningkat. Namun demikian untuk tahun 2015 mengalami penurunan dimana untuk kunjungan

wisatawan mancanegara tahun 2014 sebanyak 11.000 orang dan tahun 2015 turun menjadi 9.767 orang sedangkan untuk wisatawan nusantara tahun 2014 sebanyak 5.035 orang dan tahun 2015 turun menjadi 2.797 orang sedangkan untuk lama kunjungan wisatawan dari 1 hari menjadi 2 - 3 hari.

Obyek wisata sejarah, budaya dan religi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Istana Kuning, Istana Mangkubumi, Kolam Pemandian Putri Raja dan Makam Raja-raja Kutaringin yang terletak di tengah kota Pangkalan Bun sedangkan Astana Al Nursari, Masjid Kyai Gede dan Makam Kyai Gede terletak di Kecamatan Kotawaringin Lama.

Obyek wisata alam dan pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di tepi Pantai yaitu di obyek wisata Bugamraya yang terdiri dari Taman Wisata Alam Tanjung Penghujan, Pantai Kubu, Pantai Tanjung Keluang, Gosong Senggora dan Air Terjun Patih Mambang dengan alamnya yang asli. Kunjungan wisatawan ke obyek wisata Bugamraya pada tahun 2014 sebanyak 57.031 orang dan pada tahun 2015 turun menjadi 50.717 orang.

Tabel 2.102
Potensi Objek Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Objek Yang Dinikmati	Ciri Khas Yang Ditonjolkan
1	Pantai Kubu dan Tanjung Keluang	Kec. Kumai	Bahari	Keindahan alam
2	Pantai Teluk Bogam	Kec. Kumai	Bahari	Keindahan Alam
3	Tanjung Penghujan	Kec. Kumai	Bahari	Keindahan Alam
4	Istana Kotawaringin	Kec. Ktw. Lama	Sejarah	Barang Kuno/Antik peninggalan Kerajaan Islam Pertama di Kalteng
5	Istana Kuning	Kec. Arut Selatan	Sejarah	Kerajaan yang dipindahkan dari Kotawaringin
6	Mesjid Kyai Gede	Kec. Ktw. Lama	Religi	Mesjid Kuno Peninggalan Kerajaan Islam Pertama di Kalteng
7	Tudung Saji dan Batu Kecubung	Kec. Arut Selatan	Budaya/Seni	Nilai Seni
8	Taman Nasional Tanjung Puting	Kec. Kumai	Alam	Keindahan alam, serta Pusat Rehabilitasi Orang Utan dan Satwa Langka lainnya
9	Pantai Sei Uambang	Kec. Kumai	Bahari	Keindahan Alam
10	Danau Burung	Kec. Kumai	Alam	Keindahan Alam
11	Danau Gatal	Kec. Ktw. Lama	Alam	Keindahan Alam
12	Upacara Tiwah	Kec. Arut Utara	Budaya	Upacara Tradisional Suku Dayak
13	Riam Senamang	Kec. Arut Utara	Alam	Keindahan Alam
14	Palagan Sambu	Kec. Arut Utara	Sejarah	Nilai Sejarah

Sumber : Laporan Penyusunan Data Base Spasial Potensi Pariwisata Kalimantan Tengah

6. URUSAN INDUSTRI

Sektor Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki peran yang sangat strategis. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor Industri pada perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat yang berasal dari sector industry pengolahan terutama industry besar. Sektor Industri menempati urutan ke tiga setelah sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan, dan sektor pertambangan dan penggalian

Sektor industri komoditas kayu pada tahun 2015, dimana pemasukan yang diterima dari hasil ekspor kayu lapis berupa *plywood* yang nilainya pada tahun 2013 mencapai 154.310.965,28 USD, pada tahun 2014 nilai ekspor sebesar 79.458.726,93 USD dan pada tahun 2015 mencapai **84.108.278,7200** USD, dimana jumlah produksi pada tahun 2013 sebesar 146.247,3055 m³, pada tahun 2014 sebesar 157.281.0200 m³, dan pada tahun 2015 sebesar **191.647,6977** m³.

Sedangkan pada produk moulding nilai ekspor tahun 2013 mencapai 431.721,99 USD, tahun 2014 sebesar 926.006,45 USD dan pada tahun 2015 **10.238.613,4500** USD dengan jumlah produksi untuk tahun 2013 sebesar 1.166,0261 m³, tahun 2014 jumlah produksi sebesar 1.904,0799 m³ dan tahun 2015 sebesar **388.674,2932** m³.

Jumlah produk kayu olahan sektor perindustrian yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.103
Jumlah Produksi Komoditas Kayu Sektor Perindustrian

Produk	Jumlah Produksi (dalam m ³)		
	2013	2014	2015
Plywood	146.247,3055	157.218,0200	191.647,6977
Moulding	1.166,0261	1.904,0799	388.674,2932
Jumlah	147.413,3316	159.122,0999	580.321,9909

Sumber: Disperindag. Kab. Kotawaringin Barat

Tabel 2.104
Nilai Ekspor Komoditas Kayu Sektor Perindustrian

Produk	Nilai Ekspor (dalam USD)		
	2013	2014	2015
Plywood	154.310.965,28	79.458.726,93	84.108.278,7200
Moulding	431.721,99	926.006,45	10.238.613,4500
Jumlah	154.742.687,27	80.384.733,38	94.346.892,1700

Sumber: Disperindag. Kab. Kotawaringin Barat

Adapun masalah lain yang dihadapi IKM dalam pengembangan industri berskala kecil di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah kurangnya bantuan modal kerja dan peralatan yang dimiliki, disamping kurangnya sarana dan prasarana perhubungan sehingga mempersulit pemasaran produk industri

Sektor Industri di Kabupaten Kotawaringin Barat masih di dominasi oleh usaha kecil dan menengah, dimana jenis usaha seperti ini sangat berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah unit usaha pada tahun 2015 sebanyak 573 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,756 orang. Kondisi tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.105
Perkembangan Potensi Industri Kecil Menengah (IKM)
Tahun 2013 – 2015

No.	Potensi IKM	Satuan	Tahun		
			2013	2014	2015
1.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	13,87	13,20	25,24**
2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	%	6,52	5,22	6,2**
3.	Jumlah Unit Usaha	unit	509	536	573
4.	Penyerapan Tenaga Kerja	orang	1,549	1.643	1.756
5.	Nilai Investasi	Rp.	67,704,825,000	74,591,109,000	79.737.889.000
6.	Nilai Produksi	Rp.	118,444,438,000	112,119,149,000	119.855.369.000
7.	Cakupan bina kelompok pengrajin	Klpk	7	16	19

Sumber: Disperindag. Kab.Kotawaringin Barat
** BPS Kotawaringin Barat

4.2.7. URUSAN PERDAGANGAN

Sektor perdagangan merupakan sektor strategis bagi Kabupaten Kotawaringin Barat. Sektor ini merupakan penyumbang terbesar kedua pada pembentukan PDRB setelah sektor pertanian. Sebagai sektor strategis, sektor perdagangan memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat karena sangat terkait dengan sektor-sektor lain seperti sektor Pertanian, Industri, Pariwisata dan lainnya. Sektor Perdagangan terbagi dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.

Pembangunan sektor perdagangan difokuskan pada perlindungan konsumen dan upaya peningkatan ekspor yang dilaksanakan melalui

pengamanan produk-produk melalui monitoring harga bahan pokok 10 komoditas, monitoring distribusi barang dalam pengawasan, pembinaan perlindungan konsumen dan pemantauan barang kadaluwarsa. Untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediannya dilakukan dengan mengintensifkan koordinasi dengan Bulog dan lembaga terkait.

Sebagaimana arah kebijakan nasional bahwa untuk meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Perdagangan khususnya Perdagangan Luar Negeri diarahkan untuk peningkatan ekspor.

Tabel 2.106
Nilai dan Realisasi Volume Ekspor Perdagangan
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015

Uraian	Tahun		
	2013	2014	2015
Nilai (US\$)	215.253.097,17	183.735.699,94	186.428.669,99
Volume (m ³)	147.413,3316	157.437,0798	517.458,6212
Volume (MT)	851.858,935	622.696,302	554.615,120

Sumber: Disperindag. Kab. Kotawaringin Barat

Realisasi volume ekspor pada tahun 2015 sebesar 517.458,6212 m³ dan 554.615,120 MT dengan nilai sebesar 186.428.669,99 US\$. Jika dibandingkan dengan realisasi volume ekspor pada tahun 2014 sebesar 157.437,0798 m³ mengalami kenaikan sebesar 360.021,5414 m³ (228,6765 %) dan 622.696,302 MT mengalami penurunan sebesar 68.081,1820 MT (-10,9333 %) dan nilai sebesar 183.735.699,94 US\$ mengalami kenaikan sebesar 2.692.970,0500 US.\$ (1,47 %).

Komoditas yang diekspor mencakup 8 jenis komoditi terdiri dari *Plywood, Moulding, Wood Chip, Palm Kernel Shell, RBD Palm Oil, Wood Pellet, Konsentrat Timbal, CPO*, dengan tujuan ekspor antara lain ke negara Asean, Eropa, Timur Tengah, China, Jepang dan Pakistan.

4.2.8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN

Transmigrasi merupakan salah satu cara atau metode untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan daerah. Sejalan dengan berlakunya otonomi daerah, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, telah diamanatkan kepada semua penyelenggara pembangunan untuk merubah tata cara pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan transmigrasi agar lebih mengedepankan peran daerah untuk lebih berdayaguna dalam setiap kegiatannya.

Untuk itu penyelenggaraan program transmigrasi saat ini dalam pelaksanaannya dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif daerah dan dilaksanakan daerah serta difasilitasi oleh pusat yang bermanfaat bagi daerah itu sendiri. Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena itu, berkaitan dengan peran pemerintah daerah sebagai pelaksana (*rowing*) sedangkan pemerintah pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (*steering*), maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan *demand side*. Artinya, pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang melibatkan pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai daerah penerima calon transmigran, telah bekerjasama dengan daerah pengirim dalam penyelenggaraan transmigrasi. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin.

Tabel 2.107
Data Transmigran dan Penempatannya

No.	Daerah Asal	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Waktu Penempatan	Lokasi Penempatan
I Transmigrasi Penduduk Asal					
1.	Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	10	49	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
2.	Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat	10	37	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
3.	Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat	5	28	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
4.	Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah	10	38	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
5.	Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah	15	58	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
6.	Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung	25	103	12-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
7.	Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah	25	74	02-12-2009	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
8.	Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung	15	60	03-12-2010	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
9.	Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah	10	34	27-11-2010	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
10.	Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah	15	54	27-11-2010	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
II Transmigrasi Penduduk Setempat					
1.	Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah	75	322	16-12-2008	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai

No.	Daerah Asal	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Waktu Penempatan	Lokasi Penempatan
2.	Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah	25	100	09-12-2009	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
3.	Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah	35	138	27-11-2010	Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
Jumlah		275	1.095		

Sumber : Disnakertrans Kab. Kotawaringin Barat

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Permasalahan pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan antara kinerja pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan maka permasalahan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 yang akan datang adalah, sebagai berikut:

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/ provinsi/ kabupaten yang bersifat *mandatory*.

1. Masalah Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan

- Peningkatan jumlah angkatan kerja kurang diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.
- Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin, meskipun secara prosentase angka kemiskinan mengalami penurunan.
- Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah berkisar 10 % .
- Struktur perekonomian didominasi oleh sektor primer (sektor pertanian, sub sektor perkebunan), dan belum berkembangnya sektor sekunder (sektor industri pengolahan).
- Pengelolaan sektor pertanian arti luas (pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, dan kehutanan) sebagian besar masih dikelola secara tradisional.
- Masih parsialnya pengelolaan destinasi pariwisata.

2. Masalah Pendidikan

- Kurang meratanya penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan pada tingkat SD, SMP, SMA/SMK.
- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- Target standar pelayanan minimal (SPM) Bidang pendidikan belum mampu dipenuhi seluruhnya.
- Penerapan sistem kurikulum berbasis kompetensi masih belum optimal.
- Kurangnya pelayanan pendidikan di daerah pedalaman/ terpencil/terpinggir.

3. Masalah Kesehatan

- Belum meratanya status dan akses pelayanan kesehatan berkualitas diseluruh wilayah.
- Masih kurangnya tenaga medis dan paramedis.
- Target standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan belum tercapai seluruhnya.
- Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba, penyakit degeneratif dan penyebaran HIV/ AIDS.
- Masih adanya kasus kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular (demam berdarah dan diare)

4. Masalah Pembangunan Prasarana Wilayah

- Kurang optimalnya pelayanan angkutan perkotaan di Pangkalan Bun.
- Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar wilayah dalam kabupaten.
- Terbatasnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur.
- Kurangnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya kelistrikan sampai daerah terpencil.
- Kurang berfungsinya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.
- Belum terintegrasinya penanganan Pamsimas pada daerah-daerah rawan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman.

5. Masalah Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

- Tingginya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan menjadi lahan perkebunan secara signifikan.
- Tingginya intensitas kebakaran hutan dan lahan.
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang.
- Pengelolaan Sumber Daya Alam yang tidak memenuhi kaidah-kaidah teknis menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan.
- Belum optimalnya penanganan sampah.

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tabel 2.117 berikut :

Tabel 2.108

Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
	a. Tataran Pengambil Kebijakan			
	Ketentraman dan ketertiban umum daerah	Wajib	Kerjasama pemerintah dan masyarakat	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak
	Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah	Wajib	Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak
	Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah	Wajib	Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak
	Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD	Wajib	Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten dan DPRD	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak
	Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	Wajib	Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten dan DPRD	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak
	Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	Wajib	Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten dan DPRD serta stakeholders kabupaten	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak
	Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan	Wajib	Komitmen pemerintah, DPRD dan masyarakat terhadap ketaatan hukum	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah	Wajib	Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten dan DPRD serta stakeholders kabupaten	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak
	Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil	Wajib	Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten dan DPRD serta stakeholders kabupaten	Dana Bagi hasil dari propinsi tidak sesuai rencana yang telah dijadwalkan
	Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah	Wajib	Komitmen pemerintah, DPRD dan masyarakat terhadap ketaatan hukum	Kecukupan personil, sarana prasarana dan kepercayaan serta kesadaran masyarakat tentang pajak dan pungutan daerah dan respon atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
	Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD	Wajib	Komitmen pemerintah, DPRD dan masyarakat terhadap ketaatan hukum	Ketertiban waktu, kesepahaman dan komitmen bersama pemerintah kabupaten dan DPRD untuk prioritas alokasi perencanaan dan penganggaran
	Pengelolaan potensi daerah	Wajib	Kapabilitas inovasi pemerintah kabupaten	Keterbatasan kemampuan kreativitas untuk mencari terobosan inovatif pengelolaan potensi daerah lebih produktif
	Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Wajib	Kapabilitas inovasi pemerintah kabupaten	Pengembangan Strategi Inovasi Daerah (SID) masih dianggap belum memiliki peran strategis, dimana proses Rencana dan Design masih dianggap sebagai biaya daripada investasi bagi daerah
	b. Tataran Pelaksana Kebijakan			
	Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan	Wajib/ pilihan		

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Wajib/pilihan	Kapabilitas inovasi pemerintah kabupaten	Keterbatasan kemampuan kreativitas untuk mencari terobosan inovatif pengelolaan potensi daerah lebih produktif
	Tingkat capaian SPM	Wajib/pilihan	Rujukan dan asistensi SPM dari pemerintah pusat sangat diharapkan untuk SPM di setiap SKPD	Keterbatasan sumber daya daerah (SDM dan kapasitas keuangan daerah) dalam pencapaian target SPM
	Penataan kelembagaan daerah	Wajib/pilihan	Kapabilitas inovasi pemerintah kabupaten	Keterbatasan sumber daya daerah (SDM dan kapasitas keuangan daerah)
	Pengelolaan kepegawaian daerah	Wajib/pilihan	Regulasi pemerintah pusat	Masih terjadi perbedaan penafsiran peraturan kepegawaian dalam implementasi di daerah
	Perencanaan pembangunan daerah	Wajib/pilihan	Sumber Daya Perencanaan (SDM, Kapasitas Keuangan dan sistem)	Masih belum meratanya kapasitas sumber daya perencanaan di tingkat SKPD dan masyarakat, sehingga mempengaruhi kualitas output perencanaan
	Pengelolaan keuangan daerah	Wajib/pilihan	Kapabilitas pemerintah kabupaten dalam inovasi peningkatan PAD	Ketergantungan sumber penerimaan pembangunan dari pemerintah pusat melalui dana DAU sebesar 58,31 % dari struktur APBD
	Pengelolaan barang milik daerah	Wajib/pilihan	Pemisahan aset dalam neraca pemerintah daerah	Belum tertibnya administrasi aset daerah
	Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat	Wajib/pilihan	Sumber daya pemerintah daerah	Belum ada permasalahan yang mendesak
II	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah			
	Kesejahteraan masyarakat			
	Pelayanan umum	Urusan Pendidikan	Komitmen pemerintah, DPRD dan masyarakat untuk terselenggaranya layanan prima pendidikan di kotawaringin barat untuk membentuk insan yang cerdas komprehensif	Masih rendahnya APK/APM SMP/MTs dan SMA/SMK/MA serta masih rendahnya angka melanjutkan ke perguruan tinggi
		Urusan Kesehatan	Komitmen pemerintah DPRD, dan masyarakat	Perlu peningkatan terhadap indikator-

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			untuk terwujudnya kemandirian masyarakat hidup sehat di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sejahtera, berkeadilan dan jaya.	indikator derajat kesehatan
		Pekerjaan Umum	Komitmen pemerintah DPRD, dunia usaha, dan masyarakat untuk pembangunan pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment	Keterbatasan anggaran pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan dibandingkan dengan panjang jalan yang ditangani
		Perumahan	Komitmen pemerintah DPRD, dunia usaha, dan masyarakat untuk pembangunan pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment	Perlu penataan kawasan perumahan dan permukiman
		Penataan ruang	Komitmen dan informasi yang transparan dan aksesibilitas tentang tata ruang dan tata guna ruang wilayah dan tata ruang kota beserta sanksi bagi pelanggaran	Belum disahkannya Perda RTRW dan Rencana Rinci Ruang kota, pengendalian pemanfaatan ruang serta alih fungsi ruang dan Masih adanya konflik sengketa tanah/lahan.
		Perencanaan Pembangunan	Konsistensi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang efisien, efektif dan ekonomis	Kualitas database perencanaan SKPD yang belum sepenuhnya mampu menjadi bahan perencanaan tingkat kabupaten
		Perhubungan	Komitmen pemerintah DPRD, dunia usaha, dan masyarakat untuk pembangunan pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment	Banyaknya kendaraan dengan beban muatan berlebih yang menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan jalan
		Lingkungan Hidup	Komitmen pemerintah DPRD, dunia usaha, dan masyarakat untuk pembangunan pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment	Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk masih kurang ideal
		Pertanahan	Komitmen pemerintah DPRD, dunia usaha, dan masyarakat untuk pembangunan pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment	Belum disahkannya Perda RTRW dan Rencana Rinci Ruang kota, pengendalian pemanfaatan ruang serta alih fungsi ruang dan Masih adanya konflik sengketa tanah/lahan.
		Kependudukan dan PS	1. Pembangunan dan pengoperasian Sistem Administrasi Kependudukan	1. Kendaraan dinas roda 2 untuk operasional belum mencukupi;

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>(SIAK) secara terpadu, dilakukan pembersihan data ganda antara data kabupaten/kota dan perekaman biometrik KTP elektronik untuk mendapatkan data akurat pemilihan Gubernur 2015.</p> <p>2. Terlaksananya sosialisasi Administrasi kependudukan yang dilaksanakan melalui :</p> <p>a. Media cetak dengan penyebaran leaflet dan poster</p> <p>b. media elektronik yaitu siaran radio yang disiarkan secara berkala dan running teks SBTV</p> <p>c. Penyuluhan/ sosialisasi langsung ke masyarakat kelurahan dan desa.</p> <p>3. Penyusun kebijakan kependudukan, dengan dilaksanakannya rapat koordinasi, dengan keputusan perlunya memperkuat mekanisme pencatatan sipil agar kualitas database kependudukan semakin baik.</p>	<p>2. Belum ada gedung untuk pelayanan administrasi kependudukan, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal, selama ini masih menggunakan aula kantor Disdukcapil.</p> <p>3. Jumlah pegawai yang terampil dalam mengelola keuangan belum memadai, dan pengelola SIAK masih kurang.</p> <p>4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya validitas data penduduk sehingga dalam pengisian biodata penduduk tidak sesuai dengan data legal yang dimiliki.</p> <p>5. Upgrade Program SIAK untuk kecamatan dan kabupaten memerlukan waktu, sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga pengelola SIAK;</p> <p>6. Masih terdapat masyarakat yang enggan mengurus KTP, KK dan Akta pencatatan sipil terutama akta kelahiran sebelum benar-benar membutuhkan, terutama masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari tempat pelayanan kependudukan. Hal ini dapat terlihat pada saat mereka mengurus akta kelahiran masih banyak yang terlambat melaporkannya sehingga dikhawatirkan adanya manipulasi</p>

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>data;</p> <p>7. Belum optimalnya kinerja aparat desa/kelurahan dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan.</p> <p>8. Kelengkapan sarana dan prasarana (perangkat KTP-el) dan jaringan komunikasi data dari kecamatan ke kabupaten belum optimal, sehingga menghambat pencapaian perekaman KTP-el kepada masyarakat dan jaringan komunikasi data kecamatan ke kabupaten.</p> <p>9. Belum tersedianya petugas registrasi untuk administrasi kependudukab (akta capil) pada seluruh desa, karena keterbatasan pagu indikatif yang ada pada Disdukcapil tiap tahunnya.</p>
		Pemberdayaan Perempuan dan PA	Komitmen pemerintah dan DPRD akan pelaksanaan pembangunan berwawasan kesetaraan dan keadilan gender serta implementasi Kabupaten Menuju Layak Anak	<p>1. Kurangnya komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender.</p> <p>2. Maraknya sex bebas pada anak usia sekolah.</p>
		Keluarga Berencana dan KS	Komitmen pemerintah kabupaten akan pembangunan berwawasan kependudukan serta kesadaran dan partisipasi masyarakat	<p>A. Keluarga Berencana</p> <p>1. Seorang PKB membina 3-4 desa (SPM 1 PKB membina 1-2 desa)</p> <p>2. Tenaga PPKBD sering berganti-ganti.</p> <p>3. Register PUS desa tidak terdata maksimal.</p> <p>B. Keluarga Sejahtera</p> <p>1. Kader tribina kurang maksimal bekerja.</p> <p>2. Tidak semua PKB bisa membina kegiatan Tribina</p>

No.	Kriteria / Aspek		Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			Sosial	Komitmen pemerintah kabupaten akan pembangunan berwawasan kependudukan serta kesadaran dan partisipasi masyarakat	Masih terdapatnya Pengemis, Gelandangan dan orang terlantar yang bukan penduduk lokal
			Ketenagakerjaan	Tumbuhnya kesadaran kewirausahaan baru dan transformasi tingkatan usaha mikro, kecil dan menengah	Kurang sesuainya kualifikasi angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja
			Koperasi dan UMKM	Sinergitas antara gerakan koperasi, pemerintah, BUMN dan BUMD Kerjasama dengan praktisi pengembangan usaha	Masih rendahnya SDM pengawas, dan pengurus koperasi, teknologi, permodalan, pemasaran dan kemitraan Masih rendahnya inovasi Koperasi-UMKM dan kurangnya dukungan pemasaran produk
			Penanaman modal	Kemudahan dan kepastian hukum di bidang perijinan dan non perijinan	Belum adanya pelimpahan pelayanan perijinan dan non perijinan secara menyeluruh
			Kebudayaan	Penguatan budaya lokal dalam membangun karakter pembangunan kabupaten	Budaya lokal belum sepenuhnya menjadi sumber daya industri pariwisata dan belum optimalnya implementasi muatan budaya lokal pada kurikulum sekolah
			Pemuda dan OR	Pembangunan karakter terhadap generasi muda, sarana prasarana olah raga dan pembinaan olah raga	Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan, potensi pengaruh negatif narkoba, menurunnya jiwa nasionalisme, serta belum optimalnya pembinaan cabang olah raga (sarana prasarana olah raga tidak merata, kurangnya kompetisi kelompok umur, target dan capaian target tidak jelas)
			Kesbangpol dalam negeri	Harmonisasi antar elemen masyarakat dan kerja sama antara aparat pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat	Masih adanya potensi konflik yang sewaktu-waktu mungkin terjadi
			Otonomi Daerah, Pemerintah	Perencanaan program/ kegiatan bidang pemerintahan yang	Masih perlu peningkatan kapabilitas dan kreasi

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawain dan Persandian	didasarkan pada landasan Ilmu, Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) seperti pengembangan <i>e-government</i>	pemanfaatan peluang mengatasi keterbatasan dengan menjalin kemitraan dengan pihak diluar pemerintahan
		Perpustakaan	Ketersediaan sarana prasarana, SDM, kesadaran masyarakat	Masih rendahnya minat baca dan terbatasnya koleksi buku-buku serta sarana prasarana
		PILIHAN		
		Pertanian	SDM petani dan penyuluh, sumber daya alam (lahan, iklim dan air), sarana prasarana dan kebijakan di bidang pertanian	SDM Petani masih rendah, kondisi lahan tanaman pangan yang marjinal, kurang berfungsinya irigasi dan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian
		Pariwisata	SDM kepariwisataan, sarana prasarana pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata	Pelaksanaan program pariwisata yang masih parsial/ego sektoral, belum optimalnya pengelolaan objek dan daya tarik wisata dan sumber daya manusia kepariwisataan.
		Perdagangan	Sarana prasarana perdagangan, pengelolaan sarana prasarana perdagangan dan pelaku usaha perdagangan	Rendahnya kemampuan SDM pelaku usaha sektor perdagangan usaha kecil dan menengah
		Perindustrian	Kerja sama industri kecil, industri menengah, industri besar dan pemerintah	Kurangnya kerja sama antar pelaku industri dan masih rendahnya daya saing industri
	Daya saing daerah	Wajib/pilihan	Keamanan, kemudahan investasi dan kepastian hukum	Belum adanya regulasi tentang insentif bagi investor dan belum seluasnya evaluasi perda RTRW Kabupaten
III	Daerah Otonomi Baru			
	Perkembangan penyusunan perangkat daerah	Wajib/pilihan	-	
	Pengisian personil	Wajib/pilihan	-	
	Pengisian keanggotaan DPRD	Wajib/pilihan	-	
	Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan	Wajib/pilihan	-	
	Pembiayaan	Wajib/pilihan	-	
	Pengalihan aset dan dokumen	Wajib/pilihan	-	
	Pelaksanaan penetapan batas wilayah	Wajib/pilihan	-	

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2017

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Dinamika pertumbuhan ekonomi suatu daerah dibentuk oleh pergerakan kontribusi masing-masing sektor yang menunjukkan struktur ekonomi. Secara riil, perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2014 tumbuh sebesar 6,95 %, dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 sebesar 6,96%. Sementara pada 2015 perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat diperkirakan mengalami sedikit perlambatan menjadi 6,95% - 6,98%.

Dengan menggunakan pendekatan *trend* data PDRB atas dasar harga konstan (AHK) tahun dasar 2010, pada 2010-2014, angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat 2016 hingga 2017 diprediksikan tumbuh cukup stabil di kisaran 7,01% sampai 7,03%. Sementara itu, dengan pendekatan pertumbuhan tahun sebelumnya (*year to year*), diperoleh angka pertumbuhan yang sedikit lebih tinggi yakni 6,98% pada 2015 dan 7,01% pada 2016. Angka pertumbuhan tersebut mendekati target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD tahun 2015 sebesar 7,20% dan tahun 2016 ditargetkan tumbuh mencapai 7,30%.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kab.Kotawaringin Barat 2011-2016

Tahun	2012	2013	2014	2015*	2016*	2017*
Pertumbuhan Ekonomi	6,70%	6,96%	6,95%	6,95 - 6,98%	6,98 - 7,01%	7,01 - 7,03%

Sumber : BPS dan hasil analisis, 2016

Dilihat secara sektoral, berdasarkan hasil penghitungan PDRB AHK 2010, seluruh sektor memiliki angka pertumbuhan yang positif pada 2014. Sektor yang mencatat angka pertumbuhan tertinggi adalah sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 16,79%, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 13,88%, dan Jasa Administrasi Pemerintah, dan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,47%. Namun angka ini tidak berpengaruh banyak pada pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat, karena kontribusi ketiga Sektor tersebut relatif kecil. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 7,12%, namun demikian Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberi kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 28,49%.

Adapun 11 sektor yang mengalami pertumbuhan PDRB Tahun 2014 lebih tinggi dari Tahun 2013, yakni : Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,81% tumbuh menjadi 16,79%, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dari 5,85%

menjadi 13,88%, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh dari 7,02% menjadi 10,47%, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas naik dari 8,86% menjadi 10,00%, Sektor Real Estate tumbuh dari 7,97% menjadi 9,91% dan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum naik dari 7,03% menjadi 9,51%. Sektor Informasi dan Komunikasi meningkat dari 6,39% menjadi 8,20%. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami kenaikan dari 6,42% menjadi 7,12%. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh dari 4,25% menjadi 6,9%. Sektor Jasa Pendidikan mengalami pertumbuhan dari 1,65% menjadi 2,06%, sedangkan Sektor Jasa Lainnya mengalami peningkatan dari 5,57% menjadi 7,9%.

Enam Sektor lainnya tercatat mengalami pertumbuhan lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu Sektor Transportasi dan Pergudangan dari 10,71% menjadi 5,25%. Sektor Konstruksi dari 9,94% menjadi 7,56%, Sektor Jasa Perusahaan dari 9,90% menjadi 7,90%, Sektor Industri Pengolahan dari 7,02% menjadi 6,82%, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dari 5,77% menjadi 4,62%, Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami perlambatan dari 5,76% menjadi -13,30%. Hal ini terjadi karena adanya pelarangan ekspor bahan mentah hasil tambang (UU Nomor 4 Tahun 2009)

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat tumbuh sebesar 7,12%, sedangkan Sektor yang memberikan kontribusi yang paling rendah terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Sektor Pengadaan Listrik dan Gas serta Sektor Jasa Perusahaan yang masing-masing sektor hanya sebesar 0,05%. Adapun sektor lain yang juga memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu : Sektor Industri Pengolahan sebesar 6,82%, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,09%, Sektor Kontruksi sebesar 7,56%, Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,25%, begitu juga Sektor Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi sebesar 1,37%.

Perlambatan pertumbuhan pada sektor yang terbilang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah (Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran) ini diduga merupakan imbas tidak langsung atas perlambatan pertumbuhan ekonomi global (Tiongkok, Eropa dan Amerika), menurunnya harga komoditas dan menurunnya harga Minyak dunia. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor Kabupaten Kotawaringin Barat ke sejumlah negara mengalami peningkatan pada 2014 bila dibandingkan 2013. Komoditi ekspor ke sejumlah Negara tersebut didominasi oleh produk yang dihasilkan sektor pertanian, seperti minyak nabati dan hasil olahan kayu. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini senada dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi RI pada tahun 2014 secara kumulatif sebesar 5,21% dan triwulan II 2015 (yoy) sebesar 4,67%, terutama pada sektor perdagangan, industri dan keuangan.

a. Struktur Ekonomi dan Distribusi Persentase Persektor

Dilihat dari proporsi persektor, PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat masih didominasi oleh Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan dengan proporsi pada 2014

sebesar 28,63% dan sebesar 28,25% pada 2015*. Memperhatikan rata-rata pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB atas dasar harga berlaku (AHB) 2011-2013 terdapat kecenderungan bahwa proporsi sektor pertanian cenderung mengalami penurunan 14,2%, 11,1%, 10,2% sedang pada tahun 2014 meningkat 12,1%. Diperkirakan proporsinya akan turun menjadi 27,85% di tahun 2016, hingga menjadi 27,43% di tahun 2017. Penurunan nilai tersebut bukan semata-mata menunjukkan bahwa sektor pertanian mengalami penurunan, namun hanyalah pergeseran persentase/komposisi. Hal tersebut harus dibaca bahwa sektor ekonomi lainnya juga mengalami pertumbuhan sehingga menyebabkan peningkatan persentase/proporsi di sektor lainnya, inilah yang menyebabkan proporsi atau persentase sektor pertanian menjadi bergeser, sebab persentase akhir PDRB secara total adalah tetap 100%. Sementara secara nominal, nilai sumbangan/kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB dalam rupiah selalu mengalami peningkatan (pada tahun 2014 sebesar Rp.3.373.465.700.000 diproyeksikan menjadi Rp.4.723.141.910.000 pada tahun 2017).

Secara riil, pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan cukup baik, subsektor perkebunan yang sudah stabil terus mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Sedangkan subsektor perikanan, tanaman pangan, tanaman hortikultura dan peternakan juga digenjut agar dapat meningkatkan produktivitasnya.

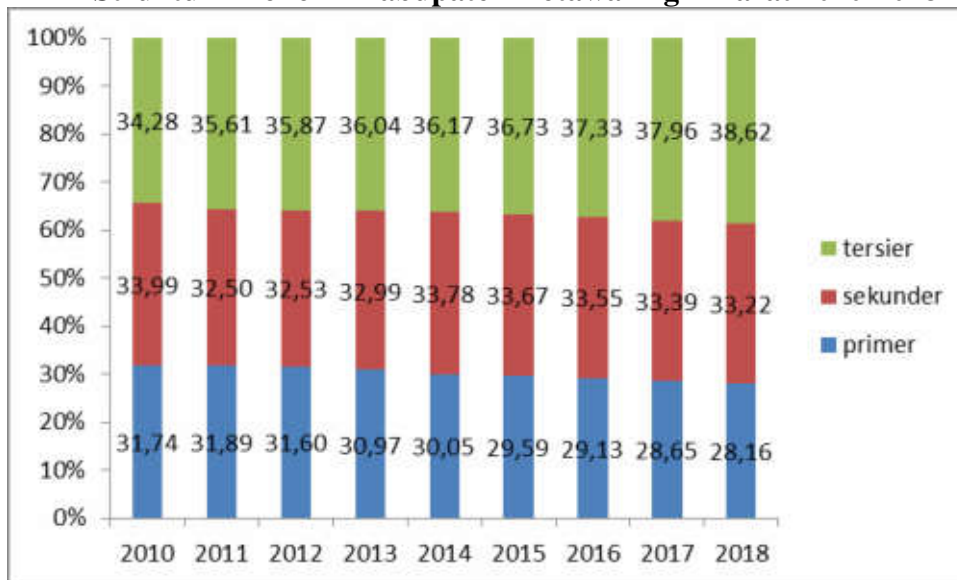
Sektor Industri Pengolahan berada di posisi kedua dengan proporsi sebesar 25,04%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menempati urutan proporsi tiga terbesar dalam perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 yaitu sebesar 11,49%. Sektor Transportasi dan Pergudangan menempati urutan ke empat dengan menyumbang sebesar 8,38%. Kelima Sektor Konstruksi menyumbang sebesar 8,24%. serta diikuti Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi menempati urutan ke enam sebesar 6,78%.

Keenam sektor diatas merupakan sektor-sektor yang diperkirakan memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2017. Sedangkan tiga sektor lainnya memberikan kontribusi yang relatif kecil, yakni Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 3,33%, Sektor Jasa Pendidikan dengan kontribusi sebesar 1,92%, Sektor real estate dengan kontribusi sebesar 1,75%, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1,25%, Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,22%, Sektor Jasa Kesehatan dan Jaminan Sosial sebesar 1,11%, dan yang memberi kontribusi kurang dari 1% yaitu Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 0,96%, Sektor Jasa Lainnya sebesar 0,89%, Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur ulang sebesar 0,08%, Sektor Jasa Perusahaan sebesar 0,05% dan Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,03%.

Sementara itu apabila distrukturkan, pada periode 2010-2018, terdapat kecenderungan terjadi pergeseran proporsi. Secara perlahan, proporsi dominan bergeser dari sektor primer ke sektor tersier, sementara sektor sekunder cenderung stabil. Ini mengindikasikan bahwa pergeseran aktivitas sektoral di Kabupaten Kotawaringin Barat

melompat dari aktivitas primer ke tersier, namun belum didukung pergerakan aktivitas sekunder. Kinerja sektor sekunder perlu diperbaiki dengan penguatan aktivitas hilir pada sektor primer, utamanya dengan membenahi sektor industri pengolahan. Langkah ini diharapkan memberikan efek domino, yakni meningkatkan nilai tambah bagi produk-produk sektor primer dan secara otomatis juga akan mendorong kinerja sektor tersier menjadi lebih baik.

Gambar 3.1
Struktur Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat 2010-2018



Sumber : BPS dan hasil analisis, 2016

b. Gambaran kondisi ekonomi berdasarkan analisis Tipologi Klassen, LQ dan Shift Share

Dengan menggunakan data PDRB AHK 2010-2014, hasil analisis tipologi kelas menunjukkan terdapat 5 (lima) sektor yang memiliki predikat sektor prima atau maju, yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Sektor Konstruksi, Sektor Transportasi dan Pergudangan dan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. Kelimanya tercatat memiliki angka pertumbuhan yang relatif tinggi dan memberikan kontribusi cukup besar terhadap PDRB.

Pada kategori sektor berkembang adalah sektor Real estate, yakni mengalami pertumbuhan tinggi namun memberikan kontribusi yang rendah terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sebanyak 3 (tiga) Sektor masuk dalam kategori tertekan yaitu Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Jasa Pendidikan, memberikan arti bahwa ketiga sektor tersebut memberikan pertumbuhan tinggi namun memberikan kontribusi yang rendah terhadap PDRB atau sebaliknya.

Sementara pada kategori sektor tertinggal, terdapat 8 sektor, yakni Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor Informasi dan komunikasi,

Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Sektor Jasa Lainnya.

Berdasarkan analisis *shift share*, pada periode 2010-2014 diketahui terdapat 5 sektor yang memiliki keunggulan komparatif terhadap ekonomi regional, yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi dan sektor transportasi dan pergudangan. Kelima sektor tersebut menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah (sektor propulsif).

Sementara berdasarkan analisis *location quotient* (LQ) sektor basis masih belum bergeser yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, Sektor industri pengolahan, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dan Sektor Transportasi dan Pergudangan dan Sektor Jasa Perusahaan. Pada periode ini juga terjadi pergeseran positif sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor, dari sektor lokal menjadi sektor basis.

Berdasarkan *Overlay* Hasil Analisis Ketiga Metode diatas, diketahui bahwa Sektor yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Transportasi dan Pergudangan serta Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, untuk dapat lebih ditingkatkan kinerjanya.

Sektor yang perlu mendapat dorongan agar dapat meningkatkan kinerjanya. adalah Sektor Industri Pengolahan, Sektor Konstruksi dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sedangkan Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang serta Sektor Jasa Perusahaan, perlu mendapat perhatian untuk membenahi kinerjanya.

c. Dukungan Investasi untuk Mencapai Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi

Target pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang selalu ditetapkan dalam suatu periode perencanaan sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan. Pada tahun perencanaan 2016 dan 2017, angka pertumbuhan ekonomi diproyeksikan pada kisaran 7,04% (dihitung berdasarkan trend pertumbuhan ekonomi / PDRB AHK 2011-2014). Untuk mencapai target/perkiraan yang ditetapkan tersebut, diperlukan dukungan dari berbagai sektor untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi secara riil.

Salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan faktor produksi, antara lain meningkatkan modal atau lazim disebut investasi. Berdasarkan penghitungan nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2009 - 2013, diketahui bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat cukup kondusif untuk berinvestasi, ditunjukkan dengan besaran angka ICOR akumulasi sebesar 1,52. Artinya jika ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 7,04% pada tahun 2017 maka dibutuhkan investasi sebesar Rp.17.697.470.683.000,-

Untuk mendorong daerah agar mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar target yang telah diproyeksikan yakni 7,04%, diperlukan dukungan investasi dalam besaran tertentu.

Skenario pertumbuhan ekonomi sebesar 7,04% tersebut memerlukan dukungan investasi sebesar Rp.17.697.470.683.000,- Investasi tersebut dapat diarahkan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, Sektor Transportasi dan Pergudangan serta Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Kontruksi dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan daur ulang serta Sektor jasa perusahaan. Kedelapan sektor tersebut merupakan sektor yang dianggap pertumbuhan dan kontribusi yang tinggi terhadap PDRB Kabupten Kotawaringin Barat.

Tabel 3.2
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014 - 2018
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat(juta)

NO	LAPANGAN USAHA	2014		2015*		2016*		2017*		2018*	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.685.321,100	28,49	2.837.479,823	28,08	2.998.260,338	27,65	3.168.151,181	27,21	3.347.668,572	26,76
B	Pertambangan dan Penggalian	129.436,480	1,37	131.327,379	1,30	133.245,901	1,23	135.192,451	1,16	137.167,437	1,10
C	Industri Pengolahan	2.356.482,890	25,00	2.512.830,132	24,86	2.679.550,656	24,71	2.857.332,704	24,54	3.046.910,184	24,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.663,030	0,05	5.116,937	0,05	5.615,028	0,05	6.161,604	0,05	6.761,384	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.621,590	0,09	9.300,082	0,09	10.031,969	0,09	10.821,454	0,09	11.673,068	0,09
F	Konstruksi	825.204,570	8,76	890.747,259	8,81	961.495,742	8,87	1.037.863,493	8,91	1.120.296,827	8,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.114.752,880	11,83	1.185.372,769	11,73	1.260.466,446	11,62	1.340.317,328	11,51	1.425.226,784	11,39
H	Transportasi dan Pergudangan	753.850,430	8,00	832.802,997	8,24	920.024,456	8,48	1.016.380,828	8,73	1.122.828,834	8,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	117.107,970	1,24	126.766,371	1,25	137.221,342	1,27	148.538,580	1,28	160.789,199	1,29
J	Informasi dan Komunikasi	102.192,510	1,08	111.399,507	1,10	121.436,006	1,12	132.376,739	1,14	144.303,173	1,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	466.937,710	4,95	546.213,963	5,40	638.949,665	5,89	747.429,949	6,42	874.327,915	6,99
L	Real Estate	169.990,520	1,80	185.864,632	1,84	203.221,107	1,87	222.198,369	1,91	242.947,773	1,94
M,N	Jasa Perusahaan	4.357,270	0,05	4.761,934	0,05	5.204,180	0,05	5.687,497	0,05	6.215,701	0,05
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	287.129,900	3,05	309.096,636	3,06	332.743,927	3,07	358.200,343	3,08	385.604,290	3,08
P	Jasa Pendidikan	213.313,170	2,26	219.791,250	2,17	226.466,063	2,09	233.343,582	2,00	240.429,963	1,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	101.046,560	1,07	107.521,050	1,06	114.410,388	1,06	121.741,156	1,05	129.541,638	1,04
RSTU	Jasa Lainnya	84.579,090	0,90	89.831,634	0,89	95.410,372	0,88	101.335,561	0,87	107.628,718	0,86
JUMLAH TOTAL		9.424.987,670	100	10.106.224,357	100	10.843.753,585	100	11.643.072,818	100	12.510.321,462	100

Sumber : BPS dan hasil analisis, 2016

Keterangan : *) angka proyeksi

Tabel 3.3
Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2014 - 2018
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kotawaringin Barat (juta)

NO	LAPANGAN USAHA	2014		2015*		2016*		2017*		2018*	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.373.465,740	28,63	3.773.936,036	28,25	4.221.946,895	27,85	4.723.141,943	27,43	5.283.834,772	27,00
B	Pertambangan dan Penggalian	166.619,720	1,41	180.027,259	1,35	194.513,675	1,28	210.165,783	1,22	227.077,382	1,16
C	Industri Pengolahan	2.978.467,820	25,28	3.369.101,135	25,22	3.810.966,961	25,14	4.310.784,568	25,04	4.876.154,472	24,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.192,340	0,04	4.487,503	0,03	4.803,448	0,03	5.141,636	0,03	5.503,635	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.181,770	0,09	11.459,228	0,09	12.896,964	0,09	14.515,085	0,08	16.336,223	0,08
F	Konstruksi	986.688,590	8,37	1.113.846,771	8,34	1.257.392,294	8,29	1.419.437,055	8,24	1.602.365,120	8,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.392.026,030	11,82	1.565.051,506	11,71	1.759.583,632	11,61	1.978.295,631	11,49	2.224.193,003	11,37
H	Transportasi dan Pergudangan	921.626,210	7,82	1.070.198,614	8,01	1.242.721,898	8,20	1.443.057,107	8,38	1.675.687,712	8,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	144.358,240	1,23	164.69,548	1,23	187.902,556	1,24	214.377,027	1,25	244.581,610	1,25
J	Informasi dan Komunikasi	116.329,320	0,99	130.96,278	0,98	147.451,665	0,97	166.008,347	0,96	186.900,374	0,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	602.773,600	5,12	751.306,555	5,62	936.440,381	6,18	1.167.194,111	6,78	1.454.809,213	7,43
L	Real Estate	201.975,110	1,71	230.714,443	1,73	263.543,137	1,74	301.043,074	1,75	343.878,931	1,76
M,N	Jasa Perusahaan	5.732,510	0,05	6.709,696	0,05	7.853,458	0,05	9.192,190	0,05	10.759,127	0,05
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	375.913,970	3,19	432.848,350	3,24	498.405,776	3,29	573.892,260	3,33	660.811,615	3,38
P	Jasa Pendidikan	263.344,700	2,24	286.186,531	2,14	311.009,602	2,05	337.985,762	1,96	367.301,764	1,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	130.909,940	1,11	148.669,787	1,11	168.839,017	1,11	191.744,497	1,11	217.757,441	1,11
RSTU	Jasa Lainnya	106.819,200	0,91	120.316,877	0,90	135.520,121	0,89	152.644,447	0,89	171.932,604	0,88
JUMLAH TOTAL		11.781.424,810	100	13.360.527,118	100	15.161.791,478	100	15.161.791,478	100	19.569.884,999	100

Sumber : BPS dan hasil analisis, 2016

Keterangan : *) angka proyeksi

Tabel 3.4
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014 - 2018
Atas Dasar Harga Berlaku (AHB) dan Harga Konstan (AHK)
Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	Sektor	2014		2015*		2016*		2017*		2018*	
		AHB (%)	AHK (%)	AHB (%)	AHK (%)	AHB (%)	AHK (%)	AHB (%)	AHK (%)	AHB (%)	AHK (%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	28,63	28,49	28,25	28,08	27,85	27,65	27,43	27,21	27,00	26,76
B	Pertambangan dan Penggalian	1,41	1,37	1,35	1,30	1,28	1,23	1,22	1,16	1,16	1,10
C	Industri Pengolahan	25,28	25,00	25,22	24,86	25,14	24,71	25,04	24,54	24,92	24,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,05	0,03	0,05	0,03	0,05	0,03	0,05	0,03	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09	0,08	0,09
F	Konstruksi	8,37	8,76	8,34	8,81	8,29	8,87	8,24	8,91	8,19	8,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,82	11,83	11,71	11,73	11,61	11,62	11,49	11,51	11,37	11,39
H	Transportasi dan Pergudangan	7,82	8,00	8,01	8,24	8,20	8,48	8,38	8,73	8,56	8,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,23	1,24	1,23	1,25	1,24	1,27	1,25	1,28	1,25	1,29
J	Informasi dan Komunikasi	0,99	1,08	0,98	1,10	0,97	1,12	0,96	1,14	0,96	1,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,12	4,95	5,62	5,40	6,18	5,89	6,78	6,42	7,43	6,99
L	Real Estate	1,71	1,80	1,73	1,84	1,74	1,87	1,75	1,91	1,76	1,94
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,19	3,05	3,24	3,06	3,29	3,07	3,33	3,08	3,38	3,08
P	Jasa Pendidikan	2,24	2,26	2,14	2,17	2,05	2,09	1,96	2,00	1,88	1,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,11	1,07	1,11	1,06	1,11	1,06	1,11	1,05	1,11	1,04
RSTU	Jasa Lainnya	0,91	0,90	0,90	0,89	0,89	0,88	0,89	0,87	0,88	0,86
	JUMLAH TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS dan hasil analisis, 2016

Keterangan : *) angka proyeksi

Tabel 3.5
Rata-rata Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (AHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (AHK) Tahun 2014 - 2018
Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	Sektor	Rata-rata	
		AHB (%)	AHK (%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	27,83	27,64
B	Pertambangan dan Penggalian	1,29	1,23
C	Industri Pengolahan	25,12	24,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09
F	Konstruksi	8,29	8,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,60	11,62
H	Transportasi dan Pergudangan	8,19	8,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,24	1,26
J	Informasi dan Komunikasi	0,97	1,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,23	5,93
L	Real Estate	1,74	1,87
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,29	3,07
P	Jasa Pendidikan	2,05	2,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,11	1,05
RSTU	Jasa Lainnya	0,89	0,88
JUMLAH TOTAL		100	100

Sumber : BPS dan hasil analisis, 2016

Tabel 3.6
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator Makro Ekonomi	Satuan	Realisasi		Bertambah/ Berkurang	Proyeksi		
			2014	2015*		2016*	2017*	2018*
1	2	3	4	5	6	8	9	9
1.	PDRB Harga Berlaku (dalam juta)	Rp	11.781.424,820	13.360.527,118	1.579.102,308	15.161.791,478	17.218.620,522	19.569.884,999
2.	PDRB Harga Konstan (dalam juta)	Rp	9.424.987,660	10.106.224,357	681.236,687	10.843.753,585	11.643.072,818	12.510.321,462
3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Berlaku tahun tertentu	%	14,46	13,40	-1,06	13,48	13,57	13,66
4.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Konstan tahun tertentu	%	6,95	7,23	0,28	7,30	7,37	7,45
5.	Tingkat Inflasi	%	7,97	4,08	-3,89	3,00	3,00	3,00
6.	Angka Kemiskinan	%	5,27	4,94	-0,33	2,00	2,00	2,00
7.	Tingkat Pengangguran	%	2,66	2	-0,66	2,10	2,0	2,00*
8.	PDRB perkapita (AHB)	Rp	43.694.946,83	47.843.510	4.148.560	52.422.290	57.481.730	63.079.140

Sumber : BPS dan hasil analisis, 2016 dan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2012 -2016

Catatan:

- * Angka PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi AHK dan AHB 2015, 2016, 2017 adalah angka proyeksi
- * Angka inflasi 2014 dan 2015 adalah realisasi bersumber dari BPS
- * Angka inflasi 2016 diambil dari Target RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016
- * Angka Kemiskinan 2014, 2015, 2016 diambil dari Target RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016
- * Angka PDRB perkapita AHB 2015, 2016 diambil dari Target RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016

3.1.2. Laju Inflasi

Laju inflasi di Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2015 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan Tahun 2014. Angka Inflasi ini masih terbilang terkendali karena angka inflasi masih dibawah dua digit. Pada bulan Desember 2015 terjadi inflasi sebesar 0,91%, laju inflasi *Tahun Kalender* (Jan-Des 2015) sebesar 4,04 % dan laju inflasi *year on year* (Des 2014 – Des 2015) sebesar 4,08 %. Angka ini jauh menurun dibandingkan dengan angka inflasi 2014 yakni sebesar 7,97 %. Angka ini juga lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Provinsi Kalimantan Tengah *year on year* untuk tahun 2015 yaitu sebesar 4,74%. dan lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional 2015 yakni sebesar 3,35% dengan deviasi 0,73% (BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2015)

Komoditas pemicu inflasi pada 2015 adalah daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan gabus, ikan mas, ikan nila, cabe rawit, cabe merah, cabe hijau, bawang merah, bawang putih, tomat, kentang, kubis, rokok kretek, bahan bakar rumah tangga, jasa angkutan, wortel, petai, kacang panjang, dan beras.

Tabel 3.7
Nilai dan Target Inflasi Tahun 2010 - 2017 Kabupaten Kotawaringin Barat

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
Inflasi	6,78 %	5,58 %	3,99 %	6,29 %	7,97 %	4,08 %	3,00 %	3,00 %

Sumber : BPS dan hasil analisis, 2016

Catatan :

⌈ * angka sementara

** diambil dari target Rancangan RPJMD 2017-2021 (angka sangat sementara)

Kebijakan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat yang terkait langsung dengan pengembangan sektor ekonomi adalah :

1. Melaksanakan Program terpadu bidang pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, nelayan dan peternak;
2. Mempersiapkan pengembangan sektor industri pengolahan (aspek hilir produk pertanian) sebagai lokomotif ekonomi baru selain pertanian dalam arti luas;
3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, melakukan regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
4. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung aktivitas dan produktivitas ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Mempersiapkan pengembangan kawasan berdasarkan sektor unggulan dan potensi masing-masing (kompetensi inti kawasan)
6. Peningkatan kualitas dan kualifikasi SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pelaksanaan kebijakan ekonomi pemerintah daerah di atas memerlukan dukungan mutlak berupa komitmen Perangkat Daerah (PD) teknis dalam pelaksanaan di lapangan. PD teknis diwajibkan mengawal kebijakan yang telah digariskan, yang

dituangkan dalam program/kegiatan. Untuk itu PD teknis wajib melakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan daerah.

Selaras dengan kebijakan ekonomi tahun 2016, maka kebijakan ekonomi tahun 2017 diarahkan antara lain untuk :

1. Meningkatkan pendapatan perkapita melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan;
2. Mengembangkan kawasan dengan keunggulan komparatif dan kompetitif;
3. Mengurangi pengangguran;
4. Menurunkan angka kemiskinan;
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat ;
6. Peningkatan kualitas, nilai tambah dan daya saing produk-produk pertanian dan pertambangan.
7. Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan daerah.

Terkait dengan arah kebijakan ekonomi tersebut, maka Pemerintah menetapkan strategi sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan tahun 2017, guna menjamin konsistensi rencana pembangunan tahun 2016, yaitu melalui :

a. Percepatan penyediaan infrastruktur

Percepatan penyediaan infrastruktur dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan penyediaan infrastruktur diutamakan pada infrastruktur dasar berupa prasarana untuk peningkatan aksesibilitas wilayah, kelistrikan dan lahan pertanian. Selain membuka keterisolasian wilayah, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

b. Peningkatan investasi daerah.

Investasi di daerah diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), memberikan kepastian hukum dan pemberian insentif bagi investor.

c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berupa peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia. Hal ini sebagai upaya menjamin ketersediaan tenaga kerja terampil di daerah dalam rangka menarik investasi ke daerah.

d. Pemerataan Hasil Pembangunan.

Dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan maka didorong percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah pengembangan, pengembangan kawasan-kawasan khusus seperti pengembangan kawasan agropolitan/ minapolitan, pengembangan sentra-sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial, percepatan pembangunan pertanian melalui peningkatan produksi pangan, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha di pedesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat serta memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat, pengembangan produk unggulan (*core business* daerah) yang meliputi: agribisnis (CPO, Kerupuk Amplang, Daging Sapi), industri manufaktur dan pariwisata (eko wisata, agrowisata dan wisata budaya).

Dalam upaya percepatan pengentasan desa tertinggal pemerintah daerah akan selalu meningkatkan peran dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan melalui program pemberdayaan masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan dana ADD dan Dana Desa.

e. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat, pemerintah daerah melakukan upaya pengembangan Koperasi dan UMKM melalui penyediaan bantuan untuk permodalan bergulir, pengembangan lembaga penjaminan untuk usaha kecil dan menengah, pengembangan lembaga-lembaga ekonomi mikro di pedesaan, fasilitasi dan pembinaan manajemen Koperasi dan UMKM serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya yang memberikan *multiplier effect* terhadap pendapatan masyarakat.

f. Peningkatan Kualitas Lingkungan.

Untuk menjamin *sustainability* pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan peningkatan kualitas lingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan, rehabilitasi lahan, pola tanam dan pengaturan pemanenan serta penegakan hukum bagi pelanggar masalah lingkungan.

g. Pengembangan Industri Hilir.

Untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan pertambangan, pemerintah akan mendorong pengembangan hilirisasi melalui diversifikasi produk. Sementara untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk, dilakukan standardisasi produk dan proses produksi.

h. Pengendalian Inflasi.

Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian daerah dan daya beli masyarakat, dilakukan upaya pengendalian komoditas pemicu inflasi, seperti : daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, ikan air tawar, beras yang sebenarnya telah dapat diproduksi di tingkat lokal meskipun dengan skala yang terbatas. Pengendalian komoditas lokal dan yang berasal dari luar daerah

dilakukan meliputi proses produksi, produktifitas dan pendistribusiannya. Selain itu pemerintah daerah juga mendorong pengembangan komoditas lokal, dengan dukungan strategi lainnya, seperti strategi pengembangan kawasan dan demplot komoditas pemicu inflasi, pembinaan UMKM, mempermudah akses permodalan dan jaringan pemasaran.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan dilakukan pada tahun 2017 masih ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan langkah sebagai berikut :

a. **Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah.**

Peningkatan pendapatan daerah akan difokuskan pada optimalisasi pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya Peningkatan PAD ditempuh melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Sejalan dengan hal tersebut, upaya untuk meningkatkan PAD akan lebih difokuskan pada upaya :

- 1) Peningkatan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah;**
- 2) Peningkatkan efektifitas pengendalian dan pengawasan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah;**
- 3) Perluasan basis pungutan pajak daerah sesuai dengan potensi dan kewenangan daerah dan Penetapan kantong-kantong potensial penerimaan retribusi daerah; Penetapan obyek kena pajak baru harus dilaksanakan secara hati-hati dan obyektif untuk tetap menjaga terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat, dengan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan masyarakat untuk membayar pajak.**
- 4) Penyesuaian peraturan daerah dibidang pajak dan retribusi daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**
- 5) Perbaikan mekanisme penerimaan pajak dan retribusi daerah, terutama menyangkut Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah;**
- 6) Peningkatan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;**
- 7) Pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan Pengembangan Teknologi Informasi (TI);**
- 8) Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan lembaga keuangan lainnya;**
- 9) Peningkatan kinerja BUMD melalui pemberian penyertaan modal yang dikaitkan dengan penerimaan deviden yang akan diperoleh.**

b. Memperkuat Posisi Tawar (*bargaining position*).

Pemerintah Daerah memperkuat posisi tawar dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh pemerintah daerah, seperti Pendapatan transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah disamping tetap memperhatikan serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi operasional yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Review perda-perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- Peningkatan koordinasi antara PD dalam upaya meningkatkan PAD.

c. Dana Perimbangan

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2017, pengalokasian didasarkan pada alokasi dana perimbangan Tahun 2016 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan tiga tahun terakhir serta dalam rangka mengantisipasi menurunnya beberapa asumsi makro ekonomi pemerintah, seperti nilai tukar rupiah terhadap dollar, peralihan kewenangan terhadap pemerintah Provinsi, penurunan tarif listrik, fluktuasi harga minyak dan harga komoditas lainnya.

Pendapatan daerah pada tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp. 1.349.480.309.397,63 atau naik sebesar 8,24% dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar Rp. 1.246.327.803.000,00 Adapun komponen Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp. 229.918.960.069,42 atau naik sebesar 73,29% apabila dibandingkan dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar Rp. 132.681.689.000,00.

b. Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan pada APBD Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp. 799.705.947.837,52 atau turun sebesar -9,22% apabila dibandingkan dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar Rp. 880.888.294.000,00.

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp. 319.394.951.490,69 atau naik sebesar 37,22% apabila dibandingkan dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar Rp.232.757.820.000,00

Secara rinci perkiraan target pendapatan daerah tahun 2017 adalah sebagaimana **tabel 3.8** berikut ini :

Tabel 3.8
Perkiraan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2016 - 2018

NO	JENIS PENDAPATAN	APBD Tahun 2016	Target pada Tahun Rencana 2017	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Proyeksi /Target pada Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.1	Pendapatan asli daerah	132.681.689.000,00	229.918.960.069,42	97.237.271.068,42	426.760.990.814,58
1.1.1	Pajak daerah	38.551.000.000,00	53.400.376.111,58	14.849.376.111,58	73.969.551.214,18
1.1.2	Retribusi daerah	14.493.067.000,00	13.579.809.001,75	-913.257.998,25	12.724.098.530,98
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.000.000.000,00	7.784.393.427,00	784.393.427,00	8.656.683.003,75
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	72.637.622.000,00	155.154.381.529,09	82.516.759.529,09	331.410.658.065,67
1.2	Dana perimbangan	880.888.294.000,00	799.705.947.837,52	(81.182.346.162,48)	1.026.190.289.308,01
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	68.178.501.000,00	77.934.354.678,87	9.755.853.678,87	89.086.200.930,28
1.2.2	Dana alokasi umum	662.249.343.000,00	721.771.593.158,65	59.522.250.158,65	786.643.638.377,73
1.2.3	Dana alokasi khusus	150.460.450.000,00	0	(150.460.450.000,00)	0
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	232.757.820.000,00	319.394.951.490,69	86.637.131.490,69	439.735.318.745,64
1.3.1	Hibah	3.500.000.000,00	3.703.571.660,50	203.571.660,50	3.918.983.727,00
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	88.365.037.000,00	118.706.197.876,41	30.341.160.876,40	159.465.348.430,42
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	127.092.783.000,00	181.115.181.953,78	54.022.398.953,78	258.100.486.588,22
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	13.800.000.000,00	15.870.000.000,00	2.070.000.000,00	18.250.500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)	1.246.327.803.000,00	1.349.480.309.397,63	253.152.506.396,64	1.892.686.598.868,24

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016 dan Hasil Analisis, 2016

Adapun hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan pendapatan daerah, realisasi serta proyeksi pendapatan daerah tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 disajikan dalam **tabel 3.9** berikut :

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2014 s.d tahun 2018

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Tahun Berjalan 2016	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2017	Proyeksi /Target pada Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan asli daerah	108.764.611.000,00	125.164.495.000,00	132.681.689.000,00	229.918.960.069,42	426.760.990.814,58
1.1.1	Pajak daerah	27.636.518.000,00	32.315.000.000,00	38.551.000.000,00	53.400.376.111,58	73.969.551.214,18
1.1.2	Retribusi daerah	12.128.846.000,00	13.987.567.000,00	14.493.067.000,00	13.579.809.001,75	12.724.098.530,98
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.051.541.300,00	6.298.061.000,00	7.000.000.000,00	7.784.393.427,00	8.656.683.003,75
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	63.947.705.700,00	72.563.867.000,00	72.637.622.000,00	155.154.381.529,09	331.410.658.065,67
1.2	Dana perimbangan	740.159.464.000,00	717.381.900.000,00	880.888.294.000,00	950.166.397.837,52	1.026.190.289.308,01
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bukan pajak	91.725.000.000,00	68.141.647.000,00	68.178.501.000,00	77.934.354.678,87	89.086.200.930,28
1.2.2	Dana bagi hasil cukai tembakau	00	00	00	00	00
1.2.3	Dana alokasi umum	597.665.464.000,00	614.824.773.000,00	662.249.343.000,00	721.771.593.158,65	786.643.638.377,73
1.2.4	Dana alokasi khusus	50.769.000.000,00	34.415.480.000,00	150.460.450.000,00	0	150.460.450.000,00

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Tahun Berjalan 2016	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2017	Proyeksi /Target pada Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	161.148.339.400,00	197.653.705.600,00	232.757.820.000,00	319.394.951.490,69	439.735.318.745,64
1.3.1	Hibah	17.260.000.000,00	28.482.597.000,00	3.500.000.000,00	3.703.571.660,50	3.918.983.727,00
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pem. daerah lainnya	84.559.068.400,00	66.903.536.600,00	88.365.037.000,00	118.706.197.876,41	159.465.348.430,42
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	52.629.271.000,00	94.067.572.000,00	127.092.783.000,00	181.115.181.953,78	258.100.486.588,22
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	6.700.000.000,00	8.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	0,00	0,00	13.800.000.000,00	15.870.000.000,00	18.250.500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)	1.010.072.414.400,00	1.040.200.100.600,00	1.246.327.803.000,00	1.349.480.309.397,63	1.892.686.598.868,24

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 2016 dan Hasil Analisis, 2016

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum, kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dengan mengupayakan 20% anggaran pendidikan sesuai dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yaitu 10% anggaran Kesehatan yang terdiri dari 1/3 untuk upaya kuratif, dan 2/3 untuk upaya preventif dan Perpres nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
3. Mendorong terselenggaranya pembangunan desa yang melalui Program terpadu dan holistik melalui program-program pro rakyat yang menstimulasi aktifitas ekonomi rakyat dengan mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya masyarakat perdesaan serta peningkatan alokasi dana desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
4. Memperbesar kemampuan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang diimbangi dengan keberpihakan pada masyarakat miskin;

II. Aspek Pelayanan Publik

1. Meningkatkan kemampuan dan standar kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan belanja modal sekurang-kurangnya 30 % dari belanja Daerah sesuai amanat Peraturan Persiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 untuk pembangunan Fasilitas Pelayanan Publik.
3. Alokasi Belanja Pegawai maksimal 50 % dari total belanja APBD dan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah maksimal 3 % dari target Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Peningkatan kedaulatan pangan masyarakat yang berbasis pada pengembangan kegiatan agribisnis dan agroindustri yang berdaya saing, pemantapan pasar yang jelas dan *prospektif* dan mendukung percepatan kawasan/ *cluster* industri berbasis pertanian.
5. Penyediaan anggaran Hibah untuk penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat.

III. Aspek Daya Saing

1. Memantapkan infrastruktur transportasi dan energi yang mendukung percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kesenjangan wilayah/ *interisolasi*, serta sarana prasarana dasar perkotaan dan perdesaan seperti jalan darat, pelabuhan laut, pelabuhan ro-ro, pelabuhan laut dalam dan bandara bertaraf internasional;
2. Mempersiapkan SDM yang handal guna mengoptimalkan tata guna, tata kelola dan tata produksi pengelolaan sumber-sumber kehidupan masyarakat dan sumberdaya alam berperspektif pertumbuhan ekonomi rendah karbon dan reduksi bencana;
3. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi sumberdaya hayati dan kearifan budaya lokal serta teknologi informasi.
4. Mempercepat reformasi regulasi dan birokrasi meliputi tiga aspek yang menjadi pilar, yaitu: kelembagaan, tatalaksana dan SDM melalui pemerintah yang memiliki kelembagaan yang kuat, kepemimpinan yang *capable* dan *responsible*, SDM yang kompeten dan profesional, sistem yang memungkinkan *check and balances*, pemerintahan yang berdasarkan prosedur dan keteraturan serta mekanisme yang transparan dan akuntabel menuju *good governance*.
5. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kedaulatan pangan, integrasi kelapa sawit dan ternak sapi serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
6. Membuat kegiatan-kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan yang bersifat selektif dan sesuai kebutuhan masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat-alat pertanian dan lain-lain, serta penyaluran kredit UKM bersyarat ringan melalui pengembangan lembaga penjaminan atau melalui perbankan.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui dana ADD dan Dana Desa dalam upaya pelaksanaan kegiatan secara optimal dan tepat sasaran.
8. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan/ Hibah harus memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif bagi kelompok berbadan hukum.
9. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.
10. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah guna melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah (PD)

harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diproyeksikan sebesar Rp.1.466.325.114.672,46 atau naik sebesar 20,14 % (Rp. 245.774.437.672,46) apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2016 yaitu Rp.1.220.550.677.000,00 yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung (BTL) tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 685.734.335.311,00 atau naik sebesar Rp.89.681.909.311,00 (15,05 %) dibandingkan dengan APBD murni Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.596.032.366.000,00

Adapun yang termasuk dalam kelompok/komponen Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terdiri dari Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Penerimaan ASN lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (diluar jumlah ASN yang mutasi keluar daerah), termasuk Gaji, Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah, pada 2017 diproyeksikan sebesar Rp.500.231.970.211,15 mengalami kenaikan sebesar 11,05% (Rp. 49.757.383.211,15) dari plafon belanja yang sama pada APBD Murni Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.450.474.587.000,00

- b. Belanja Bunga

Belanja Bunga pada tahun anggaran 2016 Sebesar Rp. 1.050.000.000,00 sedangkan pada Tahun 2017 tidak dianggarkan belanja tersebut.

- c. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi pada Tahun 2016 tidak dianggarkan, demikian juga dengan Tahun 2017.

- d. Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Belanja Hibah ini pada Tahun Anggaran 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 13.135.373.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (29,59%) dari plafon belanja yang sama pada APBD Murni Tahun 2016 yaitu sebesar Rp.10.135.373.000,00

- e. Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial, yaitu bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 1.660.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (151,52%) dari plafon belanja yang sama pada APBD murni tahun 2016 yaitu sebesar Rp.660.000.000,00.

- f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Jumlah anggaran Belanja Bagi Hasil ini pada Tahun Anggaran 2017 diproyeksikan sebesar Rp.4.696.306.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.248.300.100,00 (5,28%) dari plafon belanja yang sama pada APBD Murni Tahun 2016 sebesar Rp.4.448.006.600,00

- g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik

Belanja Bantuan Keuangan yakni bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan, partai politik dan damang kepala adat. Belanja Bantuan Keuangan ini pada Tahun Anggaran 2017 diproyeksikan sebesar Rp.163.010.685.400,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 35.076.280.000,00 (27,42%) dari plafon belanja yang sama pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.127.914.399.400,00

- h. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga disediakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Untuk tahun 2017, diproyeksikan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.650.000.000,00 (122,22%) dari plafon belanja yang sama pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.350.000.000,00

2. Belanja Langsung (BL) tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 665.623.134.506,00 dengan asumsi DAK sebesar Rp. 150.460.450.000,00 setara dengan jumlah Rp.515.162.684.506,00 (tanpa DAK) atau naik 8,67 % (Rp.41.104.823.506,00) bila dibandingkan dengan APBD murni Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.624.527.505.000,00. (DAK =Rp. 150.460.450.000,00)

Belanja Langsung dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, yakni urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Anggaran belanja daerah Tahun 2017 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung adalah disajikan dalam **tabel 3.10 dan 3.11** sebagai berikut :

Tabel 3.10
Perkiraan Target Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 - 2018

NO	JENIS BELANJA	APBD Tahun 2016	Target pada Tahun Rencana 2017	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Proyeksi /Target pada Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
2.1	Belanja Tidak Langsung	596.032.366.000,00	685.734.335.311,15	89.701.969.311,15	887.842.626.073,77
2.1.1	Belanja pegawai	450.474.587.000,00	500.231.970.211,15	49.757.383.211,15	555.485.328.679,21
2.1.2	Belanja bunga	1.050.000.000,00	0,00	-1.050.000.000,00	0,00
2.1.3	Belanja subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja hibah	10.135.373.000,00	13.135.373.000,00	3.000.000.000,00	10.135.373.000,00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	660.000.000,00	1.660.000.000,00	1.000.000.000,00	660.000.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	4.448.006.600,00	4.696.306.700,00	248.300.100,20	8.199.186.593,53
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	127.914.399.400,00	163.010.685.400,00	35.096.286.000,00	312.012.737.801,03
2.1.8	Belanja tidak terduga	1.350.000.000,00	3.000.000.000,00	1.650.000.000,00	1.350.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	624.518.311.000,00	665.623.134.506,00	41.095.629.506,00	890.572.655.349,74
	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.220.550.677.000,00	1.351.357.469.817,15	130.806.792.817,15	1.778.415.281.423,51

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016 dan Hasil Analisis, 2016

Tabel 3.11
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 s.d Tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Tahun Berjalan 2016	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2017	Proyeksi pada Tahun 2018
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	Belanja Tidak Langsung	411.600.763.300,00	505.942.125.000,00	596.032.366.000,00	685.734.335.311,15	887.842.626.073,77
2.1.1	Belanja pegawai	360.879.241.000,00	402.296.892.100,00	450.474.587.000,00	500.231.970.211,15	555.485.328.679,21
2.1.2	Belanja bunga	0,00	0	1.050.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja hibah	5.419.631.000,00	6.321.828.000,00	10.135.373.000,00	13.135.373.000,00	10.135.373.000,00
2.1.5	Belanja bantuan social	4.108.700.000,00	1.695.000.000,00	660.000.000,00	1.660.000.000,00	660.000.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	2.866.132.000,00	4.086.656.700,00	4.448.006.600,00	4.696.306.700,00	8.199.186.593,53
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	34.924.068.300,00	89.291.748.200,00	127.914.399.400,00	163.010.685.400,00	312.012.737.801,03
2.1.8	Belanja tidak terduga	3.402.991.000,00	2.250.000.000,00	1.350.000.000,00	3.000.000.000,00	1.350.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	702.361.020.500,00	605.757.510.508,00	624.518.311.000,00	665.623.134.506,00	890.572.655.349,74
	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.113.961.783.800,00	1.111.699.635.508,00	1.220.550.677.000,00	1.351.357.469.817,15	1.778.415.281.423,51

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016 dan Hasil Analisis, 2016

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat masih menetapkan kebijakan penerimaan pembiayaan bersumber dari prediksi sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan berdasarkan potensi riil yang ada dan penerimaan kembali pemberian pinjaman jangka pendek kepada masyarakat.

Kebijakan atas pengeluaran pembiayaan digunakan untuk :

- a. Menutup defisit anggaran pendapatan tahun berjalan;
- b. Penyertaan modal pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dan Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera;
- c. Pembentukan dana investasi jangka pendek dan jangka panjang.

Realisasi dan proyeksi pembiayaan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.12

Tabel 3.12

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2014 s.d Tahun 2018

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Tahun Berjalan 2016	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2017	Proyeksi/Target pada Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Penerimaan pembiayaan Daerah	159.677.576.906,91	141.374.403.817,00	14.732.068.000,00	14.732.068.000,00	14.732.068.000,00
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	159.677.576.906,91	111.374.403.817,00	14.732.068.000,00	14.732.068.000,00	14.732.068.000,00
3.1.2	Penerimaan Kembali Dana Bergulir/Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah dan Obligasi Daerah	0,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
3.2	Pengeluaran pembiayaan	6.500.000.000,00	12.000.000.000,00	40.500.000.000,00	12.394.457.580,48	12.394.457.580,48
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.500.000.000,00	12.000.000.000,00	10.500.000.000,00	12.394.457.580,48	12.394.457.580,48
3.2.3	Pembayaran pokok utang	0,00	0,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pembayaran utang pada pihak III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		153.177.576.906,91	129.374.403.817,00	-25.767.932.000,00	2.337.610.419,52	2.337.610.419,52

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016 dan Hasil Analisis, 2016

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Namun karena RPJMD tahun 2017-2021 belum ditetapkan, maka penyusunan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025, serta memperhatikan RPJMD tahun 2012-2016 dengan tujuan menyelesaikan masalah pembangunan yang belum tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD, dan masalah yang dihadapi pada tahun pertama pemerintahan baru.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan sebagai daya ungkit kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan tahun 2017 dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJPD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan pada hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2016, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Pada bagian ini dirumuskan:

1. Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:
 - a. Korelasi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional (Nawacita), seperti terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs), Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja.
 - b. Korelasi terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
 - c. Korelasi terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
 - d. Korelasi terhadap isu strategis daerah.

2. Prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana sebagai arahan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana.
3. Untuk masing-masing prioritas pembangunan, selanjutnya dirumuskan sasaran yang hendak dicapai dan fokus/agenda pokok, nama program, PD pelaksana serta rincian indikasi kegiatan prioritas.
4. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah tersebut.
5. Untuk dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas, maka masing-masing kegiatan prioritas dilengkapi dengan tolok ukur kinerja keluaran setiap kelompok program, serta kebutuhan pembiayaannya.
6. Kerangka pendanaan disusun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.

4.1 Visi dan Misi Pembangunan

Mengingat RPJMD periode 2012 -2016 berakhir pada tahun 2016, maka sesuai dengan PERMENDAGRI No 54 Tahun 2010 pasal 287 ayat 2 bahwa "*Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dengan pembangunan daerah Provinsi*". Maka pada bab ini misi, tujuan dan sasaran pembangunan mengacu pada RPJPD yang didalamnya memuat arah pembangunan dua puluh (20) tahun ke depan dengan Visi Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut : "**Terwujudnya Kotawaringin Barat yang Aman, Maju, Sejahtera, Mandiri, dan Demokratis**". Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka Misi yang harus dilaksanakan meliputi :

1. Mewujudkan masyarakat Kotawaringin Barat yang aman.
2. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik.
3. Tercukupinya sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
4. Terwujudnya Kotawaringin Barat yang demokratisberlandaskan hukum.
5. Terwujudnya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan tanaman pangan secara berkelanjutan demi terwujudnya ketahanan pangan.
6. Meningkatnya akselerasi perkembangan koperasi dan UMKM serta dunia usaha yang saling terkait antar unsur dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah.

7. Terbangun dan berkembangnya budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, trampil, inovatif dan berwawasan kebangsaan serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
8. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara berkelanjutan.
9. Terwujudnya kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan percepatan penanggulangan masalah sosial masyarakat secara berkesinambungan.
10. Terwujudnya peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil sejahtera serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
11. Terwujudnya fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan
12. Optimalnya produktivitas pemanfaatan, pengendalian ruang dan kawasan hutan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.2.1. Tujuan

Sesuai dengan Visi dan Misi tersebut diatas, bahwa wujud dari pembangunan untuk RPJMD tahap III periode 2017-2021 adalah : “Kemajuan dan Keamanan Melalui Percepatan dan Perluasan Pembangunan dengan Menekankan Keunggulan dan Potensi Daerah serta Memperhatikan Situasi dan Kondisi Daerah” dengan tujuan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM, Ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkesinambungan;
2. Pengembangan industri hulu dan hilir berbasis komoditas unggulan daerah;
3. Penyediaan infrastruktur wilayah; dan
4. Pengendalian dampak aktivitas penggunaan lahan dan hutan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

4.2.2. Sasaran

Sasaran Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 tertuang dalam indikator kinerja yang mengacu pada indikator RPJMN 2014-2019 dan RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025. Sasaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Indikator Kinerja Utama Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2015	Target Capaian Tahun 2017	Keterangan
1.	Pendidikan			
1.1	Pendidikan dasar			
	SD/MI			
1.1.1	Perbandingan guru dan siswa SD/MI	1:21	1:20	
1.1.2	Angka Partisipasi Sekolah	98,79	98,89	
1.1.3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	162,09	190,95	
	SMP/MTs			
1.1.1	Perbandingan guru dan siswa SMP/MTs	1:19	1:14	
1.1.2	Angka Partisipasi Sekolah	86,60	93,55	
1.1.3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	123,00	322,52	
1.3	Fasilitas Pendidikan			
1.3.1	Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	33,05	93,66	
1.3.2	Persentase SMP/MTs yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	52,78	96,59	
1.4	Angka Putus Sekolah			
1.4.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,20	0,15	
1.4.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,40	0,39	
1.5	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV			
1.5.1	Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	97,08	98,05	
1.5.2	Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,56	96,75	
1.6	Angka Kelulusan			

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2015	Target Capaian Tahun 2017	Keterangan
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	
1.6.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,75	100	
1.6.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,66	100	
2.	Kesehatan			
2.1	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	1: 963		
2.2	Rasio dokter per satuan penduduk	1:2857		
2.3	Rasio tenaga para medis per satuan penduduk	1:326	1,43	
2.4	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80	80	
2.5	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	62	89,4	
2.6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	87	98	
2.7	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	
2.8	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	
2.9	Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit TBC/BTA	98,46	99,44	
2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	
2.11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	
2.12	Cakupan Kunjungan Bayi	92,6	96,5	
2.13	Angka Kematian Bayi /1000 Kelahiran Hidup	17	17	
2.14	Angka Kematian Ibu /100.000 Kelahiran Hidup	102	102	

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2015	Target Capaian Tahun 2017	Keterangan
2.15	AKABA per 1000 Balita	6	7	
3.	Pekerjaan Umum			
3.1	Proporsi Panjang jalan dalam kondisi baik	890,50	0,24	
3.2	Rasio Jaringan Irigasi	80	0,73	
3.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	97,79	96,78	
3.4	Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk	771,8	771,8	
3.5	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	7,5	6,2	
3.6	Rasio rumah layak huni	0,65	0,64	
3.7	Rasio permukiman layak huni (%)	0,99	0,99	
3.8	Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km)	2.650,00	2.600,00	
4.	Perumahan			
4.1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	70,55	77,00	
4.2	Rumah Tangga Bersanitasi	73,20	80,52	
4.3	Rumah Layak Huni	37,16	63,60	
5	Penataan Ruang			
5.1	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,12	0,12	
6.	Perencanaan Pembangunan			
6.1	Tersusunnya RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda (Dokumen)	1	1	
6.2	Tersusunnya RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA (Dokumen)	1	1	
6.3	Tersusunnya RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	2	2	
6.4	Kesesuaian Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	70	70	

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2015	Target Capaian Tahun 2017	Keterangan
6.5.	Kesesuaian RKPD dengan usulan musrenbang (%)	70	70	
6.6.	Kesesuaian muatan RPJMD dengan Visi Misi Program Bupati Terpilih (%)	70	70	
6.7	Tersusunnya evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan (Dokumen)	1	1	
6.8	Tersusunnya data dan informasi pembangunan daerah (paket)	2	2	
6.9	Tersusunnya data pendukung perencanaan pembangunan daerah (bidang sarana prasarana, bidang ekonomi dan bidang kesra) (dokumen)	5	5	
7.	Perhubungan			
7.1	Jumlah Bandara (Unit)	1	1	
7.2	Jumlah Dermaga Sungai (Unit)	4	4	
7.3	Jumlah Pelabuhan Laut (Unit)	3	4	
8	Lingkungan Hidup			
8.1	Persentase Penanganan sampah	60	65	
8.2	Jumlah Duta Lingkungan	2	2	
8.3	Jumlah Kader lingkungan	50	50	
8.4	Jumlah Sekolah Adhiwiyata (Sekolah)	4	4	
8.5	Pencemaran status mutu air	2	2	
8.6	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	600	600	
8.7	Penegakan Hukum Lingkungan	3	3	
9	Kependudukan dan Catatan Sipil			
9.1	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	61,26	70	

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2015	Target Capaian Tahun 2017	Keterangan
9.2	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	91,95	100	
9.3	Presentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Nasional	88	80	
9.4	Persentase jumlah penduduk dengan KK Nasional	76,60	86	
9.5	Persentase jumlah penduduk yang memiliki Elektronik KTP (e-KTP)	90	98	
10.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
10.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	29,85	32,83	
10.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	470	517	
10.3	Rasio KDRT	22,22	15,00	
10.4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	40	60	
11	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
11.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,8	2,5	
11.2	Rasio akseptor KB	86,65	90,98	
11.3	Cakupan peserta KB aktif (orang)	78,23	86,05	
11.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	17,14	15	
12	Sosial			
12.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan Panti Rehabilitasi (unit)	17	19	
12.2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang)	21,29	25	
12.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (kasus)	33,51	30	
13	Ketenagakerjaan			
13.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,05	79,00	
13.2	Tingkat pengangguran	2,66	2,10	

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2015	Target Capaian Tahun 2017	Keterangan
	terbuka (%)			
14	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
14.1	Persentase koperasi aktif (%)	81	89,10	
14.2	Jumlah BPR/LKM (unit)	26	24	
14.3	Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	62	64	
15	Penanaman Modal			
15.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (unit)	35	40	
15.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional			
15.2.1	- PMDN	714.448.540.000	3.500.000.000.000	
15.2.2	- PMA (US \$)	455.203.990	650.000.000	
15.3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	108.805.880.000	1.500.000.000.000	
16	Kebudayaan			
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	11	12	
16.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya****	2	3	
16.3	Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	33	36	
17	Kepemudaan dan Olahraga			
17.1	Jumlah organisasi pemuda	105	112	
17.2	Jumlah organisasi olah raga	77	84	
17.3	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	7	8	
17.4	Lapangan olahraga	150	165	
18	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2015	Target Capaian Tahun 2017	Keterangan
18.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	10	9	
18.2	Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kel	100	90	
18.3	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	Ada	Ada	
18.4	Penegakan PERDA	Ada	Ada	
18.5	Assesmen manajerial (orang)	120	120	
20	Pangan			
20.1	Regulasi kedaulatan Pangan (Perbup)	Ada	Ada	
20.2	Ketersediaan pangan utama/pokok (%)	30		
20.3	Diversifikasi pangan pangan (%)			
20.4	Desa mandiri pangan (desa)			
21	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
21.1	Jumlah desa yang diperbaharui profil desanya	77	94	
21.2	Jumlah Musyawarah pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	94	94	
21.3	Terlaksananya bulan bhakti gotong royong masyarakat	1	1	
21.4	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yg Terlatih	0	188	
21.5	Jumlah Desa/Kelurahan yg mendapat akses TTG	1	1	
21.6	Jumlah desa tertinggal			
22	Statistik			
22.1	Buku "Kotawaringin Barat Dalam Angka"	Ada	Ada	
22.2	Buku "PDRB Kotawaringin Barat"	Ada	Ada	
23	Kearsipan			
23.1	Pengelolaan arsip secara baku	Ada	Ada	

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2015	Target Capaian Tahun 2017	Keterangan
24	Komunikasi dan Informatika			
24.1	Jumlah surat kabar nasional/lokal	7	10	
24.2	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	6	6	
24.3	Website milik pemerintah daerah (buah)	16	37	
24.4	Pameran/expo	Ada	Ada	
25	Perpustakaan			
25.1	Jumlah Perpustakaan	111	122	
25.1.1	Anggota	1.391	1.997	
25.1.2	Pengunjung	62.585	68.843	
25.1.3	Peminjam	34.270	37.697	
25.1.4	Jumlah koleksi bahan pustaka(eksemplar)	1.528	3.999	
II	Pelayanan Urusan Pilihan			
1.	Pertanian dan Peternakan			
1.1.	<i>Luas tanam tanaman pangan</i>			
1.1.1.	Padi sawah (Ha)	5.412	8.453	
1.1.2.	Padi ladang (Ha)	1.454	3.881	
1.1.3	Jagung (Ha)	1.526	1.678	
1.2.	<i>Luas Panen Tanaman Pangan</i>			
1.2.1	Padi sawah (Ha)	4.000	8.030	
1.2.2	Padi ladang (Ha)	1.664	3.687	
1.2.3	Jagung (Ha)	608	1.399	
1.3	<i>Produktivitas tanaman pangan</i>			
1.3.1	Padi sawah (Ton/Ha)	3,73	3,79	
1.3.2	Padi ladang (Ton/Ha)	2,28	2,50	
1.3.3	Jagung (Ton/Hektar)	3.30	3.63	
1.4	<i>Produksi tanaman pangan</i>			
1.4.1	Padi sawah (Ton)	14.928	30.435	
1.4.2	Padi ladang (Ton)	3.797	7.816	
1.5	<i>Populasi Ternak</i>			
1.5.1	Sapi (ekor)	14.397	18.726	
1.5.2	Kerbau (ekor)	0	0	
1.5.3	Kambing /Domba(ekor)	2,764	3,040	
1.5.4	Babi (ekor)	5.718	6.178	
1.5.5	Ayam buras (ekor)	345,661	451,038	
1.5.6	Ayam ras petelur (ekor)	46.500	51.150	

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2015	Target Capaian Tahun 2017	Keterangan
1.5.7	Ayam ras pedaging (ekor)	158.253	224.984	
1.6	Produksi Daging Ternak			
1.6.1	Sapi (ekor)	572,24	694,99	
1.6.2	Kerbau (Ton)	0,00	0,00	
1.6.3	Kambing / Domba(Ton)	58,14	63,95	
1.6.4	Babi (Ton)	94,47	115,14	
1.6.5	Ayam buras (Ton)	340.50	433.95	
1.6.6	Ayam Ras Petelur (Ton)	0,00	0,00	
1.6.7	Ayam Ras Pedaging (Ton)	817.78	892,1	
1.6.8	Itik (Ton)	14.12	15.14	
1.7	Produksi Telur			
1.7.1	Ayam buras(Ton)	207,98	281.84	
1.7.2	Ayam Ras Petelur (Ton)	209,25	230,17	
1.7.3	Itik(Ton)	133.19	161.17	
1.8	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)	3,85	3,80	
1.9	Kontribusi Sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	4,78	4,68	
2	Perkebunan			
2.1	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	23,92	37	
2.2	ekspor per tahun dari komoditas perkebunan (US\$)	189.439,16	199.182,20	
2.3	Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun)	65.960	79.820	
2.4	Jumlah Industri pengolahan turunan CPO	1	1	
2.5	Sumbangan sektor perkebunan terhadap PAD (Milyar Rupiah)	12,7	13	
2.6	Kemitraan/Plasma	28.785,91	31.663	
2.7	Pengembangan/perluasan areal perkebunan			
2.7.1	Karet	18.082	18.284	
2.7.2	Kelapa sawit	192.699	204.909	
2.7.3	Kelapa	776,75	1.205	
2.7.4	Lada	297,74	1.042	
2.8	Produksi komoditi			

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2015	Target Capaian Tahun 2017	Keterangan
	perkebunan			
2.8.1	Karet (lump)	7.433	15.600	
2.8.2	Kelapa (kopra)	267	347	
2.8.3	Kelapa Sawit (Tbs)	1.096.178	4.550.000	
2.8.4	Lada (putih/hitam)	162	432	
3.	Kehutanan			
3.1	Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	155.25	170.57	
4.	Pariwisata			
4.1	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)	63.281	69.609	
4.2	Jumlah Destinasi wisata (obyek)	14	15	
4.3	Jumlah devisa (Rp)			
4.4	Jumlah even tahunan wisata daerah (kegiatan)			
5.	Perikanan			
5.1	Produksi perikanan (ton)	16.055,81	17.661,82	
5.2	Perikanan tangkap (ton)	12.050	13.000	
5.3	Perikanan Budi daya (ton)	4.005,41	4.550,00	
5.4	Konsumsi ikan perkapita (Kg)	41,35	45,48	
5.5	Peningkatan produksi benih ikan (juta ekor)	0,941	2,000	
5.6	Peningkatan produksi perikanan budidaya(ton)	174,32	589,00	
5.7	Penurunan <i>illegal fishing</i> (kasus)			
6.	Perdagangan			
6.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	18	17,5	
6.2	Ekspor bersih perdagangan (US \$)	400.000	390.000	
6.3	Pasar daerah (unit)			
6.4	Penanganan sengketa konsumen (kasus)	-		
6.5	Alat ukur yang ditera ulang (unit)	-		
7.	Perindustrian			
7.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	-		
7.2	Pertumbuhan industri kecil dan menengah (%)	7	10	

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja 2015	Target Capaian Tahun 2017	Keterangan
7.3	Pembinaan pengrajin (Kelompok)			

4.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017.

4.3.1 Tema dan Isu Strategis

1. Tema

Dengan memperhatikan tujuan pembangunan RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025, maka tema pembangunan daerah tahun 2017 adalah ***“Menciptakan Kondisi Aman Guna Mengoptimalkan Potensi Sumber Daya Menuju Kotawaringin Barat yang Maju”***. Selanjutnya, penjelasan dari tema tersebut dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) pokok utama yaitu :

- a. Menciptakan keamanan yang dilaksanakan melalui peningkatan peran pemerintah dan swasta serta partisipasi masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan mengedepankan kerangka hukum yang transparan dan responsif, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efisien, efektif dan akuntabel.
- b. Mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada (pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan), melalui penguatan tata kelola pemerintahan menjadi simpul distribusi perdagangan dan jasa pendukung lainnya seperti sektor industri, sektor pariwisata, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan jasa primer pendukung.

2. Isu Strategis

Mengacu pada evaluasi pembangunan tahun 2016 serta perkiraan pelaksanaan pembangunan tahun 2017, maka permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2017 dijabarkan dalam bentuk isu strategis daerah sebagaimana berikut :

- a. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur

Meskipun secara umum pembangunan infrastruktur sudah memadai, namun pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan pemerataan dan kualitas pembangunannya agar dapat dirasakan hasilnya oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke daerah pelosok. Kebijakan diarahkan pada pengembangan infrastruktur wilayah secara berkeadilan dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daya dukung pusat-pusat pertumbuhan seperti Kawasan Industri, Kawasan *Agropolitan* dan Kawasan *Minapolitan* perlu lebih ditingkatkan sehingga akan terlihat nyata manfaatnya.

b. Kualitas layanan dan aksesibilitas Layanan Dasar

Dalam bidang kesehatan, kebijakan diarahkan pada upaya peningkatan cakupan pelayanan kesehatan secara proporsional dan berkeadilan. Saat ini aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan belum berjalan secara optimal. Oleh karenanya pemerintah senantiasa berupaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, menjangkau seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin dengan meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas puskesmas dan mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat serta sanitasi yang layak. Dalam bidang pendidikan, kebijakan diarahkan pada peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan dalam rangka pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berupaya mewujudkan dan menjamin pemerataan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

c. Penanggulangan Kemiskinan dan masalah sosial lainnya

Untuk tahun ini, kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penguatan sinergi program-program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, pemerintah mencoba untuk memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk anak-anak terlantar, fakir miskin, lansia, penyandang cacat, dan masyarakat miskin. Kebijakan pengembangan manajemen penanggulangan bencana diharapkan akan lebih efektif dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk penanganan bencana. Sementara itu, dalam hal perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.

d. Pengembangan agribisnis dan kedaulatan pangan

Dalam bidang ini, kebijakan diarahkan pada peningkatan sinergitas agribisnis dan ketahanan pangan lintas sektor. Langkah yang diambil yaitu meningkatkan pemberdayaan petani dan kelembagaan pendukungnya, meningkatkan produktivitas, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, meningkatkan pengembangan agroindustri dan agrobisnis untuk memberdayakan perekonomian rakyat, serta meningkatkan pengamanan kedaulatan pangan.

e. Peningkatan daya beli masyarakat.

Pada periode ini, Kabupaten Kotawaringin Barat ingin mencapai kemandirian dengan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, maupun daerah lain. Oleh karenanya pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mencapai kemandirian itu. Kebijakan diarahkan dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

f. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stakeholder, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat menuju pada keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Kemajuan suatu daerah ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai kemajuan itu, kebijakan diarahkan pada upaya pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai pemerataan hasil pembangunan.

g. Penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup

Dalam hal ini, permasalahan yang dihadapi adalah pada pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung capaian ketahanan pangan, pengendalian bencana dan kawasan lindung. Pada akhirnya diharapkan akan terwujud keserasian pemanfaatan ruang dan pendayagunaan tanah yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup.

h. Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik

Kinerja aparatur dalam melayani masyarakat selalu menjadi sorotan dimasa sekarang ini. Untuk itu kebijakan diarahkan pada upaya mewujudkan kualitas dan kapasitas aparatur yang profesional dan peningkatan pelayanan publik. Upaya yang dilakukan antara lain dengan mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima. Kearifan lokal berbasis sumber daya lokal yang dikembangkan dengan optimal akan menjadi modal dalam membangun Kotawaringin Barat. Sumber daya lokal dimaksud antara lain adalah potensi usaha pertanian dan perkebunan, potensi sumber daya alam serta potensi sistem sosial budaya masyarakat.

4.3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan daerah dirumuskan dalam prioritas pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah tersebut terdiri dari kebijakan dan program pembangunan.

Dalam Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka terdapat beberapa prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017 menyangkut aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek pemerintahan, aspek fisik dan prasarana wilayah.

Berdasarkan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016, berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2017, sehingga prioritas dan sasaran

pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 ditetapkan sebagai berikut:

- Prioritas 1 : Program Peningkatan Pengelolaan Pendidikan**
- Prioritas 2 : Program Peningkatan Pengelolaan Kesehatan**
- Prioritas 3 : Program Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial**
- Prioritas 4 : Program Pemerataan Struktur Ekonomi dan Peningkatan PAD**
- Prioritas 5 : Program Peningkatan Infrastruktur Penunjang Aktifitas Ekonomi dan Investasi**
- Prioritas 6 : Program Optimalisasi Potensi Sumber Daya Unggulan, Pemanfaatan Iptek dan Pengembangan Industri Hulu serta Hilir**
- Prioritas 7 : Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Pelayanan Publik**
- Prioritas 8 : Program Minimalisasi Dampak Negatif Aktivitas Pertambangan dan Kehutanan Terhadap Lingkungan Hidup.**
- Prioritas 9 : Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.**

Kesembilan program prioritas daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut operasionalnya dalam program sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 serta peraturan perubahannya sebagai mana tabel terlampir.

Tabel. 4.1.
Prioritas Pembangunan Daerah

N o.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1.	Program Peningkatan Pengelolaan Pendidikan	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Non Formal 5. Program Pendidikan Luar Biasa 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
2.	Program Peningkatan Pengelolaan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan 4. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 10. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 11. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 12. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 13. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 14. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 15. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 16. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
		<ul style="list-style-type: none"> 17. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 18. Program promosi kesehatan ibu , bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 20. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 21. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 22. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 23. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 24. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
3.	Program Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 2. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 6. Program pembinaan anak terlantar 7. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 9. Program Peningkatan

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
		<p>Kesejahteraan Petani</p> <p>10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</p> <p>11. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</p> <p>12. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</p> <p>13. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</p> <p>14. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.</p> <p>15. Program Tanggap Darurat</p> <p>16. Program Tanggap Darurat Pasca Bencana</p> <p>17. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>18. Program Peningkatan Kesempatan Kerja</p> <p>19. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</p> <p>25. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</p> <p>26. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</p> <p>27. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</p> <p>28. Program Keluarga Berencana</p> <p>29. Program Kesehatan Reproduksi Remaja</p> <p>30. Program pelayanan kontrasepsi</p> <p>31. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan</p>

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
		KB/KR yang mandiri
4.	Program Pemerataan Struktur Ekonomi dan Peningkatan PAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 4. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 6. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi industri 7. Program Penataan Struktur Industri 8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.	Program Peningkatan Infrastruktur Penunjang Aktifitas Ekonomi dan Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan 5. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Air lainnya serta air baku 8. Program Pengendalian Banjir 9. Program penyediaan dan pengolahan air baku 10. Program pengembangan,

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
		<p>pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 12. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 13. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 14. Program Pengembangan Perumahan 15. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 16. Program pengelolaan areal pemakaman 17. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 18. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 19. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 20. Program peningkatan pelayanan angkutan 21. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 22. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 23. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 24. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 25. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi. 26. Program kerjasama informasi dan media massa.

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
		27. Program pengembangan Data/ Informasi.
6.	Program optimalisasi potensi sumber daya unggulan, pemanfaatan Iptek dan pengembangan industri hulu hilir	1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan. 3. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 4. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 5. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 6. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 8. Program peningkatan produksi hasil peternakan 9. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 10. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 11. Program pengembangan budidaya perikanan 12. Program pengembangan perikanan tangkap 13. Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 14. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan. 15. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 16. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 17. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 18. Program peningkatan pelayanan

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
		kehidupan beragama 19. Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan 20. Program pendidikan politik masyarakat
7.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan pelayanan publik	1. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 2. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 3. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 4. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 6. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 7. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 8. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 9. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 10. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 11. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 12. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan; 13. Program Pelayanan Administrasi

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
		<p>Perkantoran.</p> <p>14. Program Pengembangan data/informasi</p> <p>15. Program Kerjasama Pembangunan</p> <p>16. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</p> <p>17. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh</p> <p>18. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar</p> <p>19. Program perencanaan pembangunan daerah</p> <p>20. Program perencanaan pembangunan ekonomi</p> <p>21. Program perencanaan sosial budaya</p> <p>22. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</p> <p>23. Program perencanaan pembangunan sosial budaya</p> <p>24. Program administrasi kependudukan</p> <p>25. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan</p> <p>26. Program Penyelamatan dan pelestarian Dokumen / Arsip Daerah</p> <p>27. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi</p> <p>28. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</p> <p>29. Program peningkatan peran serta kepemudaan</p> <p>30. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba</p> <p>31. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</p>

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
		<p>32. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</p> <p>33. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</p> <p>34. Program Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Daerah;</p> <p>35. Program Pengelolaan Aset Daerah;</p> <p>36. Program Peningkatan system internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah</p> <p>37. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</p> <p>38. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</p> <p>39. Program penataan peraturan perundang-undangan</p> <p>40. Program pembinaan dan pelayanan hukum</p> <p>41. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</p> <p>42. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</p> <p>43. Program pengembangan wawasan kebangsaan</p> <p>44. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</p> <p>45. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</p> <p>46. Program pendidikan politik masyarakat</p> <p>47. Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi</p>

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
8.	Program Optimalisasi Potensi Sumber Daya Unggulan, Pemanfaatan Iptek dan Pengembangan Industri Hulu serta Hilir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 5. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 6. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 7. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 8. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 9. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 10. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 11. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 13. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 14. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan 15. Program Pengembangan budidaya perikanan 16. Program Pengembangan perikanan tangkap 17. Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan 18. Program Optimalisasi pengelolaan

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
		<p>dan pemasaran produksi perikanan.</p> <p>19. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</p> <p>20. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>21. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</p> <p>22. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</p> <p>23. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</p> <p>24. Program Penataan Struktur Industri</p> <p>25. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</p> <p>26. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.</p>
8.	<p>Program Minimalisasi dampak negatif aktivitas pertambangan dan kehutanan terhadap Lingkungan Hidup</p>	<p>1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</p> <p>2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.</p> <p>3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam;</p> <p>4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>5. Program Peningkatan pengendalian polusi</p> <p>6. Program Pengendalian kebakaran hutan</p> <p>7. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</p> <p>8. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</p> <p>9. Program rehabilitasi hutan dan lahan</p> <p>10. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan</p> <p>11. Program pembinaan dan</p>

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
		<p>pengawasan bidang pertambangan.</p> <p>12. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan</p> <p>13. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.</p>
9.	<p>Program peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.</p>	<p>1. Program Pengembangan kemitraan</p> <p>2. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</p> <p>3. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</p> <p>4. Program pengembangan wawasan kebangsaan</p> <p>5. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</p> <p>6. Program pendidikan politik masyarakat</p> <p>7. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</p> <p>8. Program Perencanaan Tata Ruang</p> <p>9. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</p> <p>10. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</p>

4.3.3. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi dan Kabupaten Tahun 2017

Pembangunan dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hasil kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi

dan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi antara prioritas

pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Sinkronisasi prioritas pembangunan ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.2. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten

No	Program Prioritas Kabupaten	No	Program Prioritas Provinsi	No	Program Prioritas Nasional (Nawacita)
1	Peningkatan pengelolaan pendidikan	9	Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	5	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
2	Peningkatan pengelolaan kesehatan	9	Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	5	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
3	Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial	4	Stabilitas ekonomi daerah	4	Melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
		5	Peningkatan pendapatan masyarakat		
4	Pemerataan struktur ekonomi dan peningkatan PAD	7	Reformasi birokrasi	7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
		8	Optimalisasi kinerja aparatur	8	Melakukan revolusi karakter bangsa
		12	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD	9	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
5	Peningkatan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi dan investasi	7	Reformasi birokrasi	7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
		8	Optimalisasi kinerja aparatur	8	Melakukan revolusi karakter bangsa
		12	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD	9	Memperteguh

					kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
6	Optimalisasi potensi sumber daya unggulan, pemanfaatan Iptek dan pengemb. industri hulu hilir	3 10	Peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir dan pantai Pengelolaan dan peningkatan pariwisata	3	Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan
7	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan pelayanan publik	6 12	Peningkatan kualitas pengawasan dan administrasi pengelolaan keuangan daerah Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD	2	Membangun tata kelola Pemerintah yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
8	Minimalisasi dampak negatif aktivitas pertambangan dan kehutanan terhadap LH	11	Pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana yang berkelanjutan	6	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
9	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.	1 2	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah Pemerataan aksesibilitas wilayah	1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017. Berdasarkan prioritas pembangunan yang dijabarkan pada 33 Urusan yang terdiri atas :

a). **24 (dua puluh empat) Urusan Wajib**, yaitu :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial
7. Tenaga kerja
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Pangan
10. Pertanahan
11. Lingkungan Hidup
12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Ddesa
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15. Perhubungan
16. Komunikasi dan Informatika
17. Koperasi Usaha Kecil Menengah
18. Penanaman Modal Daerah
19. Kepemudaan dan Olah Raga
20. Statistik
21. Persandian
22. Kebudayaan
23. Perpustakaan
24. Kearsipan

b). **9 (sembilan) Urusan Pilihan**, yaitu :

- 1) Kelautan dan Perikanan;
- 2) Pariwisata;
- 3) Pertanian;
- 4) Kehutanan
- 5) Energi dan Sumberdaya Mineral;

- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian
- 8) Transmigrasian.
- 9) Pendapatan Daerah

Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017. Rincian, Program dan Rincian Rencana Kerja setiap PD tahun anggaran 2017, terlampir.

Tabel. 5.1.
Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Langsung PD Tahun 2017

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU BELANJA LANGSUNG (Rp)	KET
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga	41.797.821.000	
2	Dinas Kesehatan	42.003.213.460	
3	RSUD Sultan Imanudin	110.127.000.000	
4	Dinas Pekerjaan Umum	129.817.890.000	
5	Bappeda	5.957.549.321	
6	Dinas Perhub dan Kominfo	9.755.143.800	
7	Badan Lingkungan Hidup	2.915.839.000	
8	Dinas Kependudukan dan Capil	2.206.424.000	
9	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	3.657.157.000	
10	Dinas Sosial	2.672.063.000	
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.461.395.575	
12	Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar	24.348.601.000	
13	Badan Kesbangpolinmas	4.277.158.000	
14	Satpol PP	2.834.115.000	
15	Sekretariat Daerah	28.264.230.000	
16	Sekretariat DPRD	8.315.440.000	
17	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	8.266.027.000	
18	Badan Kepegawaian	7.036.255.400	
19	Inspektorat Kabupaten	3.250.000.000	
20	Kantor Pelayanan Terpadu Perijinan	2.245.447.900	
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.962.400.000	
22	Kec. Arut Selatan	4.237.442.000	
23	Kec. Arut Utara	1.370.000.000	
24	Kec. Kumai	1.347.749.000	
25	Kec. Kotawaringin Lama	1.543.274.000	
26	Kec. Pangkalan Lada	1.327.105.000	
27	Kec. Pangkalan Banteng	1.000.000.000	
28	Kantor Peny. Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.365.174.000	
29	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.367.352.000	
30	Kantor Perpustakaan dan	2.010.988.050	

	Arsip Daerah		
31	Dinas Pertanian dan Peternakan	13.584.640.000	
32	Dinas Perkebunan	7.147.549.250	
33	Dinas Kehutanan	4.108.385.000	
34	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.134.300.000	
35	Dinas Kelautan & Perikanan	11.390.256.000	
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.057.299.750	
	JUMLAH	515.162.684.506,00	

BAB VI

PENUTUP

RKPD ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Subtansi RKPD ini merupakan hasil sinkronisasi antar pelaku kepentingan dan stakeholder, baik ditingkat Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi dan Nasional dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang faktual dihadapi.

Kedisiplinan dan komitmen sangat menentukan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan hasil perencanaan tahunan ini, dengan demikian diperintahkan kepada seluruh perangkat daerah agar :

1. Komitemen seluruh SKPD untuk memanfaatkan Sisrenbangda yang terintegrasi dengan sistem keuangan daerah, guna menunjang akuntabilitas perencanaan daerah.
2. Melaksanakan program terpadu antar sektor dan pelaksanaan kegiatan secara disiplin untuk menghasilkan sasaran yang direncanakan.
3. Mendokumentasikan dan mengkaji hasil pelaksanaannya ditingkat SKPD untuk kemudian melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan secara lengkap sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja serta kemanfaatannya bagi masyarakat.
4. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait sehingga program dan kegiatan konsisten secara vertikal dan horizontal.

BUPATI KOT AWARINGIN BARAT,

BAMBANG PURWANTO